



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN

JEMBER

TAHUN ANGGARAN

2024

AUDITED

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan kepada Tim Penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember Tahun 2024, LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu:

1. Laporan Realisasi APBD;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Mekanisme penyusunan laporan menggunakan metode konsolidasi laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 11 yang meliputi seluruh Laporan Keuangan SKPD, termasuk Laporan Keuangan Unit Kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), LKPD Tahun 2024 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPD Tahun 2024 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan sesudah diperiksa (Audited).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk konkrit proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan dan untuk selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pokok dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024. Prinsip penyajian secara penuh (*Full Disclosure*) merupakan suatu kekuatan bagi laporan keuangan agar tidak hanya disusun dan disajikan untuk sekedar memenuhi kewajiban semata, namun harus menyajikan informasi yang komplit dan dapat dipahami serta

memadai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan kepada semua entitas akuntansi dan pelaporan yang telah menyusun Laporan Keuangan SKPD, dan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini, baik dalam bentuk data, informasi maupun saran perbaikan, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pengguna.

Tim Penyusun
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Kabupaten Jember



BUPATI JEMBER

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Jember, Mei 2025

BUPATI JEMBER

MUHAMMAD FAWAIT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	14
DAFTAR TABEL.....	15
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	23
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	25
3. NERACA	26
4. LAPORAN OPERASIONAL	28
5. LAPORAN ARUS KAS	30
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	33
BAB I	
.....	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	13
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	15
BAB II	
.....	17
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
APBD.....	17
2.1 Ekonomi Makro.....	17
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).....	18
2.1.2 Tingkat Inflasi	20
2.1.3 Tingkat kemiskinan.....	21

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	22
2.1.5 Gini rasio	24
2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	26
2.2 Kebijakan Keuangan	28
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	29
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	31
2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	32
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	35
2.3.1 Pendapatan	36
2.3.2 Belanja.....	38
2.3.3 Urusan Wajib	40
2.3.4 Pembiayaan	45
BAB III	46
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	46
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	46
3.1.1 Target Kinerja Pendapatan dan Perubahannya.....	46
3.1.2 Target Kinerja Belanja dan Perubahannya.....	48
3.1.3 Target Kinerja Pembiayaan dan Perubahannya.....	49
3.1.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	50
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	61
BAB IV	62
KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	62
4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah.....	62
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	64
4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA	65
4.2.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO	66
4.2.3 Kebijakan Akuntansi Belanja.....	66
4.2.4 Kebijakan Akuntansi Beban.....	67

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan.....	67
4.2.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas	68
4.2.7 Kebijakan Akuntansi Investasi.....	69
4.2.8 Kebijakan Akuntansi Piutang.....	71
4.2.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	74
4.2.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.....	75
4.2.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	81
4.2.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan.....	82
4.2.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya.....	82
4.2.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	85
4.2.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas	87
4.2.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.....	87
4.2.17 Kebijakan Akuntansi terkait Penerimaan dan Penggunaan Dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).....	89
BAB V	
.....	91
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	91
5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	91
5.1.1 PENDAPATAN	91
5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER	118
5.1.3 Surplus/Defisit LRA.....	144
5.1.4 Pembiayaan Netto	145
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA).....	146
5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	148
5.2.1 Lebih SAL Awal	148
5.2.2 Penggunaan SAL Sebagaimana Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	148
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA.....	148
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	149

5.2.5 Lain-lain	149
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir	149
5.3 NERACA.....	150
5.3.1 ASET.....	150
5.3.2 KEWAJIBAN	315
5.3.3 Ekuitas.....	357
5.4 LAPORAN OPERASIONAL.....	357
5.4.1 Kegiatan Operasional	358
5.4.2 Kegiatan Non Operasional	391
5.4.3 Pos Luar Biasa.....	391
5.5 LAPORAN ARUS KAS.....	392
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi.....	392
5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	402
5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan.....	406
5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris.....	408
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	411
5.5.6 Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya-BOK	411
5.5.7 Saldo Akhir Kas di Kasda , Kas di Bendahara Penerimaan , Kas di Bendahara Pengeluaran , Kas di BLUD , Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK, Setelah Reklasifikasi	413
5.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya (Termasuk Nilai Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran).....	414
5.5.9 Saldo Akhir Kas	414
5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	414
5.6.1 Ekuitas Awal	415
5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO).....	415
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	415
BAB VI.....	427

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	427
6.1 Domisili Dan Operasional Entitas	427
6.1.1 Domisili.....	427
6.1.2 Operasional Entitas	428
6.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja.....	434
6.3 Penerimaan Dana Dak Fisik, Non Fisik Dan Bkk	434
6.4 Penyelesaian Kerugian Daerah	438
BAB VII.....	443
PENUTUP	443
LAMPIRAN.....	446

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AMP	<i>Asphalt Mixing Plant</i>
ASKES	Asuransi Kesehatan
ATK	Alat Tulis Kantor
AT	Aset Tetap
B	
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPKA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
BUD	Bendahara Umum Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BOT	Built Operate and Transfer
BTL	Belanja Tidak Langsung
BL	BelanjaLangsung
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BPKP-RI	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia
BPK-RI	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
BAPPEKAB	Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Bakesbang Linmas	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPPKB	Badan Pembina Potensi Keluarga Besar

C

CPNSD Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

D

DBH Dana Bagi Hasil
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DCD Dana Cadangan Daerah
DAK Dana Alokasi Khusus
Disperindag Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinkes Dinas Kesehatan
DJKN Direktorat Jendral Kekayaan Negara
Dishub Dinas Perhubungan
DPU Dinas Pekerjaan Umum
Dispenda Dinas Pendapatan Daerah

E

ESDM Energi dan Sumber Daya Mineral

G

Gerindra Gerakan Indonesia Raya
Golkar Golongan Karya

H

Hanura Hati Nurani Rakyat
HGU Hak Guna Usaha

I

IPM Indeks Pembangunan Manusia
Inpres Instruksi Presiden
IBRD *International Bank for Reconstruction and Development*
IWP Iuran Wajib Pegawai

J

JKN Jaminan Kesehatan Nasional

<i>JSG</i>	<i>Jember Sport Garden</i>
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah

K

Kasda	Kas Daerah
KIB	Kartu Inventaris Barang
KSO	Kerja Sama Operasi
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

L

LKPJT	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan
LKMM	Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat
Lapter	Lapangan Terbang
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LPJU	Lampu Penerangan Jalan Umum
LKD	Laporan Keuangan Daerah
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

M

MCK	Mandi Cuci Kakus
<i>MoU</i>	<i>Memorandum of Understanding</i>
MTS	Madrasah Tsanawiyah

N

NASDEM	Nasional Demokrat
NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah

O

OPDN	Orang Pribadi Dalam Negeri

P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAN	Partai Amanat Nasional

PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PKNU	Partai Kebangkitan Nasional Ulama
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPh	Pajak Penghasilan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PKM	Puskesmas
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PT. KAI	PT Kereta Api Indonesia
PBF	Pedagang Besar Farmasi
PU	Pekerjaan Umum
PDP	Perusahaan Daerah Perkebunan
PTPN XI	PT Perkebunan Nusantara
PPN	Pajak Pertambahan Nilai

R

RSD	Rumah Sakit Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
R4	Roda Empat
S	
SiLPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	Standar Pelayanan Minimal
SNP	Standar Nasional Pendidikan
STS	Surat Tanda Setoran
SIMAS	Sistem Informasi Manajemen Aset

T

TA	Tahun Anggaran

U

UPT	Unit Pelaksana Teknis
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	Undang – Undang
UP	Uang Persediaan
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah

W

WKDH	Wakil Kepala Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipsahkan.....	446
Lampiran 2 Hasil Sewa BMD	447
Lampiran 3 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	453
Lampiran 4 Pendapatan dari Pengembalian.....	461
Lampiran 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	482
Lampiran 6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	485
Lampiran 7 Belanja Modal Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	486
Lampiran 8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	487
Lampiran 9 Belanja Modal Aset Lainnya	488
Lampiran 10 Daftar Nilai Utang Telepon, Listrik, Internet, Air Dan Surat Kabar Tahun 2024	489
Lampiran 11 Utang Belanja	493
Lampiran 12 Lampiran BUMD	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember	22
Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember Menurut Dimensi Penyusunnya	24
Tabel 2. 3 Perkembangan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur	25
Tabel 2. 4 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2021-Agustus 2024	27
Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2024	36
Tabel 2. 6 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024	38
Tabel 2. 7 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023-2024	40
Tabel 2. 8 Belanja Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Tahun 2023-2024	41
Tabel 2. 9 Belanja Urusan Pilihan Tahun 2023-2024	42
Tabel 2. 10 Belanja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024	43
Tabel 2. 11 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024	43
Tabel 2. 12 Belanja Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024	44
Tabel 2. 13 Belanja Urusan Kewilayahan Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024	44
Tabel 2. 14 Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023-2024	44
Tabel 2. 15 Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2024	45
Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2024	47
Tabel 3. 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2024	49
Tabel 3. 3 Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan TA. 2024	50
Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	50
Tabel 3. 5 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s.d. 2024	51
Tabel 3. 6 Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun 2024	52
Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024	52
Tabel 3. 8 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun Anggaran 2024	53
Tabel 3. 9 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	55
Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024	55
Tabel 3. 11 Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	56
Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024	57
Tabel 3. 13 Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024	57
Tabel 3. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun Anggaran 2024	57
Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024	60
Tabel 4. 1 Daftar Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember	62
Tabel 4. 2 Penggolongan Kualitas Piutang	72
Tabel 4. 3 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap	77

Tabel 4. 4 Klasifikasi Aset Lainnya.....	83
Tabel 5. 1 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.....	96
Tabel 5. 2 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024.....	98
Tabel 5. 3 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024	99
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 ...	102
Tabel 5. 5 Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2024	105
Tabel 5. 6 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu 2024....	107
Tabel 5. 7 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	108
Tabel 5. 8 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024.....	109
Tabel 5. 9 Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Jenis Rekening Pendapatan Transfer Tahun 2024.....	111
Tabel 5. 10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024.....	111
Tabel 5. 11 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH).....	112
Tabel 5. 12 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	113
Tabel 5. 13 Rincian Anggaran Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	113
Tabel 5. 14 Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik.....	114
Tabel 5. 15 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024.....	116
Tabel 5. 16 Rincian Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	116
Tabel 5. 17 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	116
Tabel 5. 18 Rincian Anggaran Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2024 ...	118
Tabel 5. 19 Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2024	119
Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	120
Tabel 5. 21 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa.....	122
Tabel 5. 22 Anggaran Dan Realisasi Belanja Persediaan	122
Tabel 5. 23 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan.....	124
Tabel 5. 24 Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa.....	125
Tabel 5. 25 Anggaran Dan Realisasi Belanja Pemeliharaan.....	130
Tabel 5. 26 Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas	133
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024	134
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun 2024	135
Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024.....	135
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136

Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139
Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	139
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	140
Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya.....	140
Tabel 5. 35 Anggaran Dan Realisasi Transfer Tahun 2024	142
Tabel 5. 36 Anggaran Dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024	142
Tabel 5. 37 Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024.....	142
Tabel 5. 38 Surplus/Defisit LRA Tahun 2024	145
Tabel 5. 39 Pembiayaan Netto Tahun 2024.....	145
Tabel 5. 40 Penerimaan Pembiayaan	146
Tabel 5. 41 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)	146
Tabel 5. 42 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2024.....	147
Tabel 5. 43 Rekening Koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024	151
Tabel 5. 44 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024.....	152
Tabel 5. 45 Rincian di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	152
Tabel 5. 46 Penyetoran Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024	153
Tabel 5. 47 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah	153
Tabel 5. 48 Rincian Kas BLUD pada BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024.....	155
Tabel 5. 49 Kas Dana Bos per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	156
Tabel 5. 50 Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	157
Tabel 5. 51 Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024	157
Tabel 5. 52 Kas Dana BOSP – Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024	157
Tabel 5. 53 Mutasi Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024.....	158
Tabel 5. 54 Rincian Kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2024.....	158
Tabel 5. 55 Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2024	160
Tabel 5. 56 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024	161
Tabel 5. 57 Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024.....	161
Tabel 5. 58 Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024.....	162
Tabel 5. 59 Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024.....	163
Tabel 5. 60 Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024.....	164
Tabel 5. 61 Rincian Piutang Pajak PPJ Non PLN per 31 Desember 2024	165
Tabel 5. 62 Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024	166
Tabel 5. 63 Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024.....	167
Tabel 5. 64 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024.....	167

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2024	168
Tabel 5. 66 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024.....	169
Tabel 5. 67 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum – Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024	175
Tabel 5. 68 Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum – Pengendalian Menara	175
Tabel 5. 69 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024.....	176
Tabel 5. 70 Rincian Piutang Retribusi - Kios per 31 Desember 2024	176
Tabel 5. 71 Rincian Piutang Retribusi Los per 31 Desember 2024	177
Tabel 5. 72 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2024	177
Tabel 5. 73 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah per 31 Desember 2024	178
Tabel 5. 74 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakian Alat per 31 Desember 2024.....	179
Tabel 5. 75 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir/Pertokoan	179
Tabel 5. 76 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.....	180
Tabel 5. 77 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024.....	180
Tabel 5. 78 Rincian Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024	181
Tabel 5. 79 Rincian Piutang Atas Denda PBB per 31 Desember 2024	182
Tabel 5. 80 Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2024.....	184
Tabel 5. 81 Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	185
Tabel 5. 82 Rincian Penyisihan Piutang Pajak <i>Self Assessment</i> per 31 Desember 2024.....	186
Tabel 5. 83 Rincian Penyisihan Piutang Pajak <i>Official Assessment</i> per 31 Desember 2024.....	187
Tabel 5. 84 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024.....	188
Tabel 5. 85 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024.....	192
Tabel 5. 87 Temuan BPK RI per 31 Desember 2024	192
Tabel 5. 88 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	194
Tabel 5. 89 Mutasi Jenis Persediaan	194
Tabel 5. 90 Belanja Persediaan APBD	197
Tabel 5. 91 Belanja Persediaan BLUD	198
Tabel 5. 92 Penerimaan Persediaan dari Hibah	199
Tabel 5. 93 Penerimaan dari BOS.....	199
Tabel 5. 94 Penerimaan dari BOK	200
Tabel 5. 95 Hutang Persediaan Tahun 2024	200

Tabel 5. 96 Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD	206
Tabel 5. 97 Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD	207
Tabel 5. 98 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hibah.....	207
Tabel 5. 99 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOS dan BOP PAUD	209
Tabel 5. 100 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOK	210
Tabel 5. 101 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber dari Koreksi Belanja Modal	210
Tabel 5. 102 Pemakaian Persediaan Dari mutasi antar OPD	210
Tabel 5. 103 Pengurangan Persediaan DI Karenakan mengeluarkan Hibah.....	212
Tabel 5. 104 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hutang.....	212
Tabel 5. 105 Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak.....	215
Tabel 5. 106 Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan	217
Tabel 5. 107 Rincian Persediaan Rusak/Usang/Kadaluarsa tahun 2024.....	218
Tabel 5. 108 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024	220
Tabel 5. 109 Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2024.....	220
Tabel 5. 110 Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2024	221
Tabel 5. 111 Penyertaan Modal Pemerintah Pada PDP Kahyangan per 31 Desember 2024.....	222
Tabel 5. 112 Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM per 31 Desember 2024	224
Tabel 5. 113 Mutasi Aset Tetap–Tanah	227
Tabel 5. 114 Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ketiga).....	228
Tabel 5. 115 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Tetap-Tanah	228
Tabel 5. 116 Aset Tetap-Tanah Yang Bersertifikat	230
Tabel 5. 117 Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai	232
Tabel 5. 118 Aset Tetap-Tanah Yang Belum Bersertifikat.....	232
Tabel 5. 119 Aset Tetap Tanah dengan Optimalisasi PAD	235
Tabel 5. 120 Daftar Tanah Belum Tercatat.....	237
Tabel 5. 121 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	240
Tabel 5. 122 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Tahun 2024	241
Tabel 5. 123 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Sebelum Tahun 2024	241
Tabel 5. 124 Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin.....	244
Tabel 5. 125 Penghapusan Barang Peralatan dan Mesin RSD Balung	245
Tabel 5. 126 Koreksi Tahun Berjalan - Peralatan dan Mesin ke Persediaan	245
Tabel 5. 127 Koreksi Tahun Berjalan - Peralatan dan Mesin ke Jasa Pemeliharaan	245
Tabel 5. 128 Reklasifikasi atas Belanja Modal Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2024	246
Tabel 5. 129 Ekstrakomtable Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024	255

Tabel 5. 130 Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	259
Tabel 5. 131 Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	259
Tabel 5. 132 Penambahan Koreksi - Gedung dan Bangunan Tahun 2024	260
Tabel 5. 133 Penambahan Koreksi – Gedung Dan Bangunan Sebelum Tahun 2024	262
Tabel 5. 134 Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2024.....	262
Tabel 5. 135 Mutasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan	265
Tabel 5. 136 Belanja Modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	265
Tabel 5. 137 Penambahan Koreksi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	266
Tabel 5. 138 Reklasifikasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan	267
Tabel 5. 139 Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024.....	268
Tabel 5. 140 Rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya	268
Tabel 5. 141 Belanja Modal Aset Tetap-Aset tetap lainnya	269
Tabel 5. 142 Koreksi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya.....	270
Tabel 5. 143 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	271
Tabel 5. 144 Kontruksi Dalam Pengerjaan	272
Tabel 5. 145 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun KDP Sebelum Tahun 2024.....	272
Tabel 5. 146 Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	273
Tabel 5. 147 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	277
Tabel 5. 148 Hibah Masuk KIB Peralatan dan Mesin	280
Tabel 5. 149 Koreksi Kurang Catat KIB Peralatan dan Mesin	280
Tabel 5. 150 Rincian Aset Lainnya.....	287
Tabel 5. 151 Penambahan Belanja Modal Aset Lainnya	288
Tabel 5. 152 Penambahan Koreksi Tahun 2024 Aset Lainnya	288
Tabel 5. 153 Reklasifikasi Antar Akun Aset Lainnya	288
Tabel 5. 154 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Lainnya.....	293
Tabel 5. 155 Rincian Aset Tak Berwujud.....	297
Tabel 5. 156 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	299
Tabel 5. 157 Rincian Aset Lainnya-Aset Lain-lain	300
Tabel 5. 158 Reklasifikasi Barang Aset Rusak Berat/Usang	301
Tabel 5. 159 Reklasifikasi Barang Aset Lain-Lain Lainnya.....	302
Tabel 5. 160 Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024.....	310
Tabel 5. 161 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	312
Tabel 5. 162 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024.....	315
Tabel 5. 163 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024	315

Tabel 5. 164 Pendapatan Diterima Dimuka selama tahun 2024	318
Tabel 5. 165 pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024	319
Tabel 5. 166 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024.....	320
Tabel 5. 167 Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024	320
Tabel 5. 168 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024.....	327
Tabel 5. 169 Rincian Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2024	328
Tabel 5. 170 Rincian Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024	342
Tabel 5. 171 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	354
Tabel 5. 172 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	354
Tabel 5. 173 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024	355
Tabel 5. 174 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024.....	356
Tabel 5. 175 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024	356
Tabel 5. 176 Rincian Pendapatan-LO	359
Tabel 5. 177 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	359
Tabel 5. 178 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO.....	360
Tabel 5. 179 Rincian Pendapatan Pajak Hotel-LO	361
Tabel 5. 180 Rincian Pendapatan Pajak Restoran-LO	361
Tabel 5. 181 Rincian Pendapatan Pajak Hiburan-LO	361
Tabel 5. 182 Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO	362
Tabel 5. 183 Rincian Retribusi-LO.....	363
Tabel 5. 184 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO	363
Tabel 5. 185 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO	364
Tabel 5. 186 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO	364
Tabel 5. 187 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	365
Tabel 5. 188 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO.....	365
Tabel 5. 189 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	366
Tabel 5. 190 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	367
Tabel 5. 191 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	367
Tabel 5. 192 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	369
Tabel 5. 193 Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO	370
Tabel 5. 194 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	370
Tabel 5. 195 Rincian Beban Pegawai	372
Tabel 5. 196 Realisasi Beban Persediaan.....	376

Tabel 5. 197 Realisasi Beban Jasa	379
Tabel 5. 198 Realisasi Beban Pemeliharaan	383
Tabel 5. 199 Realisasi Beban Perjalanan Dinas.....	383
Tabel 5. 200 Realisasi Beban Hibah	384
Tabel 5. 201 Realisasi Beban Bantuan Sosial.....	385
Tabel 5. 202 Realisasi Beban Penyisihan Piutang	385
Tabel 5. 203 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi	388
Tabel 5. 204 Realisasi Beban Transfer	390
Tabel 5. 205 Realisasi Beban Bagi Hasil.....	390
Tabel 5. 206 Realisasi Beban Bantuan Keuangan	390
Tabel 5. 207 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO	391
Tabel 5. 210 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	392
Tabel 5. 211 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi.....	403
Tabel 5. 212 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	407
Tabel 5. 213 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris.....	410
Tabel 5. 214 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga	410
Tabel 5. 215 Perhitungan Saldo Awal Kas	412
Tabel 5. 216 Perhitungan Saldo Akhir Kas.....	414
Tabel 6. 1 Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA. 2024.....	434
Tabel 6. 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja DAK Non Fisik TA. 2024.....	435
Tabel 6. 3 Mutasi Pemulihan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024...	438
Tabel 6. 4 Pemulihan Keuangan Daerah Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2024	439
Tabel 6. 5 Mutasi Pengembalian Bansos Tahun 2024	441
Tabel 6. 6 Mutasi Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2024.....	441

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD serta masyarakat.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkap secara menyeluruh tentang capaian kinerja APBD serta informasi penting lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Jember akan tetap berupaya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta akan tetap berupaya melakukan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Tujuan umum disusunnya laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dengan:



- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimaau entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undaug Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD beserta perubahannya;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Pemerintah- Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Jember No. 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;



29. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang Ekonomi Mako, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Memuat informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Memuat informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran, rincian dan penjelasan pos-pos laporan perubahan saldo anggaran lebih, rincian dan penjelasan pos-pos neraca, rincian dan penjelasan pos-pos laporan operasional, rincian dan penjelasan pos-pos laporan arus kas, rincian dan penjelasan pos-pos perubahan ekuitas, serta pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya.



BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan serta hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

BAB VII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai proses terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil atau pendapatan domestik riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil dari sektor sektor ekonomi.

Dalam upaya mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal disertai pemerataan hasil dan manfaat pembangunan, maka pemerintah daerah sebagai otoritas pembangunan dituntut untuk menerapkan kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan-kegiatan produktif para pelaku ekonomi, selain itu juga mampu menggunakan pendekatan tematik spasial berbasis data kewilayahan yang menyeluruh melingkupi kebutuhan fisik dan non-fisik serta berorientasi kepada output serta outcome dari setiap program dan kegiatan secara berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan daerah dalam bentuk APBD, yang dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun daerah. Salah satu komponen dalam APBD yaitu pengeluaran pemerintah (baik belanja rutin maupun pembangunan dan atau pemeliharaan dan belanja modal), dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pembangunan (belanja modal dan pemeliharaan) merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek-proyek yang terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi juga berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan ekonomi makro daerah yang menjadi landasan pengambilan kebijakan daerah mengacu pada beberapa indikator ekonomi yang menjadi target nasional yaitu; 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Tingkat inflasi; 3) Tingkat kemiskinan; 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5) Gini rasio; dan 6) Tingkat Pengangguran Terbuka. Melalui proyeksi ekonomi makro nasional dan provinsi dapat menjadi pertimbangan dalam memproyeksikan makro ekonomi daerah pada tahun berkenaan atau bahkan proyeksi ekonomi di masa mendatang.

Secara umum kondisi ekonomi Kabupaten Jember dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Kemajuan ekonomi Kabupaten Jember dapat diketahui dengan menyandingkan data pertumbuhan ekonomi dengan data pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kemajuan perekonomian Kabupaten Jember secara sederhana dapat dilihat melalui pertumbuhan PDRB-nya.

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah, meskipun terlihat adanya pergeseran ke sektor sekunder dan jasa. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai: penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun sebagai mekanisme jaring pengaman sosial lokal bagi masyarakat setempat. Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif serta dapat langsung dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diperlukan skala prioritas.

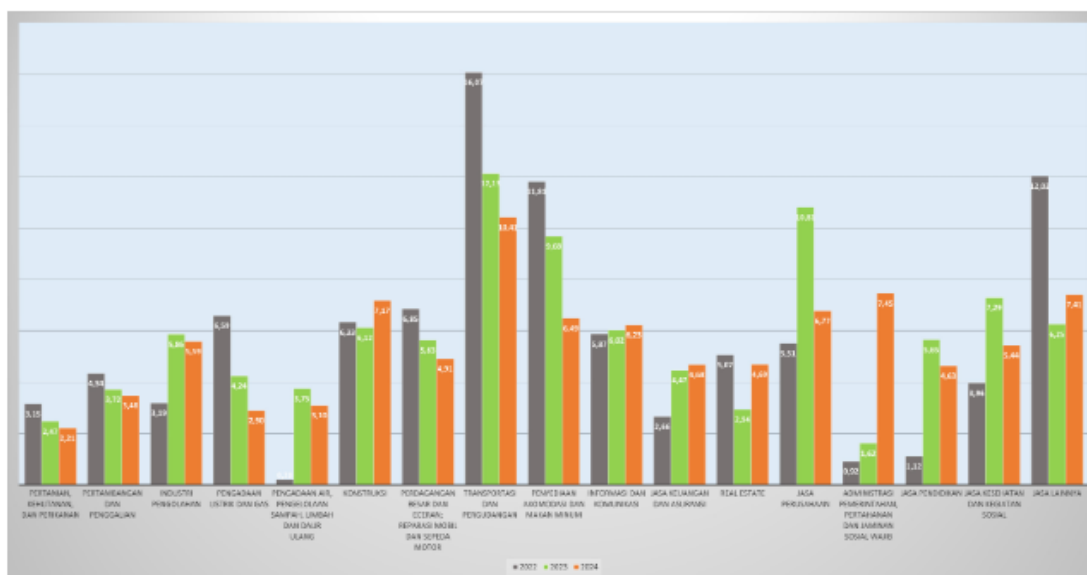
Perkembangan makro ekonomi Kabupaten Jember pada tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator tersebut berguna untuk memberikan gambaran umum perubahan kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan PDRB secara sektoral dapat digunakan untuk melihat perubahan dan pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat.

Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua lapangan usaha di Kabupaten Jember. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,41 persen, Kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial tumbuh sebesar 7,45 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Lainnya dan Konstruksi tumbuh sebesar 7,41 persen dan 7,17 persen. bebrapa lapangan usaha yang tercatat tumbuh sekitar 6 persen adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha jasa Perusahaan.

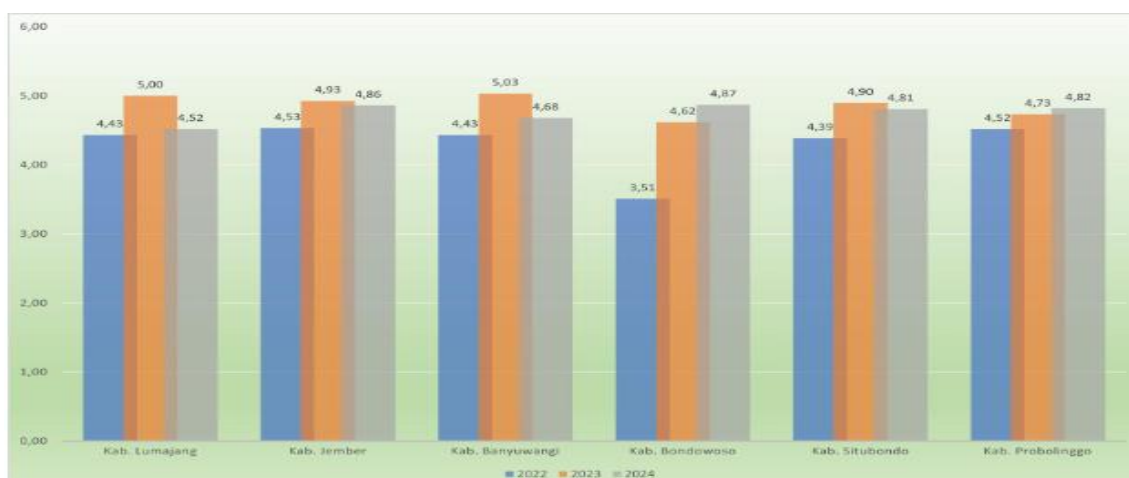
Grafik. 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Menurut Lapangan Usaha 2022 – 2024



Sumber: BPS Kab.Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 2025; No.06/03/3509/Th. IX, 3 Maret 2025)

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur semuanya tumbuh positif. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso tahun 2024 menempati posisi tertinggi di kawasan tapal kuda yakni sebesar 4,87 persen. Kemudian disusul Kabupaten Jember dengan pertumbuhan sebesar 4,86 persen, Kabupaten Probolinggo 4,82 persen dan Kabupaten Situbondo tumbuh 4,81 persen. Kabupaten Banyuwangi tercatat hanya tumbuh sebesar 4,68 persen di tahun 2024 dan paling buncit adalah Kabupaten Lumajang dengan pertumbuhan 4,52 persen.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2022 – 2024



Sumber: BPS Kab.Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 2025; No.06/03/3509/Th. IX, 3 Maret 2025)



2.1.2 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan indikator yang menjelaskan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat inflasi juga dapat menggambarkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang diikuti dengan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Meskipun demikian, tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk menjaga stabilitas tingkat inflasi. Perhitungan tingkat inflasi salah satunya dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan harga dan paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

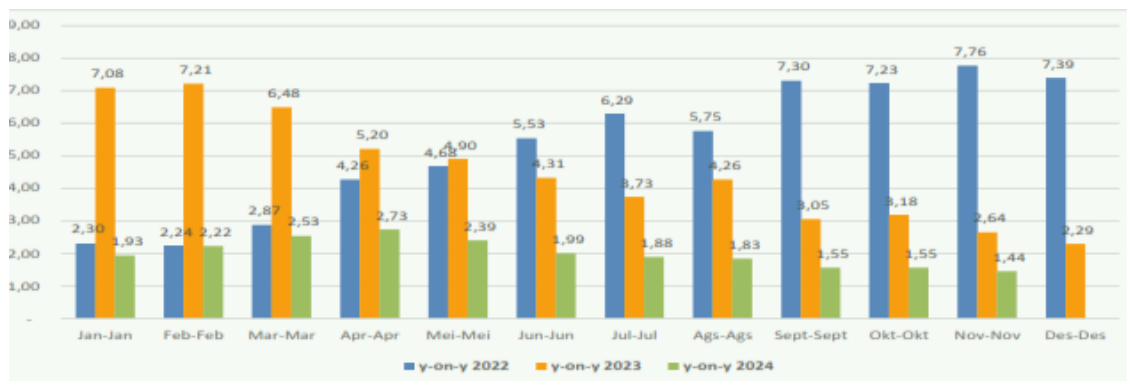
Pada November 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Jember sebesar 1,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,52.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,80 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,71 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,69 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,36 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,26 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,85 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,78 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,83 persen; sedangkan kelompok kesehatan deflasi y-on-y sebesar 0,15 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Jember bulan November 2024 sebesar 0,17 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Jember bulan November 2024 sebesar 1,20 persen.

Pada November 2024, tingkat inflasi y-on-y Jember sebesar 1,44 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,20 persen. Tingkat inflasi y-on-y untuk November 2023 dan November 2022 masing-masing sebesar 2,64 persen dan 7,76 persen. Tingkat inflasi y-to-d November 2023 dan November 2022 masing-masing sebesar 2,07 persen dan 6,79 persen.

Grafik 2.2 Tingkat Inflasi Year on Year (y-on-y) Jember bulan November, 2022–2024



Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember No. 027/12/3509/Th.VIII, Tanggal 2 Desember 2024)

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada November 2024, antara lain: emas perhiasan, beras, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, Sigaret Kretek Mesin (SKM), gula pasir, Sigaret Kretek Tangan (SKT), nasi dengan lauk, udang basah, bahan bakar rumah tangga, kopi bubuk, Sigaret Putih Mesin (SPM), rawon, kue basah, sepeda motor, mobil, bioskop, dan sandal kulit wanita.

2.1.3 Tingkat kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2024 mencapai 224,77 ribu jiwa. Jumlah ini berkurang sebesar 11,69 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang sebesar 236,46 ribu jiwa

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami penurunan dari 9,51 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 9,01 persen pada bulan Maret 2024.

Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2024 sebesar Rp. 459.043,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 17.872,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,05 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023 yang sebesar Rp. 441.171,00.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jember Maret 2024 sebesar 1,01 mengalami penurunan sebesar 0,18 poin dibandingkan Maret 2023 yaitu 1,17.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jember Maret 2024 sebesar 0,18 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin di bandingkan Maret 2023 yaitu 0,22.

**Tabel 2. 1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember
Tahun 2011- 2024**

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	226.546,00	292,10	12,44
2012	242.440,00	280,00	11,81
2013	260.106,00	278,50	11,68
2014	267.962,00	270,40	11,28
2015	283.510,00	269,54	11,22
2016	299.823,00	265,10	10,97
2017	310.650,00	266,90	11,00
2018	324.174,00	243,42	9,98
2019	339.685,00	226,57	9,25
2020	365.295,00	247,99	10,09
2021	380.397,00	257,09	10,41
2022	400.961,00	232,73	9,39
2023	441.171,00	236,46	9,51
2024	459.043,00	224,77	9,01

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember 20/08/3509/Th.VIII, Tanggal 01 Agustus 2024)

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator yang menggambarkan kualitas hidup sumber daya masyarakat di suatu daerah. Terdapat tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur IPM yaitu: a) umur panjang dan hidup sehat; b) pendidikan; dan c) standar hidup layak. Selain menjadi indikator kualitas hidup masyarakat, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas manusia, juga dapat menentukan level pembangunan suatu wilayah dan dalam konteks desentralisasi fiskal, data IPM berguna sebagai salah satu penentu alokator dana transfer pusat kepada daerah.

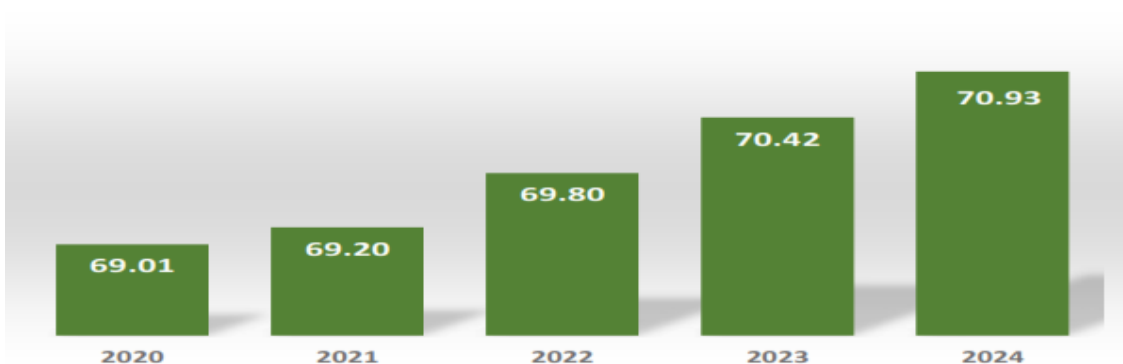
Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran perkapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember tahun 2024 mencapai 70,93, meningkat 0,51 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (70,42). Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Jember rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 naik sebesar 0,72 persen atau sebesar 0,51 poin dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama pada dimensi standar hidup layak.

Grafik 2.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember, 2020–2024



Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember No. 31/12/3509/Th.VIII, Tanggal 27 Desember 2024)

Pembangunan manusia di Kabupaten Jember terus mengalami kemajuan. Tahun 2020, status pembangunan manusia berada di level “sedang”. Namun, pada tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Jember berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Jember rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 69,01 pada tahun 2020 menjadi 70,93 pada tahun 2024.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak. Indikator ini mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 4,12 persen

dibanding tahun sebelumnya 4,44 persen. Sementara Umur Harapan Hidup (UHH) juga mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 0,20 persen dibanding tahun sebelumnya 0,31 persen. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,07 dibanding tahun sebelumnya 0,37 persen. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami pertumbuhan yang stagnan yaitu sebesar 0,31 persen.

**Tabel 2. 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jember Menurut Dimensi Penyusunnya
Tahun 2020 – 2024**

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,44	73,53	73,79	74,02	74,17
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,42	13,43	13,44	13,49	13,50
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,48	6,49	6,50	6,52	6,54
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	9294	9410	9840	10.277	10.700
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		69,01	69,20	69,80	70,42	70,93

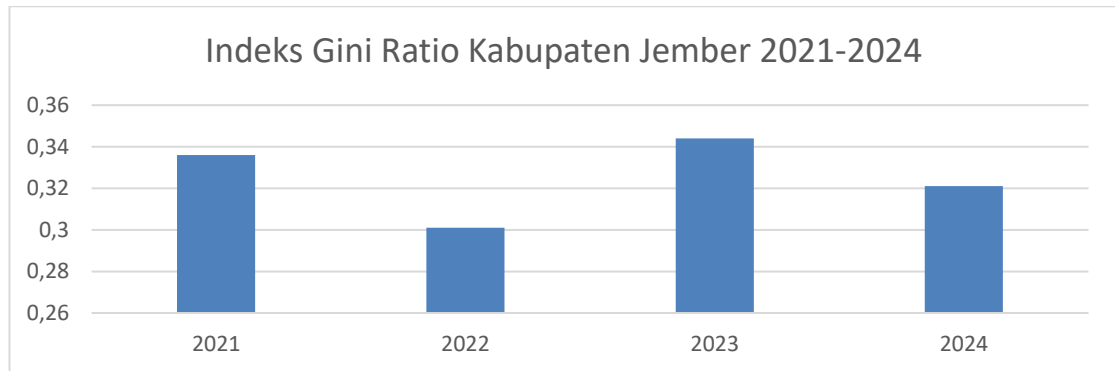
Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember No. 31/12/3509/Th.VIII, Tanggal 27 Desember 2024)

2.1.5 Gini rasio

Gini rasio merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah. Nilai gini rasio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Gini rasio berguna untuk mengukur kinerja pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien $<0,4$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, Nilai koefisien $0,4-0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang, Nilai koefisien $>0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi. Berdasarkan Informasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember bahwa belum terdapat data publikasi resmi perihal informasi indeks gini untuk tahun 2021 -2026 sehingga masih menggunakan perhitungan indeks gini pada tahun 2020 sebagai pedoman pembangunan untuk pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Jember.



Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember 2021 -2024



Sumber: <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/488/1/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh

Tabel 2. 3 Perkembangan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tahun 2021 – 2024

Nama Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Pacitan	0,337	0,338	0,352	0,327
Kabupaten Ponorogo	0,369	0,336	0,341	0,326
Kabupaten Trenggalek	0,335	0,331	0,336	0,35
Kabupaten Tulungagung	0,327	0,342	0,328	0,321
Kabupaten Blitar	0,353	0,335	0,36	0,353
Kabupaten Kediri	0,33	0,329	0,306	0,3
Kabupaten Malang	0,367	0,368	0,378	0,343
Kabupaten Lumajang	0,309	0,349	0,391	0,363
Kabupaten Jember	0,336	0,301	0,344	0,321
Kabupaten Banyuwangi	0,373	0,329	0,351	0,312
Kabupaten Bondowoso	0,334	0,365	0,35	0,333
Kabupaten Situbondo	0,323	0,298	0,326	0,385
Kabupaten Probolinggo	0,326	0,275	0,319	0,339
Kabupaten Pasuruan	0,344	0,325	0,367	0,331
Kabupaten Sidoarjo	0,347	0,373	0,359	0,327
Kabupaten Mojokerto	0,294	0,327	0,338	0,337
Kabupaten Jombang	0,332	0,31	0,339	0,302
Kabupaten Nganjuk	0,308	0,301	0,324	0,289
Kabupaten Madiun	0,359	0,354	0,342	0,309
Kabupaten Magetan	0,357	0,352	0,373	0,371
Kabupaten Ngawi	0,309	0,3	0,328	0,289
Kabupaten Bojonegoro	0,34	0,28	0,283	0,31

Nama Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tuban	0,345	0,345	0,338	0,335
Kabupaten Lamongan	0,292	0,273	0,295	0,281
Kabupaten Gresik	0,313	0,363	0,330	0,322
Kabupaten Bangkalan	0,303	0,306	0,299	0,301
Kabupaten Sampang	0,268	0,28	0,254	0,233
Kabupaten Pamekasan	0,323	0,305	0,348	0,301
Kabupaten Sumenep	0,294	0,266	0,287	0,308
Kota Kediri	0,374	0,371	0,400	0,337
Kota Blitar	0,37	0,381	0,397	0,353
Kota Malang	0,407	0,421	0,413	0,422
Kota Probolinggo	0,299	0,322	0,347	0,344
Kota Pasuruan	0,35	0,36	0,378	0,334
Kota Mojokerto	0,334	0,381	0,353	0,357
Kota Madiun	0,345	0,398	0,416	0,435
Kota Surabaya	0,351	0,388	0,423	0,381
Kota Batu	0,312	0,308	0,33	0,327

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDg4IzI=/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menjelaskan persentase jumlah penduduk yang sedang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pemerintah tiap tahun menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Melalui regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada penyediaan lapangan kerja, kepastian hukum dalam bekerja dan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja serta lingkungan yang kondusif untuk berwirausaha.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Jember pada Agustus 2024 sebanyak 1,53 juta orang, naik 41,77 ribu orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,46 persen poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 3,23 persen, turun 0,078 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2023 sebanyak 1,48 juta orang, meningkat sebanyak 52,07 ribu orang dari Agustus 2023.

Berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen poin dibandingkan tahun 2023. Selain itu sektor jasa mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 1,86 persen poin. Sedangkan sektor manufaktur juga mengalami penurunan persentase orang yang bekerja sebesar 1,27 persen poin.

Tabel 2. 4 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus 2021-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan 1 Tahun (Agustus 2023–Agustus 2024)	
	orang	orang	orang	orang	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	1.947.404	1.959.071	2.058.816	2.074.920	16.104	0,78
Angkatan Kerja	1.343.187	1.360.361	1.488.624	1.530.401	41.777	2,81
- Bekerja	1.270.170	1.305.101	1.428.908	1.480.981	52.073	3,64
- Pengangguran	73.017	55.260	59.716	49.420	-10.296	-17,24
Bukan Angkatan Kerja	604.217	598.710	570.192	544.519	-25.673	-4,50
	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,44	4,06	4,01	3,23	-0,78	
- Laki-laki	5,16	3,91	3,71	3,07	-0,64	
- Perempuan	5,87	4,29	4,45	3,45	-1	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,97	69,44	72,30	73,76	1,46	
- Laki-Laki	86,35	85,13	86,76	87,96	1,2	
- Perempuan	52,41	54,49	58,13	59,84	1,71	

Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi statistik Kabupaten Jember Tahun 2024 No. 30/12/3509/Th. VIII tanggal 2 Desember 2024)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT yang terpotret dari hasil Sakernas Agustus 2024 di Kabupaten Jember, sebesar 3,23 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,78 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

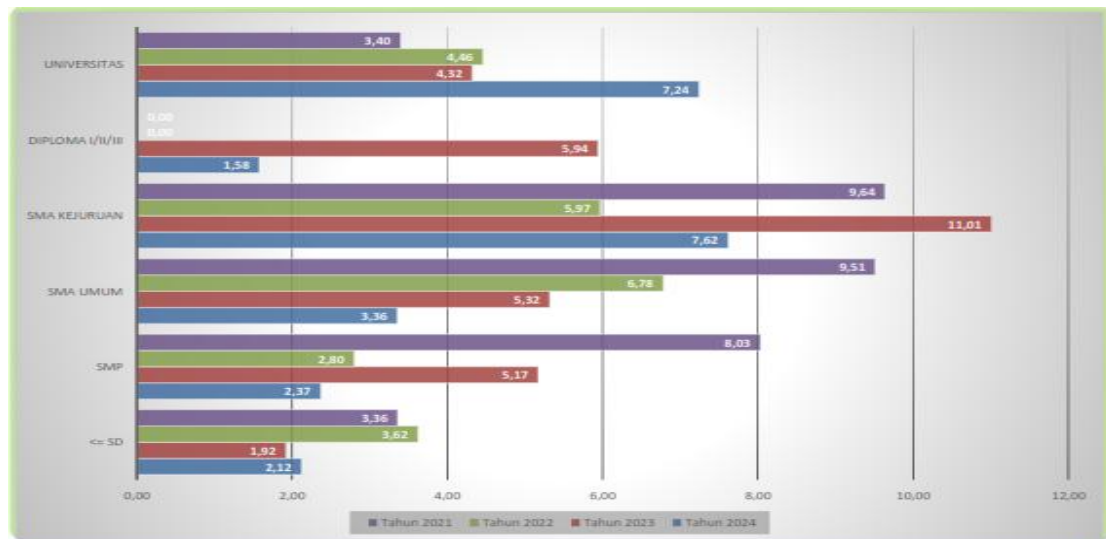
TPT bervariasi secara signifikan menurut tingkat pendidikan. Beberapa tingkat pendidikan mengalami fluktuasi yang besar dari tahun ke tahun, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja yang berbeda atau perubahan permintaan di sektor tertentu.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agustus 2024, TPT untuk tingkat pendidikan SMA Kejuruan mengalami penurunan dari 11,01 persen pada tahun 2023 menjadi 7,62 persen pada tahun 2024. Meskipun masih cukup tinggi, penurunan ini merupakan tanda positif bahwa pengangguran di kalangan lulusan SMA Kejuruan berkurang. TPT untuk tingkat pendidikan SD mengalami sedikit peningkatan dari 1,92 persen pada tahun 2023 menjadi 2,12 persen pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa pengangguran sedikit meningkat di kalangan lulusan SD. TPT untuk tingkat pendidikan Universitas mengalami peningkatan dari 4,32 persen pada tahun 2023 menjadi 7,24 persen pada tahun 2024.



Mayoritas tingkat pendidikan mengalami penurunan TPT dari 2023 ke 2024, kecuali untuk lulusan SD dan universitas yang justru mengalami sedikit kenaikan. TPT untuk lulusan universitas meningkat, menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan (persen), Agustus 2021–Agustus 2024



2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan adalah langkah-langkah atau tindakan-tindakan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 meliputi kebijakan umum pendapatan, kebijakan umum belanja dan kebijakan umum pembiayaan.

Pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan kebijakan penyusunan APBD berpedoman kepada Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Permendagri ini berisi pedoman penyusunan APBD 2024. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pengelolaan pendapatan

daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026, tema pembangunan tahun 2024 adalah Pembangunan Inklusif Menuju Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 7 Prioritas Pembangunan yang selaras dengan Tema Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian;
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk Pemerataan Pembangunan dan mengurangi Kemiskinan;
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
4. Mendorong Pariwisata yang berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya;
5. Memperkuat Layanan Infrastruktur untuk mendorong Perekonomian Daerah;
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah;
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional.

Pertama, sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi hubungan perencanaan dan penganggaran serta secara cepat dapat mengukur dan menunjukkan kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan.

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan Daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan (RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Sebagai pedoman dan acuan serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal Daerah difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan atau transfer pemerintah pusat. Dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Jember secara umum menerapkan kebijakan untuk menjalin hubungan secara intensif dan harmonis baik kepada Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Secara teknis, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Jember.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah tahun 2024 lebih difokuskan untuk pembangunan ketahanan sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan anggaran belanja daerah juga berdasarkan atas prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan pencapaian target sasaran-sasaran Perubahan RPJMD serta pencapaian penyempurnaan target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi:

1. Perencanaan yang tepat
2. Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas;
3. Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel;
4. Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif;
5. Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Sedangkan arah kebijakan belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;

3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana alam;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2023;

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2023.

b. Pencairan dana cadangan;

Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 73 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

d. Penerimaan pinjaman Daerah;

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 75 digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penerimaan piutang Daerah.

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian

pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang antara lain terdiri dari:

1. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 77 digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman tersebut baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51 persen (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;

3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana

tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud Pasal 303 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 pasal 81 digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat. Pemberian Pinjaman Daerah tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD yang merupakan bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS sebagaimana diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seiring dengan penyusunan kebijakan anggaran yang dituangkan dalam APBD, ditetapkan juga rencana kinerja yang harus dicapai dalam tahun tertentu. Penentuan target kinerja APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan dicapai, berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya atas kesesuaian pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan daerah. Perubahan sasaran strategis beserta indikatornya dalam Pemerintah Kabupaten Jember direncanakan sebagai sasaran dalam perubahan Dokumen Perencanaan Strategis Kabupaten yakni Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Komitmen pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan akan terus dijaga, melalui pengalokasian anggaran yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu kolaborasi aktif pelaksanaan program diperlukan sehingga terdapat hasil kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi baik internal maupun eksternal perangkat daerah secara efektif sehingga target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau jika memungkinkan mampu melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target Kinerja APBD digolongkan menjadi:

- Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah;
- Pencapaian Kinerja Belanja Daerah; dan
- Pencapaian Kinerja Pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan daerah berguna dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi realisasi

pendapatan daerah dan mengukur sejauh mana efektifitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerah.

Selanjutnya pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Jember Tahun 2023 dijelaskan dalam anggaran dan realisasi pelaksanaan APBD di bawah ini:

2.3.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun TA. 2024 dianggarkan sebesar Rp4.218.542.591.731,00 dapat direalisasikan sebesar Rp4.129.094.313.771,47 atau sebesar 97,88 persen, mengalami kenaikan sebesar Rp89.448.672.735,53 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 yaitu sebesar Rp3.957.426.651.267,85 atau sebesar 4,16 persen.

Berikut rincian kenaikan dan penurunan realisasi pendapatan Daerah TA. 2024 dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 5 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2024

Kode Rek.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2023	Tahun 2024	(Rp)	%
4	PENDAPATAN	3.957.426.651.267,85	4.129.094.313.771,47	171.667.662.503,62	4,16
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	764.496.302.893,85	774.166.633.985,47	9.670.331.091,62	1,25
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	288.151.785.388,00	301.523.590.641,00	13.371.805.253,00	4,43
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	27.374.994.636,00	346.940.142.283,82	319.565.147.647,82	92,11
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.189.012.393,75	7.584.439.331,25	395.426.937,50	5,21
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	441.780.510.476,10	118.118.461.729,40	(323.662.048.746,70)	(18,03)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.191.994.244.040,00	3.354.927.679.786,00	162.933.435.746,00	4,86
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.845.857.792.619,00	3.049.537.234.686,00	203.679.442.067,00	6,68
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.522.861.210.219,00	2.718.533.172.486,00	195.671.962.267,00	7,20
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	210.923.988.652,00	217.238.300.409,00	6.314.311.757,00	2,91
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.704.938.164.985,00	1.832.793.869.706,00	127.855.704.721,00	6,98
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	45.036.717.101,00	104.185.840.707,00	59.149.123.606,00	56,77
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	561.962.339.481,00	564.315.161.664,00	2.352.822.183,00	0,42
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	322.996.582.400,00	331.004.062.200,00	8.007.479.800,00	2,42
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	322.996.582.400,00	325.303.772.200,00	2.307.189.800,00	0,71
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	5.700.290.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	346.136.451.421,00	305.390.445.100,00	(40.746.006.321,00)	(13,34)
4.2.01.02	Pendapatan Bagi Hasil	334.510.008.600,00	293.673.542.400,00	(40.836.466.200,00)	(13,91)
4.2.01.05	Bantuan Keuangan	11.626.442.821,00	11.716.902.700,00	90.459.879,00	0,77



Kode Rek.	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2023	Tahun 2024	(Rp)	%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	936.104.334,00	0,00	(936.104.334,00)	(0,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	936.104.334,00	0,00	(936.104.334,00)	(0,00)
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0.00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Jember pada TA. 2024 sebesar Rp774.166.633.985,47 Pendapatan Asli Daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.670.331.091,62 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2023 yaitu sebesar Rp764.496.302.893,85 atau sebesar 1,25 persen. yang terdiri dari :

1	Pendapatan Pajak Daerah	301.523.590.641,00
2	Hasil Retribusi Daerah	346.940.142.283,82
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.439.331,25
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.118.461.729,40
	Jumlah	774.166.633.985,47

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 sebesar Rp3.354.927.679.786,00 yang terdiri dari dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Jumlah Pendapatan Transfer tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp162.933.435.746,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 yaitu sebesar Rp3.191.994.244.040,00 atau sebesar 4,86 persen. Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp2.718.533.172.486,00

1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	217.238.300.409,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.832.793.869.706,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	104.185.840.707,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	564.315.161.664,00
	Jumlah	2.718.533.172.486,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp331.004.062.200,00

1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00
2	Dana Desa	325.303.772.200,00
3	Insentif Fiskal	5.700.290.000,00
	Jumlah	331.004.062.200,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp305.390.445.100,00

1	Pendapatan Bagi Hasil	293.673.542.400,00
2	Bantuan Keuangan	11.716.902.700,00
Jumlah		305.390.445.100,00

Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA. 2024 sebesar Rp0,00 tidak ada realisasi di tahun ini, jika dibandingkan dengan realisasi TA. 2023 yaitu sebesar Rp936.104.334,00.

2.3.2 Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban atau semua pengeluaran kas daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berjalann. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja Kabupaten Jember pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.372.730.733.767,00 dengan realisasi sebesar Rp3.829.547.166.517,57 atau sebesar 87,58 persen. Realisasi belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp27.325.104.839,65 atau 0,71 persen dibandingkan realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp3.802.222.061.677,92.

2.3.2.1 Belanja Daerah

Rincian kenaikan dan penurunan Belanja Daerah Kabupaten Jember TA. 2024 dari tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Realisasi Belanja Dearah Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2023	Tahun 2024	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	3.802.222.061.677,92	3.829.547.166.517,57	27.325.104.839,65	0,71
5.1	BELANJA OPERASI	3.015.559.884.677,66	3.023.289.882.630,57	7.729.997.952,91	0,26
5.1.01	Belanja Pegawai	1.361.120.333.591,47	1.401.352.250.469,71	40.231.916.878,24	2,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.258.354.206,19	1.298.171.536.917,86	(56.086.817.288,33)	(4,32)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	270.995.238.880,00	306.794.019.443,00	35.798.780.563,00	11,67
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.185.958.000,00	16.972.075.800,00	(12.213.882.200,00)	(71,96)
5.2	BELANJA MODAL	232.163.748.376,26	270.766.304.957,00	38.602.556.580,74	14,26
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2023	Tahun 2024	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.716.522.691,50	58.483.245.460,00	(21.233.277.231,50)	(36,31)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.635.641.878,00	72.252.822.584,00	17.617.180.706,00	24,38
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	43.233.220.730,76	90.641.872.297,00	47.408.651.566,24	52,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.351.340.328,00	48.677.747.566,00	(5.673.592.762,00)	(11,66)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	227.022.748,00	710.617.050,00	483.594.302,00	68,05
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	31.854.315.147,00	1.261.756.421,00	(30.592.558.726,00)	(2.424,06)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	31.854.315.147,00	1.261.756.421,00	(30.592.558.726,00)	(2.424,06)
5.4	BELANJA TRANSFER	522.644.113.477,00	534.229.222.509,00	11.585.109.032,00	2,17
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.500.000.000,00	22.876.438.492,00	376.438.492,00	1,65
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	500.144.113.477,00	511.352.784.017,00	11.208.670.540,00	2,19

Klasifikasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2024 dipergunakan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.440.620.529.517,98 dengan realisasi sebesar Rp3.023.289.882.630,57 atau sebesar 87,87 persen. Belanja operasi dipergunakan untuk mendanai kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Kabupaten Jember Tahun 2024 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp379.707.511.752,00 dengan realisasi sebesar Rp270.766.304.957,00 atau 71,31 persen. Belanja Modal dipergunakan untuk mendanai pengeluaran anggaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja jalan, Irigasi, dan jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp16.884.125.188,02 dengan realisasi sebesar Rp1.261.756.421,00 atau sebesar 7,47 persen. Belanja tidak Terduga dipergunakan untuk mendanai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp535.518.567.309,00 dengan realisasi sebesar Rp534.229.222.509,00 atau sebesar 99,76 persen. Belanja Transfer dipergunakan untuk transfer bagi hasil pajak daerah dan transfer bantuan keuangan ke desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Pada tahun 2024 klasifikasi APBD Kabupaten Jember terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan unsur pendukung urusan pemerintahan ,urusan unsur penunjang urusan pemerintahan, urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan, urusan unsur kewilayaan dan urusan pemerintahan umum, Rincian anggaran dan realisasi dari masing – masing urusan tersebut adalah sebagai berikut :

2.3.3 Urusan Wajib

Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, Belanja daerah untuk Urusan Wajib dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial.

Anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar TA 2024 sebesar Rp2.818.347.016.751,00 dan terealisasi sebesar Rp2.513.638.834,740,89 atau sebesar 89,19 persen. Realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Sebesar Rp123.981.008.530,97 dibandingkan realisasi TA. 2023 sebesar Rp2.389.747.826.209,92 atau sebesar 105,19 persen.

Rincian belanja urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 7 Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1.01.01	Pendidikan Dan Pelatihan	1.272.359.336.626,00	1.418.064.718.066	1.281.182.280.001,86	90,35
1.02.01	Kesehatan	780.557.488.253,16	910.815.303.231	821.124.869.919,03	90,15



KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
1.03.01	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	217.660.165.796,76	273.881.332.911	227.572.771.910,00	83,09
1.04.02	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	23.109.344.412,00	109.818.182.816	97.482.626.745,00	88,77
1.05.01	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	41.735.142.179,00	47.843.868.613	35.582.212.436,00	74,37
1.06.01	Sosial	54.326.348.943,00	57.923.611.114	50.694.073.729,00	87,52
	JUMLAH	2.389.747.826.209,92	2.818.347.016.751,00	2.513.638.834.740,89	89,19

B. Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar terdiri dari bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan anak, pertanahan, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, Persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Pada tahun 2024 belanja urusan wajib non pelayanan dasar dianggarkan sebesar Rp212.768.802.133,00 dengan realisasi sebesar Rp182.271.608.727,68 atau sebesar 85,67 persen. Realisasi belanja urusan wajib non pelayanan dasar tahun 2023 dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.390.646.588,32 atau sebesar 90,83 persen.

Rincian Belanja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 2. 8 Belanja Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar) Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		%
			ANGGARAN	REALISASI	
2.07.01	Tenaga Kerja	13.359.116.248,00	15.090.048.490	11.829.366.687,00	78,39
2.08.01	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.313.069.477,00	7.652.743.213	6.886.248.667,00	89,98
2.09.02	Pangan	534.340.664,00	1.149.160.125	142.443.250,00	12,40
2.10.02	Pertanahan	238.745.397,00	86.929.230	87.896.084,00	101,11
2.11.01	Lingkungan Hidup	35.642.491.931,00	34.256.351.894	33.173.071.334,00	96,84
2.12.01	Administrasi Kependudukan Dan Capil	9.294.471.653,00	9.834.222.823	8.594.655.924,00	87,40
2.13.01	Pemberdayaa Masyarakat Dan Desa	14.974.680.204,00	15.673.409.467	13.283.391.809,00	84,75
2.14.02	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20.293.596.242,00	24.220.619.889	22.845.627.065,00	94,32
2.15.01	Perhubungan	31.606.039.690,00	26.704.551.555	23.963.479.390,00	89,74
2.16.01	Komunikasi Dan Informatika	22.019.903.158,00	24.189.602.990,00	20.672.124.575,00	85,46
2.17.01	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.763.474.858,00	10.124.418.541	8.163.384.097,00	80,63



KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		%
			ANGGARAN	REALISASI	
2.18.01	Penanaman Modal	5.824.146.601,00	6.960.136.593	4.696.237.868,00	67,47
2.19.01	Kepemudaan Dan Olahraga	22.106.398.159,00	29.145.295.285	21.688.016.490,68	74,41
2.20.02	Statistik	240.895.530,00	63.400.000	61.748.000,00	97,39
2.21.02	Persandian	140.487.000,00	55.718.300	45.597.940,00	81,84
2.22.02	Kebudayaan	2.380.368.630,00	2.509.543.000	2.260.852.813,00	90,09
2.23.01	Perpustakaan	5.209.618.866,00	4.918.194.538	3.814.586.734,00	77,56
2.24.02	Kearsipan	720.411.008,00	134.456.200	62.880.000,00	46,77
	JUMLAH	200.662.255.316,00	212.768.802.133,00	182.271.608.727,68	85,67

C. Urusan Pilihan

Belanja Urusan Pilihan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan Urusan Pilihan yang secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Anggaran Belanja Urusan Pilihan tahun 2024 sebesar Rp125.129.151.167,00 dengan realisasi sebesar Rp86.617.891.506,00 atau sebesar 74,53 persen. Realisasi belanja urusan pilihan mengalami penurunan sebesar Rp37.701.390.527,00 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp124.319.282.033,00 atau sebesar 69,67 persen.

Berikut Rincian Belanja Urusan Pilihan Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yang terdiri dari :

Tabel 2. 9 Belanja Urusan Pilihan Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
3.25.01	Kelautan Dan Perikanan	5.754.588.016,00	9.866.537.304	8.477.267.467,00	85,92
3.26.01	Pariwisata	13.943.877.248,00	15.972.407.593	15.129.358.357,00	94,72
3.27.01	Pertanian	79.959.780.618,00	75.477.617.039	42.701.346.758,00	56,57
3.30.01	Perdagangan	20.969.324.313,00	19.809.001.949	17.778.394.839,00	89,75
3.31.02	Perindustrian	3.691.711.838,00	4.003.587.282	2.531.524.085,00	63,23
	JUMLAH	124.319.282.033,00	125.129.151.167,00	86.617.891.506,00	69,22

D. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

Urusan Pendukung urusan pemerintahan merupakan klasifikasi APBD yang baru diberlakukan pada tahun 2021, yang belanja nya digunakan untuk mendukung kegiatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dimana pada tahun sebelumnya belanja dimaksud masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan, Anggaran belanja urusan pemerintahan tahun 2024 sebesar Rp213.037.457.742,00 dengan realisasi sebesar Rp165.430.820.998,00 atau sebesar 77,65 persen. Realisasi belanja urusan pemerintahan tahun



2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp34.724.401.901,00 atau sebesar 82,65 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Belanja Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
4.01.01	Sekretariat Daerah	118.867.436.829,00	136.509.990.383	96.029.258.082,00	70,35
4.02.02	Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat	81.287.786.070,00	76.527.467.359	69.401.562.916,00	90,69
	JUMLAH	200.155.222.899,00	213.037.457.742,00	165.430.820.998,00	77,65

E. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Anggaran Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan tahun 2024 sebesar Rp712.947.349.698,00 dengan realisasi sebesar Rp624.615.583.085,00 atau sebesar 87,61 persen. Realisasi belanja urusan penunjang urusan pemerintahan tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp46.766.312.142,00 atau sebesar 93,03 persen. Khusus untuk urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan sejak tahun 2021 diklasifikasikan ke dalam urusan pendukung urusan pemerintahan.

Berikut rincian Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 2. 11 Belanja Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
5.01.02	Perencanaan	12.185.829.944,00	15.744.549.335	11.777.879.566,00	74,81
5.02.01	Keuangan	629.858.746.678,00	669.907.924.046	595.803.507.242,00	88,94
5.03.01	Kepegawaian	25.827.607.882,00	24.974.266.317	15.982.338.716,00	64,00
5.04.02	Pendidikan Dan Pelatihan	988.799.816,00	178.429.000	156.480.877,00	87,70
5.05.02	Penelitian Dan Pengembangan	2.520.910.907,00	2.142.181.000	895.376.684,00	41,80
	JUMLAH	671.381.895.227,00	712.947.349.698,00	624.615.583.085,00	87,61

F. Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Belanja Urusan unsur pengawasan urusan pemerintahan merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp15.966.816.537,00 dan terealisasi sebesar Rp12.833.468.097,00 atau 80,38 persen. Jika dibandingkan tahun 2023 meningkat sebesar Rp1.072.326.492,00 atau 109,12 persen, Belanja untuk mendukung kegiatan pengawasan pada Inspektorat masuk dalam klasifikasi urusan penunjang urusan pemerintahan staf dan pengawasan.

Berikut rincian Belanja Urusan Pengawasan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 2. 12 Belanja Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.01	Inspektorat Daerah	11.761.141.605,00	15.966.816.537	12.833.468.097,00	80,38
	JUMLAH	11.761.141.605,00	15.966.816.537,00	12.833.468.097,00	80,38

G. Urusan Unsur Kewilayahan

Belanja Urusan unsur kewilayahan merupakan belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada 31 (tiga puluh satu) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) kelurahan di Kabupaten Jember, Anggaran untuk urusan unsur kewilayaan pada tahun 2024 sebesar Rp161.228.428.001,00 dan terealisasi sebesar Rp139.655.761.087,00 atau sebesar 86,62 persen jika dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp7.847.513.987,00 atau sebesar 105,95 persen.

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Kewilayahan urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 2. 13 Belanja Urusan Kewilayahan Urusan Pemerintahan Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
7.01.01	Kecamatan	131.808.247.100,00	161.228.428.001	139.655.761.087,00	86,62
	JUMLAH	131.808.247.100,00	161.228.428.001,00	139.655.761.087,00	86,62

Belanja Urusan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintahan kabupaten Jember merupakan urusan pemerintah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan umum yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan umum sejak tahun 2023 hanya terdiri dari belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik. Anggaran untuk urusan unsur Pemerintahan Umum sebesar Rp113.305.711.738,00 dan terealisasi sebesar Rp104.483.468.276,00 atau sebesar 92,21 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp72.317.991.288,00 mengalami peningkatan sebesar Rp32.165.476.988,00 atau sebesar 144,48 persen

Berikut rincian Belanja Urusan Unsur Pemerintahan Umum urusan Pemerintahan Kabupaten Jember tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 :

Tabel 2. 14 Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2023-2024

KODE REKENING	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2023	TAHUN 2024		
			ANGGARAN	REALISASI	%
8.01.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	72.317.991.288,00	113.305.711.738	104.483.468.276,00	92,21
	JUMLAH	72.317.991.288,00	113.305.711.738,00	104.483.468.276,00	92,21

2.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	Rp	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.391.890.210,93	276.618.534.800,86	155.226.644.589,93	56,12
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121.337.947.710,93	276.596.479.800,86	155.258.532.089,93	56,13
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	53.942.500,00	22.055.000,00	(31.887.500,00)	(144,58)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	121.391.890.210,93	261.618.534.800,86	140.226.644.589,93	53,60

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2024 sebesar Rp276.618.534.800,86 mengalami kenaikan sebesar Rp155.226.644.589,93 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yaitu sebesar Rp121.391.890.210,93 atau sebesar 56,12 persen. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00, pada tahun sebelumnya tidak ada realisasi, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp261.618.534.800,86

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp561.165.412.054,76 yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pendapatan	Rp	4.129.094.313.771,47
Belanja	Rp	3.829.547.166.517,57
Pembiayaan Netto	Rp	261.618.534.800,86
SiLPA Tahun 2024	Rp	561.165.682.054,76

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka mendukung program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), perlu adanya perencanaan penganggaran yang menggambarkan pendapatan dan belanja dalam periode tahunan. Perencanaan penganggaran dimaksud dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan target yang akan dicapai.

Pelaksanaan APBD dan pencapaian indikator target kinerja dimaksud membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah serta perlu adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi yang efektif antar perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan APBD dimungkinkan adanya perubahan, baik pada asumsi pendapatan ataupun belanja daerah akibat adanya penyesuaian rencana keuangan dan perkembangan yang terjadi.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3.1.1 Target Kinerja Pendapatan dan Perubahannya

Sumber Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai sumber dana pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Berdasarkan klasifikasinya, pendapatan dikelompokkan atas:



- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terinci ke dalam 4 (empat) sub pos anggaran pendapatan dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- Pendapatan Transfer, yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Transfer pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terinci ke dalam sub pos anggaran pendapatan: Pendapatan Hibah, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah target kinerja pendapatan beserta perubahannya pada Tahun Anggaran 2024:

Tabel 3. 1 Anggaran Pendapatan Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2024

Kode.Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
4	PENDAPATAN	4.211.894.855.731,00	4.218.542.591.731,00	6.647.736.000,00	0,16
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	928.680.252.910,00	928.680.252.910,00	0,00	0,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	345.550.000.000,00	345.550.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	49.862.544.920,00	49.862.544.920,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00	7.439.012.400,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.828.695.590,00	525.828.695.590,00	0,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.283.214.602.821,00	3.289.862.338.821,00	6.647.736.000,00	0,20
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.014.727.498.000,00	3.021.375.234.000,00	6.647.736.000,00	0,22
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.694.897.627.000,00	2.694.897.627.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	156.214.937.000,00	156.214.937.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	35.558.056.000,00	35.558.056.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00	1.793.208.947.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	125.885.996.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	584.029.691.000,00	0,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	319.829.871.000,00	326.477.607.000,00	6.647.736.000,00	2,04
4.2.01.05	Dana Desa	319.829.871.000,00	326.477.607.000,00	6.647.736.000,00	2,04
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00	268.487.104.821,00	0,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00	257.405.562.000,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.081.542.821,00	0,00	0,00

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Jember TA 2024 sebelum perubahan sebesar Rp4.211.894.855.731,00 dan setelah perubahan Rp4.218.542.591.731,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.647.736.000,00 atau sebesar 0,16 persen. Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebelum



perubahan sebesar Rp928,680,252,910.00 dan setelah perubahan sebesar Rp928,680,252,910.00 tidak ada kenaikan atau penurunan.

Anggaran Pendapatan Transfer sebelum perubahan sebesar Rp3.283.214.602.821,00 dan setelah perubahan sebesar Rp3.289.862.338.821,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.647.736.000,00 atau sebesar 0,20 persen.

3.1.2 Target Kinerja Belanja dan Perubahannya

Anggaran Belanja merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja, yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja Daerah mengacu pada analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundang– undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Berikut adalah target kinerja belanja beserta perubahannya pada TA 2024:

Dari total Belanja Daerah Kabupaten Jember dalam Perubahan APBD tahun 2024 sebesar Rp4.372.730.733.767,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.647.736.000,00 atau sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp4.366.082.997.767,00 Rincian anggaran belanja Daerah Kabupaten Jember sebelum dan sesudah perubahan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Anggaran Belanja Sebelum dan Sesudah Perubahan APBD TA. 2024

Kode Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.366.082.997.767,00	4.372.730.733.767,00	6.647.736.000,00	0,15
5.1	BELANJA OPERASI	3.432.504.654.706,00	3.440.620.529.517,98	8.115.874.811,98	0,24
5.1.01	Belanja Pegawai	1.597.170.669.748,00	1.602.930.982.759,98	5.760.313.011,98	0,36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.460.989.604,00	1.482.816.551.404,00	2.355.561.800,00	0,16
5.1.05	Belanja Hibah	331.735.392.554,00	331.735.392.554,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00	23.137.602.800,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	379.707.511.752,00	379.707.511.752,00	0,00	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	3.670.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00	97.472.868.423,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00	105.738.332.087,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00	121.715.589.110,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00	49.965.980.989,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00	1.144.741.143,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	25.000.000.000,00	16.884.125.188,02	(8.115.874.811,98)	(48,07)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	16.884.125.188,02	(8.115.874.811,98)	(48,07)
5.4	BELANJA TRANSFER	528.870.831.309,00	535.518.567.309,00	6.647.736.000,00	1,24
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.991.948.492,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	505.878.882.817,00	512.526.618.817,00	6.647.736.000,00	1,30

3.1.3 Target Kinerja Pembiayaan dan Perubahannya

Anggaran Pembiayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD dan sesuai dengan pedoman umum penyusunan serta pelaksanaan APBD, yang secara garis besar dibagi menjadi:

- Penerimaan Pembiayaan
- Pengeluaran Pembiayaan

Dari kedua pos tersebut kondisi umum pembiayaan dalam Perubahan APBD TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Anggaran Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Perubahan TA. 2024

Kode Rek.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
				(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	169.188.142.036,00	169.188.142.036,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	169.188.142.036,00	169.188.142.036,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	154.188.142.036,00	154.188.142.036,00	0,00	0,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah APBD TA 2024 sebesar Rp169.188.142.036,00; pengeluaran pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000,00 serta pembiayaan netto sebesar Rp154.188.142.036,00. Tidak terdapat perubahan anggaran penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan serta pembiayaan netto pada tahun 2024.

3.1.4 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sehubungan dengan berbagai kebijakan keuangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.4.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.218.542.591.731,00 dapat terealisasi sebesar Rp4.129.094.313.771,47 atau sebesar 97,88 persen dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH/(KURANG)
		Rp	Rp		
4	PENDAPATAN	4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	97,88	89.448.277.959,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	928.680.252.910,00	774.166.633.985,47	83,36	154.513.618.924,53
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26	44.026.409.359,00
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79	(297.077.597.363,82)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95	(145.426.931,25)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.828.695.590,00	118.118.461.729,40	22,46	407.710.233.860,60



KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA LEBIH/(KURANG)
		Rp	Rp		
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.289.862.338.821,00	3.354.927.679.786,00	101,98	(65.065.340.965,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.021.375.234.000,00	3.049.537.234.686,00	100,93	(28.162.000.686,00)
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.694.897.627.000,00	2.718.533.172.486,00	100,88	(23.635.545.486,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	191.772.993.000,00	217.238.300.409,00	113,28	(25.465.307.409,00)
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	(39.584.922.706,00)
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	21.700.155.293,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	19.714.529.336,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	326.477.607.000,00	331.004.062.200,00	101,39	(4.526.455.200,00)
4.2.01.05	Dana Desa	326.477.607.000,00	325.303.772.200,00	99,64	1.173.834.800,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	5.700.290.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00	305.390.445.100,00	113,74	(36.903.340.279,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09	(36.267.980.400,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.716.902.700,00	105,73	(635.359.879,00)

3.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.670.331.091,62 dari tahun 2020, Rincian perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 5 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 s.d. 2024

TAHUN	REALISASI (Rp)	PENINGKATAN/ (PENURUNAN) (Rp)
2020	593.175.066.985,65	74.423.359.923,35
2021	659.649.404.423,24	66.474.337.437,59
2022	640.243.830.361,32	19.405.574.061,92
2023	764.496.302.893,85	(124.252.472.532,53)
2024	774.166.633.985,47	(9.670.331.091,62)

Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp774.166.633.985,47 atau sebesar 83,36 persen dari target Anggaran Pendapatan Asli Daerah



sebesar Rp928.680.252.910,00. Realisasi pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar Rp9.670.331.091,62 atau sebesar 1,25 persen.

Tabel 3. 6 Rincian Realisasi dan Target PAD Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.828.695.590,00	118.118.461.729,40	22,46
	Jumlah	928.680.252.910,00	774.166.633.985,47	83,36

3.1.4.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2024 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp3.354.927.679.786,00 atau 101,98 persen dari target Anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp3.289.862.338.821,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp2.718.531.172.486,00 dari target anggaran sebesar Rp2.694.897.627.000,00 atau 100,88 persen, pendapatan Transfer Pemerintah pusat-lainnya yang terealisasi sebesar Rp331.004.062.200,00 dari target anggaran sebesar Rp326.477.607.000,00 atau 101,39 persen, dan pendapatan transfer antar Daerah yang terealisasi sebesar Rp305.390.445.100,00 dari target anggaran sebesar Rp268.487.104.821,00 atau 113,74 persen. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.1	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan	2.694.897.627.000,00	2.718.533.172.486,00	100,88
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	191.772.993.000,00	217.238.300.409,00	113,28
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya	326.477.607.000,00	331.004.062.200,00	101,39
4.2.01.05	Dana Desa	326.477.607.000,00	325.303.772.200,00	99,64
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	5.700.290.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00	305.390.445.100,00	113,74
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.716.902.700,00	105,73
	Jumlah	3.289.862.338.821,00	3.354.927.679.786,00	101,98

Perbandingan antara Anggaran dan realisasi pendapatan setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Per OPD Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan	62.400.000,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	1.000.000.000,00	625.159.200,00	62,52
3	Puskesmas Kencong	1.794.674.541,00	2.386.011.226,86	132,95
4	Puskesmas Cakru	580.184.016,00	1.501.521.427,08	258,80
5	Puskesmas Gumukmas	1.397.652.979,00	2.354.453.575,86	168,46
6	Puskesmas Tembokrejo	882.631.542,00	1.430.055.595,61	162,02
7	Puskesmas Puger	1.913.201.454,00	2.701.361.541,79	141,20
8	Puskesmas Kasiyan	1.312.370.627,00	2.218.389.722,19	169,04
9	Puskesmas Wuluhan	2.641.360.989,00	3.303.520.355,34	125,07
10	Puskesmas Lojejer	1.402.233.364,00	2.270.275.718,91	161,90
11	Puskesmas Ambulu	2.469.051.682,00	3.053.193.668,00	123,66
12	Puskesmas Sabrang	912.474.343,00	1.563.992.104,12	171,40
13	Puskesmas Andongsari	720.042.261,00	1.287.994.011,42	178,88
14	Puskesmas Tempurejo	2.430.802.360,00	3.035.264.878,56	124,87
15	Puskesmas Curahnongko	1.162.024.283,00	1.691.377.331,07	145,55
16	Puskesmas Silo I	1.776.773.043,00	2.322.667.721,53	130,72
17	Puskesmas Silo li	2.149.204.571,00	2.631.208.725,19	122,43
18	Puskesmas Mayang	2.309.806.760,00	2.963.138.179,89	128,29
19	Puskesmas Mumbulsari	3.273.191.237,00	3.692.425.844,24	112,81
20	Puskesmas Jenggawah	1.735.398.642,00	2.713.740.144,81	156,38
21	Puskesmas Kemuningsari	937.134.646,00	1.763.794.658,58	188,21
22	Puskesmas Ajung	2.776.961.936,00	3.830.340.758,73	137,93
23	Puskesmas Karangduren	891.963.143,00	1.675.446.815,98	187,84
24	Puskesmas Rambipuji	1.981.810.758,00	2.533.456.338,40	127,84
25	Puskesmas Balung	1.799.900.440,00	2.064.709.518,70	114,71
26	Puskesmas Nogosari	612.014.391,00	1.247.599.844,92	203,85
27	Puskesmas Umbulsari	1.880.603.725,00	2.559.935.327,93	136,12
28	Puskesmas Paleran	1.091.373.188,00	1.582.221.188,74	144,98
29	Puskesmas Semboro	1.613.601.665,00	2.017.071.000,76	125,00
30	Puskesmas Jombang	1.279.654.847,00	1.948.342.585,82	152,26
31	Puskesmas Sumberbaru	3.337.948.379,00	3.435.693.876,95	102,93
32	Puskesmas Rowotengah	1.525.303.455,00	1.984.725.736,63	130,12
33	Puskesmas Tanggul	2.946.701.332,00	3.117.796.412,80	105,81
34	Puskesmas Klatakan	1.001.657.963,00	1.912.449.753,07	190,93
35	Puskesmas Bangsalsari	3.405.299.355,00	3.748.507.139,95	110,08
36	Puskesmas Sukorejo	1.178.814.120,00	1.939.709.811,92	164,55
37	Puskesmas Panti	3.040.036.818,00	3.246.820.348,58	106,80
38	Puskesmas Sukorambi	1.696.956.129,00	2.267.808.635,13	133,64
39	Puskesmas Arjasa	2.116.482.416,00	2.450.318.048,47	115,77
40	Puskesmas Pakusari	1.990.158.491,00	1.986.385.059,01	99,81
41	Puskesmas Kalisat	4.123.163.377,00	4.332.271.802,46	105,07
42	Puskesmas Ledokombo	3.770.402.483,00	3.769.009.781,74	99,96
43	Puskesmas Sumberjambe	3.339.225.821,00	4.170.235.331,37	124,89



NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
44	Puskesmas Sukowono	3.879.603.205,00	4.317.257.855,14	111,28
45	Puskesmas Jelbuk	1.609.243.504,00	2.323.118.820,59	144,36
46	Puskesmas Kaliwates	1.385.856.658,00	1.881.499.297,59	135,76
47	Puskesmas Mangli	815.543.122,00	1.524.739.212,39	186,96
48	Puskesmas Jemberkidul	882.481.509,00	952.075.082,69	107,89
49	Puskesmas Sumbersari	2.225.542.482,00	2.965.257.348,16	133,24
50	Puskesmas Gladakpakem	690.112.902,00	988.367.273,40	143,22
51	Puskesmas Patrang	2.026.947.518,00	2.376.258.257,94	117,23
52	Puskesmas Banjarsengon	1.402.670.118,00	1.733.576.943,80	123,59
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	79.490.880.000,00	57.197.819.767,44	71,96
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	246.600.000.000,00	214.024.254.104,65	86,79
55	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	42.231.827.000,00	32.312.111.880,09	76,51
56	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	450.350.000,00	450,35
57	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	12.370.500.000,00	1.662.228.335,00	13,44
58	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	3.256.000.000,00	2.519.092.043,00	77,37
59	Satuan Polisi Pamong Praja	2.808.000,00	0,00	0,00
60	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	242.500.000,00	338.040.000,00	139,40
61	Dinas Lingkungan Hidup	230.000.000,00	542.595.000,00	235,91
62	Dinas Perhubungan	21.537.320.160,00	1.824.253.845,00	8,47
63	Dinas Komunikasi Dan Informatika	0,00	0,00	0,00
64	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
65	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	155.000.000,00	507.112.500,00	327,17
66	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.306.362.000,00	2.830.666.500,00	85,61
67	Dinas Perikanan	386.000.000,00	117.201.500,00	30,36
68	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.696.562.760,00	7.719.180.423,00	100,29
70	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	3.323.853.391.221,00	3.374.690.123.225,48	101,53
71	Badan Pendapatan Daerah	381.902.792.000,00	309.966.733.807,00	81,16
	JUMLAH	4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	97,88

3.1.4.2 Target Realisasi Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember Menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp4.372.730.733.767,00 di tahun 2024 dan terealisasi sebesar Rp3.829.547.166.517,57 atau sebesar 14,18 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut:



Tabel 3. 9 Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun 2024	Tahun 2024	(Rp)	%
5	BELANJA DAERAH	4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	(543.183.567.249,43)	(14,18)
5.1	BELANJA OPERASI	3.440.620.529.517,98	3.023.289.882.630,57	(417.330.646.887,41)	(13,80)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	(201.578.732.290,27)	(14,38)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	(184.645.014.486,14)	(14,22)
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	(24.941.373.111,00)	(8,13)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	(6.165.527.000,00)	(36,33)
5.2	BELANJA MODAL	379.707.511.752,00	270.766.304.957,00	(108.941.206.795,00)	(40,23)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	0,00	(3.670.000.000,00)	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00	58.483.245.460,00	(38.989.622.963,00)	(66,67)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00	72.252.822.584,00	(33.485.509.503,00)	(46,34)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00	90.641.872.297,00	(31.073.716.813,00)	(34,28)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00	48.677.747.566,00	(1.288.233.423,00)	(2,65)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00	710.617.050,00	(434.124.093,00)	(61,09)
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	(15.622.368.767,02)	(1.238,14)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	(15.622.368.767,02)	(1.238,14)
5.4	BELANJA TRANSFER	535.518.567.309,00	534.229.222.509,00	(1.289.344.800,00)	(0,24)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.876.438.492,00	(115.510.000,00)	(0,50)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	(1.173.834.800,00)	(0,23)

3.1.4.2.1 Belanja Operasi

Pemerintahan Kabupaten Jember menganggarkan belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp3.440.620.529.517,98 dan terealisasi sebesar Rp3.023.289.882.630,57 atau sebesar 87,87 persen dari total belanja daerah. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	87,42
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	87,55
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	92,48
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	73,35
	Jumlah	3.440.620.529.517,98	3.023.289.882.630,57	87,87

Dari total belanja Operasi Kabupaten Jember, Belanja Pegawai di tahun 2024 memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.401.352.250.469,71 atau sebesar 87,42 persen.



Belanja Barang dan Jasa memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp1.298.171.536.917,86 atau sebesar 87,55 persen. Belanja Hibah memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp306.794.019.443,00 atau 92,48 persen dan Belanja Bantuan Sosial memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp16.972.075.800,00 atau 73,35 persen.

3.1.4.2.2 Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Modal di tahun 2024 sebesar Rp379.707.511.752,00 dan terealisasi sebesar Rp270.766.304.957,00 atau 71,31 persen. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rincian Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00	58.483.245.460,00	60,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00	72.252.822.584,00	68,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00	90.641.872.297,00	74,47
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00	48.677.747.566,00	97,42
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00	710.617.050,00	62,08
	Jumlah	379.707.511.752,00	270.766.304.957,00	71,31

Dari total belanja Modal Kabupaten Jember tahun 2024, Belanja Modal Tanah tidak memberikan kontribusi realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp58.483.245.460,00 atau sebesar 60,00 persen. Belanja Modal Gedung dan Bangunan memberikan kontribusi sebesar Rp72.252.822.584,00 atau sebesar 68,33 persen sedangkan Belanja Belanja Modal Jalan,Jaringan, dan Irigasi memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp90.641.872.297,00 atau sebesar 74,47 persen dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp48.677.747.566,00 atau sebesar 97,42 persen. Dan belanja modal Aset Lainnya memberikan kontribusi sebesar Rp710.617.050,00 atau sebesar 62,08 persen.

3.1.4.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Tidak Terduga tahun 2024 sebesar Rp16.884.125.188,02 dan terealisasi sebesar Rp1.261.756.421,00 atau sebesar 7,47 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tidak Terduga tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Rincian Target dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.3	BELANJA TAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47
	Jumlah	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47

3.1.4.2.4 Belanja Transfer

Pemerintah Kabupaten Jember menganggarkan Belanja Transfer tahun 2024 sebesar Rp535.518.567.309,00 dan terealisasi sebesar Rp534.229.222.509,00 atau sebesar 99,76 persen. Rincian anggaran dan realisasi belanja Transfer tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Rincian Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.876.438.492,00	99,50
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77
	Jumlah	535.518.567.309,00	534.229.222.509,00	99,76

Dari total Belanja Transfer Kabupaten Jember tahun 2024, Belanja Bagi Hasil memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp22.876.438.492,00 atau sebesar 99,50 persen, Belanja Bantuan Keuangan memberikan kontribusi realisasi sebesar Rp511.352.784.017,00 atau sebesar 99,77 persen. Anggaran dan realisasi belanja setiap OPD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2024 dijelaskan dibawah ini :

Tabel 3. 14 Anggaran dan Realisasi Belanja Per OPD Tahun Anggaran 2024

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
	Belanja Operasi & Modal	4.372.730.733.767,00	3.829.547.436.517,57	87,58
1	Dinas Pendidikan	1.418.064.718.066,00	1.281.182.280.001,86	90,35
2	Dinas Kesehatan	448.374.347.641,00	409.956.311.543,00	91,43
3	Puskesmas Kencong	1.794.674.541,00	1.718.839.187,00	95,77
4	Puskesmas Cakru	580.184.016,00	1.091.864.444,00	188,19
5	Puskesmas Gumukmas	1.397.652.979,00	1.120.928.916,00	80,20
6	Puskesmas Tembokrejo	882.631.542,00	1.154.514.410,00	130,80
7	Puskesmas Puger	1.913.201.454,00	2.355.917.821,00	123,14
8	Puskesmas Kasiyan	1.312.370.627,00	1.386.974.638,00	105,68
9	Puskesmas Wuluhan	2.641.360.989,00	2.640.568.446,00	99,97
10	Puskesmas Lojejer	1.402.233.364,00	1.402.221.590,00	100,00
11	Puskesmas Ambulu	2.469.051.682,00	2.408.838.300,00	97,56
12	Puskesmas Sabrang	912.474.343,00	912.314.537,20	99,98
13	Puskesmas Andongsari	720.042.261,00	711.032.746,00	98,75

NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
14	Puskesmas Tempurejo	2.430.802.360,00	2.430.253.078,00	99,98
15	Puskesmas Curahnongko	1.162.024.283,00	1.159.359.783,00	99,77
16	Puskesmas Silo I	1.776.773.043,00	2.065.464.354,00	116,25
17	Puskesmas Silo li	2.149.204.571,00	2.128.427.393,00	99,03
18	Puskesmas Mayang	2.309.806.760,00	2.309.500.776,00	99,99
19	Puskesmas Mumbulsari	3.273.191.237,00	3.056.005.329,00	93,36
20	Puskesmas Jenggawah	1.735.398.642,00	1.884.877.379,00	108,61
21	Puskesmas Kemuningsari	937.134.646,00	887.791.584,00	94,73
22	Puskesmas Ajung	2.776.961.936,00	2.979.173.821,00	107,28
23	Puskesmas Karangduren	891.963.143,00	1.215.573.672,00	136,28
24	Puskesmas Rambipuji	1.981.810.758,00	1.928.508.335,00	97,31
25	Puskesmas Balung	1.799.900.440,00	1.796.417.107,00	99,81
26	Puskesmas Nogosari	612.014.391,00	728.462.813,00	119,03
27	Puskesmas Umbulsari	1.880.603.725,00	2.109.753.852,00	112,18
28	Puskesmas Paleran	1.091.373.188,00	1.279.911.842,00	117,28
29	Puskesmas Semboro	1.613.601.665,00	1.584.985.844,00	98,23
30	Puskesmas Jombang	1.279.654.847,00	1.283.852.746,00	100,33
31	Puskesmas Sumberbaru	3.337.948.379,00	3.017.551.262,00	90,40
32	Puskesmas Rowotengah	1.525.303.455,00	1.596.664.567,00	104,68
33	Puskesmas Tanggul	2.946.701.332,00	2.678.461.524,00	90,90
34	Puskesmas Klatakan	1.001.657.963,00	1.583.103.196,00	158,05
35	Puskesmas Bangsalsari	3.405.299.355,00	3.287.675.728,00	96,55
36	Puskesmas Sukorejo	1.178.814.120,00	1.426.211.473,00	120,99
37	Puskesmas Panti	3.040.036.818,00	2.927.803.245,00	96,31
38	Puskesmas Sukorambi	1.696.956.129,00	1.696.938.473,00	100,00
39	Puskesmas Arjasa	2.116.482.416,00	2.116.305.596,00	99,99
40	Puskesmas Pakusari	1.990.158.491,00	1.725.531.380,00	86,70
41	Puskesmas Kalisat	4.123.163.377,00	3.808.290.703,00	92,36
42	Puskesmas Ledokombo	3.770.402.483,00	3.691.572.859,00	97,91
43	Puskesmas Sumberjambe	3.339.225.821,00	3.480.179.818,00	104,22
44	Puskesmas Sukowono	3.879.603.205,00	3.644.332.541,00	93,94
45	Puskesmas Jelbuk	1.609.243.504,00	1.780.534.746,00	110,64
46	Puskesmas Kaliwates	1.385.856.658,00	1.529.280.817,00	110,35
47	Puskesmas Mangli	815.543.122,00	1.179.433.633,00	144,62
48	Puskesmas Jemberkidul	882.481.509,00	871.567.188,00	98,76
49	Puskesmas Sumbersari	2.225.542.482,00	2.223.788.690,00	99,92
50	Puskesmas Gladapakem	690.112.902,00	633.450.090,00	91,79
51	Puskesmas Patrang	2.026.947.518,00	1.967.862.629,00	97,09
52	Puskesmas Banjarsengon	1.402.670.118,00	1.240.177.334,00	88,42
53	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	79.490.880.000,00	222.291.985.703,82	279,64
54	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	246.600.000.000,00	61.484.732.663,01	24,93
55	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	42.231.827.000,00	31.552.787.774,00	74,71
56	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	179.741.811.043,00	143.344.619.096,00	79,75



NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
57	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	204.044.633.914,00	181.798.675.643,00	89,10
58	Satuan Polisi Pamong Praja	34.874.293.342,00	24.990.300.559,00	71,66
59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.969.575.271,00	10.591.911.877,00	81,67
60	Dinas Sosial	57.923.611.114,00	50.694.073.729,00	87,52
61	Dinas Tenaga Kerja	15.090.048.490,00	11.829.366.687,00	78,39
62	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	31.873.363.102,00	29.731.875.732,00	93,28
63	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	20.085.023.634,00	15.475.678.642,00	77,05
64	Dinas Lingkungan Hidup	34.256.351.894,00	33.173.071.334,00	96,84
65	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9.834.222.823,00	8.594.655.924,00	87,40
66	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.673.409.467,00	13.283.391.809,00	84,75
67	Dinas Perhubungan	26.704.551.555,00	23.963.479.390,00	89,74
68	Dinas Komunikasi Dan Informatika	24.308.721.290,00	20.779.470.515,00	85,48
69	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	10.124.418.541,00	8.163.384.097,00	80,63
70	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.960.136.593,00	4.696.237.868,00	67,47
71	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	29.145.295.285,00	21.688.016.490,68	74,41
72	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	18.481.950.593,00	17.390.211.170,00	94,09
73	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.052.650.738,00	3.877.466.734,00	76,74
74	Dinas Perikanan	9.866.537.304,00	8.477.267.467,00	85,92
75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	56.541.753.530,00	27.368.111.366,00	48,40
76	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	23.812.589.231,00	20.309.918.924,00	85,29
77	Sekretariat Daerah	136.509.990.383,00	96.029.258.082,00	70,35
78	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	76.527.467.359,00	69.401.562.916,00	90,69
79	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	17.886.730.334,00	12.673.256.250,00	70,85
80	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah – Skpd	631.189.225.638,00	568.924.486.691,00	90,14
81	Badan Pendapatan Daerah	38.718.698.409,00	26.878.750.551,00	69,42
82	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	25.152.695.317,00	16.138.819.593,00	64,16
83	Inspektorat	15.418.958.963,00	12.302.854.004,00	79,79
84	Kecamatan Ajung	3.715.768.171,00	3.451.465.475,00	92,89
85	Kecamatan Kalisat	4.416.692.224,00	3.660.926.754,00	82,89
86	Kecamatan Kaliwates	15.479.672.415,00	13.826.057.442,00	89,32
87	Kecamatan Kencong	3.953.466.898,00	3.247.281.713,00	82,14
88	Kecamatan Ledokombo	3.789.518.571,00	3.027.763.149,00	79,90
89	Kecamatan Mayang	3.717.062.042,00	3.183.319.459,00	85,64
90	Kecamatan Mumbulsari	3.583.483.116,00	3.254.598.050,00	90,82
91	Kecamatan Pakusari	3.424.912.430,00	3.064.590.092,00	89,48
92	Kecamatan Patrang	16.880.658.360,00	14.738.401.303,00	87,31
93	Kecamatan Puger	4.430.342.428,00	3.771.427.684,00	85,13
94	Kecamatan Ambulu	4.492.070.793,00	4.124.398.349,00	91,82



NO	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
95	Kecamatan Rambipuji	4.413.412.263,00	4.195.113.034,00	95,05
96	Kecamatan Semboro	3.894.507.781,00	3.545.596.394,00	91,04
97	Kecamatan Silo	4.466.986.831,00	3.870.512.927,00	86,65
98	Kecamatan Sukorambi	3.466.940.109,00	3.398.342.162,00	98,02
99	Kecamatan Sukowono	4.375.561.108,00	3.423.634.019,00	78,24
100	Kecamatan Sumberbaru	4.202.372.727,00	3.662.927.592,00	87,16
101	Kecamatan Sumberjambe	3.837.355.555,00	3.476.898.275,00	90,61
102	Kecamatan Sumpersari	16.260.169.994,00	12.721.622.184,00	78,24
103	Kecamatan Tanggul	4.679.041.635,00	3.960.670.095,00	84,65
104	Kecamatan Tempurejo	3.702.309.151,00	3.193.417.168,00	86,25
105	Kecamatan Arjasa	3.693.830.405,00	3.056.387.022,00	82,74
106	Kecamatan Umbulsari	4.605.947.113,00	3.771.374.016,00	81,88
107	Kecamatan Wuluhan	4.215.052.872,00	3.877.178.154,00	91,98
108	Kecamatan Panti	4.313.214.531,00	3.830.902.521,00	88,82
109	Kecamatan Balung	4.024.853.588,00	3.579.151.669,00	88,93
110	Kecamatan Bangsalsari	4.298.119.422,00	3.902.019.559,00	90,78
111	Kecamatan Gumukmas	4.159.923.854,00	3.650.618.618,00	87,76
112	Kecamatan Jelbuk	3.714.368.474,00	2.977.046.747,00	80,15
113	Kecamatan Jenggawah	3.961.714.744,00	3.497.657.988,00	88,29
114	Kecamatan Jombang	3.606.955.970,00	3.245.075.566,00	89,97
115	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	113.305.711.738,00	104.483.468.276,00	92,21
	Jumlah	4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	87,58

3.1.4.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Rincian Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.188.142.036,00	276.596.479.800,86	163,50
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	22.055.000,00	~
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pembiayaan NETTO	154.188.142.036,00	261.618.534.800,86	154,63

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai setiap pos pendapatan dan belanja daerah. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2024 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

- a. Perencanaan yang belum optimal sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- b. Pada pelaksanaan anggaran pendapatan terdapat kendala yang mempengaruhi realisasi pendapatan belum optimal, antara lain Peraturan Daerah sebagai dasar penetapan tarif masih dalam proses, sistem aplikasi dalam proses perbaikan serta gagal kontrak hasil pemanfaatan barang milik daerah;

Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang antara lain:

- 1) Optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta sosialisasi teknis secara berkala serta melaksanakan tender ulang terkait hasil pemanfaatan barang milik daerah;
- 2) Menerapkan program prioritas dalam pengalokasian anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah, serta melakukan antisipasi perubahan-perubahan kondisional yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan
- 3) Menerapkan evaluasi berkala terhadap capaian program dan kegiatan sesuai dengan tenggat waktu yang telah direncanakan;
- 4) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya maupun perubahan-perubahan kondisional pada tahun berjalan, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih efektif dan efisien.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2024 menggunakan kebijakan akuntansi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Atas dasar peraturan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Jember, dalam Tahun 2014 telah menyusun Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember Berbasis Akrua beserta perubahannya dan Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

Perubahan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah serta perubahan sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah baik perencanaan dan penganggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian termasuk kebijakan akuntansi pemerintah daerah serta sistem akuntansinya. Pemerintah Kabupaten Jember telah menyusun draft kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi sesuai regulasi yang baru namun mengingat dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan serta akuntansi dan pelaporan aplikasi SIPD pada tahun 2023 baru dalam tahap adaptasi, maka proses bisnis masih banyak ditemukan kendala.

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Jember.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dimaksud terdiri dari 115 OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2024 dalam tabel.

Tabel 4. 1 Daftar Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
1	Dinas Pendidikan	58	Kecamatan Kencong
2	Dinas Kesehatan	59	Kecamatan Gumukmas
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Sumber Daya Air	60	Kecamatan Umbulsari
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman & Cipta Karya	61	Kecamatan Puger
5	Satuan Polisi Pamong Praja	62	Kecamatan Jombang

NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
6	Dinas Sosial	63	Kecamatan Balung
7	Dinas Tenaga Kerja	64	Kecamatan Wuluhan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bencana	65	Kecamatan Ambulu
9	Dinas Lingkungan Hidup	66	Puskesmas Kencong
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	67	Puskesmas Cakru
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	68	Puskesmas Gumukmas
12	Dinas Perhubungan	69	Puskesmas Tembokrejo
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	70	Puskesmas Puger
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	71	Puskesmas Kasiyan
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72	Puskesmas Wuluhan
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	73	Puskesmas Lojejer
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74	Puskesmas Ambulu
18	Dinas Perikanan	75	Puskesmas Sabrang
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	76	Puskesmas Andongsari
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	77	Puskesmas Tempurejo
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	78	Puskesmas Curahnongko
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	79	Puskesmas Silo I
23	Sekretariat Daerah	80	Puskesmas Silo II
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	81	Puskesmas Mayang
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82	Puskesmas Mumbulsari
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83	Puskesmas Jenggawah
27	Inspektorat	84	Puskesmas Kemuningsari
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	85	Puskesmas Ajung
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	86	Puskesmas Rambipuji
30	Badan Pendapatan Daerah	87	Puskesmas Nogosari
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	88	Puskesmas Balung
32	RSD dr. Soebandi	89	Puskesmas Karangduren
33	RSD Balung	90	Puskesmas Umbulsari
34	RSD Kalisat	91	Puskesmas Paleran
35	Kecamatan Kaliwates	92	Puskesmas Semboro
36	Kecamatan Patrang	93	Puskesmas Jombang
37	Kecamatan Sumber Sari	94	Puskesmas Sumberbaru
38	Kecamatan Arjasa	95	Puskesmas Rowotengah
39	Kecamatan Jelbuk	96	Puskesmas Tanggul
40	Kecamatan Pakusari	97	Puskesmas Klatakan
41	Kecamatan Sukowono	98	Puskesmas Bangsalsari
42	Kecamatan Kalisat	99	Puskesmas Sukorejo
43	Kecamatan Ledokombo	100	Puskesmas Panti
44	Kecamatan Sumberjambe	101	Puskesmas Sukorambi
45	Kecamatan Mayang	102	Puskesmas Arjasa
46	Kecamatan Silo	103	Puskesmas Pakusari
47	Kecamatan Mumbulsari	104	Puskesmas Kalisat
48	Kecamatan Tempurejo	105	Puskesmas Ledokombo



NO	NAMA OPD	NO	NAMA OPD
49	Kecamatan Rambipuji	106	Puskesmas Sumberjambe
50	Kecamatan Jenggawah	107	Puskesmas Sukowono
51	Kecamatan Panti	108	Puskesmas Jelbuk
52	Kecamatan Sukorambi	109	Puskesmas Kaliwates
53	Kecamatan Ajung	110	Puskesmas Mangli
54	Kecamatan Tanggul	111	Puskesmas Jember Kidul
55	Kecamatan Semboro	112	Puskesmas Summersari
56	Kecamatan Sumberbaru	113	Puskesmas Gladak Pakem
57	Kecamatan Bangsalsari	114	Puskesmas Patrang
		115	Puskesmas Banjarsengon

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Di Kabupaten Jember bertindak sebagai entitas pelaporan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Jember sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain BPKAD, terdapat 53 (lima puluh tiga) unit kerja sebagai entitas pelaporan yaitu Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas, karena berstatus sebagai PPK BLUD. PPK BLUD sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian 5 (lima) jenis laporan keuangan, yaitu LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK. digabungkan dengan laporan entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, yaitu pada PPKD. Hal ini didasarkan pada ketentuan paragraf 116 sampai dengan 122, PSAP No. 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLUD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Jember menyajikan saldo Akun-Akun. Adapun dampak kumulatif dari



perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember adalah:

- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis;
- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi atau sejumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang;
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember

4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah; Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Kabupaten Jember atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Atas penerimaan pendapatan oleh Bendahara Penerimaan pada akhir periode pelaporan dan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran Pendapatan-LO yang menggunakan *Self Assesment* dicatat sebesar nilai yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan. Pendapatan-LO yang dipungut melalui sistem *Official Assesment* dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Ketetapan atau dokumen yang dipersamakan. Pendapatan-LO non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.2.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran

dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja LS di SKPD dan PPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD maupun PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja UP/GU/TU pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD yang selanjutnya disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah ataupun belanja yang pembayarannya tidak melalui kas umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Contohnya adalah belanja BLUD, BOS, ataupun JKN belanja diakui berdasarkan dan sesuai dengan tanggal Surat Pengesahan Belanja (SP2B).

Belanja disajikan dalam LRA dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

4.2.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban-LO diakui pada saat timbulnya kewajiban dan atau terjadinya konsumsi aset dan atau pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya adalah tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
- 2) Terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

4.2.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam perda tentang pembentukan dana cadangan dengan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4.2.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas meliputi investasi yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari

3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum (BLUD), Dana Kapitasi FTKP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan Dana BOS. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah memiliki saldo uang elektronik ataupun dalam bentuk lain yang dapat dipersamakan sebagai kas yang dapat digunakan untuk pembayaran pada satu atau beberapa produk/jasa, sepanjang masih memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, maka aset dimaksud dapat juga dikategorikan sebagai setara kas.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Dana Kapitasi FKTP dan Dana BOS. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Transaksi atas rekening kas dan setara kas diakui pada saat terjadinya transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yaitu berupa:

- a. Penerimaan uang tunai, cek, atau giro bilyet;
- b. Penerbitan SP2D/SP2B;
- c. Diterimanya nota debet/nota kredit dari bank atas mutasi yang terjadi pada rekening bank;
- d. Pembayaran/penyetoran;
- e. berupa uang tunai, cek, giro bilyet;
- f. Pencairan dan penempatan deposito.

4.2.7 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pengukuran investasi berbeda-beda menurut jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga investasi, komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila

tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya. Sementara investasi dalam bentuk non saham, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan, dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Investasi Jangka Panjang.

1) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

- a. Investasi jenis ini yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya.
- b. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Metode penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, namun tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah (tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham) akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

- 1) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
- 2) Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah bersifat nonpermanen-dana bergulir. Pada saat perolehan, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) sebagaimana diterapkan dalam menghitung NRV piutang. Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika SKPD pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih, dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. kepemilikan kurang dari 20 persen menggunakan metode biaya;
- b. kepemilikan 20 persen sampai 50 persen, atau kepemilikan kurang dari 20 persen tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. kepemilikan lebih dari 50 persen menggunakan metode ekuitas;
- d. kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Perolehan investasi jangka panjang dicatat saat BUD melakukan pencairan SP2D-LS sebagai dasar pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat penambahan pada akun investasi jangka panjang dan pengurangan saldo kas di kas daerah pada neraca serta mencatat pengeluaran pembiayaan pada laporan realisasi anggaran.

4.2.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; Pengakuan piutang dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi;



- Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan piutang lain-lain;
- Penyajian piutang berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
- Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember;
- Kebijakan penggolongan kualitas piutang menurut jenis/obyek piutang, umur dan tingkat kolektibilitasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Penggolongan Kualitas Piutang

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Thn)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	>2 s.d 3	>3 s.d 5	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2.	Piutang Retribusi	Lancar	K L	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	Macet	Macet
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	Macet	Macet
5	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	Macet	Macet
6	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	Macet	Macet
7	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
8	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	Macet	Macet
9	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	Macet	Macet
10	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	Macet	Macet
11	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	Macet	Macet

- Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:
 - Kualitas Lancar sebesar 0,5 persen (nol koma lima per seratus);
 - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 persen (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas Diragukan sebesar 50 persen (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - Kualitas Macet 100 persen (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Pemberhentian Pengakuan Piutang dilakukan karena sebab sebagai berikut:
 - 1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/Lunas.

2) Pemberhentian pengakuan piutang karena adanya penghapusan.

Sesuai dengan Peraturan, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: Penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih, sementara penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

3) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan, maka penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

4) Penerimaan kembali piutang yang telah dihapustagihkan

Suatu piutang yang telah dihapustagihkan dan ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut baik yang telah dilakukan penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Penyajian piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

4.2.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

Persediaan, merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah. Contoh barang habis pakai (alat tulis kantor), barang tak habis pakai (komponen peralatan) dan sebagainya;
- Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, contoh bahan baku pembuatan alat pertanian dan sebagainya;
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual. Contoh: alat-alat pertanian setengah jadi;
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh: hewan, bibit tanaman dan sebagainya; Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar;

Khusus untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di Rumah Sakit Daerah dan Dinas Kesehatan, pencatatan dengan metode perpetual, yaitu dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update;

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.



4.2.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya, sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat;

- Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- Nilai rupiah pembelian barang atau pengeluaran untuk pembelian barang baru tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut dicatat sebagai beban dan diadministrasikan secara ekstrakomtabel. Penatausahaan atas aset-aset tersebut diperlakukan seperti persediaan/aset lainnya dengan justifikasi non asset. Untuk aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehan dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Komponen biaya aset tetap merupakan biaya perolehan suatu aset tetap yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat distribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai; Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi sesuai yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan/rehab, atau restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sesuai kebijakan akuntansi. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya

pemeliharaannya tidak dikapitalisasi dengan pertimbangan tidak menambah masa manfaat dan tidak menambah produktivitas serta biaya pemeliharaan masih dibawah nilai kapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung untuk aset konstruksi dan bangunan adalah:

a. Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual atau jenis konstruksi tertentu yang dilaksanakan secara swakelola.

b. Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

c. Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	1		ALAT BESAR	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	10
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		ALAT PERTANIAN	

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	10
1	3	2	7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	5
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	4
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	15
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	15
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	10
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	3	Alat Sar	4
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	4
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	4
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	4
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	3	3	1		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		MONUMEN	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	20
1	3	3	4		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1	3	4	1		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		BANGUNAN AIR	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		INSTALASI	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	4		JARINGAN	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	
1	3	5	2		BARANG BERCORAK/KESENIAN/KEBUDAYAAN/ OLAHRAGA	
1	3	5	2	1	Alat Musik	
					Alat Musik Modern/Band	4

- Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut;
- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset, dengan nilai perolehannya, diikuti akumulasi penyusutan, sehingga diketahui nilai buku aset tetap;
- Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
- Perhitungan Penyusutan Aset Tetap yang Diperoleh Tengah Tahun
Aset tetap dapat diperoleh pada waktu tertentu di sepanjang tahun, awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh pada 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- Penyusutan atas Aset secara Berkelompok
Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki

persamaan atribut misalnya tahun perolehan yang sama, masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.

8. Penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Apabila terdapat rehab/ penambahan kapitalisasi atas aset yang nilai perolehan aset induknya tidak diketahui atau bernilai Rp0,00 maka penambahan masa manfaat atas aset tersebut diakui sebesar 100 persen.

4.2.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan; Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran; Suatu aset berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
- Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Pencatatan atas penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (Konstruksi Dalam Pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f. Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- g. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - Secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersama biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - Biaya lain bersangkutan;

4.2.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah dan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. Pembentukan dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan melalui proses pencairan SP2D-LS sebesar nilai nominal. Pembentukan dana cadangan diperlakukan sebagai mutasi tambah atas saldo dana cadangan yang ada pada neraca. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan, misalnya berupa jasa giro atau bunga, diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan dana cadangan tersebut dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LRA sebesar nilai nominal.

4.2.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset

lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan <i>Frenchise</i>
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran khusus sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/Bupati/Wakil Bupati/Pihak lain. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah atau Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau

hak usaha yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- 1) Sewa
 - 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
 - 3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)
 - 4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
- c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) Paten, Hak Cipta, Merek Dagang dan Franchise
 - 2) Software
 - 3) Lisensi
 - 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - 5) Aset Tak Berwujud Lainnya
- d. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan, jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut;

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Perhitungan amortisasi aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset tak berwujud atau sesuai masa aktif aset tak berwujud berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendasarinya. Apabila masa manfaat

aset tetap tak berwujud sulit diestimasi, perhitungan masa manfaat amortisasi ditetapkan selama 5 tahun.

e. Aset Lain-Lain

Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah atau tidak lagi memenuhi syarat diakui sebagai aset, maka direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4.2.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dapat dibedakan menjadi:

a. Kewajiban Jangka Pendek, yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2) Utang Bunga
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 4) Pendapatan Diterima dimuka
- 5) Utang Belanja
- 6) Utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan / potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode pelaporan.

- 2) Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya dinilai sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Pendapatan Diterima Dimuka dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal pelaporan. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- 5) Utang Belanja terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa akan tetapi belum dilakukan pembayaran atas perolehan barang atau jasa tersebut. Apabila rekanan menyediakan barang/jasa sesuai kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, antara lain: biaya yang masih harus dibayar per tanggal laporan, penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain. Terkait dengan utang transfer, diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah. Sedangkan pengakuan setiap jenis kewajiban.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- Bunga pinjaman yang terutang ada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman.

4.2.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Akun ini terdiri dari:

a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah /dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, Aset Tetap, dan lain- lain.

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit-LRA.

c. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

Pengungkapan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang- kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan
- Informasi penting lainnya.

4.2.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yaitu yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan belum diterbitkan serta yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

a) Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, namun laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Terdapat beberapa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan laporan keuangan sudah diterbitkan, antara lain:

(1) Koreksi kesalahan belanja

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang menambah posisi kas, maka dilakukan koreksi dengan menambah saldo kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(b) Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan koreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.

(2) Koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas, baik yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(3) Koreksi kesalahan beban

(a) Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas serta tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah- LO.

- (b) Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - (4) Koreksi kesalahan pendapatan-LRA
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
 - (5) Koreksi kesalahan pendapatan-LO
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - (6) Koreksi kesalahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.
 - (7) Koreksi kesalahan kewajiban
Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 3) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.2.17 Kebijakan Akuntansi terkait Penerimaan dan Penggunaan Dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Dalam pelaksanaannya tidak semua pendapatan dan pengeluaran melalui mekanisme Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Terdapat beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran yang dapat diterima dan dikeluarkan secara langsung oleh entitas akuntansi maupun entitas yang berpola BLUD. Hal ini selaras dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dalam IPSAP 02 dijelaskan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) termasuk dalam pengertian tersebut adalah pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat

entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diakui sebagai pendapatan daerah dan juga belanja daerah.

Di Kabupaten Jember terdapat beberapa pos Laporan keuangan yang terdampak dari penerapan IPSAP 02 serta berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut diantaranya:

- (1) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- (2) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang pendapatannya diakui sebagai Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- (3) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
- (4) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana peran serta masyarakat oleh entitas sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah;
- (5) Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana blockgrant dari Pemerintah Pusat untuk sekolah negeri yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah;

Pengakuan penerimaan dan pengeluaran dana sumbangan dari masyarakat yang dikelola oleh sub entitas akuntansi yang pendapatannya diakui sebagai Lain-lain pendapatan daerah yang sah-Pendapatan Hibah. Contoh: dana sumbangan dari masyarakat yang dikelola oleh Satuan Tugas Penanganan Bencana.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan dalam pengelolaan instansi pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup LRA meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Pada penjelasan tentang LRA berikut ini, memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses penganggaran penatausahaan dan pelaporan sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.1.1 PENDAPATAN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	3.957.426.651.267,85

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2024, Anggaran pendapatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.218.542.591.731,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.129.094.313.771,47 atau sebesar 97,88 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp171.667.662.503,62 atau sebesar 4,34 persen.

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing kelompok pendapatan pada tahun 2024 dan 2023 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

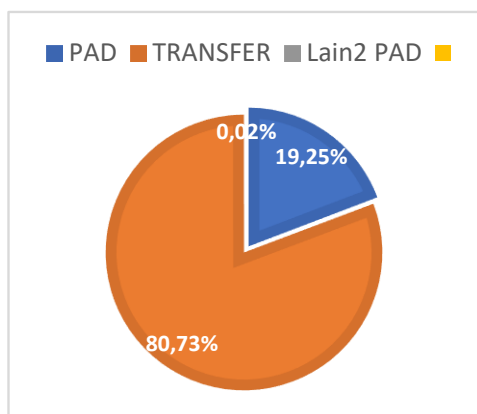


Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Kelompok Pendapatan Pada Tahun 2024 Dan 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Pendapatan asli Daerah	928.680.252.910,00	774.166.633.985,47	83,36	764.496.302.893,85
2.	Pendapatan Transfer	3.289.862.338.821,00	3.354.927.679.786,00	101,98	3.191.994.244.040,00
3.	Lain-lain Pendapatan- yang Sah	0,00	0,00	0,00	936.104.334,00
	TOTAL	4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	97,88	3.957.426.651.267,85

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp162.933.435.746,00 atau sebesar 5,10 persen. Jika dibanding capaian realisasi Tahun 2023 yakni dari Rp3.191.994.244.040,00 menjadi Rp3.354.927.679.786,00, kenaikan dikarenakan pada Tahun 2023, Kabupaten Jember mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Komposisi pendapatan daerah Tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:



- PAD : 19,32 persen
- TRANSFER : 80,66 persen
- Lain-lain PAD : 0,02 persen

Berdasarkan Komposisi Pendapatan diatas dapat diketahui bahwa porsi terbesar pada Pendapatan Transfer, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki ketergantungan terhadap pendanaan Pemerintah Pusat.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp774.166.633.985,47 atau 83,36 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp928.680.252.910,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.670.331.091,62 atau sebesar 1,26 persen jika dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp764.496.302.893,85. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan asli daerah tahun 2024:



**Tabel Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Jenis Rekening Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2024**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26	288.151.785.388,00
2.	Retribusi Daerah	49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79	27.374.994.636,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95	7.189.012.393,75
4.	Lain-lain PAD yang Sah	525.828.695.590,00	118.118.461.729,40	22,46	441.780.510.476,10
	TOTAL	928.680.252.910,00	774.166.633.985,47	83,36	764.496.302.893,85

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26	288.151.785.388,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp301.523.590.641,00 atau 87,26 persen dari Anggaran sebesar Rp345.550.000.000,00. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA.2024, mengalami kenaikan sebesar Rp13.371.805.253,00 atau 4,64 persen dibanding realisasi TA.2023 sebesar Rp288.151.785.388,00.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Bapenda terdiri atas:

1. Pajak Hotel

Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel. Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

2. Pajak Restoran

Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar



pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 persen. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

3. Pajak Hiburan

Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

Tontonan Film sebesar 10 persen;

- ✓ Pagelaran kesenian, music, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, bina raga sebesar 10 persen;
- ✓ Kesenian rakyat sebesar 5 persen;
- ✓ Pameran sebesar 10 persen;
- ✓ Diskotik, karaoke, dan klub malam sebesar 25 persen;
- ✓ Sirkus, acrobat, dan sulap sebesar 10 persen;
- ✓ Permainan Bilyard, golf, bowling sebesar 10 persen;
- ✓ Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10 persen;
- ✓ Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran sebesar 10 persen;
- ✓ Pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidentil sebesar 10 persen.

Sistem pemungutannya menggunakan *self assessment* dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

4. Pajak Reklame

Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah NSR (Nilai Sewa Reklame).

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 persen dimana:

- ✓ Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25 persen;

- ✓ Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15m pertama, besarnya NSR ditambah 20 persen.

Sistem pemungutannya menggunakan Official Assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

5. Pajak Penerangan Jalan.

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subyek pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut

- ✓ Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri;
- ✓ pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10 persen;
- ✓ Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3 persen;
- ✓ Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5 persen.

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

6. Pajak Parkir

Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 persen untuk tarif pajak parkir yang cuma-cuma sebesar 10 persen.

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana system pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

7. Pajak Air Tanah

Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan

air tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20 persen. Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

8. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kelola Bapenda oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan batuan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF	
1.	Asbes	3 persen	(Tiga Persen)
2.	Batu Tulis	2 persen	(Dua Persen)
3.	Batu Setengah Permata	10 persen	(Sepuluh Persen)
4.	Batu Kapur	5 persen	(Lima Persen)
5.	Batu Apung	5 persen	(Lima Persen)
6.	Batu Permata	10 persen	(Sepuluh Persen)
7.	Bentonit	4 persen	(Empat Persen)
8.	Dolomit	2 persen	(Dua Persen)
9.	Feldspar	5 persen	(Lima Persen)
10.	Garam Batu (Halite)	7 persen	(Tujuh Persen)
11.	Grafit	7 persen	(Tujuh Persen)
12.	Granit/Andesit		
	-Batu Pondasi	4 persen	(Empat Persen)
	-Batu Piring	4 persen	(Empat Persen)
13.	Gips	5 persen	(Lima Persen)
14.	Kalsit	2 persen	(Dua Persen)
15.	Kaolin	5 persen	(Lima Persen)
16.	Leusit	5 persen	(Lima Persen)
17.	Magnesit	5 persen	(Lima Persen)
18.	Mika	2 persen	(Dua Persen)
19.	Marmer	2 persen	(Dua Persen)
20.	Nitrat	4 persen	(Empat Persen)



NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	TARIF	
21.	Opsiden	7 persen	(Tujuh Persen)
22.	Oker	6 persen	(Enam Persen)
23.	Pasir	4 persen	(Empat Persen)
24.	Kerikil	2 persen	(Dua Persen)
25.	Pasir Kuarsa	4 persen	(Empat Persen)
26.	Perlit	7 persen	(Tujuh Persen)
27.	Phospat	5 persen	(Lima Persen)
28.	Talk	2 persen	(Dua Persen)
29.	Tanah Serap (Fullers Earth)	4 persen	(Empat Persen)
30.	Tanah Diatome	3 persen	(Tiga Persen)
31.	Tanah Liat	4 persen	(Empat Persen)
32.	Tawas (alun)	4 persen	(Empat Persen)
33.	Tras	5 persen	(Lima Persen)
34.	Yarosif	5 persen	(Lima Persen)
35.	Zeolit	4 persen	(Empat Persen)
36.	Phiropilit	4 persen	(Empat Persen)
37.	Onyx	5 persen	(Lima Persen)
38.	Kayu Kersik	4 persen	(Empat Persen)
39.	Napal/Pedel	2 persen	(Dua Persen)

Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP (Nilai Jual Obyek pajak). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,110 persen per tahun, untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,205 persen per tahun. Batas minimal pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sistem pemungutannya menggunakan Official Assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.

10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Subyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah NPOP (Nilai Perolehan Obyek Pajak). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 persen (Lima persen). Sistem pemungutannya menggunakan self assessment dimana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

Tabel 5. 2 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.012.445.508,00	85,89	6.792.254.303,00
2	Pajak Restoran	26.200.000.000,00	36.300.274.330,00	138,55	29.832.324.497,00
3	Pajak Hiburan	4.000.000.000,00	4.127.555.206,00	103,19	3.271.913.540,00
4	Pajak Reklame	10.350.000.000,00	6.506.661.392,00	62,87	5.498.514.081,00
5	Pajak Penerangan Jalan	95.000.000.000,00	105.752.728.305,00	111,32	97.719.447.053,00
6	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.562.187.841,00	78,11	2.134.794.328,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	944.894.695,00	94,49	805.667.522,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.000.000.000,00	7.197.756.541,00	35,99	9.017.713.199,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	80.000.000.000,00	54.657.531.371,00	68,32	57.750.331.276,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,00	78.461.555.452,00	78,46	75.328.825.589,00
	TOTAL	345.550.000.000,00	301.523.590.641,00	87,26	288.151.785.388,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79	27.374.994.636,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp346.940.142.283,82 atau 695,79 persen dari anggaran adalah sebesar Rp49.862.544.920,00. Realisasi Restribusi Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp319.565.147.647,82 atau 1.167,36 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp27.374.994.636,00. Kenaikan signifikan Pendapatan



Retribusi tersebut sebagai akibat Reklasifikasi dari Lain-lain PAD - Pendapatan BLUD ke Pendapatan Retribusi Daerah sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	29.964.610.960,00	337.996.781.605,82	1.127,99	21.726.476.775,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.626.485.960,00	4.941.418.795,00	106,81	3.797.631.048,00
3	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	15.271.448.000,00	4.001.941.883,00	26,21	1.850.886.813,00
	TOTAL	49.862.544.920,00	346.940.142.283,82	695,79	27.374.994.636,00

1. Retribusi Jasa Umum

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan. Obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Jasa Umum Tarif Retribusi Jasa Umum terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retibusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan /kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; Subyek Retribusi Persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.; Wajib Retibusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan kebersihan; Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



✓ **Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan**

Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; Subyek Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan; Wajib Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi; Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah dari sumbernya/lokasi pembuangan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ **Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman**

Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Obyek Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat; Subyek Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten; Wajib Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi; Tarif Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman dan Pengabuan mayat terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ **Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum secara berlangganan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum secara berlangganan adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum secara berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum secara berlangganan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum secara berlangganan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ **Retribusi Pelayanan Pasar**

Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Obyek Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang. Subyek pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/serhana yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retibusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tarif Retribusi Pelayanan Pasar terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji. Subyek Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib Retibusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

✓ **Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran**

Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran yang dikelola oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Obyek retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum pada tahun 2024 adalah sebesar Rp29.964.610.960,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp337.996.781.605,82 atau sebesar

1.127,99 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp316.270.304.830,82 atau sebesar 1.455,69 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa umum tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000,00	327.539.366.754,82	32.753,94	344.493.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	362.632.640,00	951.213.500,00	262,31	407.953.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.000.000,00	0,00	0,00	7.460.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.872.582.600,00	1.708.312.000,00	8,60	10.611.905.010,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.724.986.120,00	6.886.270.923,00	102,40	6.529.600.415,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.516.017.600,00	16.616.200,00	1,10	1.952.703.295,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.808.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00
8	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	477.584.000,00	6.540.000,00	1,37	349.474.000,00
9	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00
10	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	888.462.228,00	0,00	1.509.192.555,00
TOTAL		29.964.610.960,00	337.996.781.605,82	1.127,99	21.726.476.775,00

2. Retribusi Jasa Usaha

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten antara lain meliputi:

- Pemakaian Tanah Pengairan yang dikelola oleh DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pemakaian Tanah Ruang Milik Jalan yang dikelola oleh DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- Pemakaian Bangunan/Gedung Balai Serba Guna yang dikelola oleh Bag. Umum Setkab;
- Pemakaian Tanah Eks Bengkok yang dikelola oleh BPKA.
- Sewa Rumah Dinas Karyawan Pemda yang dikelola oleh BPKA.
- Sewa Rumah Dinas Kepala Puskesmas/Tenaga Medis yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- Sewa Rumah Dinas Camat, Dishutbun dan Diperta yang dikelola oleh Bapenda.
- Sewa Rumah Dinas Guru yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.

- Sewa GOR, Lap Tenis PKPSO dan Stadion Se-Kab. Jember yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

Subyek Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai Kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten. Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Retribusi Kios Bandara.

Retribusi Kios Bandara yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Kios Bandara adalah penyediaan fasilitas kios yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Subyek Retribusi Kios Bandara adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas di kios yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Kios Bandara adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Kios Bandara terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan yang dikelola oleh Disperindag. Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai fasilitas di pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4) Retribusi Terminal

Retribusi Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum. Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas yang disediakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Terminal adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Terminal terdapat pada Perda Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Disperindag. Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan Bagian Umum Setkab Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah propinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga dari pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8) Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, dan Disperindag. Obyek Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. Subyek Retribusi Penyediaan dan penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

9) Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Kabupaten Subyek Retribusi Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau menikmati/memakai fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.626.485.960,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.941.418.795,00 atau sebesar 106,81 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.143.787.747,00 atau sebesar 30,12 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 5 Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	323.932.800,00	690.229.295,00	213,08	81.396.045,00

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3	Retribusi Terminal	43.887.960,00	42.180.000,00	96,11	40.252.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	527.083.200,00	600.753.000,00	113,98	515.484.501,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.109.160.000,00	610.050.000,00	55,00	653.668.001,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	157.500.000,00	241.830.000,00	153,54	168.690.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.149.922.000,00	2.506.695.000,00	116,59	2.065.540.501,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	315.000.000,00	249.681.500,00	79,26	270.000.000,00
TOTAL		4.626.485.960,00	4.941.418.795,00	106,81	3.797.631.048,00

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin pendirian suatu bangunan. Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten. Wajib Retribusi IMB adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi IMB terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Retribusi Izin Gangguan

Retribusi Izin Gangguan yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan kesehatan kerja. Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Izin Gangguan terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan

penumpang umum dan angkutan insidentil pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah kabupaten. Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin dari pemerintah kabupaten. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Tarif Retribusi Izin Trayek terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024 adalah sebesar Rp15.271.448.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp4.001.941.883,00 atau sebesar 26,21 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.151.055.070,00 atau sebesar 116,22 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.139.051.683,00
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.448.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
3.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	20.000.000,00	0,00	0,00	36.060.000,00
4.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	12.000.000.000,00	1.482.849.840,00	12,36	673.875.130,00
5.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	3.240.000.000,00	2.519.092.043,00	77,75	0,00
TOTAL		15.271.448.000,00	4.001.941.883,00	26,21	1.850.886.813,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95	7.189.012.393,75

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp7.584.439.331,25 atau 101,95 persen dari anggaran sebesar Rp7.439.012.400,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp395.426.937,50 atau 5,50 persen dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.189.012.393,75.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.939.012.400,00	6.084.439.331,25	102,45	5.939.012.393,75
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.250.000.000,00
TOTAL		7.439.012.400,00	7.584.439.331,25	101,95	7.189.012.393,75

- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2024 adalah sebesar Rp7.584.439.331,25 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD–PDAM sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - Bagian Laba atas Penyertaan modal pada BUMD–Dividen Bank Jatim sebesar Rp6.084.439.331,25 Sesuai surat Direktur PT. Bank Jatim Nomor 063/062/DIR/CSE/SRT tanggal 21 Februari 2024, bagian laba bersih tersebut telah dibagikan 100 persen dalam bentuk *cash* dividen dengan dividen *yield* sebesar 21,76 persen, sehingga bagian dividen Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp6.084.439.331,25.
 - Atas penerimaan deviden tersebut telah disetorkan oleh Bank Jatim kedalam rekening kas daerah Pemerintah Daerah Jember pada tanggal 07 Maret 2024.
- Penerimaan setoran bagian laba dari BUMD-PDAM belum diatur dalam Peraturan Daerah namun sudah tercantum dalam Bisnis Plan dan RKAP PDAM Jember.

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
525.828.695.590,00	374.280.677.074,40	71,18	441.780.510.476,10

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp374.280.677.074,40 atau 71,18 persen dari anggaran sebesar Rp525.828.695.590,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp67.499.833.401,70 atau 15,28 persen jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp441.780.510.476,10. Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah TA 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 8 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	4.236.953.188,00	0,00	154.140.227,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	37.262.500.000,00	7.441.280.340,00	19,97	14.255.772.578,00
3	Jasa Giro	9.000.000.000,00	4.487.406.842,78	49,86	3.526.497.640,69
4	Pendapatan Bunga	2.450.000.000,00	710.273.972,58	28,99	1.638.520.547,87
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	75.240.000,00	44.720.845,00	59,44	421.376.932,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.500.000.000,00	400.560.178,00	11,44	1.309.590.256,73
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	421.645.166,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	11.100.000.000,00	1.985.251.358,87	17,89	2.817.601.385,78
10	Pendapatan BLUD	462.440.955.590,00	354.549.585.183,17	76,67	417.657.010.908,03
TOTAL		525.828.695.590,00	374.280.677.074,40	71,18	441.780.510.476,10

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp4.236.953.188,00 dengan rincian:

1 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	Rp	2.725.000,00
2 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	Rp	4.234.228.188,00
Jumlah	Rp	4.236.953.188,00

(rincian pada lampiran 1)

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp7.441.280.340,00 dengan rincian:

1) Hasil Sewa BMD sebesar	Rp	949.782.340,00
2) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar	Rp	6.491.498.000,00
Jumlah	Rp	7.441.280.340,00

(rincian pada lampiran 2)

3. Jasa Giro sebesar Rp4.487.406.842,78 terdiri atas:

1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar	Rp	3.503.452.942,22
2) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar	Rp	983.953.900,56
Jumlah	Rp	4.487.406.842,78

- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah merupakan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp710.273.972,58
- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp3.000.000,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp44.720.845,00 merupakan Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain



7. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp400.560.178,00, merupakan Denda Keterlambatan dari OPD lain. *(rincian pada lampiran 3)*

8. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp421.645.166,00 terdiri atas:

1) Pendapatan Denda Pajak Hotel	Rp	4.480.973,00
2) Pendapatan Denda Pajak Restoran	Rp	86.594.508,00
3) Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Rp	30.631.641,00
4) Pendapatan Denda Pajak Reklame	Rp	52.025.276,00
5) Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	Rp	421.686,00
6) Pendapatan Denda Pajak Parkir	Rp	1.753.466,00
7) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Rp	4.093.765,00
8) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp	34.827.393,00
9) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	188.411.623,00
10) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	18.404.835,00
Jumlah	Rp	421.645.166,00

9. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.985.251.358,87 terdiri atas:

1) Setoran Dan Penerimaan Lain-lain	Rp	745.890.430,28
2) Pengembalian Taspen	Rp	100.957.724,00
3) Pengembalian Gaji dan Tunjangan	Rp	214.561.846,00
4) Temuan BPK	Rp	250.879.504,02
5) Pengembalian Kelebihan Rehabilitasi	Rp	373.795.831,16
6) Pengembalian Via Transfer	Rp	23.705.735,00
7) Pembayaran Kekurangan Volume	Rp	109.604.588,41
8) Pengembalian Hibah Bansos	Rp	165.855.700,00
Jumlah	Rp	1.985.251.358,87

(rincian pada lampiran 4)

10. Pendapatan BLUD sebesar Rp354.549.585.183,17 terdiri atas:

➤ Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	Rp	354.509.585.183,17
➤ Pendapatan BLUD dari Hibah	Rp	40.000.000,00
Jumlah	Rp	354.549.585.183,17

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Anggaran Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp3.289.862.338.821,00 dan realisasinya sebesar Rp3.354.927.679.786,00 atau 101,98 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp162.933.435.746,00 atau 5,10 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening pendapatan transfer tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Rincian Anggaran Dan Realisasi Masing-Masing Jenis Rekening Pendapatan Transfer Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.694.897.627.000,00	2.718.533.172.486,00	100,88	2.522.861.210.219,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	326.477.607.000,00	331.004.062.200,00	101,39	322.996.582.400,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.487.104.821,00	305.390.445.100,00	113,74	346.136.451.421,00
TOTAL		3.289.862.338.821,00	3.354.927.679.786,00	101,98	3.191.994.244.040,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2024 sebesar Rp2.694.897.627.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.718.533.172.486,00 atau sebesar 100,88 persen dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp195.671.962.267,00 atau 7,76 persen. Rincian transfer pemerintah pusat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	191.772.993.000,00	217.238.300.409,00	113,28	210.923.988.652,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	1.704.938.164.985,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	45.036.717.101,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	561.962.339.481,00
TOTAL		2.694.897.627.000,00	2.718.533.172.486,00	100,88	2.522.861.210.219,00



5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp191.772.993.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp217.238.300.409,00 atau sebesar 113,28 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.314.311.757,00 atau 2,99 persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	13.000.089.000,00	27.319.496.409,00	210,15	13.044.290.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	27.429.551.000,00	25.221.603.000,00	91,95	36.497.750.664,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	2.207.948.000,00	0,00	3.043.988.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	115.785.297.000,00	126.063.961.000,00	108,88	118.869.160.988,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	26.224.728.000,00	23.103.616.000,00	88,10	27.812.985.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	3.987.976.800,00	0,00	2.083.438.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	62.575.000,00	50.431.200,00	80,59	57.008.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.343.497.000,00	2.340.800,00	0,04	5.102.000,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	6.353.671.200,00	0,00	5.914.870.000,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.042.290.000,00	1.042.290.000,00	100,00	1.559.521.000,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.884.966.000,00	1.884.966.000,00	100,00	2.035.875.000,00
	TOTAL	191.772.993.000,00	217.238.300.409,00	113,28	210.923.988.652,00

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	1.704.938.164.985,00

Anggaran pendapatan dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) adalah sebesar Rp1.793.208.947.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.832.793.869.706,00 atau sebesar 102,21 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp127.855.704.721,00 atau 7,50



persen. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Rincian Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	DAU	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	1.639.549.754.985,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	4.400.000.000,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	60.988.410.000,00
	TOTAL	1.793.208.947.000,00	1.832.793.869.706,00	102,21	1.704.938.164.985,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	45.036.717.101,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp125.885.996.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp104.185.840.707,00 atau mencapai 82,76 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.149.123.606,00 atau 131,34 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 13 Rincian Anggaran Dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	45.036.717.101,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	246.224.000,00	245.265.800,00	99,61	303.164.500,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	16.119.343.000,00	16.058.831.419,00	99,62	14.366.655.100,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.405.020.000,00	10.268.836.000,00	98,69	19.007.481.151,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.549.936.000,00	1.784.955.200,00	70,00	815.159.750,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.748.213.000,00	1.812.000.000,00	23,39	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1.870.390.000,00	1.836.788.000,00	98,20	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	29.599.857.000,00	20.719.899.898,00	70,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	35.081.697.000,00	27.365.361.722,00	78,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1.988.644.000,00	497.160.999,00	25,00	2.152.472.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	1.491.481.001,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.652.659.000,00	913.164.700,00	25,00	3.877.836.000,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	2.739.494.100,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.360.000.000,00	1.340.000.000,00	25,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	474.823.600,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	4.434.013.000,00	3.455.996.570,00	77,94	3.647.625.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00	0,00	391.500.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	6.830.000.000,00	5.772.142.624,00	84,51	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	213.346.400,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	576.677.974,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	2.796.645.000,00	0,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	0,00	4.297.793.300,00	0,00	0,00
	TOTAL	125.885.996.000,00	104.185.840.707,00	82,76	45.036.717.101,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	561.962.339.481,00

Anggaran pendapatan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp584.029.691.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp564.315.161.664,00 atau mencapai 96,62 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.352.822.183,00 atau 0,42 persen. Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Rincian anggaran dan realisasi dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	561.962.339.481,00
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	240.115.204.579,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	8.765.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	225.401.885.000,00	212.538.150.215,00	94,29	225.305.159.651,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	6.027.561.000,00	8.528.945.000,00	141,50	5.387.805.048,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	42.646.992.000,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	2.389.190.650,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	20.050.335.000,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	193.193.000,00	177.092.100,00	91,67	275.624.569,00
	DAK Non Fisik-BOKB-KB	21.411.970.000,00	20.383.213.647,00	95,20	15.410.142.924,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	350.721.326,00	86,38	266.551.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2.286.900.000,00	2.171.965.800,00	94,97	1.026.781.100,00
	DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	323.552.960,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	237.903.360.000,00	237.863.266.384,00	99,98	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	7.155.000.000,00	7.155.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	41.996.800.000,00	41.588.493.200,00	99,03	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	675.000.000,00	675.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.652.540.000,00	1.393.680.000,00	84,34	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.034.056.000,00	9.154.653.996,00	76,07	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	398.237.000,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	26.397.189.000,00	22.244.979.996,00	84,27	0,00
	TOTAL	584.029.691.000,00	564.315.161.664,00	96,62	561.962.339.481,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
326.477.607.000,00	331.004.062.200,00	101,39	322.996.582.400,00

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp326.477.607.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp331.004.062.200,00 atau sebesar 101,39 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.007.479.800,00 atau 2,48 persen. Alokasi Insentif Fiskal dari Provinsi tersebut berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 15 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Dana Desa	326.477.607.000,00	325.303.772.200,00	99,64	322.996.582.400,00
2	Insentif Fiskal	0,00	5.700.290.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	326.477.607.000,00	331.004.062.200,00	101,39	322.996.582.400,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp305.390.445.100,00 atau sebesar 113,74 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp268.487.104.821,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah tahun 2023, realisasi pendapatan transfer antar daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp40.746.006.321,00 atau 11,77 persen. Rincian Transfer Pemerintah Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Rincian Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09	334.510.008.600,00
2	Bantuan Keuangan	11.081.542.821,00	11.716.902.700,00	105,73	11.626.442.821,00
	TOTAL	268.487.104.821,00	305.390.445.100,00	113,74	346.136.451.421,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09	334.510.008.600,00

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 adalah sebesar Rp257.405.562.000,00. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi tahun 2024 sebesar Rp293.673.542.400,00 atau sebesar, 114,09 persen dari yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp40.836.466.200,00 atau 12,21 persen. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 17 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	60.562.736.000,00	73.387.072.200,00	121,18	72.760.694.500,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.018.947.000,00	41.260.703.300,00	137,45	41.806.470.900,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	60.185.503.000,00	78.159.257.400,00	129,86	103.393.126.800,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	356.250.000,00	494.527.600,00	138,81	665.371.600,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	106.282.126.000,00	100.371.981.900,00	94,44	115.884.344.800,00
	TOTAL	257.405.562.000,00	293.673.542.400,00	114,09	334.510.008.600,00

5.1.1.2.3.3 Bantuan Keuangan

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
11.081.542.821,00	11.716.902.700,00	105,73	11.626.442.821,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur, pada APBD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp11.081.542.821,00 dan terealisasi sebesar Rp11.716.902.700,00 atau 105,73 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp90.459.879,00 atau 0,78 persen. Alokasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi tersebut berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 16 April 2024 Nomor: 400.10.2/3169/112.2/2024 Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2024. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dengan memperhatikan kebijakan strategis berbasis kewenangan Desa sekaligus peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam 7 (Tujuh) prioritas Pembangunan Jawa Timur Tahun 2024, maka dibutuhkan data yang baik dan akurat dalam merumuskan kebijakan dalam pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

Sehubungan hal tersebut, guna memperoleh data penggunaan Dana Desa (DD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani di Desa serta Penurunan Stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan honorarium bagi Aparatur Pemerintah Desa untuk mencukupi Kebutuhan data dimaksud.

Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2024

NO	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)
1	BPPDGS	7.402.800.000,00	7.402.800.000,00
2	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	298.800.000,00	597.600.000,00
3	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	150.000.000,00	150.000.000,00
4	Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	980.040.121,00	1.320.600.000,00
5	Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	180.000.000,00	180.000.000,00
6	Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	119.564.500,00	119.564.500,00
7	Konseling Dari Pintu Ke Pintu (KOPIPU)	84.894.700,00	84.894.700,00
8	BUAIAN Pendampingan Bumil KEK dalam Pencegahan Stunting	119.477.000,00	119.477.000,00
9	SAJADAH Santri Jatim Sehat dan Berkah	36.366.500,00	36.366.500,00
10	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	64.000.000	60.000.000,00
14	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	1.645.600.000	1.645.600.000,00
	TOTAL	11.081.542.821,00	11.716.902.700,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024 adalah Rp0,00 dan realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2023, realisasi pendapatan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp936.104.334,00 atau 100,00 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2024:

Tabel 5. 18 Rincian Anggaran Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	936.104.334,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	936.104.334,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
0,00	0,00	0,00	936.104.334,00

Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024 adalah Rp0,00 dan realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah tahun 2023, realisasi Pendapatan Hibah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp936.104.334,00 atau 100 persen.

5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	3.802.222.061.677,92

Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2024 sebesar Rp3.829.547.166.517,57 atau sebesar 87,58 persen dari anggaran belanja dan transfer sebesar Rp4.372.730.733.767,00 dan terdapat kenaikan sebesar Rp27.325.104.839,65 atau sebesar 0,72 persen dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 19 Realisasi Belanja dan Transfer TA. 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	BELANJA OPERASI	3.440.620.529.517,98	3.023.289.882.630,57	87,87	3.015.559.884.677,66
	Belanja Pegawai	1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	87,42	1.361.120.333.591,47
	Belanja Barang dan Jasa	1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	87,55	1.354.258.354.206,19
	Belanja Hibah	331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	92,48	270.995.238.880,00
	Belanja Bantuan Sosial	23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	73,35	29.185.958.000,00
2	BELANJA MODAL	379.707.511.752,00	270.766.304.957,00	71,31	232.163.748.376,26
	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.472.868.423,00	58.483.245.460,00	60,00	79.716.522.691,50
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.738.332.087,00	72.252.822.584,00	68,33	54.635.641.878,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	121.715.589.110,00	90.641.872.297,00	74,47	43.233.220.730,76
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	49.965.980.989,00	48.677.747.566,00	97,42	54.351.340.328,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.144.741.143,00	710.617.050,00	62,08	227.022.748,00
3	BELANJA TAK TERDUGA	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47	31.854.315.147,00
	Belanja Tidak Terduga	16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47	31.854.315.147,00
4	BELANJA TRANSFER	535.518.567.309,00	534.229.222.509,00	99,76	522.644.113.477,00
	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.876.438.492,00	99,50	22.500.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77	500.144.113.477,00
	TOTAL	4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	87,58	3.802.222.061.677,92

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi TA. 2024 adalah sebesar Rp3.440.620.529.517,98 dan realisasinya sebesar Rp3.023.289.882.630,57 atau 87,87 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2023, realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.729.997.952,91 atau sebesar 0,26 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening belanja operasi tahun 2024.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	87,42	1.361.120.333.591,47

Anggaran Belanja Pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp1.602.930.982.759,98 dan Realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp1.401.352.250.469,71 atau sebesar 87,42 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2023, realisasi belanja pegawai pada

tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.231.916.878,24 atau sebesar 2,96 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	733.010.596.073,12	668.533.940.746,00	91,20	639.765.067.357,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	71.734.800.938,00	63.005.936.471,00	87,83	59.545.717.321,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	10.330.152.114,00	8.141.039.000,00	78,81	8.200.040.746,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.506.786.072,00	32.648.851.000,00	82,64	34.016.584.605,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.472.885.924,96	15.437.940.000,00	79,28	15.963.415.153,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.213.995.480,92	36.856.711.269,00	83,36	37.308.437.512,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.239.735.714,90	3.742.137.339,00	88,26	2.482.705.611,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.684.741,96	9.635.915,00	29,48	8.774.262,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.844.294.124,64	43.857.456.524,00	52,31	36.308.838.900,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.775.326.296,14	1.371.189.133,00	49,41	1.497.279.082,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.167.360.985,34	4.114.143.993,00	57,40	3.945.433.911,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	178.564.838.469,00	151.305.663.162,00	84,73	140.048.099.565,00
13	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.980.056.821,00	187.391.100,00	9,46	0,00
14	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	74.105.738,00	74.105.200,00	100,00	0,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.253.750.000,00	8.224.637.500,00	80,21	10.416.601.006,00
16	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	199.401.885.000,00	183.706.327.872,00	92,13	196.774.677.215,00
17	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.200.000.000,00	470.500.000,00	39,21	1.109.500.000,00
18	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.265.292.000,00	1.858.724.072,00	82,05	386.985.352,00
19	Belanja Honorarium	12.761.470.000,00	11.531.597.500,00	90,36	12.693.363.000,00
20	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	26.000.000.000,00	25.008.391.696,00	96,19	18.374.501.000,00
21	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	4.827.561.000,00	3.893.750.000,00	80,66	6.906.000.000,00
22	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00	1.112.580.000,00	99,34	1.106.385.000,00
23	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	165.900.000,00	132.178.200,00	79,67	131.680.500,00
24	Belanja Tunjangan Beras DPRD	222.198.256,00	168.883.440,00	76,01	143.970.960,00
25	Belanja Uang Paket DPRD	112.826.000,00	95.340.000,00	84,50	94.720.500,00
26	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.629.677.000,00	1.613.241.000,00	98,99	1.604.258.250,00
27	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	150.544.800,00	124.905.900,00	82,97	135.898.350,00
28	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	67.599.000,00	4.156.425,00	6,15	14.768.250,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
29	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.820.000.000,00	100,00	8.746.500.000,00
30	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00	722.505.000,00	98,30	1.457.505.000,00
31	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	2.140.771,00	180.256,00	8,42	787.090,00
32	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.838.640.276,00	10.778.117.808,00	99,44	10.736.626.278,00
33	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.880.000.000,00	5.880.000.000,00	100,00	5.743.500.000,00
34	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	453.915.000,00	95,05	12.600.000,00
35	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	66.201.800,00	54.600.000,00	82,48	54.600.000,00
36	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.100.000,00	7.056.000,00	77,54	7.056.000,00
37	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	104.300.000,00	98.280.000,00	94,23	98.280.000,00
38	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10.850.000,00	7.097.160,00	65,41	7.097.160,00
39	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.680.000,00	1.623.755,00	96,65	644.522,00
40	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.200,00	360,00	4,39	420,00
41	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.200.000,00	5.483.520,00	76,16	5.486.880,00
42	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000,00	112.320,00	62,40	112.320,00
43	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000,00	336.960,00	70,20	336.960,00
44	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.058.100.000,00	750.106.250,00	70,89	956.151.940,00
45	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	288.288.000,00	73,33	314.496.000,00
46	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.392.347.434,00	1.375.550.634,00	98,79	1.017.972.800,00
47	Belanja Pegawai BLUD	116.007.771.729,00	104.877.642.989,71	90,41	102.976.876.813,47
	TOTAL	1.602.930.982.759,98	1.401.352.250.469,71	87,42	1.361.120.333.591,47

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	87,55	1.354.258.354.206,19

Anggaran Belanja Barang dan Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp1.482.816.551.404,00 dan realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp1.298.171.536.917,86 atau sebesar 87,55 persen, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2023, realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp56.086.817.288,33 atau 4,41 persen dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 21 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Persediaan	138.678.152.043,00	100.304.762.259,00	72,33	138.196.133.528,00
2	Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan	42.757.450.514,00	32.842.744.642,00	76,81	40.503.724.787,00
3	Belanja Jasa	696.738.429.650,00	597.044.485.894,00	85,69	591.166.416.309,00
4	Belanja Pemeliharaan	20.218.249.665,00	15.203.881.143,68	75,20	21.014.561.264,00
5	Belanja Perjalanan Dinas	77.042.789.930,00	63.791.858.457,00	82,80	65.583.299.348,00
6	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.232.420.000,00	50.305.861.108,00	87,90	61.910.500.374,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	140.935.473.848,00	141.723.779.690,86	100,56	142.183.695.371,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	309.213.585.754,00	296.954.163.723,32	96,04	293.700.023.225,19
	TOTAL	1.482.816.551.404,00	1.298.171.536.917,86	87,55	1.354.258.354.206,19

a. Belanja Persediaan

Anggaran Belanja Persediaan TA. 2024 sebesar Rp138.678.152.043,00 dan terealisasi Rp100.304.762.259,00 atau 72,33 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22 Anggaran Dan Realisasi Belanja Persediaan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.246.360.937,00	12.501.346.239,00	94,38	12.331.203.701,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	9.259.788.550,00	8.654.210.351,00	93,46	5.517.673.925,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.627.345.831,00	14.268.559.663,00	80,95	16.099.958.205,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	872.843.100,00	861.659.455,00	98,72	1.307.805.900,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	238.732.000,00	222.144.500,00	93,05	317.692.825,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	46.899.800,00	39.091.825,00	83,35	30.761.925,00
7	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	74.508.500,00	39.098.900,00	52,48	40.703.300,00
8	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	70.890.000,00	69.300.000,00	97,76	0,00
9	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.931.925.116,00	1.668.546.972,00	86,37	7.323.494.019,00
10	Belanja Suku Cadang-Alat Angkutan	3.452.742.500,00	1.888.454.729,00	54,69	3.345.184.607,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	141.449.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Alat Kedokteran	947.319.400,00	7.761.300,00	0,82	399.990.482,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	64.808.700,00	12.959.750,00	20,00	9.608.700,00
14	Belanja Suku Cadang-Alat Studio dan Komunikasi	70.836.759,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Suku Cadang-Alat Pertanian	209.136.400,00	175.587.618,00	83,96	680.015.700,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
16	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	41.719.400,00	37.985.180,00	91,05	57.683.500,00
17	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	10.000.000,00	7.532.387,00	75,32	365.834.747,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.653.138.137,00	2.093.226.320,00	78,90	2.565.283.974,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.206.994.814,00	2.764.684.034,00	86,21	3.038.495.409,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.929.508.604,00	7.348.605.246,00	74,01	10.131.142.290,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	704.705.982,00	314.359.500,00	44,61	606.421.205,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.000.000,00	5.994.000,00	99,90	12.000.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.576.675.105,00	3.052.923.421,00	85,36	3.866.966.770,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.018.783.338,00	1.731.051.372,00	85,75	2.807.454.721,00
25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.084.896.089,00	749.035.829,00	69,04	2.611.014.355,00
26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.598.983.784,00	2.327.149.234,00	41,56	4.661.828.611,00
27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	560.713.160,00	531.987.519,00	94,88	654.580.916,00
28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.774.101.262,00	1.780.247.063,00	64,17	2.829.119.509,00
29	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.068.484.760,00	814.804.767,00	76,26	1.268.570.226,00
30	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.922.394.010,00	1.599.603.589,00	83,21	3.675.335.233,00
31	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	946.944.100,00	896.590.000,00	94,68	560.790.100,00
32	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	42.655.714.100,00	23.931.837.823,00	56,10	40.261.672.776,00
33	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	45.000.000,00	44.000.000,00	97,78	39.500.000,00
34	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	885.397.500,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.787.400.501,00	2.427.338.273,00	87,08	2.578.003.612,00
36	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	308.575.804,00	300.545.000,00	97,40	353.350.000,00
37	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	135.570.000,00	135.316.000,00	99,81	408.895.754,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
38	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	22.500.000,00	11.225.109,00	49,89	13.255.000,00
39	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	133.773.000,00
40	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	725.000.000,00	697.110.000,00	96,15	245.245.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	194.000.000,00	164.335.906,00	84,71	40.950.000,00
42	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	553.014.000,00	479.528.401,00	86,71	474.065.100,00
43	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.846.000.000,00	1.762.817.811,00	95,49	2.243.379.430,00
44	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	262.550.000,00	221.892.500,00	84,51	12.295.000,00
45	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.500.000,00	15.091.779,00	91,47	30.660.000,00
46	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
47	Belanja Pakaian KORPRI	14.500.000,00	3.150.000,00	21,72	0,00
48	Belanja Pakaian Adat Daerah	335.000.000,00	222.636.771,00	66,46	338.727.992,00
49	Belanja Pakaian Batik Tradisional	944.600.000,00	793.315.297,00	83,98	448.753.000,00
50	Belanja Pakaian Olahraga	2.231.950.000,00	2.172.410.105,00	97,33	2.940.852.009,00
51	Belanja Pakaian Paskibraka	167.900.000,00	167.700.000,00	99,88	137.450.000,00
52	Belanja Pakaian Jas/Safari	50.500.000,00	40.970.721,00	81,13	12.400.000,00
53	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	31.500.000,00	31.105.000,00	98,75	191.242.000,00
54	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	90.000.000,00	62.235.000,00	69,15	0,00
55	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	143.200.000,00	142.100.000,00	99,23	0,00
56	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	0,00
	TOTAL	138.678.152.043,00	100.304.762.259,00	72,33	138.196.133.528,00

b. Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan

Anggaran Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan TA. 2024 sebesar Rp42.757.450.514,00 dan terealisasi Rp32.842.744.642,00 atau 76,81 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23 Anggaran Dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Non Persediaan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.843.001.514,00	22.715.877.393,00	73,65	29.038.142.674,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.278.255.700,00	2.415.588.705,00	73,69	3.396.502.785,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
3	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.000.000,00	6.270.000,00	69,67	0,00
4	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	239.369.450,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.627.193.300,00	7.705.008.544,00	89,31	7.829.709.878,00
	TOTAL	42.757.450.514,00	32.842.744.642,00	76,81	40.503.724.787,00

c. Belanja Jasa

Anggaran Belanja Jasa TA. 2024 sebesar Rp696.738.429.650,00 dan terealisasi Rp597.044.485.894,00 atau 85,69 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 24 Anggaran Dan Realisasi Belanja Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.941.103.500,00	11.215.441.000,00	66,20	15.348.725.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.047.930.000,00	2.039.650.000,00	40,41	3.127.445.300,00
3	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36.861.800.000,00	31.660.782.000,00	85,89	27.803.095.199,00
4	Honorarium Rohaniwan	10.800.000,00	6.400.000,00	59,26	7.200.000,00
5	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	109.600.000,00	54.300.000,00	49,54	38.200.000,00
6	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00	467.300.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.562.550.000,00	1.411.202.000,00	90,31	9.632.700.000,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	692.400.000,00	563.600.000,00	81,40	568.300.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	82.708.600.000,00	70.133.744.000,00	84,80	36.010.845.565,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	49.882.820.390,00	48.366.881.075,00	96,96	29.831.845.828,00
11	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.053.760.800,00	2.350.429.309,00	57,98	1.681.434.143,00
12	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.525.300.000,00	11.204.580.000,00	97,22	11.539.675.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	0,00	0,00	56.468.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	56.731.025,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	5.283.950.000,00	4.636.650.000,00	87,75	9.255.250.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	492.500.000,00	483.500.000,00	98,17	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.880.000,00	52.000.000,00	73,36	240.000.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.495.000.000,00	40.481.637.400,00	93,07	74.770.656.700,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
19	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.863.100.000,00	1.739.500.000,00	93,37	1.202.650.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.721.180.000,00	40.004.771.199,00	98,24	41.695.552.664,00
21	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.387.808.500,00	4.354.814.332,00	68,17	5.806.097.602,00
22	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.034.968.000,00	12.078.055.500,00	92,66	13.032.659.600,00
23	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.640.400.000,00	1.352.850.000,00	51,24	2.645.312.500,00
24	Belanja Jasa Tenaga Caraka	631.500.000,00	394.550.000,00	62,48	442.600.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	6.614.750.000,00	6.534.775.000,00	98,79	331.400.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	521.100.000,00	258.131.708,00	49,54	118.688.879,00
27	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	86.550.000,00	22.500.000,00	26,00	17.250.000,00
28	Belanja Jasa Tata Rias	47.650.000,00	44.568.919,00	93,53	24.750.000,00
29	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.284.700.000,00	1.012.777.250,00	78,83	1.352.648.850,00
30	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	34.675.000,00	17.528.000,00	50,55	84.297.062,00
31	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.029.000.000,00	973.266.000,00	94,58	0,00
32	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	182.881.630,00
33	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.772.050.000,00	1.648.579.000,00	93,03	1.659.865.000,00
34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.925.200.899,00	39.820.346.044,00	71,20	42.568.376.150,00
35	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	38.237.094,00	76,47	75.226.496,00
36	Belanja Jasa Kalibrasi	568.967.000,00	126.733.480,00	22,27	120.785.000,00
37	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	83.520.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	500.000.000,00	379.923.000,00	75,98	667.836.780,00
39	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.405.936.750,00	4.503.455.185,00	70,30	1.008.964.400,00
40	Belanja Tagihan Telepon	6.355.700.000,00	6.086.245.297,00	95,76	5.615.426.530,00
41	Belanja Tagihan Air	969.557.562,00	718.982.835,00	74,16	670.103.815,00
42	Belanja Tagihan Listrik	50.306.746.504,00	46.397.665.819,00	92,23	49.757.445.776,00
43	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	101.000.000,00	69.160.223,00	68,48	79.285.000,00
44	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.533.730.000,00	5.877.204.259,00	78,01	6.721.335.932,00
45	Belanja Paket/Pengiriman	313.630.000,00	213.181.233,00	67,97	176.419.586,00
46	Belanja Penambahan Daya	43.498.098,00	20.093.579,00	46,19	44.775.750,00
47	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.796.375.000,00	636.292.499,00	35,42	940.560.040,00
48	Belanja Lembur	13.082.872.050,00	8.764.098.000,00	66,99	9.935.470.910,00
49	Belanja Medical Check Up	197.500.000,00	126.400.000,00	64,00	153.600.000,00
50	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.197.657.560,00	3.634.085.500,00	86,57	3.488.530.450,00
51	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	95.567.955.000,00	95.567.953.600,00	100,00	57.825.110.000,00
52	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi	9.761.528.000,00	9.761.526.600,00	100,00	7.587.160.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	Peserta PBPB dan BP Kelas 3				
53	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.151.526.344,00	5.155.361.815,00	72,09	7.631.114.396,00
54	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.422.044.398,00	7.482.773.979,00	71,80	5.992.253.271,00
55	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.962.323.463,00	2.576.251.802,00	86,97	1.127.177.764,00
56	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	38.660.639.200,00	36.100.273.605,00	93,38	56.772.893.520,00
57	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	12.211.200,00	12.211.200,00	100,00	0,00
58	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	135.000.000,00	45.000.000,00	33,33	0,00
59	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	69.801.100,00
60	Belanja Sewa Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
61	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.130.436.800,00
62	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.346.426.200,00	4.216.714.603,00	78,87	3.355.027.666,00
63	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	44.655.000,00
64	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000,00	0,00	0,00	49.027.500,00
65	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	36.200.000,00	0,00	0,00	104.141.324,00
66	Belanja Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	156.783.000,00
67	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.277.861.730,00	1.793.424.277,00	54,71	5.103.443.250,00
68	Belanja Sewa Mebel	285.840.500,00	110.555.336,00	38,68	54.189.510,00
69	Belanja Sewa Alat Pendingin	140.250.000,00	17.648.500,00	12,58	11.657.000,00
70	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	865.503.600,00	525.527.732,00	60,72	468.834.066,00
71	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	107.950.000,00
72	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	164.000.000,00	139.400.000,00	85,00	304.250.000,00
73	Belanja Sewa Komputer Jaringan	400.000.000,00	197.500.000,00	49,38	200.200.000,00
74	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00
75	Belanja Sewa Bangunan Gudang	195.000.000,00	135.100.000,00	69,28	45.600.000,00
76	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	752.102.500,00	64.706.500,00	8,60	270.797.375,00
77	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	1.023.560.560,00
78	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.800.000,00	1.198.000,00	24,96	4.165.000,00
79	Belanja Sewa Hotel	588.293.440,00	467.974.348,00	79,55	1.789.260.535,00
80	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	15.000.000,00	9.584.850,00	63,90	4.990.000,00
81	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	86.731.422,00	51.322.670,00	59,17	1.042.869.720,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
82	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	680.705.000,00	331.451.900,00	48,69	188.234.000,00
83	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.659.700.000,00	4.810.332.767,00	55,55	7.218.031.474,00
84	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	0,00	0,00	493.489.965,00
85	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	775.000.000,00	563.595.600,00	72,72	410.004.400,00
86	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.150.000.000,00	957.121.200,00	83,23	297.965.000,00
87	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi	52.500.000,00	50.462.000,00	96,12	0,00
88	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	205.000.000,00	0,00	0,00	361.533.182,00
89	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.455.735.154,00	3.539.971.774,00	54,83	4.335.552.288,00
90	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	330.000.000,00	326.503.000,00	98,94	456.602.800,00
91	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	615.000.000,00	478.588.072,00	77,82	528.773.100,00
92	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	35.000.000,00	33.826.000,00	96,65	0,00
93	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	0,00	0,00	334.687.200,00
94	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	66.000.000,00	64.100.000,00	97,12	91.685.000,00
95	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	60.000.000,00	59.817.900,00	99,70	284.803.900,00
96	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	1.450.000.000,00	0,00	0,00	289.923.788,00
97	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	50.000.000,00	48.673.500,00	97,35	0,00
98	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	600.000.000,00	478.179.675,00	79,70	495.986.400,00
99	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa	3.250.000.000,00	1.491.639.140,00	45,90	3.256.717.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	Studi Penelitian dan Bantuan Teknik				
100	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.535.000.000,00	1.185.559.500,00	77,24	1.660.013.387,00
101	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	632.950.000,00	293.700.000,00	46,40	550.838.500,00
102	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.388.450.000,00	1.788.389.000,00	74,88	1.032.130.000,00
103	Belanja Sosialisasi	264.000.000,00	246.673.500,00	93,44	457.861.500,00
104	Belanja Bimbingan Teknis	5.564.747.000,00	2.717.350.000,00	48,83	3.235.571.919,00
105	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	392.002.000,00
106	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	22.750.000,00	11.375.000,00	50,00	18.637.500,00
107	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	85.150.000,00	63.862.500,00	75,00	70.512.500,00
108	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	9.750.000,00	6.500.000,00	66,67	7.550.000,00
109	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	25.228.125,00	14.096.875,00	55,88	13.650.679,00
110	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	308.750.000,00	231.562.500,00	75,00	262.012.500,00
111	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.281.250,00	2.843.750,00	53,85	3.845.000,00
112	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.046.875,00	1.421.875,00	46,67	2.038.125,00
113	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	48.750.000,00	16.250.000,00	33,33	16.250.000,00
114	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.500.000,00	123.500.000,00	100,00	123.500.000,00
115	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	227.500.000,00	146.250.000,00	64,29	161.150.000,00
116	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	117.311.440,00	0,00	0,00	0,00
117	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	165.604.860,00	0,00	0,00	463.971.848,00
118	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	18.950.220,00	18.950.220,00	100,00	75.800.880,00
119	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.099.260,00	0,00	0,00	0,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
120	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	361.491,00	361.490,00	100,00	722.980,00
121	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.223.340,00	0,00	0,00	0,00
122	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	295.082.000,00
TOTAL		696.738.429.650,00	597.044.485.894,00	85,69	591.166.416.309,00

d. Belanja Pemeliharaan

Anggaran belanja pemeliharaan TA. 2024 adalah sebesar Rp20.218.249.665,00 dan realisasinya sebesar Rp15.203.881.143,68 atau 75,20 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Anggaran Dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	14.144.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	17.837.593,00	17.660.000,00	99,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	0,00	0,00	0,00	114.165.961,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	230.000.000,00	225.294.671,00	97,95	13.187.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	221.650.000,00	78.180.974,00	35,27	176.017.370,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	122.293.741,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	147.435.750,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.218.175.000,00	914.502.658,00	75,07	494.989.299,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.542.310.000,00	1.450.853.877,00	57,07	1.985.879.884,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	116.100.000,00	97.475.525,00	83,96	461.004.442,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	779.525.000,00	350.751.670,00	45,00	380.658.615,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
12	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	50.796.800,00	50.000.000,00	98,43	2.824.458,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	134.400.000,00	133.098.338,00	99,03	96.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	0,00	0,00	0,00	17.905.895,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	48.750.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	65.000.000,00	64.039.503,00	98,52	21.160.135,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	814.380.000,00	627.155.809,00	77,01	807.734.280,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	104.100.000,00	101.669.659,00	97,67	395.060.226,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	969.590.500,00	827.402.768,00	85,34	921.540.019,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.100.000,00	60.423.665,00	70,18	189.203.624,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	923.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	219.810.000,00	0,00	0,00	3.403.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	16.650.000,00	16.010.150,00	96,16	26.235.210,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	832.635.024,00	770.150.000,00	92,50	254.876.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	962.500.000,00	707.629.516,00	73,52	781.241.544,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	743.850.000,00	439.784.807,00	59,12	584.638.274,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75	197.500.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.000.000,00	59.265.000,00	98,78	185.770.476,00
29	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
30	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.369.907.069,00	4.857.886.098,68	76,26	10.574.324.705,00
31	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.662.500.000,00	1.634.800.000,00	98,33	0,00
32	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	240.000.000,00	119.155.333,00	49,65	0,00
33	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	22.140.620,00	21.004.600,00	94,87	187.000.000,00
34	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	54.925.400,00
35	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	64.391.100,00
36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	20.954.580,00
37	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	89.306.839,00
38	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	78.873.900,00	9.855.000,00	12,49	156.858.400,00
39	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	61.824.000,00	23.014.340,00	37,23	6.132.375,00
40	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	553.849.600,00	549.341.000,00	99,19	691.351.259,00
41	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	192.988.000,00
42	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	407.000.000,00	389.539.182,00	95,71	122.526.548,00
43	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan	20.000.000,00	19.960.000,00	99,80	75.307.855,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	Telepon-Jaringan Telepon Lainnya				
44	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	227.600.159,00	226.250.000,00	99,41	348.096.000,00
45	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	260.000.000,00	246.927.000,00	94,97	0,00
	TOTAL	20.218.249.665,00	15.203.881.143,68	75,20	21.014.561.264,00

e. Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran belanja perjalanan dinas TA. 2024 sebesar Rp77.042.789.930,00 dan realisasinya sebesar Rp63.791.858.457,00, atau 82,80 persen. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Anggaran Dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.709.877.065,00	35.816.475.277,00	87,98	37.973.502.246,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.356.756.465,00	24.436.924.332,00	77,93	25.430.472.914,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.181.800.000,00	3.506.307.448,00	83,85	1.652.720.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	310.330.000,00	32.151.400,00	10,36	526.604.188,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	484.026.400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	77.042.789.930,00	63.791.858.457,00	82,80	65.583.299.348,00

f. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat TA. 2024 sebesar Rp57.232.420.000,00 dan realisasinya sebesar Rp50.305.861.108,00, atau 87,90 persen. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Anggaran Dan Realisasi Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.190.720.000,00	47.955.466.430,00	88,49	57.634.120.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.041.700.000,00	2.350.394.678,00	77,27	4.276.380.374,00
	TOTAL	57.232.420.000,00	50.305.861.108,00	87,90	61.910.500.374,00

g. Belanja Barang dan Jasa (BOS)

Realisasi belanja barang dan jasa (BOS) TA. 2024 sebesar Rp141.723.779.690,86 atau sebesar 100,56 persen dari anggaran belanja sebesar Rp140.935.473.848,00.

h. Belanja Barang dan Jasa (BLUD)

Realisasi belanja barang dan jasa (BLUD) TA 2024 sebesar Rp296.954.163.723,32 atau sebesar 96,04 persen dari anggaran belanja sebesar Rp309.213.585.754,00

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Tidak terdapat realisasi belanja bunga periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

5.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Tidak terdapat realisasi belanja subsidi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024.

5.1.2.1.5 Belanja Hibah

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	92,48	270.995.238.880,00

Anggaran Belanja Hibah TA. 2024 adalah sebesar Rp331.735.392.554,00 dan Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar Rp306.794.019.443,00 atau sebesar 92,48 persen, Jika dibandingkan dengan Belanja Hibah tahun 2023, realisasi Belanja Hibah pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.798.780.563,00 atau 13,21 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	224.977.067.554,00	201.132.537.213,00	89,40	208.053.504.347,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	56.472.000.000,00	56.042.324.033,00	99,24	56.816.949.533,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.124.785.000,00	6.124.784.997,00	100,00	6.124.785.000,00
4	Belanja Hibah Dana BOSP	44.161.540.000,00	43.494.373.200,00	98,49	0,00
	TOTAL	331.735.392.554,00	306.794.019.443,00	92,48	270.995.238.880,00

5.1.2.1.6 Bantuan Sosial

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	73,35	29.185.958.000,00

Anggaran Belanja Bansos TA. 2024 adalah sebesar Rp23.137.602.800,00 dan Realisasi bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp16.972.075.800,00 atau sebesar 73,35 persen dan terdapat penurunan sebesar Rp12.213.882.200,00 atau sebesar 41,85 persen dari realisasi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Sosial Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	13.296.300.000,00	7.430.775.000,00	55,89	12.037.900.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	9.841.302.800,00	9.541.300.800,00	96,95	17.148.058.000,00
	TOTAL	23.137.602.800,00	16.972.075.800,00	73,35	29.185.958.000,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
379.707.511.752,00	270.766.304.957,00	71,31	232.163.748.376,26

Anggaran Belanja Modal tahun 2024 adalah sebesar Rp379.707.511.752,00 dan realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp270.766.304.957,00 atau sebesar 71,31 persen, Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2023, realisasi Belanja Modal pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp38.602.556.580,74 atau 16,63 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	3.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.402.032.496,00	50.368.641.190,00	66,80	61.338.281.848,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.070.835.927,00	8.114.604.270,00	36,77	18.378.240.843,50
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.358.105.887,00	71.399.092.616,00	77,31	53.339.020.197,00
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.380.226.200,00	853.729.968,00	6,38	1.296.621.681,00
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	119.465.586.230,00	90.454.873.872,00	75,72	43.005.753.758,76
7.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.002.880,00	186.998.425,00	8,31	227.466.972,00
8.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.158.500.000,00	1.056.625.200,00	91,21	3.960.587.348,00
9.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.903.686.152,00	47.496.958.366,00	99,15	50.223.907.580,00
10.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	903.794.837,00	124.164.000,00	13,74	166.845.400,00
11.	Belanja Modal Aset Lainnya	930.000.000,00	653.362.050,00	70,25	74.375.000,00
12.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	214.741.143,00	57.255.000,00	26,66	152.647.748,00
	TOTAL	379.707.511.752,00	270.766.304.957,00	71,31	232.163.748.376,26

Bahwa penyajian Belanja Modal berbeda dengan tahun sebelumnya mengacu Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sudah dilakukan proses migrasi ke SIPD. Penjelasan perbedaan saldo Ralisasi TA 2024 dengan Realisasi TA 2023 sebagai berikut:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah TA. 2024 adalah sebesar Rp3.670.000.000,00 dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2024 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 persen. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA. 2024 nihil dikarenakan pada tersebut Pemerintah Kabupaten Jember tidak menetapkan Perda APBD sehingga penggunaan anggaran terbatas hanya yang bersifat wajib mengikat.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 adalah sebesar Rp97.472.868.423,00 dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 sebesar Rp58.483.245.460,00 atau sebesar 60,00 persen dan terdapat penurunan sebesar Rp21.233.277.231,50 atau sebesar 26,64 persen dari realisasi tahun lalu. Penurunan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Jember tidak menetapkan Perda APBD sehingga penggunaan anggaran terbatas hanya yang bersifat wajib mengikat.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp58.483.245.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Proses	1.200.000.000,00	1.198.800.000,00	99,90	1.034.900.000,00
2	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	374.000.000,00	24.000.000,00	6,42	73.900.000,00
3	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	157.700.000,00
4	Belanja Modal Pompa	63.607.300,00	49.675.000,00	78,10	350.412.000,00
5	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.176.081.300,00	529.300.000,00	45,01	453.200.000,00
6	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.711.719.200,00	1.023.700.000,00	59,81	7.906.400.000,00
7	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.272.097.500,00	2.342.320.000,00	71,58	3.917.840.000,00
8	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.049.888.000,00	1.027.200.000,00	97,84	1.699.786.000,00
9	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	213.000.000,00
10	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.303.858.600,00	1.296.000.000,00	99,40	3.026.000.000,00
11	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.191.600.000,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
12	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	425.675.600,00	423.016.000,00	99,38	340.473.000,00
13	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	40.850.000,00
14	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	24.702.400,00	24.700.000,00	99,99	5.173.500,00
15	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	4.285.700,00	4.215.000,00	98,35	199.200.000,00
16	Belanja Modal Alat Ukur Universal	2.765.000,00	2.568.540,00	92,89	119.268.200,00
17	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	6.105.000,00	5.658.750,00	92,69	88.800.000,00
18	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	512.500,00	482.500,00	94,15	29.950.000,00
19	Belanja Modal Alat Panen	0,00	0,00	0,00	53.500.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	300.750.000,00	192.779.000,00	64,10	0,00
21	Belanja Modal Alat Pasca Panen	0,00	0,00	0,00	106.400.000,00
22	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	219.200.000,00	218.400.000,00	99,64	24.850.000,00
23	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	381.500,00	0,00	0,00	10.723.200,00
24	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	257.677.760,00	247.850.000,00	96,19	52.000.000,00
25	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	201.872.476,00	155.737.453,00	77,15	287.002.401,00
26	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.183.457.082,00	2.078.915.465,00	65,30	2.924.518.741,00
27	Belanja Modal Mebel	2.552.236.848,00	1.747.697.350,00	68,48	2.614.839.766,00
28	Belanja Modal Alat Pembersih	54.867.500,00	54.187.575,00	98,76	16.483.158,00
29	Belanja Modal Alat Pendingin	881.296.946,00	500.690.137,00	56,81	786.873.398,00
30	Belanja Modal Alat Dapur	25.636.400,00	24.630.000,00	96,07	23.076.172,00
31	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.987.639.167,00	7.617.614.606,00	84,76	6.522.201.655,00
32	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	25.847.543,00	12.857.000,00	49,74	110.732.500,00
33	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	17.753.400,00	0,00	0,00	271.100.000,00
34	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00
35	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.611.600,00	24.100.000,00	81,39	151.000.000,00
36	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	28.199.800,00	27.957.400,00	99,14	0,00
37	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	5.850.000,00	97,50	70.500.000,00
38	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.041.134.100,00	5.025.665.000,00	83,19	117.409.685,00
39	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	557.782.900,00	519.510.000,00	93,14	242.403.500,00
40	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	23.830.000,00	6.050.000,00	25,39	391.831.000,00
41	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00	37.050.000,00
42	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.289.436.624,00	1.714.149.550,00	39,96	3.647.625.000,00
43	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	0,00	197.404.000,00
44	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.302.970.042,00	302.732.224,00	23,23	0,00
45	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	24.900.000,00	21.070.000,00	84,62	0,00



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
46	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	157.492.000,00	60.340.000,00	38,31	0,00
47	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.022.000.000,00	964.500.000,00	94,37	0,00
48	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	572.296.780,00	538.000.000,00	94,01	0,00
49	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	3.647.771.307,00	3.598.202.970,00	98,64	0,00
50	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	11.148.500,00	7.000.000,00	62,79	2.893.000,00
51	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
52	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	8.602.581.800,00	1.170.495.000,00	13,61	0,00
53	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	510.273.400,00	19.580.400,00	3,84	0,00
54	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	231.142.000,00	230.000.000,00	99,51	0,00
55	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	1.465.167.471,00	1.457.900.000,00	99,50	0,00
56	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.961.114.900,00	89.160.000,00	2,25	7.576.700,00
57	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	11.000.000,00	9.562.500,00	86,93	0,00
58	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	734.999.000,00	696.000.000,00	94,69	437.734.648,00
59	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	683.100.000,00	588.000.000,00	86,08	0,00
60	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	40.310.400,00	0,00	0,00	0,00
61	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	86.913.000,00	85.900.000,00	98,83	33.900.000,00
62	Belanja Modal Komputer Jaringan	106.642.858,00	64.891.300,00	60,85	117.900.000,00
63	Belanja Modal Personal Computer	10.796.767.227,00	9.714.505.470,00	89,98	12.567.004.803,00
64	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	108.313.395,00	83.485.000,00	77,08	196.075.000,00
65	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.012.571.270,00	631.290.000,00	62,35	750.011.621,00
66	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.178.000,00	4.100.000,00	98,13	56.705.000,00
67	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	240.000.000,00	169.800.000,00	70,75	695.307.000,00
68	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	910.000.000,00
69	Belanja Modal Rambu Bersuar	360.000.000,00	358.000.000,00	99,44	396.600.000,00
70	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	352.500.000,00	336.200.000,00	95,38	2.599.643.200,00
71	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.593.254.000,00
72	Belanja Modal Runway/Threshold Light	0,00	0,00	0,00	187.500.000,00
73	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air	68.000.000,00	67.000.000,00	98,53	49.600.000,00
74	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	985.469.400,00	972.150.000,00	98,65	166.600.000,00
75	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	22.070.835.927,00	8.114.604.270,00	36,77	18.378.240.843,50
JUMLAH		97.472.868.423,00	58.483.245.460,00	60,00	79.716.522.691,50



5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan TA. 2024 sebesar Rp105.738.332.087,00 dan terealisasi sebesar Rp72.252.822.584,00 atau sebesar 68,33 persen dan jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat peningkatan sebesar Rp17.617.180.706,00 atau sebesar 32,24 persen dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	60.480.653.917,00	45.593.990.612,00	75,39	43.872.450.016,00
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	3.870.183.470,00
3	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.600.000.000,00	0,00	0,00	1.904.160.600,00
4	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	28.115.801.970,00	24.990.563.163,00	88,88	40.240.941,00
5	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	355.000.000,00	155.588.841,00	43,83	1.008.871.849,00
6	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	508.217.500,00
7	Belanja Modal Asrama	25.000.000,00	0,00	0,00	606.539.672,00
8	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	626.750.000,00	616.050.000,00	98,29	0,00
9	Belanja Modal Pagar	154.900.000,00	42.900.000,00	27,70	1.528.356.149,00
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	13.380.226.200,00	853.729.968,00	6,38	1.296.621.681,00
	JUMLAH	105.738.332.087,00	72.252.822.584,00	68,33	54.635.641.878,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2024 adalah sebesar Rp121.715.589.110,00 dan terealisasi sebesar Rp90.641.872.297,00 atau sebesar 74,47 persen dan jika dibandingkan realisasi tahun lalu terdapat peningkatan sebesar Rp47.408.651.566,24 atau sebesar 109,66 persen dari realisasi tahun lalu dikarenakan adanya prioritas pembangunan jalan. Adapun anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	85.013.707.380,00	65.858.922.000,00	77,47	15.689.793.945,00
2	Belanja Modal Jalan Khusus	9.877.445.750,00	8.062.196.000,00	81,62	9.132.976.792,00
3	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.905.000.000,00	9.225.908.000,00	84,60	2.665.095.771,76
4	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	8.151.316.900,00	6.848.148.872,00	84,01	14.930.050.250,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.283.116.200,00	459.699.000,00	35,83	392.637.000,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.235.000.000,00	0,00	0,00	195.200.000,00
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.250.002.880,00	186.998.425,00	8,31	227.466.972,00
	JUMLAH	121.715.589.110,00	90.641.872.297,00	74,47	43.233.220.730,76

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp49.965.980.989,00 dan terealisasi sebesar Rp48.677.747.566,00 atau sebesar 97,42 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.673.592.762,00 atau 10,44 persen.

Anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya disajikan sesuai sumber pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	127.500.000,00	78.625.200,00	61,67	346.748.198,00
2	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Musik	1.000.000.000,00	978.000.000,00	97,80	2.537.479.000,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.215.000,00
5	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	208.797.400,00
6	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	243.783.750,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	598.564.000,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.903.686.152,00	47.496.958.366,00	99,15	50.223.907.580,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	903.794.837,00	124.164.000,00	13,74	166.845.400,00
	JUMLAH	49.965.980.989,00	48.677.747.566,00	97,42	54.351.340.328,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2024 adalah sebesar Rp1.144.741.143,00 dan terealisasi sebesar Rp710.617.050,00 atau sebesar 62,08 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp483.594.302,00 atau 213,02 persen. Adapun anggaran dan realisasi belanja modal asset lainnya TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	630.000.000,00	374.144.050,00	59,39	74.375.000,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	300.000.000,00	279.218.000,00	93,07	0,00
3	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	214.741.143,00	57.255.000,00	26,66	152.647.748,00
	JUMLAH	1.144.741.143,00	710.617.050,00	62,08	227.022.748,00



5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
16.884.125.188,02	1.261.756.421,00	7,47	31.854.315.147,00

Anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2024 adalah sebesar Rp16.884.125.188,02 dan realisasinya sebesar Rp1.261.756.421,00 atau 7,47 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp30.592.558.726,00 atau sebesar 96,04 persen dari realisasi tahun lalu. Berikut ini merupakan rincian realisasi masing-masing jenis rekening belanja tidak terduga tahun 2024:

- 1 Pembayaran Utang Belanja Pengadaan Wastafel BTT Covid-19 TA 2020 untuk 1 Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 8/Pdt.G.S/2024 Pengadilan Negeri Jember kepada CV. RISKA (daftar terlampir) pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat & Mendesak pada BPKAD Kabupaten Jember, sebagaimana permohonan terlampir. Rp 248.097.800,00
- 2 Pembayaran Utang Belanja Pengadaan Wastafel BTT Covid-19 TA 2020 untuk 1 Putusan No. 7/Pdt.G.S/2024 Pegawai Negeri Jember kepada CV. HALIM JAYA ABADI (daftar terlampir) pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Pengeluaran Dana Darurat & Mendesak pada BPKAD Kabupaten Jember, sebagaimana permohonan terlampir. Rp 266.595.400,00
- 3 Pembayaran Pengembalian sisa BKK TA 2023 Pemkab Jember berdasar BA Rekon Bantuan Keuangan Provinsi Jawa timur No.900.1.15.3/Kab.jember/BA.TRIPARTIT/2024 ke RKUD Provinsi Jawa Timur melalui via Bank Jatim No.1951000008782024 Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat mendesak pada BPKAD Kabupaten Jember sebagaimana permohonan terlampir. Rp 747.063.221,00

Jumlah

Rp 1.261.756.421,00

5.1.2.4 Transfer

Anggaran Transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp535.518.567.309,00 dan realisasinya sebesar Rp534.229.222.509,00 atau 99,76 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2023, realisasi transfer pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.585.109.032,00 atau sebesar 2,22 persen. Berikut ini merupakan rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis rekening transfer tahun 2024:

Tabel 5. 35 Anggaran Dan Realisasi Transfer Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	22.991.948.492,00	22.876.438.492,00	99,50	22.500.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77	500.144.113.477,00
	TOTAL	535.518.567.309,00	534.229.222.509,00	99,76	522.644.113.477,00

5.1.2.4.1 Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran Bagi Hasil Pendapatan tahun 2024 adalah sebesar Rp22.991.948.492,00 dan realisasinya sebesar Rp22.876.438.492,00 atau 99,50 persen, sama dengan realisasi Bagi Hasil Pendapatan tahun 2023, yang terdiri dari:

Tabel 5. 36 Anggaran Dan Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.000.000.000,00	19.894.674.000,00	99,47	18.703.050.930,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.991.948.492,00	2.981.764.492,00	99,66	3.796.949.070,00
	TOTAL	22.991.948.492,00	22.876.438.492,00	99,50	22.500.000.000,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran belanja bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp512.526.618.817,00 dan terealisasi 2024 sebesar Rp 511.352.784.017,00 atau sebesar 99,78 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2023, realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.208.670.540,00 atau 2,24 persen. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang terdiri dari:

Tabel 5. 37 Anggaran Dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau	0,00	0,00	0,00	500.144.113.477



NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
	Kabupaten/Kota kepada Desa				
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77	0,00
	TOTAL	512.526.618.817,00	511.352.784.017,00	99,77	500.144.113.477,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp511.352.784.017,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	15/02/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 44 Desa bagian bln Januari sd Februari TA.2024 bedasar surat DISPEMASDES no.001 Tgl 12/2/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pada BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	6.093.544.000,00
2	27/02/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 14 Desa bagian bln Januari sd Februari TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.001 Tgl 19/2/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	1.908.850.000,00
3	28/02/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 25 Desa bagian bln Januari sd Februari TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.003 Tgl 27/2/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	3.382.108.000,00
4	29/02/2024	Belanja Dana Desa Bulan Februari	51.796.262.800,00
5	05/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 83 Desa bag bln Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.005 Tgl 1/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	5.692.251.000,00
6	05/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 24 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.004 Tgl 1/3/2024 pd Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	4.760.244.000,00
7	08/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 28 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.006 Tgl 7/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	5.783.526.000,00
8	15/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 18 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.007 Tgl 13/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	3.807.009.000,00
9	20/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 22 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.008 Tgl 18/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	4.519.212.000,00
10	22/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 24 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.009 Tgl 21/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	5.028.591.000,00
11	26/03/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 16 Desa bagian bln Jan-Maret TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.010 Tgl 25/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	3.315.138.000,00
12	31/03/2024	Belanja Dana Desa Bulan Maret	99.606.675.400,00
13	01/04/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 10 Desa bagian bln Jan-April TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.012 Tgl 28/3/2024 pd Keg	2.725.116.000,00

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
		Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir	
14	01/04/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 215 Desa bagian bln April TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.011 Tgl 28/3/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sebagaimana permohonan terlampir.	14.763.491.000,00
15	30/04/2024	Belanja Dana Desa Bulan April	23.991.259.600,00
16	06/05/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 225 Desa bagian bln Mei TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.013 Tgl 30/4/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.444.770.000,00
17	15/05/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 1 Desa PECORO bagian bln Januari-Mei TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.011 Tgl 13/5/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	296.640.000,00
18	31/05/2024	Belanja Dana Desa Bulan Mei	10.937.162.000,00
19	03/06/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Juni TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.015 Tgl 30/5/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
20	30/06/2024	Belanja Dana Desa Bulan Juni	12.220.391.600,00
21	01/07/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Juli TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.016 Tgl 28/6/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
22	31/07/2024	Belanja Dana Desa Bulan Juli	62.248.878.200,00
23	01/08/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Agustus TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.017 Tgl 30/7/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
24	31/08/2024	Dana Desa Bulan Agustus	45.018.086.200,00
25	02/09/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln September TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.018 Tgl 27/8/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
26	30/09/2024	Belanja Dana Desa September	5.337.596.200,00
27	08/10/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Oktober TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.019 Tgl 30/9/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
28	31/10/2024	Belanja Dana Desa Bulan Oktober 2024	2.971.970.000,00
29	05/11/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln November TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.020 Tgl 28/10/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.504.098.000,00
30	30/11/2024	Belanja Dana Desa Bulan November	3.970.002.600,00
31	02/12/2024	Pembayaran Penyaluran ADD Utk 226 Desa bagian bln Desember TA.2024 bdsr surat DISPEMASDES no.021 Tgl 28/11/2024 pd Keg Sub Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, pd BPKAD Kab. Jember sbgmna permhnan trlmpir.	15.503.933.817,00
32	31/12/2024	Belanja Dana Desa Desember 2024	7.205.487.600,00
JUMLAH			511.352.784.017,00

5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
(154.188.142.036,00)	299.547.147.253,90	(194,27)	155.204.589.589,93

Defisit anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp(154.188.142.036,00) dan Defisit realisasi sebesar Rp299.547.147.253,90 atau (194,27) persen sedangkan tahun 2023 surplus realisasi sebesar Rp155.204.589.589,93 dengan perhitungan:

Tabel 5. 38 Surplus/Defisit LRA Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
Pendapatan	4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	97,88	3.957.426.651.267,85
Belanja dan Transfer	4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	87,58	3.802.222.061.677,92
Surplus (Defisit)	(154.188.142.036,00)	299.547.147.253,90	(194,27)	155.204.589.589,93

5.1.4 Pembiayaan Netto

	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	Persentase	Realisasi 2023 (Audited)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	169.188.142.036,00	276.596.479.800,86	163,48	121.337.947.710,93
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	22.055.000,00	0,00	53.942.500,00
TOTAL	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50	121.391.890.210,93

Anggaran Pembiayaan Netto TA 2024 adalah sebesar Rp169.188.142.036,00 dan Realisasi Pembiayaan Netto TA 2024 sebesar Rp276.618.534.800,86 atau sebesar 163,50 persen. Jika dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan Netto tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp155.226.644.589,93 atau 127,87 persen dari realisasi tahun lalu yang terdiri dari:

Tabel 5. 39 Pembiayaan Netto Tahun 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50	121.391.890.210,93
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	0,00
	TOTAL	154.188.142.036,00	261.618.534.800,86	169,67	121.391.890.210,93

a. Perimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp276.618.929.576,86 atau 163,50 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp169.188.142.036,00. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 40 Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA	169.188.142.036,00	276.596.479.800,86	163,48	121.337.947.710,93
2.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	22.055.000,00	0,00	53.942.500,00
	TOTAL	169.188.142.036,00	276.618.534.800,86	163,50	121.391.890.210,93

- Penggunaan SiLPA sebesar Rp276.618.534.800,86
- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya merupakan pengembalian pokok pinjaman atas dana bergulir Bank Jatim Bagian Perekonomian sebesar Rp22.055.000,00 yang disetor tanggal 31 Desember 2024.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 100 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
0,00	561.165.682.054,76	276.596.479.800,86

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember TA 2024 sebesar Rp561.165.682.054,76 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 41 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SiLPA)

URAIAN	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%	REALISASI TA 2023 (Rp)
Pendapatan	4.218.542.591.731,00	4.129.094.313.771,47	97,88	3.957.426.651.267,85
Belanja dan Transfer	4.372.730.733.767,00	3.829.547.166.517,57	87,58	3.802.222.061.677,92
Surplus (Defisit)	(154.188.142.036,00)	299.547.147.253,90	(194,27)	155.204.589.589,93
Pembiayaan Netto	154.188.142.036,00	261.618.534.800,86	169,67	121.391.890.210,93
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	561.165.682.054,76	0,00	276.596.479.800,86

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp561.165.682.054,76



Tabel 5. 42 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2024

URAIAN	JENIS KAS (Rp)
Kas Di kasda	505.269.925.888,31
Pemotongan Qris Dishub - 2023	(105.000,00)
Kas Di bendahara Penerimaan - Bapenda	1.425.515.999,00
Kas Di bendahara Penerimaan - Disperindag	909.000,00
Kas Di bendahara Penerimaan - Dispora	8.112.500,00
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Subandi	6.370.540,73
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD balung	4.930.396,00
Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	12.102.400,00
Kas Di BLUD - RSD Soebandi	11.751.985.484,52
Kas Di BLUD - RSD Balung	1.322.603.704,92
Kas Di BLUD - RSD Kalisat	2.739.578.149,60
Kas Di BLUD - Puskesmas	35.235.922.938,06
Kas Dana BOS	63.455.375,62
Kas BOK Puskesmas	3.324.374.678,00
SiLPA	561.165.682.054,76



5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada suatu tahun anggaran dapat terjadi keadaan realisasi keuangan yang lebih atau kurang dan menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya. Rincian perhitungan perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2024 adalah sebagai berikut.

5.2.1 Lebih SAL Awal

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
276.596.479.800,86	121.337.947.707,91	155.258.532.092,95	127,96

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp276.596.479.800,86 mengalami kenaikan sebesar Rp155.258.532.092,95 atau sebesar 127,96 persen jika dibandingkan SAL Awal tahun 2023 sebesar Rp121.337.947.707,91.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagaimana Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
276.596.479.800,86	121.337.947.710,93	155.258.532.089,93	127,96

Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2024 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD 2024, yaitu sebesar Rp276.596.479.800,86 yang mengalami kenaikan sebesar Rp155.258.532.089,93 atau sebesar 127,96 persen dibandingkan tahun 2023.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
561.165.682.054,76	276.596.479.800,86	284.569.202.253,90	102,88

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Adapun SiLPA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp284.569.202.253,90 atau sebesar 102,88 persen dibandingkan tahun 2023. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp561.165.682.054,76 yang diuraikan sebagai berikut :

➤ Defisit Anggaran	Rp	299.547.147.253,90
➤ Pembiayaan Netto	Rp	261.618.534.800,86
SILPA Tahun berjalan	Rp	561.165.682.054,76

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada LP-SAL TA 2024.

5.2.5 Lain-lain

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/(Penurunan)	Persentase
0,00	3,02	(3,02)	100

Tidak terdapat koreksi lain-lain pada LP-SAL TA 2024.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
561.165.682.054,76	276.596.479.800,86	284.569.202.253,90	102,88

Merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan Silpa tahun berjalan ditambah sisa anggaran lebih tahun berkenaan. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 terdiri dari:

➤ Silpa Terikat	Rp	344.879.887.655,10
➤ Silpa Tidak Terikat	Rp	216.285.794.399,66

Silpa Terikat sebesar Rp344.879.887.655,10 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang sudah jelas penggunaannya yang terdiri dari :

1 Kas Di kasda

Kas di Kas Umum Daerah sebesar Rp288.984.131.488,65 terinci sebagai berikut:

Kas di Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023	Rp	234.552.670.324,51
Sisa DBH Cukai	Rp	29.729.062.600,00
Sisa DID	Rp	114.549.520,00
Sisa BKK Provinsi (TA 2021 sd 2023)	Rp	20.515.000,14



	Sisa BKK Provinsi TA 2024	Rp	1.388.920.300,00
	Sisa DAK Fisik	Rp	557.854.012,00
	Sisa DAK Non Fisik	Rp	22.620.559.732,00
	Jumlah	Rp	288.984.131.488,65
2	Pemotongan Qris Dishub - 2023	Rp	(105.000,00)
3	Kas Di bendahara Penerimaan - Bapenda	Rp	1.425.515.999,00
4	Kas Di bendahara Penerimaan - Disperindag	Rp	909.000,00
5	Kas Di bendahara Penerimaan - Dispora	Rp	8.112.500,00
6	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Subandi	Rp	6.370.540,73
7	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD balung	Rp	4.930.396,00
8	Kas Di bendahara Penerimaan - RSD Kalisat	Rp	12.102.400,00
9	Kas Di BLUD - RSD Soebandi	Rp	11.751.985.484,52
10	Kas Di BLUD - RSD Balung	Rp	1.322.603.704,92
11	Kas Di BLUD - RSD Kalisat	Rp	2.739.578.149,60
12	Kas Di BLUD - Puskesmas	Rp	35.235.922.938,06
13	Kas Dana BOS	Rp	63.455.375,62
14	Kas BOK Puskesmas	Rp	3.324.374.678,00
	Jumlah	Rp	344.879.887.655,10

Silpa Tidak Terikat sebesar Rp216.285.794.399,66 merupakan sisa dari pendapatan transfer Umum yang berada di rekening Kas Daerah.

5.3 NERACA

5.3.1 ASET

5.3.1.1 Aset Lancar

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
777.075.446.494,81	454.949.892.131,98	322.125.554.362,83	70,80

Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp777.075.446.494,81 dan Rp454.949.892.131,98 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp322.125.554.362,83 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Aset Lancar mengalami peningkatan sebesar Rp322.125.554.362,83 atau 70,80 persen.

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut :

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas dan Bank	561.857.519.295,77	277.297.712.915,76
Piutang	442.554.069.669,40	366.128.200.889,03
Penyisihan Piutang	(288.489.643.732,93)	(255.468.435.927,69)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	2.846.435,66
Persediaan	61.153.501.262,57	66.989.567.819,22
Jumlah	777.075.446.494,81	454.949.892.131,98

Kas dan Bank

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	561.857.519.295,77	277.297.712.915,76

Kas dan Bank per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp561.857.519.295,77 dan Rp277.297.712.915,76, merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah dan ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOS, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP serta Kas Dana BOK Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	505.269.820.888,31	234.552.295.324,51
Kas di Bendahara Penerimaan	1.457.940.835,73	956.095.399,17
Kas di BLUD	51.050.090.277,10	36.880.823.767,70
Kas Dana BOS	0,00	55.451.081,48
Kas Lainnya	691.837.241,01	4.853.047.342,90
Kas Dana BOSP	63.455.375,62	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	3.324.374.678,00	0,00
Jumlah Kas dan Bank	561.857.519.295,77	277.297.712.915,76

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp505.269.820.888,31 dan Rp234.552.295.324,51 yang merupakan kas murni dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 43 Rekening Koran Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024

No	Bank	Nomor Rekening	Nilai 2024	Nilai 2023
1.	Bank Jatim Cabang Jember	31070007	505.269.925.888,31	234.552.670.324,51
Jumlah			505.269.925.888,31	234.552.670.324,51



Kas di Kas Daerah pada Rekening Koran Bank Jatim sebesar Rp505.269.925.888,31, terdapat selisih Rp105.000,00 dimana selisih tersebut merupakan selisih antara nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum - Dinas Perhubungan dengan Rekening Koran Kas Daerah sebesar Rp105.000,00. Kelebihan Pembayaran tersebut merupakan Retribusi Jasa Umum - Pengujian Kendaraan Bermotor - Pengujian Kendaraan Bermotor atas pendapatan Dinas Perhubungan karena transfer ganda pada tahun 2023, yang disebabkan adanya maintenance QRIS pada bulan Juli 2023 berdasarkan pada surat Bank Jatim nomor 062/896/jbr/Ops. Dana/SRT.

Kas di Kas Daerah pada Bank Jatim sebesar Rp505.269.925.888,31 terdiri dari:

Tabel 5. 44 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024

No	URAIAN	Kas di Kasda (Rp)
	Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2024	505.269.925.888,31
	Terdiri dari:	
1	Sisa Tahun Yang Lalu	234.552.670.324,51
2	Sisa Pendapatan Transfer Umum	216.285.794.399,66
3	Sisa DBH Cukai	29.729.062.600,00
4	Sisa DID	114.549.520,00
5	Sisa BKK Provinsi (TA 2021 sd 2023)	20.515.000,14
6	Sisa BKK Provinsi TA 2024	1.388.920.300,00
7	Sisa DAK Fisik	557.854.012,00
8	Sisa DAK Non Fisik	22.620.559.732,00
	Jumlah	505.269.925.888,31

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.457.940.835,73 dan Rp956.095.399,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 45 Rincian di Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Keterangan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSD dr. Soebandi	6.370.540,73	25.909.450,17
2	RSD Balung	4.930.396,00	19.305.479,00
3	RSD Kalisat	12.102.400,00	14.435.900,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1.425.515.999,00	873.061.070,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	909.000,00	23.383.500,00
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.112.500,00	0,00
	Jumlah	1.457.940.835,73	956.095.399,17



Tabel 5. 46 Penyetoran Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024

NO	Uraian	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah/Kas BLUD
1	RSD dr. Soebandi	6.370.540,73	2 Januari 2025
2	RSD Balung	4.930.396,00	2 Januari 2025
3	RSD Kalisat	12.102.400,00	2 Januari 2025
4	Badan Pendapatan Daerah	1.425.515.999,00	2 Januari 2025
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	909.000,00	2 Januari 2025
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.112.500,00	2 Januari 2025
Jumlah		1.457.940.835,73	

Kas di Bendahara Penerimaan pada 3 Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Jember merupakan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan yang diterima saat batas akhir tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Nomor dan Nama Rekening 3 Rumah Sakit Kabupaten Jember

No	Uraian	Nomor dan Nama Rekening
1	RSD dr. Soebandi	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031019499 an. RSD dr. Soebandi
2	RSD Balung	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031005019 an. Bendahara Penerimaan RSD Balung
3	RSD Kalisat	Bank Jawa Timur Nomor Rekening 0031016339 an. RSD Kalisat

Kas di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.425.515.999,00 dan Rp873.061.070,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah

NO	Keterangan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	4.086.894,00	75.000,00
2	Pajak Restoran	68.225.369,00	152.308.321,00
3	Pajak Hiburan	6.693.000,00	10.645.000,00
4	Pajak Reklame	2.504.375,00	47.058.563,00
5	Pajak Parkir	281.850,00	0,00
6	Pajak Air Tanah	99.702,00	9.124.521,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	674.455.533,00	193.748.747,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	669.169.276,00	460.100.918,00
Jumlah		1.425.515.999,00	873.061.070,00

Tabel Rincian Nomor dan Nama Rekening Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah

No	Nama Bank	Nomor dan Nama Rekening	Nominal
1	Bank BCA	024111929 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember	232.346,00
2	Bank BNI	1946336336 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab. Jember	343.279,00
3	Bank Mandiri	1430023945734 a/n Penerimaan Pajak Daerah Kab. Jember	59.391.553,00



No	Nama Bank	Nomor dan Nama Rekening	Nominal
4	Bank Jatim (PBB)	0031023564 a/n Giro Pemda Kabupaten	597.334.645,00
5	Bank Jatim (Pajak Daerah Lainnya)	'00310031110033 a/n Giro Pemda Kabupaten	180.000,00
6	Magna Karsa Mulva (Indomaret)	-	24.260.210,00
7	Kantor Pos	-	743.773.966,00
Jumlah			1.425.515.999,00

Kas Bendahara Penerimaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp909.000,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang ditampung pada Rekening Bank Jatim Nomor 0031010071 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/140.1.12/2024 tanggal 7 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	21.000,00	0,00
2	Retribusi Pelataran	120.000,00	6.241.500,00
3	Retribusi Los	150.000,00	7.503.000,00
4	Retribusi Kios	0,00	4.931.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	298.000,00	2.157.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	320.000,00	2.551.000,00
Jumlah		909.000,00	23.383.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.112.500,00 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada rekening Penampung Bank Jatim Nomor 0031060001 sesuai 0031010071 sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/140.1.12/2024 tanggal 7 Februari 2024.

5.3.1.1.3 Kas di BLUD

Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.050.090.277,10 dan Rp36.880.823.767,70 terinci sebagai berikut:

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1. Kas RSD dr. Soebandi		
Rekening giro RSD dr. Soebandi di Bank Jatim Nomor 0031019499	1.238.062.580,00	8.621.547.341,25
Rekening giro RS di BNI Rek 0329701594	10.513.922.904,52	1.378.630.833,00
Deposito Bank Syariah Indonesia	0,00	10.000.000.000,00

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jumlah	11.751.985.484,52	20.000.178.174,25
2. Kas RSD Balung		
Rekening Giro RSD Balung di Bank Jatim Nomor 0031005019	1.322.417.648,92	5.595.141.517,49
Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran	186.056,00	0,00
Jumlah	1.322.603.704,92	5.595.141.517,49
3. Kas RSD Kalisat		
Rekening giro RS Kalisat di Bank Jatim Rek 0031016339	2.739.578.149,60	1.977.920.543,51
Jumlah	2.739.578.149,60	1.977.920.543,51
4 Kas di BLUD - 50 Puskesmas	35.235.922.938,06	9.307.583.532,45
Jumlah Kas di BLUD	51.050.090.277,10	36.880.823.767,70

Kas di BLUD 50 Puskesmas sebesar Rp35.235.922.938,06 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 48 Rincian Kas BLUD pada BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KAS BLUD (Rp)
1	Kencong	697.488.490,04
2	Cakru	521.018.265,29
3	Gumukmas	1.645.895.015,34
4	Tembokrejo	440.843.369,71
5	Puger	672.309.085,35
6	Kasiyan	996.760.085,67
7	Wuluhan	983.278.413,37
8	Lojejer	974.830.219,55
9	Ambulu	769.200.313,48
10	Sabrang	802.421.856,72
11	Andongsari	655.117.987,31
12	Tempurejo	696.420.270,81
13	Curahnongko	593.344.637,49
14	Silo I	650.628.160,60
15	Silo II	747.710.938,65
16	Mayang	899.726.001,56
17	Mumbulsari	837.275.541,16
18	Jenggawah	1.040.055.104,40
19	Kemuningsari	986.773.540,71
20	Ajung	1.314.396.793,12



NO	PUSKESMAS	JUMLAH KAS BLUD (Rp)
21	Rambipuji	877.738.908,84
22	Nogosari	826.616.025,05
23	Balung	371.740.184,23
24	Karangduren	618.713.265,39
25	Umbulsari	575.238.273,65
26	Paleran	407.655.303,00
27	Semboro	582.687.185,71
28	Jombang	677.623.947,38
29	Sumberbaru	438.398.052,67
30	Rowotengah	699.398.525,75
31	Tanggul	636.707.731,48
32	Klatakan	381.685.097,22
33	Bangsalsari	841.119.353,90
34	Sukorejo	552.775.120,81
35	Panti	756.906.473,73
36	Sukorambi	804.112.656,27
37	Arjasa	450.802.557,46
38	Pakusari	419.840.796,98
39	Kalisat	686.559.286,15
40	Ledokombo	168.806.318,71
41	Sumberjambe	811.711.557,97
42	Sukowono	1.256.154.781,30
43	Jelbuk	767.943.966,68
44	Kaliwates	458.690.170,78
	Mangli	494.618.900,20
46	Jember Kidul	112.384.198,47
47	Sumbersari	981.857.033,61
48	Gladak Pakem	479.821.624,85
49	Patrang	438.814.137,02
50	Banjarsengon	733.307.412,47
Jumlah Kas BLUD Puskemas		35.235.922.938,06

5.3.1.1.4 Kas Dana BOS

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan Rp55.451.081,48. Kas Dana BOS Tahun 2023 dicatat pada akun saldo Kas Dana BOS dan pada tahun 2024 direklasifikasi ke Akun Kas Dana BOSP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 49 Kas Dana Bos per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Lembaga	2024 Rp	2023 Rp
1	SD	0,00	42.037.588,56
2	SMP	0,00	13.413.492,92
JUMLAH		0,00	55.451.081,48)

5.3.1.1.5 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan Rekening Titipan Pasien di Bank Jatim - RSD dr. Soebandi per 31 Desember 2024 serta Bantuan Operasional Kesehatan pada 50 Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp691.837.241,01 dan Rp4.853.047.342,50. Kas BOK Puskesmas tahun 2023 dicatat pada Saldo Kas Lainnya dan pada tahun 2024 saldo Kas BOK direklasifikasi ke akun Kas Dana BOK Puskesmas.dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 50 Kas Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

NO	Keterangan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Lainnya - Rekening Titipan Pasien di Bank Jatim - RS dr. Soebandi	691.837.241,01	701.233.114,90
2	Kas Lainnya – Bantuan Operasional Kesehatan 50 Puskesmas	0,00	4.151.814.228,00)
JUMLAH		691.837.241,01	4.853.047.342,90

5.3.1.1.6 Kas Dana BOSP

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.455.375,62 dan Rp0,00. Kas BOS Tahun 2023 dicatat pada akun saldo Kas Dana BOS dan pada tahun 2024 direklasifikasi ke Akun Kas Dana BOSP, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 51 Rincian Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024

No	Lembaga	Saldo Akhir 2024	Saldo Akhir 2023
1	SD	56.791.874,70	0,00
2	SMP	6.663.500,92	0,00
Jumlah		63.455.375,62	0,00

Tabel 5. 52 Kas Dana BOSP – Dinas Pendidikan per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SD Negeri Reguler	34.291.853,70	0,00
2	SD Negeri Kinerja	22.500.021,00	0,00
3	SMP Negeri Reguler	6.663.289,92	0,00
4	SMP Negeri Kinerja	211,00	0,00
Jumlah		63.455.375,62	0,00

5.3.1.1.7 Kas BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.324.374.678,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Mutasi Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bantuan Operasional Kesehatan - 50 Puskesmas	3.324.374.678,00	0,00
JUMLAH		3.324.374.678,00	0,00

Kas BOK Puskesmas tahun 2023 dicatat pada Saldo Kas Lainnya dan pada tahun 2024 saldo kas BOK direklasifikasi ke akun Kas Dana BOK Puskesmas.

Adapun saldo Kas BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp3.324.374.678,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 54 Rincian Kas BOK Puskesmas per 31 Desember 2024

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KAS BOK
1	Kencong	67.172.045,00
2	Cakru	40.660.171,00
3	Gumukmas	57.289.659,00
4	Tembokrejo	45.383.901,00
5	Puger	95.421.687,00
6	Kasiyan	46.101.697,00
7	Wuluhan	49.708.600,00
8	Lojejer	22.363.388,00
9	Ambulu	99.965.326,00
10	Sabrang	97.390.691,00
11	Andongsari	64.111.945,00
12	Tempurejo	50.182.174,00
13	Curahnongko	41.058.341,00
14	Silo I	97.428.489,00
15	Silo II	70.773.740,00
16	Mayang	57.774.200,00
17	Mumbulsari	74.531.167,00
18	Jenggawah	65.448.027,00
19	Kemuningsari	44.180.988,00
20	Ajung	82.725.833,00
21	Rambipuji	103.712.607,00
22	Nogosari	54.918.458,00
23	Balung	90.531.196,00
24	Karangduren	46.399.978,00
25	Umbulsari	61.615.120,00
26	Paleran	77.589.494,00
27	Semboro	74.435.100,00
28	Jombang	78.557.410,00
29	Sumberbaru	54.254.580,00
30	Rowotengah	62.110.086,00
31	Tanggul	60.335.473,00
32	Klatakan	32.550.426,00



NO	PUSKESMAS	JUMLAH KAS BOK
33	Bangsalsari	79.474.731,00
34	Sukorejo	14.249.254,00
35	Panti	42.432.043,00
36	Sukorambi	87.792.100,00
37	Arjasa	76.419.035,00
38	Pakusari	47.172.118,00
39	Kalisat	87.239.762,00
40	Ledokombo	33.375.161,00
41	Sumberjambe	67.599.273,00
42	Sukowono	103.957.417,00
43	Jelbuk	35.566.312,00
44	Kaliwates	70.820.676,00
45	Mangli	68.768.646,00
46	Jember Kidul	76.280.652,00
47	Sumbersari	105.353.600,00
48	Gladak Pakem	118.987.018,00
49	Patrang	83.671.557,00
50	Banjarsengon	58.433.326,00
Jumlah Kas BOK		3.324.274.678,00

Piutang

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
442.554.069.669,40	366.128.200.889,03	76.425.868.780,37	20,87

Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp442.554.069.669,40 dan Rp366.128.200.889,03 yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp76.425.868.780,37 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp76.425.868.780,37 atau 20,87 persen.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran atau manfaat dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Perundang – undangan. Saldo Piutang pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp442.554.069.669,40 dengan perhitungan sebagai berikut :



	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	343.122.178.306,57	306.047.175.977,57
Piutang Retribusi	49.611.448.016,61	6.500.877.373,50
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.415.802.841,45	4.688.441.242,95
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.404.640.504,77	48.891.706.295,01
Jumlah Piutang	442.554.069.669,40	366.128.200.889,03
Penyisihan Piutang	(288.489.643.732,93)	(255.468.435.927,69)
Jumlah Piutang bersih	154.064.425.936,47	110.659.764.961,34

Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Jember selama Tahun 2024

No	Jenis Piutang	2023 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	306.047.175.977,57	0,00	(86.200.115,00)	50.808.809.384,00	13.647.606.940,00	343.122.178.306,57
2	Piutang Retribusi	6.500.877.373,50	6.429.084.812,24	(252.141.120,00)	265.386.032.688,87	228.452.405.738,00	49.611.448.016,61
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.688.441.242,95	0,00	(0,95)	4.227.361.599,45	1.500.000.000,00	7.415.802.841,45
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	48.891.706.295,01	(6.429.084.812,24)	0,00	497.918.645,00	555.899.623,00	42.404.640.504,77
	Jumlah Piutang	366.128.200.889,03	0,00	(338.341.235,95)	320.920.122.317,32	244.155.912.301,00	442.554.069.669,40
5	Penyisihan Piutang	(255.468.435.927,69)	0,00	0,00	0,00	33.021.207.805,24	(288.489.643.732,93)
	Piutang bersih	110.659.764.961,34	0,00	(338.341.235,95)	320.920.122.317,32	277.177.120.106,24	154.064.425.936,47

Saldo dan mutasi dari masing – masing Piutang Per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
343.122.178.306,57	306.047.175.977,57	37.075.002.329,00	12,11



Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp343.122.178.306,57 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp306.047.175.977,57 mengalami kenaikan sebesar Rp37.075.002.329,00 atau 12,11 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Piutang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp343.122.178.306,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	1.389.128.251,00	(6.235.500,00)	1.193.269.845,00	168.109.887,00	2.408.052.709,00
2	Piutang Pajak Restoran	1.299.792.160,00	(30.014.615,00)	2.491.647.726,00	596.364.375,00	3.165.060.896,00
3	Piutang Pajak Hiburan	219.224.494,00	(49.950.000,00)	118.446.611,00	54.924.630,00	232.796.475,00
4	Piutang Reklame	1.855.535.390,00	0,00	1.505.440.202,00	293.428.808,00	3.067.546.784,00
5	Piutang Pajak Peneranagn Jalan Non PLN	7.952.931,00	0,00	0,00	5.548.315,00	2.404.616,00
6	Pajak Parkir	5.922.203,00	0,00	62.557.597,00	4.880.503,00	63.599.297,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	16.678.722,00	0,00	23.046.470,00	12.995.855,00	26.729.337,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Piutang Pajak Batu Kapur - Bapenda	83.014.053,00	0,00	183.209.500,00	21.197.841,00	245.025.712,00
9	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	301.169.927.773,57	0,00	45.231.191.433,00	12.490.156.726,00	333.910.962.480,57
Jumlah		306.047.175.977,57	(86.200.115,00)	50.808.809.384,00	13.647.606.940,00	343.122.178.306,57

Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jember sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

➤ **Piutang Pajak Hotel**

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.408.052.709,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2008	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2017	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
2019	23.905.900,00	0,00	0,00	15.349.900,00	8.556.000,00
2020	182.300,00	0,00	0,00	0,00	182.300,00
2021	3.765.000,00	(3.388.500,00)	0,00	376.500,00	0,00
2022	24.687.249,00	0,00	0,00	4.733.000,00	19.954.249,00
2023	1.332.497.802,00	(2.847.000,00)	0,00	147.650.487,00	1.182.000.315,00
2024	0,00	0,00	1.193.269.845,00	0,00	1.193.269.845,00
Jumlah	1.389.128.251,00	(6.235.500,00)	1.193.269.845,00	168.109.887,00	2.408.052.709,00

Penambahan piutang pajak hotel terjadi karena:



- terdapat penambahan Pajak Hotel tahun 2024 sebanyak 49 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp1.193.269.845,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak hotel sebesar Rp168.109.887,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hotel tahun 2019 sebanyak 3 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp15.349.900,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hotel tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp376.500,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hotel tahun 2022 sebanyak 8 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp4.733.000,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hotel tahun 2023 sebanyak 21 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp147.650.487,00.

Koreksi kurang atas piutang pajak hotel sebesar Rp6.235.500,00 terdiri dari:

- koreksi pajak hotel tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp3.388.500,00 karena salah catat piutang pajak hotel yang seharusnya Rp376.500,00 tercatat Rp3.765.000,00
- koreksi pajak hotel tahun 2023 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.847.000,00 karena pokok ketetapan tidak sama dengan APDL (Aplikasi Pajak Daerah Lainnya) yang seharusnya Rp1.002.500 tercatat senilai Rp3.849.500,00.

➤ **Piutang Pajak Restoran**

Piutang pajak restoran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.165.060.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2005	12.936.500,00	0,00	0,00	0,00	12.936.500,00
2006	21.108.500,00	0,00	0,00	0,00	21.108.500,00
2007	27.813.700,00	0,00	0,00	0,00	27.813.700,00
2008	24.469.900,00	0,00	0,00	0,00	24.469.900,00
2010	1.472.787,00	0,00	0,00	0,00	1.472.787,00
2011	363.500,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00
2012	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.000,00
2013	1.726.200,00	0,00	0,00	0,00	1.726.200,00
2017	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00
2018	350.760,00	0,00	0,00	0,00	350.760,00
2019	92.542.876,00	(22.222.865,00)	0,00	4.253.465,00	66.066.546,00
2020	75.603.746,00	0,00	0,00	180.000,00	75.423.746,00
2021	615.278.911,00	(122.000,00)	0,00	217.831.339,00	397.325.572,00
2022	5.088.416,00	0,00	0,00	32.600,00	5.055.816,00



Tahun SKP	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2023	418.477.364,00	(7.669.750,00)	0,00	374.066.971,00	36.740.643,00
2024	0,00	0,00	2.491.647.726,00	0,00	2.491.647.726,00
Jumlah	1.299.792.160,00	(30.014.615,00)	2.491.647.726,00	596.364.375,00	3.165.060.896,00

Penambahan piutang pajak restoran terjadi karena:

- terdapat penambahan pajak restoran tahun 2024 sebanyak 340 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.491.647.726,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak restoran sebesar Rp596.364.375,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak restoran tahun 2019 sebanyak 14 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp4.253.465,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak restoran tahun 2020 sebanyak 8 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp180.000,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak restoran tahun 2021 sebanyak 20 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp217.831.339,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak restoran tahun 2022 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp32.600,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak restoran tahun 2023 sebanyak 62 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp374.066.971,00.

Koreksi kurang atas piutang pajak restoran sebesar Rp30.014.615,00 terdiri dari:

- terdapat koreksi kurang piutang pajak restoran tahun 2019 sebesar Rp22.222.865,00 terdiri dari salah catat 4 SPTPD sebesar Rp7.879.940,00, dobel catat 14 SPTPD sebesar Rp14.286.925,00 dan 2 SPTPD yang bukan objek pajak daerah sebesar Rp56.000,00.
- terdapat koreksi kurang piutang pajak restoran tahun 2021 sebesar Rp122.000,00 sebanyak 1 SPTPD karena salah catat piutang pajak restoran sebesar Rp200.000,00 yang seharusnya sebesar Rp78.000,00.
- terdapat koreksi kurang piutang pajak restoran tahun 2023 sebesar Rp7.669.750,00 sebanyak 2 SPTPD karena ketetapan piutang tidak sama dengan aplikasi APDL.

➤ **Piutang Pajak Hiburan**

Piutang Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp232.796.475,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2005	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
2006	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00

Tahun SKP	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2007	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2008	529.100,00	0,00	0,00	0,00	529.100,00
2009	14.720.000,00	0,00	0,00	0,00	14.720.000,00
2010	2.726.550,00	0,00	0,00	0,00	2.726.550,00
2019	110.244.500,00	(49.950.000,00)	0,00	173.000,00	60.121.500,00
2020	2.686.364,00	0,00	0,00	0,00	2.686.364,00
2021	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2022	4.706.300,00	0,00	0,00	0,00	4.706.300,00
2023	73.271.600,00	0,00	0,00	54.751.550,00	18.520.050,00
2024	0,00	0,00	118.446.611,00	0,00	118.446.611,00
Jumlah	219.224.494,00	(49.950.000,00)	118.446.611,00	54.924.630,00	232.796.475,00

Penambahan piutang pajak hiburan terjadi karena:

- terdapat penambahan pajak hiburan tahun 2024 sebanyak 27 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp118.446.611,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak hiburan sebesar Rp54.924.630,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hiburan tahun 2019 sebanyak 2 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp173.000,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hiburan tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp80,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak hiburan tahun 2023 sebanyak 18 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp54.751.550,00.

Koreksi kurang atas piutang pajak hiburan sebesar Rp49.950.000,00 terdiri dari:

- terdapat koreksi kurang piutang pajak hiburan tahun 2019 sebanyak 1 SPTPD sebesar Rp49.950.000,00 karena salah pencatatan sebesar Rp50.000.000,00 yang seharusnya Rp50.000,00.

➤ **Piutang Pajak Reklame**

Piutang Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.067.546.784,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 60 Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2004	8.030.000,00	0,00	0,00	8.030.000,00
2005	4.899.500,00	0,00	0,00	4.899.500,00
2006	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
2007	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
2008	22.175.000,00	0,00	0,00	22.175.000,00



Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2009	14.475.000,00	0,00	0,00	14.475.000,00
2010	9.088.500,00	0,00	0,00	9.088.500,00
2011	6.543.500,00	0,00	0,00	6.543.500,00
2012	117.359.033,00	0,00	0,00	117.359.033,00
2013	5.112.625,00	0,00	0,00	5.112.625,00
2016	5.590.625,00	0,00	0,00	5.590.625,00
2017	17.603.688,00	0,00	0,00	17.603.688,00
2018	140.138.354,00	0,00	0,00	140.138.354,00
2019	346.352.820,00	0,00	15.596.938,00	330.755.882,00
2020	307.979.076,00	0,00	5.770.000,00	302.209.076,00
2021	231.992.625,00	0,00	29.463.125,00	202.529.500,00
2022	43.847.375,00	0,00	942.500,00	42.904.875,00
2023	558.347.669,00	0,00	241.656.245,00	316.691.424,00
2024	0,00	1.505.440.202,00	0,00	1.505.440.202,00
Jumlah	1.855.535.390,00	1.505.440.202,00	293.428.808,00	3.067.546.784,00

Penambahan piutang pajak reklame terjadi karena:

- terdapat penambahan atas pajak reklame tahun 2024 sebanyak 966 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp1.505.440.202,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak reklame sebesar Rp293.428.808,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak reklame tahun 2019 sebanyak 3 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp15.596.938,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak reklame tahun 2020 sebanyak 1 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp5.770.000,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak reklame tahun 2021 sebanyak 3 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp29.463.125,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak reklame tahun 2022 sebanyak 2 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp942.500,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak reklame tahun 2023 sebanyak 135 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp241.656.245,00.

➤ **Piutang Pajak Penerangan Jalan – NonPLN**

Piutang pajak penerangan jalan NonPLN sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.404.616,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Piutang Pajak PPJ Non PLN per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2019	630.364,00	0,00	125.550,00	504.814,00

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2020	502.254,00	0,00	0,00	502.254,00
2021	2.236.244,00	0,00	838.696,00	1.397.548,00
2022	4.584.069,00	0,00	4.584.069,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.952.931,00	0,00	5.548.315,00	2.404.616,00

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak Penerangan Jalan Non PLN sebesar Rp5.548.315,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2019 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp125.550,00;
- terdapat pengurangan atas Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2021 sebanyak 3 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp838.696,00;
- terdapat pengurangan atas Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2022 sebanyak 24 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp4.584.069,00.

➤ **Piutang Pajak Parkir**

Piutang Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp63.739.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Rincian Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2018	226.700,00	0,00	0,00	226.700,00
2021	230.000,00	0,00	80.000,00	150.000,00
2022	2.438.000,00	0,00	2.308.000,00	130.000,00
2023	3.027.503,00	0,00	2.492.503,00	535.000,00
2024	0,00	62.557.597,00	0,00	62.557.597,00
Jumlah	5.922.203,00	62.557.597,00	4.880.503,00	63.599.297,00

Penambahan piutang pajak parkir terjadi karena:

- terdapat penambahan pajak parkir tahun 2024 sebanyak 17 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp62.557.597,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak parkir sebesar Rp4.880.503,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak parkir tahun 2021 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp80.000,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak parkir tahun 2022 sebanyak 4 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.308.000,00;



- terdapat pengurangan atas penetapan pajak parkir tahun 2023 sebanyak 9 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp2.492.503,00.

➤ **Piutang Pajak Air Tanah**

Piutang pajak air tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.990.610,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2021	461.351,00	0,00	0,00	461.351,00
2022	847.434,00	0,00	847.434,00	0,00
2023	15.369.937,00	0,00	12.148.421,00	3.221.516,00
2024	0,00	23.046.470,00	0,00	23.046.470,00
Jumlah	16.678.722,00	23.046.470,00	12.995.855,00	26.729.337,00

Penambahan piutang pajak air tanah terjadi karena:

- terdapat penambahan pajak air tanah tahun 2024 sebanyak 251 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp23.046.470,00.

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak air tanah sebesar Rp12.995.855,00 terjadi karena:

- terdapat pengurangan atas penetapan pajak air tanah tahun 2022 sebanyak 10 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp847.434,00;
- terdapat pengurangan atas penetapan pajak air tanah tahun 2023 sebanyak 140 SKPD dengan pokok pajak senilai Rp12.148.421,00;

➤ **Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur**

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – Batu Kapur sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp245.025.712,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2011	4.170.000,00	0,00	0,00	4.170.000,00
2012	6.157.700,00	0,00	0,00	6.157.700,00
2014	355.931,00	0,00	0,00	355.931,00
2015	7.489.300,00	0,00	0,00	7.489.300,00
2016	35.317.325,00	0,00	0,00	35.317.325,00
2018	486.981,00	0,00	0,00	486.981,00
2019	7.338.381,00	0,00	5.841,00	7.332.540,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506.435,00	0,00	0,00	506.435,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21.192.000,00	0,00	21.192.000,00	0,00



Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2024	0,00	183.209.500,00		183.209.500,00
Jumlah	83.014.053,00	183.209.500,00	21.197.841,00	245.025.712,00

Penambahan piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur terjadi karena:

- terdapat penambahan atas pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur sebanyak 6 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp183.209.500,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur sebesar Rp21.197.841,00 terjadi karena:

- terdapat pembayaran atas penetapan piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur tahun 2019 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp5.841,00.
- terdapat pembayaran atas penetapan piutang pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Batu Kapur tahun 2023 sebanyak 1 SPTPD dengan pokok pajak senilai Rp21.192.000,00.

➤ **Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp333.910.962.480,57 dengan rincian sebesar berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Piutang Pajak PBB per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2001	24.128.987.512,00	0,00	395.282,00	24.128.592.230,00
2002	1.456.371.199,88	0,00	86.856,00	1.456.284.343,88
2003	643.512.806,60	0,00	29.740,00	643.483.066,60
2004	2.535.973.773,56	0,00	187.176,00	2.535.786.597,56
2005	4.885.487.382,12	0,00	137.574,00	4.885.349.808,12
2006	8.142.870.144,48	0,00	254.920,00	8.142.615.224,48
2007	4.587.040.370,84	0,00	336.946,00	4.586.703.424,84
2008	10.693.746.349,44	0,00	446.988,00	10.693.299.361,44
2009	461.576.934,44	0,00	1.430.238,00	460.146.696,44
2010	1.177.112.556,44	0,00	8.332.092,00	1.168.780.464,44
2011	3.224.864.995,14	0,00	25.640.126,00	3.199.224.869,14
2012	3.864.783.682,63	0,00	29.234.241,00	3.835.549.441,63
2013	3.274.559.476,00	0,00	116.466.059,00	3.158.093.417,00
2014	9.993.572.799,00	0,00	283.300.196,00	9.710.272.603,00
2015	13.767.338.759,00	0,00	397.895.619,00	13.369.443.140,00
2016	14.351.602.196,00	0,00	409.824.410,00	13.941.777.786,00
2017	13.282.891.505,00	0,00	413.030.706,00	12.869.860.799,00
2018	13.578.877.715,00	0,00	431.407.706,00	13.147.470.009,00
2019	14.343.824.432,00	0,00	479.942.014,00	13.863.882.418,00
2020	33.580.849.078,00	0,00	1.128.417.908,00	32.452.431.170,00
2021	35.388.498.992,00	0,00	1.316.014.114,00	34.072.484.878,00



Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2022	38.516.384.973,00	0,00	2.080.807.896,00	36.435.577.077,00
2023	45.289.200.141,00	0,00	5.366.537.919,00	39.922.662.222,00
2024	0,00	45.231.191.433,00	0,00	45.231.191.433,00
Jumlah	301.169.927.773,57	45.231.191.433,00	12.490.156.726,00	333.910.962.480,57

Penambahan piutang pajak PBB-P2 terjadi karena terdapat penambahan atas penetapan PBB-P2 sebanyak 598.332 SPTPD dengan pokok pajak sebesar Rp45.231.191.433,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang pajak PBB-P2 sebesar Rp12.490.156.726,00 terjadi karena terdapat pembayaran pajak PBB-P2 ketetapan tahun 2001 - 2023 sebanyak 158.330 SPPT dengan pokok pajak senilai Rp12.490.156.726,00.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
49.611.448.016,61	6.500.877.373,50	43.110.570.643,11	663,15

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.611.448.016,61 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.500.877.373,50 mengalami kenaikan sebesar Rp43.110.570.643,11 atau 663,15 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.611.448.016,61 terdiri dari:

Tabel 5. 66 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
a	Piutang Retribusi Jasa Umum						
1	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	1.858.550.550,00	(8.733.300,00)	4.173.861.600,00	1.849.772.250,00	4.173.906.600,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	4.570.534.262,24	(243.407.820,00)	259.170.751.416,87	225.603.464.285,00	37.894.413.574,11



No	Uraian	2023 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
3	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Perhubungan	1.790.887.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00
4	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Informasi dan Komunikasi	1.127.137.630,00	0,00	0,00	0,00	888.462.228,00	238.675.402,00
5	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.248.761.015,00	0,00	0,00	2.023.386.672,00	110.706.975,00	5.161.440.712,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	18.033.000,00	0,00	18.033.000,00
b	Piutang Retribusi Jasa Usaha						
1	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan - Badan Pendapatan Daerah	39.654.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.654.500,00
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Pemakaian Alat	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00



No	Uraian	2023 (Rp)	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
	- DPU Bina Marga						
4	Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	65.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.610.000,00
Jumlah		6.500.877.373,50	6.429.084.812,24	(252.141.120,00)	265.386.032.688,87	228.452.405.738,00	49.611.448.016,61

A. Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp49.277.357.038,11 terdiri dari:

1. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Terdapat Reklasifikasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH 50 Puskesmas ke Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp4.173.906.600,00.

Adapun penjelasan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas senilai Rp4.173.906.600,00 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi	penambahan	pengurangan	2024
1	Piutang BPJS - Non Kapitasi						
	Puskesmas Kencong	0,00	54.030.000,00	0,00	33.155.000,00	54.030.000,00	33.155.000,00
	Puskesmas Cakru	0,00	26.420.750,00	0,00	73.120.000,00	26.420.750,00	73.120.000,00
	Puskesmas Gumukmas	0,00	20.590.000,00	0,00	146.952.500,00	20.590.000,00	146.952.500,00
	Puskesmas Tembokrejo	0,00	9.995.000,00	0,00	48.640.000,00	9.995.000,00	48.640.000,00
	Puskesmas Puger	0,00	27.633.300,00	0,00	114.570.000,00	27.633.300,00	114.570.000,00
	Puskesmas Kasiyan	0,00	17.522.500,00	0,00	34.300.000,00	17.522.500,00	34.300.000,00
	Puskesmas Wuluhan	0,00	35.606.750,00	0,00	137.308.000,00	35.606.750,00	137.308.000,00
	Puskesmas Lojejer	0,00	3.590.000,00	0,00	46.000.000,00	3.590.000,00	46.000.000,00
	Puskesmas Ambulu	0,00	130.641.500,00	(6.972.500,00)	241.595.000,00	123.669.000,00	241.595.000,00
	Puskesmas Sabrang	0,00	15.602.500,00	0,00	50.740.000,00	15.602.500,00	50.740.000,00
	Puskesmas Andongsari	0,00	26.843.250,00	0,00	38.377.000,00	26.843.250,00	38.377.000,00
	Puskesmas Tempurejo	0,00	71.750.000,00	0,00	101.002.000,00	71.750.000,00	101.002.000,00
	Puskesmas Curahnongko	0,00	15.135.750,00	45.000,00	40.148.000,00	15.135.750,00	40.193.000,00
	Puskesmas Silo I	0,00	28.715.000,00		-	28.715.000,00	-



No	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi	penambahan	pengurangan	2024
	Puskesmas Silo II	0,00	40.577.500,00	0,00	120.390.000,00	40.577.500,00	120.390.000,00
	Puskesmas Mayang	0,00	55.610.000,00	0,00	125.095.000,00	55.610.000,00	125.095.000,00
	Puskesmas Mumbulsari	0,00	56.735.000,00	0,00	52.590.000,00	56.735.000,00	52.590.000,00
	Puskesmas Jenggawah	0,00	73.050.000,00	0,00	102.685.000,00	73.050.000,00	102.685.000,00
	Puskesmas Kemungsari Kidul	0,00	12.250.000,00	0,00	59.711.000,00	12.250.000,00	59.711.000,00
	Puskesmas Ajung	0,00	96.767.000,00	0,00	193.147.000,00	96.767.000,00	193.147.000,00
	Puskesmas Rambipuji	0,00	55.272.500,00	0,00	54.825.000,00	55.272.500,00	54.825.000,00
	Puskesmas Nogosari	0,00	22.200.000,00	0,00	40.180.000,00	22.200.000,00	40.180.000,00
	Puskesmas Balung	0,00	13.375.000,00	0,00	9.520.000,00	13.375.000,00	9.520.000,00
	Puskesmas Karangduren	0,00	27.093.000,00	0,00	43.288.000,00	27.093.000,00	43.288.000,00
	Puskesmas Umbulsari	0,00	32.602.500,00	0,00	140.400.000,00	32.602.500,00	140.400.000,00
	Puskesmas Paleran	0,00	38.370.000,00	0,00	34.690.000,00	38.370.000,00	34.690.000,00
	Puskesmas Semboro	0,00	76.337.500,00	0,00	120.530.000,00	76.337.500,00	120.530.000,00
	Puskesmas Jombang	0,00	7.098.250,00	0,00	83.350.000,00	7.098.250,00	83.350.000,00
	Puskesmas Sumberbaru	0,00	0,00	0,00	33.160.000,00	0,00	33.160.000,00
	Puskesmas Rowotengah	0,00	27.162.500,00	0,00	87.250.000,00	27.162.500,00	87.250.000,00
	Puskesmas Tanggul	0,00	31.522.500,00	0,00	43.961.000,00	31.522.500,00	43.961.000,00
	Puskesmas Klatakan	0,00	28.088.000,00	(1.550.000,00)	128.508.000,00	26.538.000,00	128.508.000,00
	Puskesmas Bangsalsari	0,00	78.720.000,00	(255.800,00)	239.352.100,00	78.464.200,00	239.352.100,00
	Puskesmas Sukorejo	0,00	40.016.000,00	0,00	72.843.000,00	40.016.000,00	72.843.000,00
	Puskesmas Panti	0,00	100.305.000,00	0,00	35.470.000,00	100.305.000,00	35.470.000,00
	Puskesmas Sukorambi	0,00	16.095.000,00	0,00	28.470.000,00	16.095.000,00	28.470.000,00
	Puskesmas Arjasa	0,00	20.142.000,00	0,00	167.075.000,00	20.142.000,00	167.075.000,00
	Puskesmas Pakusari	0,00	12.429.000,00	0,00	25.820.000,00	12.429.000,00	25.820.000,00
	Puskesmas Kalisat	0,00	10.865.000,00	0,00	28.305.000,00	10.865.000,00	28.305.000,00
	Puskesmas Ledokombo	0,00	28.804.000,00	0,00	140.600.000,00	28.804.000,00	140.600.000,00
	Puskesmas Sumberjambe	0,00	80.240.000,00	0,00	200.145.000,00	80.240.000,00	200.145.000,00
	Puskesmas Sukowono	0,00	106.557.500,00	0,00	355.870.000,00	106.557.500,00	355.870.000,00
	Puskesmas Jelbuk	0,00	39.355.000,00	0,00	47.480.000,00	39.355.000,00	47.480.000,00
	Puskesmas Kaliwates	0,00	27.020.000,00	0,00	79.250.000,00	27.020.000,00	79.250.000,00
	Puskesmas Mangli	0,00	49.767.000,00	0,00	54.194.000,00	49.767.000,00	54.194.000,00
	Puskesmas Jemberkidul	0,00	800.000,00	0,00	6.765.000,00	800.000,00	6.765.000,00
	Puskesmas Sumbersari	0,00	21.710.000,00	0,00	23.650.000,00	21.710.000,00	23.650.000,00
	Puskesmas Gladakpakem	0,00	7.680.000,00	0,00	16.300.000,00	7.680.000,00	16.300.000,00
	Puskesmas Patrang	0,00	23.855.000,00	0,00	62.630.000,00	23.855.000,00	62.630.000,00



No	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi	penambahan	pengurangan	2024
	Puskesmas Banjarsengon	0,00	16.002.500,00	0,00	10.455.000,00	16.002.500,00	10.455.000,00
Total		0,00	1.858.550.550,00	(8.733.300,00)	4.173.861.600,00	1.849.772.250,00	4.173.906.600,00

Penjelasan atas Koreksi Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp8.733.300,00 adalah sebagai berikut:

- a. terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Ambulu sebesar Rp6.972.500,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS, dari pengajuan Rp130.641.500,00 dilakukan Verifikasi sebesar Rp123.669.000,00.
 - b. terdapat koreksi tambah atas Piutang Puskesmas Curahnongko sebesar Rp45.000,00 karena kelebihan pembayaran belanja bahan Natura.
 - c. terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Klatakan sebesar Rp1.550.000,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS, dari pengajuan Rp28.088.000,00 dilakukan Verifikasi sebesar Rp26.538.000,00.
 - d. terdapat koreksi kurang atas Piutang Puskesmas Bangsalsari sebesar Rp255.800,00 karena terdapat perbedaan saat pengajuan dan Verifikasi BPJS, dari pengajuan Rp78.720.000,00 dilakukan Verifikasi sebesar Rp78.464.200,00.
2. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Terdapat Reklasifikasi Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp37.894.413.574,11.

Adapun penjelasan dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp37.894.413.574,11 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024
1	RS. dr. Soebandi						
	Piutang BPJS	0,00	147.507.753,00	0,00	195.024.768.847,00	169.623.364.422,00	25.548.912.178,00
	Piutang SPM	0,00	1.159.547.444,24	(37.816.400,00)	472.650.033,00	499.706.833,00	1.094.674.244,24
	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang kepada Asuransi Lainnya	0,00	1.611.206.578,00	(143.419.109,00)	13.294.728.114,87	12.800.878.497,00	1.961.637.086,87
	Kemenkes (COVID - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024
2	RS. Balung						
	Piutang BPJS	0,00	20.326.680,00	-	45.595.850.426,00	40.869.851.858,00	4.746.325.248,00
	Piutang Jasa Raharja	0,00	100.987.404,00	(62.172.311,00)	743.849.652,00	782.257.723,00	407.022,00
	Piutang SPM	0,00	-	-	-	-	-
	Kemenkes (COVID - 19)	0,00	593.586.000,00	-	-	-	593.586.000,00
3	RS. Kalisat						
	Piutang BPJS	0,00	854.593.700,00	-	3.856.574.287,00	854.593.700,00	3.856.574.287,00
	Piutang JAMPERSAL	0,00	-	-	139.596.200,00	139.596.200,00	-
	Piutang Jasa Raharja	0,00	11.151.252,00	-	8.710.631,00	11.151.252,00	8.710.631,00
	Piutang Ketenagakerjaan	0,00	71.627.451,00	-	27.498.226,00	22.063.800,00	77.061.877,00
	Piutang TCM - TB RO	0,00	-	-	6.525.000,00		6.525.000,00
	Piutang Parkir	0,00	-	-	-	-	-
	Total	0,00	4.570.534.262,24	(243.407.820,00)	259.170.751.416,87	225.603.464.285,00	37.894.413.574,11

❖ Penjelasan atas Koreksi Piutang BLUD dari Jasa Layanan RS. dr. Soebandi pada tahun 2024 sebesar Rp181.235.509,00 adalah sebagai berikut:

a. Piutang SPM sebesar Rp37.816.400,00

- terdapat koreksi kurang atas piutang SPM Situbondo an. Suparmo sebesar Rp3.585.300,00. Nilai pengajuan Klaim sebesar Rp17.119.000,00 terverif sebesar Rp13.533.700,00.
- terdapat koreksi kurang atas piutang SPM Lumajang sebesar Rp20.000,00 karena terdapat selisih pembayaran sebesar Rp11.355.000,00 seharusnya Rp11.335.000,00.
- terdapat koreksi kurang atas piutang SPM Biakesmaskin sebesar Rp34.211.100,00 karena dobel catat pembayaran tanggal 22 Desember 2023

b. Piutang Kepada Asuransi Lainnya sebesar Rp143.419.109,00

- terdapat koreksi kurang atas piutang PT. Jasa Raharja an. Prasetyo Dwi Fambudi sebesar Rp4.547.195 dimana terdapat selisih pembayaran Klaim Jasa Raharja Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,00 dengan yang diajukan sebesar Rp15.452.805,00.
- terdapat koreksi kurang atas piutang PT. Telkom sebesar Rp2.900,00 karena biaya transfer.

❖ Terdapat koreksi kurang atas piutang RS Balung Penjelasan atas Koreksi Piutang BLUD dari Jasa Layanan RS. Balung pada tahun 2024 sebesar Rp62.172.311,00



karena pengajuan klaim ke PT. Jasarahaja tidak layak klaim/ kadaluarsa.

2. Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan dalam tahun 2024 tidak ada mutasi penambahan dan pengurangan, dimana mutasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum – Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2014	44.849.550,00	0,00	0,00	44.849.550,00
2015	1.746.038.200,00	0,00	0,00	1.746.038.200,00
Jumlah	1.790.887.750,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ini sesuai dengan peraturan Bupati Nomor :11 Tahun 2012. Tetapi retribusi ini pada tanggal 9 Juni 2015, sesuai surat Kementerian keuangan RI Nomor: S-349/PK/2015 perihal penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tarif retribusi harus disesuaikan. Daftar Nama-nama penanggung piutang sebagai berikut:

Tabel 5. 68 Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum – Pengendalian Menara

NO	Perusahaan (PT)	Piutang 2014	Piutang 2015
1	Bakrie Tel	0,00	6.212.800,00
2	Daya Mitra Tel	0,00	99.981.000,00
3	Flexi (Telkom)	44.849.550,00	0,00
4	Inti Bangun Sejahtera (IBS)	0,00	0,00
5	Indosat	0,00	174.499.600,00
6	Naragita DK	0,00	16.478.200,00
7	Persada ST	0,00	17.567.100,00
8	Protelindo	0,00	236.838.600,00
9	Sampoerna Tel	0,00	25.707.100,00
10	Smart Tel	0,00	7.284.300,00
11	Solusi Tunas Pratama (STP)	0,00	122.149.800,00
12	Tower Bersama Grup (TBG)	0,00	293.196.100,00
13	Telkomsel	0,00	455.520.100,00
14	XL Axiata	0,00	290.603.500,00
	JUMLAH	44.849.550,00	1.746.038.200,00

4. Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 5. 69 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2023	1.127.137.630,00	0,00	888.462.228,00	238.675.402,00
Jumlah	1.127.137.630,00	0,00	888.462.228,00	238.675.402,00

Tabel Rincian Nama Penanggung Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengendalian Menara Telekomunikasi – Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Pemilik Tower	Jumlah Tower	Nilai Piutang (Rp)
1	PT. Citra Gaia	3	19.809.352,00
2	PT. Komet Infra Nusantara (Kin)	1	7.092.237,00
3	PT. Protelindo	123	5.042.989,00
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	70	8,00
5	PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk	1	12,00
6	PT. Solusi Tunas Pratama	35	206.727.903,00
7	PT. Iforte	2	2.901,00
	Jumlah	235	238.675.402,00

5. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar–Piutang Retribusi Kios
- Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.161.440.712,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Rincian Piutang Retribusi - Kios per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2012	39.410.090,00	0,00	0,00	39.410.090,00
2016	109.856.100,00	0,00	0,00	109.856.100,00
2017	6.726.300,00	0,00	0,00	6.726.300,00
2018	103.782.750,00	0,00	0,00	103.782.750,00
2019	508.295.100,00	0,00	2.781.600,00	505.513.500,00
2020	588.282.200,00	0,00	8.043.600,00	580.238.600,00
2021	638.519.250,00	0,00	10.047.600,00	628.471.650,00
2022	689.525.100,00	0,00	20.192.850,00	669.332.250,00
2023	564.364.125,00	0,00	69.641.325,00	494.722.800,00
2024	0,00	2.023.386.672,00	0,00	2.023.386.672,00
Jumlah	3.248.761.015,00	2.023.386.672,00	110.706.975,00	5.161.440.712,00

Penambahan piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios terjadi karena terdapat penambahan atas penetapan Piutang Retribusi Kios sebanyak 6.707 SKR dengan pokok pajak sebesar Rp2.023.386.672,00;

Pengurangan atas pembayaran piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Piutang Retribusi Kios sebesar Rp110.706.975,00 terjadi karena terdapat



pembayaran:

- Tahun 2019 sebanyak 24 SKRD senilai Rp2.781.600,00
- Tahun 2020 sebanyak 61 SKRD senilai Rp8.043.600,00
- Tahun 2021 sebanyak 83 SKRD senilai Rp10.047.600,00
- Tahun 2022 sebanyak 176 SKRD senilai Rp20.192.850,00
- Tahun 2023 sebanyak 640 SKRD senilai Rp69.641.325,00

6. Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Piutang Retribusi Los

Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los – pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.033.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Rincian Piutang Retribusi Los per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2024	0,00	18.033.000,00	0,00	18.033.000,00
Jumlah	0,00	18.033.000,00	0,00	18.033.000,00

Penambahan Piutang Retribusi Jasa Umum - Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios selama tahun 2024 terdapat penetapan SKRD tahun 2024 sebanyak 493 senilai Rp18.033.000,00.

B. Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp334.090.978,50 terdiri dari:

1. Piutang Retribusi Jasa Usaha –Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang retribusi Jasa Usaha - Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perumahan Umum Bina Marga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp88.826.478,50 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas

Tabel 5. 72 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Rumah Dinas per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2016	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00



- Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah

Tabel 5. 73 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Sewa Penggunaan Tanah per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2016	82.826.478,50	0,00	0,00	82.826.478,50
Jumlah	82.826.478,50	0,00	0,00	82.826.478,50

2. Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan - Rumah Dinas – Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.654.500,00 terdiri dari:

Tabel Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Penyewaan Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2005	8.738.500,00	0,00	0,00	8.738.500,00
2006	5.669.000,00	0,00	0,00	5.669.000,00
2007	5.594.500,00	0,00	0,00	5.594.500,00
2008	6.532.500,00	0,00	0,00	6.532.500,00
2009	1.292.500,00	0,00	0,00	1.292.500,00
2010	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
2011	2.392.500,00	0,00	0,00	2.392.500,00
2012	2.445.000,00	0,00	0,00	2.445.000,00
2013	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
2014	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
2015	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2016	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2017	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2018	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
2019	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
2023	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Jumlah	39.654.500,00	0,00	0,00	39.654.500,00

3. Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat - DPU Binamarga

Mutasi Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat adalah sebesar Rp140.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 74 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha – Pemakaian Alat per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2017	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00
Jumlah	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00

4. Piutang Retribusi Jasa Usaha - Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan

Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan-Jompo Shopping Centre pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp65.610.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 75 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir/Pertokoan per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2016	13.230.000,00	0,00	0,00	13.230.000,00
2017	7.560.000,00	0,00	0,00	7.560.000,00
2018	26.820.000,00	0,00	0,00	26.820.000,00
2019	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	65.610.000,00	0,00	0,00	65.610.000,00

5.3.1.1.10 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
7.415.802.841,45	4.688.441.242,95	2.727.361.598,50	58,17

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.415.802.841,45 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.688.441.242,95 mengalami kenaikan sebesar Rp2.727.361.598,50 atau 58,17 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.415.802.841,45 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5. 76 Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
per 31 Desember 2024**

No	Uraian	2023 (Rp)	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	4.688.441.242,95	(0,95)	4.227.361.599,45	1.500.000.000,00	7.415.802.841,45
JUMLAH		4.688.441.242,95	(0,95)	4.227.361.599,45	1.500.000.000,00	7.415.802.841,45

Mutasi Tambah sebesar Rp4.227.361.599,45 merupakan bagian laba pemda sebesar 55 persen dari pendapatan bersih PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember tahun 2023 sesuai Peraturan Daerah nomor 04 tahun 1975 PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember telah mencadangkan bagian laba tersebut di kewajiban lainnya dalam laporan keuangan PDAM Tahun 2023 Audited. Terdapat Koreksi Kurang sebesar Rp0,95 karena penyesuaian angka Audited pada Laporan Keuangan PDAM Tahun Anggaran 2023.

Mutasi kurang sebesar Rp1.500.000.000,00 merupakan pengurangan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan atas penyetoran bagian laba penyertaan modal oleh PDAM kepada Pemerintah Kabupaten Jember di Tahun 2024.

5.3.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
42.404.640.504,77	48.891.706.295,01	(6.487.065.790,24)	(13,27)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.404.640.504,77 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.891.706.295,01 mengalami penurunan sebesar Rp6.487.065.790,24 atau 13,27 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.404.640.504,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 77 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - Dinas Perhubungan	18.950.500,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.950.500,00

No	Uraian	2023 (Rp)	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	42.351.475.982,77	0,00	146.019.645,00	188.411.623,00	42.309.084.004,77
3	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	92.195.000,00	0,00	0,00	92.195.000,00	0,00
4	Piutang Pendapatan BLUD	6.429.084.812,24	(6.429.084.812,24)	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	351.899.000,00	272.293.000,00	79.606.000,00
JUMLAH		48.891.706.295,01	(6.429.084.812,24)	497.918.645,00	555.899.623,00	42.404.640.504,77

1. Piutang Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – Dinas Perhubungan

Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang SAH - Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan sebesar Rp15.950.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Piutang Konsensi - Dinas Perhubungan per 31 Desember 2024

Tahun SKR	2023 (Rp)	Koreksi Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2018	12.856.700,00	0,00	0,00	3.000.000,00	9.856.700,00
2020	6.093.800,00	0,00	0,00	0,00	6.093.800,00
Jumlah	18.950.500,00	0,00	0,00	3.000.000,00	15.950.500,00

Terdapat pembayaran Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara – Dinas Perhubungan atas PT. Quarta sebesar Rp3.000.000,00.

2. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB

Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB – Bapenda sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp42.309.084.004,77 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 79 Rincian Piutang Atas Denda PBB per 31 Desember 2024

Tahun SKP	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
2001	11.581.918.238,56	0,00	184.346,00	11.581.733.892,56
2002	699.058.175,14	0,00	41.691,00	699.016.484,14
2003	308.886.148,45	0,00	14.275,00	308.871.873,45
2004	1.217.267.410,91	0,00	61.127,00	1.217.206.283,91
2005	2.345.033.943,70	0,00	62.957,00	2.344.970.986,70
2006	3.908.577.668,55	0,00	118.975,00	3.908.458.693,55
2007	2.202.034.657,44	0,00	154.229,00	2.201.880.428,44
2008	5.143.174.421,05	0,00	203.449,00	5.142.970.972,05
2009	245.367.503,41	0,00	637.543,00	244.729.960,41
2010	650.895.748,85	0,00	3.528.418,00	647.367.330,85
2011	1.721.229.488,67	0,00	11.403.295,00	1.709.826.193,67
2012	2.036.636.886,06	0,00	12.887.955,00	2.023.748.931,06
2013	1.719.679.374,36	0,00	2.007.518,00	1.717.671.856,36
2014	5.118.421.395,56	0,00	4.161.153,00	5.114.260.242,56
2015	3.453.294.922,06	0,00	6.925.047,00	3.446.369.875,06
2016	0,00	6.876.708,00	6.876.708,00	0,00
2017	0,00	6.695.290,00	6.695.290,00	0,00
2018	0,00	8.715.941,00	8.715.941,00	0,00
2019	0,00	10.160.789,00	10.160.789,00	0,00
2020	0,00	21.033.846,00	21.033.846,00	0,00
2021	0,00	26.468.099,00	26.468.099,00	0,00
2022	0,00	32.800.667,00	32.800.667,00	0,00
2023	0,00	32.881.488,00	32.881.488,00	0,00
2024	0,00	386.817,00	386.817,00	0,00
Jumlah	42.351.475.982,77	146.019.645,00	188.411.623,00	42.309.084.004,77

Penambahan terjadi karena terdapat pengakuan Piutang atas denda Pajak PBB tahun 2016-2024 senilai Rp146.019.645,00. Sedangkan pengurangan terjadi karena terdapat pembayaran denda pajak PBB ketetapan tahun 2001 –2024 senilai Rp188.411.623,00.

3. Piutang Pendapatan BLUD

Terdapat Reklasifikasi Piutang Pendapatan BLUD ke Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.429.084.812,24.

No	Keterangan	2023	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2024
1	RS. dr. Soebandi					
	Piutang BPJS	147.507.753,00	(147.507.753,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang SPM	1.159.547.444,24	(1.159.547.444,24)	0,00	0,00	0,00



No	Keterangan	2023	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2024
	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang kepada Asuransi Lainnya	1.611.206.578,00	(1.611.206.578,00)	0,00	0,00	0,00
	Kemenkes (COVID - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RS. Balung					
	Piutang BPJS	20.326.680,00	(20.326.680,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	100.987.404,00	(100.987.404,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kemenkes (COVID - 19)	593.586.000,00	(593.586.000,00)	0,00	0,00	0,00
3	RS. Kalisat					
	Piutang BPJS	854.593.700,00	(854.593.700,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang JAMPERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Jasa Raharja	11.151.252,00	(11.151.252,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang Ketenagakerjaan	71.627.451,00	(71.627.451,00)	0,00	0,00	0,00
	Piutang TCM - TB RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang BPJS - Non Kapitasi					
	Puskesmas Kencong	54.030.000,00	(54.030.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Cakru	26.420.750,00	(26.420.750,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Gumukmas	20.590.000,00	(20.590.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Tembokrejo	9.995.000,00	(9.995.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Puger	27.633.300,00	(27.633.300,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kasiyan	17.522.500,00	(17.522.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Wuluhan	35.606.750,00	(35.606.750,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Lojejer	3.590.000,00	(3.590.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Ambulu	130.641.500,00	(130.641.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sabrang	15.602.500,00	(15.602.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Andongsari	26.843.250,00	(26.843.250,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Tempurejo	71.750.000,00	(71.750.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Curahnongko	15.135.750,00	(15.135.750,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Silo I	28.715.000,00	(28.715.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Silo II	40.577.500,00	(40.577.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Mayang	55.610.000,00	(55.610.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Mumbulsari	56.735.000,00	(56.735.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Jenggawah	73.050.000,00	(73.050.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kemungsari Kidul	12.250.000,00	(12.250.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Ajung	96.767.000,00	(96.767.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Rambipuji	55.272.500,00	(55.272.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Nogosari	22.200.000,00	(22.200.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Balung	13.375.000,00	(13.375.000,00)	0,00	0,00	0,00



No	Keterangan	2023	Reklas	Penambahan	Pengurangan	2024
	Puskesmas Karangduren	27.093.000,00	(27.093.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Umbulsari	32.602.500,00	(32.602.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Paleran	38.370.000,00	(38.370.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Semboro	76.337.500,00	(76.337.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Jombang	7.098.250,00	(7.098.250,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sumberbaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Rowotengah	27.162.500,00	(27.162.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Tanggul	31.522.500,00	(31.522.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Klatakan	28.088.000,00	(28.088.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Bangsalsari	78.720.000,00	(78.720.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sukorejo	40.016.000,00	(40.016.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Panti	100.305.000,00	(100.305.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sukorambi	16.095.000,00	(16.095.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Arjasa	20.142.000,00	(20.142.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Pakusari	12.429.000,00	(12.429.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kalisat	10.865.000,00	(10.865.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Ledokombo	28.804.000,00	(28.804.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sumberjambe	80.240.000,00	(80.240.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sukowono	106.557.500,00	(106.557.500,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Jelbuk	39.355.000,00	(39.355.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Kaliwates	27.020.000,00	(27.020.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Mangli	49.767.000,00	(49.767.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Jemberkidul	800.000,00	(800.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Sumbersari	21.710.000,00	(21.710.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Gladapakem	7.680.000,00	(7.680.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Patrang	23.855.000,00	(23.855.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Puskesmas Banjarsengon	16.002.500,00	(16.002.500,00)	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.429.084.812,24	(6.429.084.812,24)	0,00	0,00	0,00

4. Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan

Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.606.000,00 terdiri dari:

Tabel 5. 80 Rincian Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023	Penambahan	Pengurangan	2024
1	RS. dr. Soebandi				
	Piutang Sewa Lahan Parkir	0,00	324.000.000,00	249.000.000,00	75.000.000,00
	Piutang PT. Wastec International	0,00	1.106.000,00	0,00	1.106.000,00
2	RS. Kalisat				

No	Keterangan	2023	Penambahan	Pengurangan	2024
	Piutang Parkir	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	Jumlah	0,00	328.606.000,00	249.000.000,00	79.606.000,00

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
288.489.643.732,93	255.468.435.927,69	33.021.207.805,24	12,93

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp288.489.643.732,93 dan Rp255.468.435.927,69, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp33.021.207.805,24 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Penyisihan Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp33.021.207.805,24 atau 12,93 persen.

Penyisihan Piutang Tahun sebesar 2024 Rp288.489.643.732,93 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2024	Nilai Penyisihan 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	236.741.827.648,51	205.553.720.285,77
2	Penyisihan Piutang Retribusi	5.847.042.035,25	3.875.485.412,28
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.575.341.514,40	3.068.425.083,68
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	42.325.432.534,77	42.970.805.145,96
	Total Penyisihan Piutang	288.489.643.732,93	255.468.435.927,69

Penyisihan Piutang Tahun 2024 dengan rincian per Jenis pajaknya adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Per Jenis per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2024	Nilai Penyisihan 2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
	Piutang Pajak Hotel	146.880.655,23	27.147.813,91
	Piutang Pajak Restoran	413.902.262,93	487.114.841,92
	Piutang Pajak Hiburan	94.577.720,06	85.618.110,00
	Piutang Pajak Parkir	732.987,99	600.637,52
	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.454.715,00	2.142.837,90
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	62.479.042,00	58.005.605,00

No	Jenis Penyisihan Piutang	Nilai Penyisihan 2024	Nilai Penyisihan 2023
	Piutang Reklame	1.263.159.063,91	1.144.520.509,35
	Piutang Pajak Air Tanah	898.734,95	392.268,59
	Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	234.757.742.466,44	203.748.177.661,58
2	Penyisihan Piutang Retribusi		
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	20.869.533,00	0,00
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.310.691.740,19	0,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Dishub	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	23.867.540,20	5.635.688,15
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.368.254.328,36	1.747.386.495,63
	Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90.165,00	0,00
	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - DPU Bina Marga	88.826.478,50	88.826.478,50
	Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	37.944.500,00	37.139.000,00
	Piutang Retribusi Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	140.000.000,00	140.000.000,00
	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan- Disprerindag	65.610.000,00	65.610.000,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	Piutang PDAM	3.575.341.514,40	3.068.425.083,68
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - DISHUB	15.950.500,00	18.950.500,00
	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB	42.309.084.004,77	42.351.475.982,77
	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - DPU Bina Marga	0,00	460.975,00
	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	599.917.688,19
	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	398.030,00	0,00
Total Penyisihan Piutang		288.489.643.732,93	255.468.435.927,69

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah per jenis pajak sebesar Rp236.741.827.648,51 adalah sebagai berikut:

a. Self Assessment

Tabel 5. 82 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Self Assessment per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	
Piutang Pajak Hotel	1.193.269.845,00	1.182.000.315,00	20.136.549,00	12.646.000,00	2.408.052.709,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.966.349,23	118.200.031,50	10.068.274,50	12.646.000,00	146.880.655,23
NRV	1.187.303.495,78	1.063.800.283,50	10.068.274,50	0,00	2.261.172.053,78
Piutang Pajak Restoran	2.491.647.726,00	36.740.643,00	477.805.134,00	158.867.393,00	3.165.060.896,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.458.238,63	3.674.064,30	238.902.567,00	158.867.393,00	413.902.262,93
NRV	2.479.189.487,37	33.066.578,70	238.902.567,00	0,00	2.751.158.633,07
Piutang Pajak Hiburan	118.446.611,00	18.520.050,00	7.392.664,00	88.437.150,00	232.796.475,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	592.233,06	1.852.005,00	3.696.332,00	88.437.150,00	94.577.720,06
NRV	117.854.377,95	16.668.045,00	3.696.332,00	0,00	138.218.754,94
Piutang Pajak Parkir	62.557.597,00	535.000,00	280.000,00	226.700,00	63.599.297,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	312.787,99	53.500,00	140.000,00	226.700,00	732.987,99
NRV	62.244.809,02	481.500,00	140.000,00	0,00	62.866.309,02
Piutang Pajak PPJ Non PLN	0,00	0,00	1.899.802,00	504.814,00	2.404.616,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	949.901,00	504.814,00	1.454.715,00
NRV	0,00	0,00	968.632,20	1.666.341,00	949.901,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	183.209.500,00	0,00	506.435,00	61.309.777,00	245.025.712,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	916.047,50	0,00	253.217,50	61.309.777,00	62.479.042,00
NRV	182.293.452,50	0,00	253.217,50	0,00	182.546.670,00

b. Official Assessment

Tabel 5. 83 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Official Assessment per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	0-1 Tahun	> 3Tahun	
	0,50%	10%	0,50%	100%	
Piutang Pajak Reklame	1.505.440.202,00	316.691.424,00	42.904.875,00	1.202.510.283,00	3.067.546.784,00
Jumlah Penyisihan Piutang	7.527.201,01	31.669.142,40	21.452.437,50	1.202.510.283,00	1.263.159.063,91



Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang				Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	0-1 Tahun	> 3Tahun	
	0,50%	10%	0,50%	100%	
Tidak Tertagih					
NRV	1.497.913.000,99	285.022.281,60	21.452.437,50	0,00	1.804.387.720,09
Piutang Pajak Air Tanah	23.046.470,00	3.221.516,00	0,00	461.351,00	26.729.337,00
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	115.232,35	322.151,60	0,00	461.351,00	898.734,95
NRV	22.931.237,65	2.899.364,40	0,00	0,00	25.830.602,05
Piutang PBB	45.231.191.433,00	39.922.662.222,00	36.435.577.077,00	212.321.531.748,57	333.910.962.480,57
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	226.155.957,17	3.992.266.222,20	18.217.788.538,50	212.321.531.748,57	234.757.742.466,44
NRV	45.005.035.475,84	35.930.395.999,80	18.217.788.538,50	0,00	99.153.220.014,14

2. Penyisihan Piutang Retribusi per jenis retribusi sebesar Rp5.847.042.035,25 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 84 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.173.906.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173.906.600,00
Jumlah Penyisihan Piutang	20.869.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.869.533,00
NRV	4.153.037.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153.037.067,00



Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – RS. Dr. Soebandi	27.535.076.464,87	0,00	0,00	1.070.147.044,24	0,00	28.605.223.509,11
Jumlah Penyisihan Piutang	137.675.382,32	0,00	0,00	1.070.147.044,24	0,00	1.207.822.426,56
NRV	27.397.401.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397.401.082,55
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – RS. Balung	4.746.388.130,00	593.930.140,00	0,00	0,00	0,00	5.340.318.270,00
Jumlah Penyisihan Piutang	23.731.940,65	59.393.014,00	0,00	0,00	0,00	83.124.954,65
NRV	4.722.656.189,35	534.537.126,00	0,00	0,00	0,00	5.257.193.315,35
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah – RS. Kalisat	3.948.871.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.871.795,00
Jumlah Penyisihan Piutang	19.744.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.744.358,98
NRV	3.929.127.436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929.127.436,02
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pengawasan dan Pengendalian Menara	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00



Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Telekomunikasi - Dishub						
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.887.750,00	1.790.887.750,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Diskominfo	0,00	238.675.402,00	0,00	0,00	0,00	238.675.402,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	23.867.540,20	0,00	0,00	0,00	23.867.540,20
NRV	0,00	214.807.861,80	0,00	0,00	0,00	214.807.861,80
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Kios - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.023.386.672,00	494.722.800,00	669.332.250,00	1.714.223.750,00	259.775.240,00	5.161.440.712,00
Jumlah Penyisihan Piutang	10.116.933,36	49.472.280,00	334.666.125,00	1.714.223.750,00	259.775.240,00	2.368.254.328,36
NRV	2.013.269.738,64	445.250.520,00	334.666.125,00	0,00	0,00	2.793.186.383,64
Piutang Retribusi Jasa Umum-Piutang Retribusi Pelayanan Pasar - Piutang Retribusi Los - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.033.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	90.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.165,00
NRV	17.942.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942.835,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50



Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Bangunan - DPU Bina Marga						
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	88.826.478,50	88.826.478,50
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum - Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan - Bapenda	0,00	900.000,00	1.800.000,00	840.000,00	36.114.500,00	39.654.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	90.000,00	900.000,00	840.000,00	36.114.500,00	37.944.500,00
NRV	0,00	810.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Piutang Retribusi Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah - Pemakaian Alat - DPU Bina Marga	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha - Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang dikontrakkan - Disperindag	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	47.610.000,00	65.610.000,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp3.575.341.514,40 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan per 31 Desember 2024



Urian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – PDAM	2.727.361.599,45	1.161.909.394,00	162.036.162,00	2.098.317.706,00	1.266.177.980,00	7.415.802.841,45
Jumlah Penyisihan Piutang	13.636.808,00	116.190.939,40	81.018.081,00	2.098.317.706,00	1.266.177.980,00	3.575.341.514,40
NRV	2.713.724.791,45	1.045.718.454,60	81.018.081,00	0,00	0,00	3.840.461.327,05

4. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp42.325.432.534,77 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024

Uraian	Jumlah Piutang Berdasarkan Umur Piutang					Total
	0-1 Tahun	> 1-2 Tahun	> 2-3 Tahun	> 3-5 Tahun	> 5 Tahun	
	0,50%	10%	50%	100%	100%	
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - DISHUB	0,00	0,00	0,00	3.093.800,00	12.856.700,00	15.950.500,00
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	3.093.800,00	12.856.700,00	15.950.500,00
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Piutang Pendapatan Denda PBB - Bapenda	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309.084.004,77	42.309.084.004,77
Jumlah Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	42.309.084.004,77	42.309.084.004,77
NRV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD - RS. dr. Soebandi	76.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.106.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	380.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.530,00
NRV	75.725.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.725.470,00
Piutang Pendapatan BLUD - RS. Kalisat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
NRV	3.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.500,00

Piutang Lain-lain PAD yang SAH per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.147.926.174,11 tidak termasuk tagihan berupa temuan hasil pemeriksaan BPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Temuan BPK RI per 31 Desember 2024

NO	Uraian	Saldo 31 Desember 2024
1	Pemeriksaan LKD th 2004 Kelebihan Biaya Ops & Belanja daerah yg tdk sesuai ketentuan	2.307.636.500,00
2	Dari hasil pemeriksaan investigasi BPK RI th 2005	
	Ketekoran kas & Pengurangan kas yg tdk sesuai ketentuan	128.759.374.669,36
	biaya pengurusan pemindahan ijin radio Kendedes dari banyuwangi ke Jember	700.000.000,00
	pemotongan dana bantuan keuangan untuk pembinaan kecamatan	3.348.000.000,00
3	Dari hasil pemeriksaan LKD th 2005	
	DPRD kelebihan biaya penunjang oprs pimpinan dan ketua DPRD dan belanja daerah DPRD th.2004 yg tdk sesuai ketentuan	80.500.000,00
	THR DPRD dan Muspida yang diberikan tidak sesuai ketentuan	275.000.000,00
	Biaya Oprs PPJ dan sumbangan pihak ketiga yg diberikan secara tunai	146.598.477,19
	Denda keterlambatan penyerahan pengadaan obat yng tidak dikenakan	85.056.776,00
4	dari hasil pemeriksaan LKD th. 2006	
	DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan dana Oprs bagi pimpinan dan anggota DPRD	69.317.000,00
	DPRD Honorarium Pimpinan DPRD	81.600.000,00
	Bantuan Keuangan pada parpol yg melebihi ketentuan	53.580.000,00
	Biaya perjalanan Dinas tetap yg tidak sesuai ketentuan	29.935.490,00
5	Dari hasil pemeriksaan LKD th. 2007	
	Bantuan uang muka perumahan PNS (BKD)	850.625.000,00
	Pengenaan pajak bunga tabungan dana askes (Dinas Kesehatan)	2.109.529,00
	Honor panitia muspida inti muspida plus (Bagian Pemerintahan)	242.500.000,00
	Denda keterlambatan pengadaan alkes dan pemeliharaan rutin berkala (RSD Soebandi)	2.474.875,50
Jumlah		137.034.308.317,05

5.3.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	2.846.435,66	(2.846.435,66)	(100)

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp2.846.435,66 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp2.846.435,66 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Beban dibayar dimuka mengalami penurunan sebesar Rp2.846.435,66 atau 100 persen.

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan pengeluaran biaya Tahun 2024 yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 87 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Beban dibayar dimuka - Sewa Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal - RS Kalisat	2.846.435,66	0,00	2.846.435,66	0,00
Jumlah		2.846.435,66	0,00	2.846.435,66	0,00

5.3.1.1.14 Persediaan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
61.153.501.262,57	66.989.567.819,22	(5.836.066.556,65)	(8,71)

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.153.501.262,57. Jika dibandingkan dengan nilai saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.989.567.819,22 maka nilai persediaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.836.066.556,65 atau sebesar 8,71 persen. Adapun rincian persediaan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	66.989.567.819,22
Penambahan Tahun 2024	Rp	450.721.793.125,42
Jumlah Penambahan	Rp	517.711.360.944,64
Pengurangan Tahun 2024	Rp	456.557.859.682,07
Jumlah Pengurangan	Rp	456.557.859.682,07
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	61.153.501.262,57

Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan sistem informasi/aplikasi untuk penatausahaan persediaan yaitu Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA). Seluruh jenis persediaan telah dicatat ke dalam aplikasi SIPERDA kecuali jenis persediaan medis pada Dinas Kesehatan, 3 (tiga) Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan persediaan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan. Persediaan yang tidak dicatat dalam SIPERDA masih dicatat secara manual dengan menggunakan *Microsoft Excel*.

Tabel 5. 88 Mutasi Jenis Persediaan

NO.	REKENING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.150.896.173,00	26.458.540.390,00	26.942.550.481,10	666.886.081,90
2	Bahan Kimia	7.656.468.718,84	38.217.721.908,91	32.155.895.996,25	13.718.294.631,50
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	35.959.975,00	17.125.125.569,00	17.142.520.044,00	18.565.500,00
4	Bahan Baku	0,00	1.328.288.495,00	1.320.548.495,00	7.740.000,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	47.749.850,00	668.831.552,00	668.831.552,00	47.749.850,00



NO.	REKUNING PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.609.280,00	101.856.097,00	106.130.877,00	2.334.500,00
7	Isi Tabung Gas	13.139.150,00	447.125.990,00	446.037.770,00	14.227.370,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00
9	Bahan Lainnya	10.983.240.884,63	66.428.287.257,61	69.349.095.305,44	8.062.432.836,80
10	Suku Cadang Alat Angkutan	62.310.500,00	2.062.680.124,00	2.064.933.699,00	60.056.925,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	857.532.076,15	868.464.624,00	1.210.787.803,25	515.208.896,90
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	565.995.850,00	558.145.850,00	7.850.000,00
13	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	0,00	36.896.400,00	36.896.400,00	0,00
14	Suku Cadang Alat Pertanian	1.861.000,00	182.862.618,00	124.422.318,00	60.301.300,00
15	Suku Cadang Alat Bengkel	660.000,00	37.985.180,00	38.381.180,00	264.000,00
16	Suku Cadang Lainnya	0,00	7.532.387,00	7.532.387,00	0,00
17	Alat Tulis Kantor	1.272.636.290,10	27.202.240.066,86	27.205.870.178,88	1.269.006.178,08
18	Kertas Dan Cover	483.572.894,00	9.535.303.118,00	9.675.488.617,22	343.387.394,78
19	Bahan Cetak	2.488.264.976,83	19.946.998.288,00	19.203.794.750,16	3.231.468.514,67
20	Benda Pos	39.553.500,00	820.041.635,00	838.561.135,00	21.034.000,00
21	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	478.500,00	5.994.000,00	6.472.500,00	0,00
22	Bahan Komputer	685.201.810,21	8.624.060.305,00	8.661.424.645,36	647.837.469,85
23	Perabot Kantor	812.570.758,93	9.495.959.585,00	9.833.836.007,66	474.694.336,27
24	Alat Listrik	3.616.206.101,59	3.521.917.066,00	4.113.393.897,29	3.024.729.270,30
25	Perlengkapan Dinas	1.194.824.730,00	10.459.639.007,00	10.787.917.747,00	866.545.990,00
26	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	746.000,00	2.996.373.243,00	2.997.119.243,00	0,00
27	Suvenir/Cendera Mata	201.654.000,00	1.951.889.295,00	2.134.118.295,00	19.425.000,00
28	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	570.203.666,13	2.579.370.574,00	2.792.191.164,36	357.383.075,77
29	Obat	22.342.410.163,18	144.494.912.928,35	148.086.782.399,28	18.750.540.692,25
30	Obat Obatan Lainnya	2.167.435.194,62	19.830.972.197,49	19.476.829.832,61	2.521.577.559,50
31	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10.051.807.349,75	29.958.543.073,00	33.715.602.478,75	6.294.747.944,00
32	Natura	121.481.376,26	4.171.997.901,20	4.275.488.332,46	17.990.945,00
33	Pakan	0,00	300.545.000,00	300.545.000,00	0,00
34	Natura Dan Pakan Lainnya	124.092.900,00	135.316.000,00	128.187.900,00	131.221.000,00
35	Komponen Peralatan	0,00	21.076.900,00	21.076.900,00	0,00
36	Komponen Lainnya	0,00	31.105.000,00	31.105.000,00	0,00
37	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	0,00	3.771.500,00	3.771.500,00	0,00
38	Pipa Fiber Glass	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
39	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	0,00	25.642.000,00	25.642.000,00	0,00
Jumlah Total		66.989.567.819,22	450.721.793.125,42	456.557.859.682,07	61.153.501.262,57

Mutasi Persediaan selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. Saldo awal persediaan tahun 2024 sebesar Rp66.989.567.819,22 merupakan saldo akhir persediaan tahun 2023 (*audited*) yang berasal dari akumulasi persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	20.544.081.098,67
Manual	Rp	46.445.486.720,55
Jumlah	Rp	66.989.567.819,22

- b. Penambahan persediaan tahun 2024 sebesar Rp450.721.793.125,42 merupakan akumulasi penambahan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan penambahan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	105.890.086.697,25
Manual	Rp	344.831.706.428,17
Jumlah	Rp	450.721.793.125,42

Adapun rincian sebesar Rp450.721.793.125,42 terdiri dari:

1) Belanja persediaan APBD	Rp	100.086.827.259,00
2) Belanja persediaan BLUD	Rp	121.141.249.990,28
3) Penerimaan persediaan dari Hibah	Rp	39.346.465.794,43
4) Belanja Persediaan dari BOS	Rp	71.497.267.119,86
5) Penerimaan Persediaan dari BOK	Rp	5.345.986.250,00
6) Hutang Persediaan	Rp	67.877.013.474,36
7) Koreksi dari Belanja Modal	Rp	887.080.493,00
8) Mutasi antar OPD	Rp	44.539.902.744,49

Penambahan persediaan tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Belanja persediaan APBD sebesar Rp100.086.827.259,00 merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan baku, bahan bibit tanaman, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan bibit ternak ikan, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pertanian, suku cadang alat bengkel, suku cadang lainnya, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, dokumen administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik,

perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir cinderamata, kegiatan kantor lainnya, obat, obat lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, natura, pakan, serta natura dan pakan lainnya, dan komponen lainnya. Adapun rincian belanja persediaan APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 89 Belanja Persediaan APBD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	12.501.346.239,00
2	Bahan kimia	8.654.210.351,00
3	Bahan bakar dan pelumas	14.268.559.663,00
4	Bahan baku	861.659.455,00
5	Bahan/bibit tanaman	222.144.500,00
6	Isi tabung pemadam kebakaran	39.091.825,00
7	Isi tabung gas	39.098.900,00
8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.300.000,00
9	Bahan Lainnya	1.668.546.972,00
10	Suku Cadang Alat Angkutan	1.888.454.729,00
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	7.761.300,00
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	12.959.750,00
13	Suku Cadang Alat Pertanian	175.587.618,00
14	Suku Cadang Alat Bengkel	37.985.180,00
15	Suku Cadang Lainnya	7.532.387,00
16	Alat Tulis Kantor	2.093.226.320,00
17	Kertas Dan Cover	2.764.684.034,00
18	Bahan Cetak	7.348.605.246,00
19	Benda Pos	314.359.500,00
20	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.994.000,00
21	Bahan Komputer	3.052.923.421,00
22	Perabot Kantor	1.731.051.372,00
23	Alat Listrik	749.035.829,00
24	Perlengkapan Dinas	9.079.333.634,00
25	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	531.987.519,00
26	Suvenir/Cendera Mata	1.780.247.063,00
27	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	814.804.767,00
28	Obat	1.599.603.589,00
29	Obat-Obatan Lainnya	896.590.000,00
30	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	23.975.837.823,00
31	Natura	2.427.338.273,00
32	Pakan	300.545.000,00
33	Natura Dan Pakan Lainnya	135.316.000,00
34	Komponen Lainnya	31.105.000,00
TOTAL		100.086.827.259,00

- 2) Belanja persediaan BLUD sebesar Rp121.141.249.990,28 merupakan realisasi belanja persediaan yang telah dianggarkan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari bahan bangunan dan alat konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, isi tabung pemadam kebakaran, isi tabung gas, bahan lainnya, suku cadang alat angkutan, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat kedokteran, alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir cinderamata, alat/bahan kegiatan kantor lainnya, obat, obatan lainnya, persediaan yang akan dijual/diserahkan ke masyarakat, natura. Adapun rincian belanja persediaan BLUD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 90 Belanja Persediaan BLUD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	21.639.376,00
2	Bahan Kimia	17.735.985.291,46
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	2.447.252.012,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	61.584.272,00
5	Isi Tabung Gas	324.463.100,00
6	Bahan Lainnya	35.486.617.229,98
7	Suku Cadang Alat Angkutan	160.022.395,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	710.733.552,00
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	2.810.200,00
10	Alat Tulis Kantor	1.575.483.509,00
11	Kertas Dan Cover	301.982.719,00
12	Bahan Cetak	3.326.603.846,00
13	Benda Pos	105.740.000,00
14	Bahan Komputer	923.394.902,00
15	Perabot Kantor	334.282.889,00
16	Alat Listrik	496.077.919,00
17	Perlengkapan Dinas	511.907.373,00
18	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.808.520,00
19	Suvenir/Cendera Mata	72.801.182,00
20	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.461.348.507,00
21	Obat	44.404.738.991,86
22	Obat-Obatan Lainnya	9.712.788.997,73
23	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	10.235.000,00
24	Natura	947.948.206,25
TOTAL		121.141.249.990,28

- 3) Penerimaan persediaan dari hibah sebesar Rp39.346.465.794,43 merupakan penerimaan persediaan yang berasal dari instansi vertikal dan/atau pihak lain diluar Pemerintah

Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan persediaan dari hibah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 91 Penerimaan Persediaan dari Hibah

NO	NAMA OPD	ASAL HIBAH	NILAI (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Bkkbn Provinsi Jawa Timur	5.197.722.711,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.213.772.200,00
3	Dinas Kesehatan Non Medis	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	212.956.380,00
4	Dinas Kesehatan Medis	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	32.437.514.503,43
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Upt Proteksi Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Timur	284.500.000,00
TOTAL			39.346.465.794,43

- 4) Belanja Persediaan dari BOS dan BOP PAUD sebesar Rp71,497,267,119.86 merupakan belanja persediaan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan dari BOS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 92 Penerimaan dari BOS

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan dan Kontruksi	13.935.554.775,00
	Bahan kimia	76.527.985,00
	Bahan Bakar dan Pelumas	39.648.534,00
	Bahan baku	466.629.040,00
	Bahan bibit tanaman	446.687.052,00
	Isi tabung pemadam kebakaran	1.180.000,00
	Isi tabung gas	67.759.300,00
	Suku cadang alat laboratorium	18.995.500,00
	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	36.896.400,00
	Suku cadang alat pertanian	7.275.000,00
	Alat tulis kantor	23.504.494.637,86
	Kertas dan Cover	6.209.533.365,00
	Bahan cetak	7.475.351.625,00
	Benda pos	398.102.135,00
	Bahan komputer	4.365.104.482,00
	Perabot kantor	7.408.823.624,00

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
	Alat listrik	2.274.703.318,00
	Perlengkapan dinas	326.625.000,00
	Perlengkapan pendukung olahraga	2.459.577.204,00
	Souvenir cinderamata	98.841.050,00
	Obat	1.732.106.893,00
	Natura	95.729.800,00
	Komponen peralatan	21.076.900,00
	Pipa air besi tuang (dci)	3.771.500,00
	Pipa fiber glass	630.000,00
	Pipa plastik pvc (upvc)	25.642.000,00
TOTAL		71.497.267.119,86

- 5) Belanja Persediaan dari BOK sebesar Rp5.345.986.250,00 merupakan belanja persediaan yang berasal dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Adapun rincian Penerimaan dari BOK tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 93 Penerimaan dari BOK

NO	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bakar Dan Pelumas	126.226.250,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.219.760.000,00
Total		5.345.986.250,00

- 6) Hutang Persediaan sebesar Rp67.877.013.474,36 merupakan persediaan yang telah diterima oleh RSD dr. Soebandi, RSD Balung, RSD Kalisat, Puskesmas Ajung, Puskesmas Andongsari, Puskesmas Arjasa, Puskesmas Cakru, Puskesmas Curah Nongko, Puskesmas Gladakpakem, Puskesmas Gumukmas, Puskesmas Jenggawah, Puskesmas Jombang, Puskesmas Kaliwates, Puskesmas Karangduren, Puskesmas Kasiyan, Puskesmas Kemuningsari kidul, Puskesmas Klatakan, Puskesmas Mangli, Puskesmas Nogosari, Puskesmas Panti, Puskesmas Patrang, Puskesmas Puger, Puskesmas Rowotengah, Puskesmas Sabrang, Puskesmas Sukorejo, Puskesmas Sukowono, Puskesmas Sumberjambe, Puskesmas Sumber Sari, Puskesmas Tempurejo, Puskesmas Wuluhan namun belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2024. Adapun rincian hutang persediaan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Hutang Persediaan Tahun 2024

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Bahan Bakar Dan Pelumas	5.209.828,00
		Bahan Lainnya	6.561.000,00

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (RP)
		Suku Cadang Alat Kedokteran	26.014.093,00
		Kertas Dan Cover	231.571.500,00
		Bahan Cetak	475.181.200,00
		Bahan Komputer	66.538.500,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	251.614.800,00
		Obat	7.367.366.642,13
		Obat-Obatan Lainnya	8.734.291.294,76
		Natura	633.526.621,95
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan Kimia	9.047.088.182,06
		Bahan Lainnya	24.580.577.269,27
		Obat	14.485.289.467,71
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	409.914.430,00
		Obat	604.989.811,48
4	Puskesmas Ajung	Bahan Kimia	5.952.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	13.745.600,00
		Bahan Komputer	1.875.000,00
		Perabot Kantor	5.198.000,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	152.500,00
		Obat	60.065.500,00
5	Puskesmas Andongsari	Bahan Bakar Dan Pelumas	21.770.686,00
		Isi Tabung Gas	209.000,00
6	Puskesmas Arjasa	Bahan Bakar Dan Pelumas	3.100.000,00
7	Puskesmas Cakru	Bahan Cetak	1.212.500,00
		Benda Pos	400.000,00
8	Puskesmas Curahnongko	Bahan Bakar Dan Pelumas	22.039.284,00
		Isi Tabung Gas	1.470.000,00
		Bahan Lainnya	12.997.500,00
		Alat Tulis Kantor	14.400.000,00
		Kertas Dan Cover	9.100.000,00
		Bahan Cetak	8.980.000,00
		Perabot Kantor	4.950.100,00
		Obat	32.875.000,00
		Natura	22.545.000,00
9	Puskesmas Gladapakem	Bahan Bakar Dan Pelumas	4.526.000,00
		Bahan Cetak	1.177.500,00
10	Puskesmas Gumukmas	Bahan Bakar Dan Pelumas	25.920.000,00
		Suku Cadang Alat Angkutan	12.926.500,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	11.378.000,00
11	Puskesmas Jenggawah	Bahan Bakar Dan Pelumas	4.360.000,00
		Isi Tabung Gas	2.700.000,00
		Bahan Cetak	7.230.000,00
12	Puskesmas Jombang	Bahan Bakar Dan Pelumas	23.350.000,00
		Isi Tabung Gas	2.194.000,00



NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (RP)
		Bahan Cetak	5.462.000,00
		Natura	13.050.000,00
13	Puskesmas Kaliwates	Bahan Lainnya	2.586.000,00
		Alat Tulis Kantor	2.115.000,00
		Bahan Cetak	2.500.000,00
		Bahan Komputer	2.100.000,00
		Obat	24.761.000,00
14	Puskesmas Karangduren	Isi Tabung Gas	2.056.500,00
		Bahan Cetak	3.825.000,00
		Obat	2.165.000,00
15	Puskesmas Kasiyan	Bahan Bakar Dan Pelumas	9.340.000,00
16	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Bakar Dan Pelumas	1.200.000,00
		Obat	22.914.548,00
17	Puskesmas Klatakan	Bahan Bakar Dan Pelumas	2.252.000,00
		Obatan Lainnya	2.877.120,00
18	Puskesmas Mangli	Bahan Bakar Dan Pelumas	4.800.000,00
		Isi Tabung Gas	470.000,00
		Benda Pos	90.000,00
		Obat	6.468.636,00
19	Puskesmas Nogosari	Isi Tabung Gas	1.380.000,00
20	Puskesmas Panti	Bahan Bakar Dan Pelumas	1.600.000,00
		Obat	3.720.000,00
21	Puskesmas Patrang	Isi Tabung Gas	910.000,00
22	Puskesmas Puger	Isi Tabung Gas	143.190,00
		Suku Cadang Alat Angkutan	1.276.500,00
		Bahan Cetak	14.457.000,00
		Obat	20.371.680,00
23	Puskesmas Rowotengah	Bahan Bakar Dan Pelumas	2.400.000,00
		Isi Tabung Gas	1.540.000,00
		Bahan Lainnya	5.450.000,00
		Alat Tulis Kantor	6.020.600,00
		Kertas Dan Cover	2.045.000,00
		Bahan Cetak	7.203.900,00
		Benda Pos	800.000,00
		Bahan Komputer	14.124.000,00
		Perabot Kantor	5.053.600,00
		Alat Listrik	2.100.000,00
		Perlengkapan Dinas	9.160.000,00
		Obat	1.199.998,00
		Obatan Lainnya	9.594.285,00
24	Puskesmas Sabrang	Bahan Bakar Dan Pelumas	8.500.000,00
		Kertas Dan Cover	3.000.000,00
		Bahan Cetak	6.120.000,00
25	Puskesmas Sukorejo	Bahan Bakar Dan Pelumas	17.100.000,00

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (RP)
		Alat Tulis Kantor	6.500.000,00
		Kertas Dan Cover	13.386.500,00
		Bahan Cetak	13.700.000,00
		Obat	620.000,00
		Obatan Lainnya	14.155.500,00
		Natura	13.545.000,00
26	Puskesmas Sukowono	Bahan Bakar Dan Pelumas	25.915.000,00
		Isi Tabung Gas	1.000.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	5.681.080,00
		Bahan Cetak	7.198.500,00
		Benda Pos	550.000,00
		Obat	8.498.000,00
27	Puskesmas Sumberjambe	Bahan Bakar Dan Pelumas	39.726.312,00
		Isi Tabung Gas	1.732.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	21.320.040,00
		Bahan Cetak	6.500.000,00
		Obat	68.189.600,00
28	Puskesmas Sumbersari	Bahan Lainnya	16.468.754,00
		Obat	2.419.500,00
29	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	6.984.140,00
		Bahan Bakar Dan Pelumas	20.330.000,00
		Bahan Lainnya	9.719.381,00
		Bahan Cetak	11.566.000,00
		Obat	22.156.300,00
30	Puskesmas Wuluhan	Natura	18.315.000,00
Total			67.877.013.474,36

- 7) Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp887.080.493,00 merupakan tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dicatat menjadi Persediaan. Adapun rincian Reklasifikasi dari belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel Reklasifikasi Belanja Modal

No	Nama Opd	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Bahan Lainnya	9.678.000,00
		Suku Cadang Alat Laboratorium	531.230.400,00
		Perlengkapan Dinas	89.882.000,00
2	Dinas Sosial	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	51.450.000,00
3	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Bahan Komputer	198.000.000,00
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Perabot Kantor	6.600.000,00
5	Puskesmas Panti	Bahan Lainnya	92.130,00
6	Puskesmas Tanggul	Suku Cadang Alat Kedokteran	147.963,00
Total			887.080.493,00

8) Mutasi antar OPD sebesar Rp44.539.902.744,49 merupakan perpindahan persediaan antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Mutasi Antar OPD Tahun 2024

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	60.863.000,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	811.023.153,44
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	1.982.051.660,78
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	220.105.997,49
5	Puskesmas Ajung	1.273.512.822,46
6	Puskesmas Ambulu	1.273.098.921,15
7	Puskesmas Andongsari	620.182.252,22
8	Puskesmas Arjasa	594.603.660,27
9	Puskesmas Balung	599.227.195,67
10	Puskesmas Bangsalsari	1.209.521.751,76
11	Puskesmas Banjarsengon	707.481.930,16
12	Puskesmas Cakru	500.738.066,73
13	Puskesmas Curahnongko	579.765.674,55
14	Puskesmas Gladakpakem	616.249.766,18
15	Puskesmas Gumukmas	832.696.682,67
16	Puskesmas Jelbuk	637.366.843,33
17	Puskesmas Jember Kidul	1.091.008.578,69
18	Puskesmas Jenggawah	685.901.074,21
19	Puskesmas Jombang	652.109.345,55
20	Puskesmas Kalisat	1.506.040.547,92
21	Puskesmas Kaliwates	1.052.255.168,84
22	Puskesmas Karangduren	815.996.488,58
23	Puskesmas Kasiyan	664.977.819,49
24	Puskesmas Kemuningsari Kidul	722.295.086,15
25	Puskesmas Kencong	1.117.112.075,69
26	Puskesmas Klatakan	644.588.719,68
27	Puskesmas Ledokombo	746.925.762,01
28	Puskesmas Lojejer	776.829.067,39
29	Puskesmas Mangli	936.993.232,46
30	Puskesmas Mayang	672.665.115,03
31	Puskesmas Mumbulsari	824.911.962,81
32	Puskesmas Nogosari	570.515.098,11
33	Puskesmas Pakusari	1.388.211.280,83
34	Puskesmas Paleran	570.816.000,13
35	Puskesmas Panti	803.701.045,88
36	Puskesmas Patrang	785.033.340,14
37	Puskesmas Puger	1.133.354.467,39
38	Puskesmas Rambipuji	805.789.167,73
39	Puskesmas Rowotengah	591.620.629,33
40	Puskesmas Sabrang	765.513.475,48
41	Puskesmas Semboro	775.200.434,65

No	Nama OPD	Nilai (Rp)
42	Puskesmas Silo I	723.174.426,11
43	Puskesmas Silo li	806.116.254,79
44	Puskesmas Sukorambi	753.496.304,52
45	Puskesmas Sukorejo	758.239.369,88
46	Puskesmas Sukowono	807.676.767,14
47	Puskesmas Sumberbaru	659.040.909,53
48	Puskesmas Sumberjambe	814.742.564,60
49	Puskesmas Sumbersari	1.111.206.207,64
50	Puskesmas Tanggul	1.202.632.279,71
51	Puskesmas Tembokrejo	544.507.998,62
52	Puskesmas Tempurejo	647.521.435,40
53	Puskesmas Umbulsari	873.775.525,38
54	Puskesmas Wuluhan	1.218.918.338,15
Total		44.539.902.744,49

c. Pengurangan persediaan tahun 2024 sebesar Rp456.557.859.682,07 merupakan akumulasi pengurangan persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Infromasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan pengurangan persediaan yang tercatat secara manual (*excel*), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda	Rp	109.588.840.306,38
Manual	Rp	346.969.019.375,69
Jumlah	Rp	456.557.859.682,07

Pengurangan persediaan tahun 2024 tersebut terdiri dari:

1) Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD	Rp	84.955.779.886,85
2) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD	Rp	113.366.004.681,57
3) Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hibah	Rp	12.353.388.382,63
4) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS	Rp	71.490.285.122,86
5) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK	Rp	5.345.986.250,00
6) Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal	Rp	835.538.363,00
7) Pemakaian Persediaan dari mutasi antar OPD	Rp	35.147.953.839,67
8) Pengurangan persediaan untuk mengeluarkan hibah	Rp	1.863.137.496,09
9) Pemakaian persediaan yang bersumber dari Hutang	Rp	76.294.021.521,99
10) Persediaan kadaluarsa/usang/rusak	Rp	611.063.220,93
11) Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke belanja modal	Rp	4.347.761.922,00
12) Koreksi	Rp	61.050.000,00
13) Pengurangan Persediaan dikarenakan mutasi antar OPD	Rp.	49.885.888.994,49

Pengurangan persediaan tahun 2024 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD sebesar Rp84.955.779.886,85 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah dan hutang persediaan pada tahun 2024. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Pemakaian persediaan yang bersumber dari APBD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan bangunan dan konstruksi	12.951.354.218,10
2	Bahan kimia	634.947.195,94
3	Bahan bakar dan pelumas	14.155.122.213,00
4	Bahan baku	853.919.455,00
5	Bahan/bibit tanaman	222.144.500,00
6	Isi tabung pemadam kebakaran	36.757.325,00
7	Isi tabung gas	39.118.900,00
8	Bahan/ bibit ternak/bibit ikan	69.300.000,00
9	Bahan lainnya	1.547.655.113,62
10	Suku cadang alat angkutan	1.894.768.229,00
11	Suku cadang alat kedokteran	76.299.293,00
12	Suku cadang alat laboratorium	5.109.750,00
13	Suku cadang alat pertanian	117.147.318,00
14	Suku cadang alat bengkel	38.381.180,00
15	Suku cadang lainnya	7.532.387,00
16	Alat tulis kantor	2.007.706.466,00
17	Kertas dan cover	2.748.238.776,00
18	Bahan cetak	6.949.805.862,50
19	Benda pos	326.288.500,00
20	Persediaan dokumen/administrasi tender	6.282.500,00
21	Bahan komputer	2.998.756.963,00
22	Perabot kantor	1.745.051.771,00
23	Alat listrik	1.233.190.863,52
24	Perlengkapan dinas	9.081.867.934,00
25	Perlengkapan pendukung olah raga	524.733.519,00
26	Suvenir/cendera mata	1.962.476.063,00
27	Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	843.601.445,00
28	Obat	47.182.432,67
29	Obat-obatan lainnya	947.235.149,00
30	Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	18.004.045.840,50
31	Natura	2.419.920.824,00
32	Pakan	300.545.000,00
33	Natura dan pakan lainnya	128.187.900,00
34	Komponen lainnya	31.105.000,00
TOTAL		84.955.779.886,85



- 2) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD sebesar Rp113.366.004.681,57 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari belanja persediaan pada perangkat daerah dan hutang persediaan pada tahun 2024. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Pemakaian persediaan yang bersumber dari BLUD

NO	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	51.241.488,00
2	Bahan Kimia	17.710.715.177,08
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	2.447.252.012,00
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.193.552,00
5	Isi Tabung Gas	318.721.880,00
6	Bahan Lainnya	32.810.386.628,26
7	Suku Cadang Alat Angkutan	155.962.470,00
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	872.124.739,00
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	2.810.200,00
10	Alat Tulis Kantor	1.671.804.465,02
11	Kertas Dan Cover	456.092.667,22
12	Bahan Cetak	2.971.529.927,66
13	Benda Pos	111.721.500,00
14	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	190.000,00
15	Bahan Komputer	892.999.800,36
16	Perabot Kantor	644.775.978,66
17	Alat Listrik	585.495.115,77
18	Perlengkapan Dinas	563.888.813,00
19	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	4.808.520,00
20	Suvenir/Cendera Mata	72.801.182,00
21	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.666.009.997,36
22	Obat	39.853.539.686,29
23	Obat-Obatan Lainnya	8.384.302.326,63
24	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	32.593.500,00
25	Natura	1.016.043.055,26
TOTAL		113.366.004.681,57

- 3) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hibah sebesar Rp12.353.388.382,63 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari penerimaan hibah pada OPD. Rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari penerimaan persediaan dari hibah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 97 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hibah

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	4.970.841.391,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.223.954.200,00

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
3	Dinas Kesehatan	15.528.789,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	253.313.000,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	1.376.875,00
6	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	97.666.254,54
7	Puskesmas Ajung	98.159.498,27
8	Puskesmas Ambulu	145.395.654,38
9	Puskesmas Andongsari	63.875.016,74
10	Puskesmas Arjasa	90.293.219,84
11	Puskesmas Balung	91.306.746,17
12	Puskesmas Bangsalsari	75.724.590,98
13	Puskesmas Banjarsengon	120.684.273,15
14	Puskesmas Cakru	77.020.950,23
15	Puskesmas Curahnongko	76.689.264,56
16	Puskesmas Gladakpakem	81.354.213,06
17	Puskesmas Gumukmas	97.873.654,04
18	Puskesmas Jelbuk	84.193.818,08
19	Puskesmas Jember Kidul	88.559.650,85
20	Puskesmas Jenggawah	194.836.677,65
21	Puskesmas Jombang	81.852.640,54
22	Puskesmas Kalisat	206.110.894,19
23	Puskesmas Kaliwates	125.893.866,46
24	Puskesmas Karangduren	102.621.162,77
25	Puskesmas Kasiyan	122.700.249,38
26	Puskesmas Kemuningsari Kidul	77.999.675,67
27	Puskesmas Kencong	234.736.936,37
28	Puskesmas Klatakan	80.030.558,74
29	Puskesmas Ledokombo	111.029.003,46
30	Puskesmas Lojejer	146.061.753,03
31	Puskesmas Mangli	109.745.518,78
32	Puskesmas Mayang	85.556.619,22
33	Puskesmas Mumbulsari	98.382.195,15
34	Puskesmas Nogosari	61.700.250,35
35	Puskesmas Pakusari	132.414.223,02
36	Puskesmas Paleran	115.082.544,33
37	Puskesmas Panti	58.945.515,79
38	Puskesmas Patrang	81.740.793,36
39	Puskesmas Puger	160.319.967,32
40	Puskesmas Rambipuji	154.897.035,94
41	Puskesmas Rowotengah	67.744.751,57
42	Puskesmas Sabrang	145.439.384,86
43	Puskesmas Semboro	60.787.337,14
44	Puskesmas Silo I	104.466.708,22
45	Puskesmas Silo II	138.709.759,46
46	Puskesmas Sukorambi	111.222.979,41
47	Puskesmas Sukorejo	506.104.644,72



NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
48	Puskesmas Sukowono	111.806.043,59
49	Puskesmas Sumberbaru	35.080.682,42
50	Puskesmas Sumberjambe	257.900.302,01
51	Puskesmas Sumbersari	77.153.154,39
52	Puskesmas Tanggul	60.575.366,07
53	Puskesmas Tembokrejo	125.402.849,91
54	Puskesmas Tempurejo	90.970.757,04
55	Puskesmas Umbulsari	54.255.083,16
56	Puskesmas Wuluhan	109.299.437,25
TOTAL		12.353.388.382,63

- 4) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS dan BOP PAUD sebesar Rp71.490.285.122,86 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri serta PAUD Negeri yang berada di wilayah kerja Dinas Pendidikan kabupaten Jember. Rincian Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOS tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 98 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOS dan BOP PAUD

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
Dinas Pendidikan	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	13.931.554.775,00
	Bahan Kimia	76.527.985,00
	Bahan Bakar Dan Pelumas	39.648.534,00
	Bahan Baku	466.629.040,00
	Bahan/Bibit Tanaman	446.687.052,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.180.000,00
	Isi Tabung Gas	67.739.300,00
	Suku Cadang Alat Laboratorium	18.995.500,00
	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	36.896.400,00
	Suku Cadang Alat Pertanian	7.275.000,00
	Alat Tulis Kantor	23.505.517.947,86
	Kertas Dan Cover	6.219.741.674,00
	Bahan Cetak	7.472.282.625,00
	Benda Pos	398.711.135,00
	Bahan Komputer	4.375.206.382,00
	Perabot Kantor	7.379.879.758,00
	Alat Listrik	2.274.634.918,00
	Perlengkapan Dinas	334.315.000,00
	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	2.459.577.204,00
	Suvenir/Cendera Mata	98.841.050,00
	Obat	1.731.593.643,00

NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
	Natura	95.729.800,00
	Komponen Peralatan	21.076.900,00
	Pipa Air Besi Tuang (Dci)	3.771.500,00
	Pipa Fiber Glass	630.000,00
	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	25.642.000,00
TOTAL		71.490.285.122,86

- 5) Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK sebesar Rp5.345.986.250,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas Kesehatan kabupaten Jember. Rincian Pemakaian persediaan yang bersumber dari BOK tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 99 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari BOK

NO	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Bahan Bakar Dan Pelumas	126.226.250,00
2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.219.760.000,00
Total		5.345.986.250,00

- 6) Pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal sebesar Rp835.538.363,00 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari tindakan korektif atas realisasi belanja modal tahun 2024 yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga dikoreksi menjadi Persediaan. Adapun rincian pemakaian persediaan yang bersumber dari koreksi belanja modal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 100 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber dari Koreksi Belanja Modal

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Bahan Lainnya	9.678.000,00
		Suku Cadang Alat Laboratorium	531.230.400,00
		Perlengkapan Dinas	89.882.000,00
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Bahan Komputer	198.000.000,00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Perabot Kantor	6.600.000,00
4	Puskesmas Tanggul	Suku Cadang Alat Kedokteran	147.963,00
TOTAL			835.538.363,00

- 7) Pemakaian persediaan dari mutasi antar OPD yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp35.147.953.839,67 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5. 101 Pemakaian Persediaan Dari mutasi antar OPD

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	60.863.000,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	811.023.153,44
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	1.690.196.879,18
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	142.035.696,87

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
5	Puskesmas Ajung	1.074.999.934,97
6	Puskesmas Ambulu	962.482.132,17
7	Puskesmas Andongsari	455.716.606,37
8	Puskesmas Arjasa	477.714.745,54
9	Puskesmas Balung	428.976.286,97
10	Puskesmas Bangsalsari	1.019.136.490,62
11	Puskesmas Banjarsengon	530.587.246,89
12	Puskesmas Cakru	385.776.004,30
13	Puskesmas Curahnongko	374.580.577,86
14	Puskesmas Gladakpakem	465.626.353,87
15	Puskesmas Gumukmas	572.326.187,43
16	Puskesmas Jelbuk	484.252.388,96
17	Puskesmas Jember Kidul	818.791.705,54
18	Puskesmas Jenggawah	553.976.471,09
19	Puskesmas Jombang	501.483.696,88
20	Puskesmas Kalisat	1.253.534.538,26
21	Puskesmas Kaliwates	747.928.432,18
22	Puskesmas Karangduren	654.916.428,92
23	Puskesmas Kasiyan	473.918.233,25
24	Puskesmas Kemuningsari Kidul	560.778.024,93
25	Puskesmas Kencong	964.455.345,79
26	Puskesmas Klatakan	486.479.612,64
27	Puskesmas Ledokombo	626.275.702,73
28	Puskesmas Lojejer	639.366.369,75
29	Puskesmas Mangli	702.292.583,04
30	Puskesmas Mayang	554.927.510,30
31	Puskesmas Mumbulsari	706.612.475,68
32	Puskesmas Nogosari	418.435.386,03
33	Puskesmas Pakusari	1.107.494.812,70
34	Puskesmas Paleran	348.456.006,72
35	Puskesmas Panti	680.433.016,31
36	Puskesmas Patrang	663.710.010,81
37	Puskesmas Puger	954.174.670,70
38	Puskesmas Rambipuji	631.026.480,11
39	Puskesmas Rowotengah	492.813.328,95
40	Puskesmas Sabrang	534.385.730,06
41	Puskesmas Semboro	590.118.077,47
42	Puskesmas Silo I	620.257.343,36
43	Puskesmas Silo li	615.044.640,32
44	Puskesmas Sukorambi	538.189.541,29
45	Puskesmas Sukorejo	430.225.704,27
46	Puskesmas Sukowono	678.415.936,37
47	Puskesmas Sumberbaru	562.819.932,40
48	Puskesmas Sumberjambe	658.453.473,38



NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
49	Puskesmas Sumbersari	952.528.868,11
50	Puskesmas Tanggul	1.031.568.129,00
51	Puskesmas Tembokrejo	339.638.408,29
52	Puskesmas Tempurejo	465.522.511,76
53	Puskesmas Umbulsari	668.039.233,76
54	Puskesmas Wuluhan	984.171.781,08
TOTAL		35.147.953.839,67

- 8) Pengurangan persediaan dikarenakan Mengeluarkan Hibah sebesar Rp1.863.137.496,09 pada beberapa Rumah Sakit swasta yang berupa bahan cetak, bahan kimia, suku cadang kedokteran, bahan lainnya dan obat-obatan. Berdasarkan surat rekapitulasi penyaluran barang dengan nomer 000.2.3.1/12411/35.09.311/2024 dan 800.1.11.1/20/35.09.311.01/2025

Tabel 5. 102 Pengurangan Persediaan Di Karenakan mengeluarkan Hibah

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.863.137.496,09
TOTAL		1.863.137.496,09

- 9) Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang sebesar Rp 76.294.021.521,99 merupakan pemakaian atas persediaan yang berasal dari hutang persediaan. Adapun pengurangan hutang Pemakaian persediaan yang bersumber dari hutang terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 103 Pemakaian Persediaan Yang Bersumber Dari Hutang

NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Bahan Bakar Dan Pelumas	9.815.503,00
		Bahan Lainnya	6.561.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	26.014.093,00
		Kertas Dan Cover	231.571.500,00
		Bahan Cetak	475.181.200,00
		Bahan Komputer	66.538.500,00
		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	251.614.800,00
		Obat	8.607.969.262,92
		Obat-Obatan Lainnya	9.668.500.255,29
		Natura	676.339.653,20
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Bahan Kimia	9.116.418.860,03
		Bahan Lainnya	27.361.851.089,88
		Obat	18.076.733.872,81
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	501.750.515,00
		Obat	604.989.811,48



NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
4	Puskesmas Ajung	Bahan Kimia	2.172.000,00
		Perabot Kantor	3.138.000,00
		Obat	2.736.260,00
5	Puskesmas Andongsari	Bahan Bakar Dan Pelumas	21.770.686,00
		Isi Tabung Gas	209.000,00
6	Puskesmas Arjasa	Bahan Bakar Dan Pelumas	3.100.000,00
7	Puskesmas Cakru	Bahan Cetak	1.212.500,00
		Benda Pos	400.000,00
		Obat	486.455,00
8	Puskesmas Curahnongko	Bahan Bakar Dan Pelumas	22.039.284,00
		Isi Tabung Gas	1.470.000,00
		Bahan Lainnya	771.480,00
		Alat Tulis Kantor	5.040.000,00
		Kertas Dan Cover	3.128.000,00
		Bahan Cetak	8.980.000,00
		Perabot Kantor	3.366.900,00
		Obat	5.804.780,00
		Natura	22.545.000,00
9	Puskesmas Gladapakem	Bahan Bakar dan Pelumas	4.526.000,00
		Bahan Cetak	1.177.500,00
10	Puskesmas Gumukmas	Bahan Bakar dan Pelumas	25.920.000,00
		Suku Cadang Alat Angkutan	12.926.500,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	9.430.300,00
11	Puskesmas Jenggawah	Bahan Bakar dan Pelumas	4.360.000,00
		Isi Tabung Gas	2.700.000,00
		Bahan Cetak	7.230.000,00
12	Puskesmas Jombang	Bahan Bakar dan Pelumas	23.350.000,00
		Isi Tabung Gas	2.194.000,00
		Bahan Cetak	5.462.000,00
		Natura	13.050.000,00
13	Puskesmas Kaliwates	Bahan Lainnya	1.370.000,00
		Alat Tulis Kantor	72.000,00
		Bahan Cetak	225.000,00
		Bahan Komputer	1.512.000,00
		Obat	4.623.200,00
14	Puskesmas Karangduren	Isi Tabung Gas	2.056.500,00
		Bahan Cetak	3.378.000,00
		Obat	2.165.000,00
15	Puskesmas Kasiyan	Bahan Bakar dan Pelumas	9.340.000,00
16	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Bakar dan Pelumas	1.200.000,00
		Obat	6.298.618,46
17	Puskesmas Klatakan	Bahan Bakar dan Pelumas	2.252.000,00
		Obatan Lainnya	1.198.800,00
18	Puskesmas Mangli	Bahan Bakar dan Pelumas	4.800.000,00



NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
		Isi Tabung Gas	470.000,00
		Benda Pos	90.000,00
		Obat	6.468.636,00
19	Puskesmas Nogosari	Isi Tabung Gas	1.380.000,00
20	Puskesmas Panti	Bahan Bakar dan Pelumas	1.600.000,00
		Obat	2.539.600,00
21	Puskesmas Patrang	Isi Tabung Gas	910.000,00
22	Puskesmas Puger	Isi Tabung Gas	143.190,00
		Suku Cadang Alat Angkutan	1.276.500,00
		Bahan Cetak	14.457.000,00
		Obat	10.312.424,61
23	Puskesmas Rowotengah	Bahan Bakar dan Pelumas	2.400.000,00
		Isi Tabung Gas	1.540.000,00
		Bahan Lainnya	5.450.000,00
		Alat Tulis Kantor	4.854.300,00
		Kertas dan cover	982.500,00
		Bahan Cetak	7.203.900,00
		Benda Pos	800.000,00
		Bahan Komputer	5.656.000,00
		Perabot Kantor	5.053.600,00
		Alat Listrik	1.728.000,00
		Perlengkapan Dinas	9.160.000,00
		Obat	581.999,03
		Obatan Lainnya	8.515.008,69
24	Puskesmas Sabrang	Bahan Bakar dan Pelumas	8.500.000,00
		Kertas dan cover	3.000.000,00
		Bahan Cetak	6.120.000,00
25	Puskesmas Sukorejo	Bahan Bakar dan Pelumas	17.100.000,00
		Alat Tulis Kantor	3.375.000,00
		Kertas dan cover	12.733.500,00
		Bahan Cetak	13.700.000,00
		Obat	413.000,00
		Obatan Lainnya	10.704.500,00
		Natura	13.545.000,00
26	Puskesmas Sukowono	Bahan Bakar dan Pelumas	25.915.000,00
		Isi Tabung Gas	1.000.000,00
		Suku Cadang Alat Kedokteran	674.678,00
		Bahan Cetak	7.198.500,00
		Benda Pos	550.000,00
		Obat	1.189.720,00
27	Puskesmas Sumberjambe	Bahan Bakar dan Pelumas	39.726.312,00
		Isi Tabung Gas	1.732.000,00
		Bahan Cetak	6.500.000,00
		Obat	2.104.140,00



NO	NAMA OPD	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
28	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	6.984.140,00
		Bahan Bakar dan Pelumas	20.330.000,00
		Bahan Lainnya	6.082.013,60
		Bahan Cetak	11.566.000,00
		Obat	18.352.680,00
29	Puskesmas Wuluhan	Natura	18.315.000,00
TOTAL			76.294.021.521,99

10) Persediaan kadaluarsa/usang/rusak sebesar Rp 611.063.220,93 merupakan pengurangan persediaan yang disebabkan karena adanya persediaan yang kadaluarsa/usang/rusak, bukan karena pemakaian persediaan. Rincian persediaan kadaluarsa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 104 Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	78.422.222,15
		Obat	378.215.497,25
2.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	1.871.100,00
		Obat	16.689.147,92
3.	Puskesmas Bangsalsari	Obat	290.406,00
4.	Puskesmas Curahnongko	Bahan Kimia	150.784,00
		Obat	5.963.680,00
5.	Puskesmas Gumukmas	Bahan Kimia	2.947.080,80
		Obat	706.932,82
6.	Puskesmas Jenggawah	Obat	1.079.475,00
7.	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Kimia	806.772,00
		Obat	8.382.217,00
8.	Puskesmas Ledokombo	Obat	2.538.930,00
9.	Puskesmas Mangli	Bahan Kimia	2.961.864,60
		Obat	8.985.482,13
10.	Puskesmas Mayang	Obat	3.424.429,00
11.	Puskesmas Nogosari	Bahan Kimia	122.494,90
		Obat	78.961,00
12.	Puskesmas Pakusari	Bahan Kimia	635.544,60
		Obat	9.387.718,00
13.	Puskesmas Paleran	Obat	2.804.519,25
14.	Puskesmas Panti	Bahan Kimia	218.956,00
		Obat	2.517.300,00
15	Puskesmas Patrang	Obat	6.934.197,00
16	Puskesmas Rambipuji	Obat	7.214.125,00
17.	Puskesmas Sabrang	Obat	18.540,00
18.	Puskesmas Semboro	Bahan Kimia	2.143.607,00
		Obat	3.806.955,38

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
19.	Puskesmas Sukorambi	Obat	9.455.110,00
20.	Puskesmas Sukorejo	Bahan Kimia	756.000,00
		Bahan Lainnya	1.055.805,08
		Obat	626.345,00
21.	Puskesmas Sumberbaru	Bahan Kimia	6.620.001,80
		Obat	7.355.598,40
22.	Puskesmas Sumbersari	Obat	39.330,00
23.	Puskesmas Tembokrejo	Bahan Kimia	156.934,00
		Obat	2.285.560,00
24.	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	1.096.816,00
		Obat	8.617.146,88
25	Puskesmas Umbulsari	Bahan Kimia	1.863.426,00
		Obat	6.296.924,86
26.	Puskesmas Wuluhan	Bahan Kimia	611.380,00
		Obat	697.007,00
27	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Obat	176.730,00
		Obat – obatan lainnya	2.830.413,00
28	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Soebandi	Bahan lainnya	816.750,00
		Obat	10.387.004,11
	TOTAL		611.063.220,93

- 11) Pengurangan persediaan dikarenakan koreksi ke belanja modal sebesar Rp4.347.761.922,00 merupakan persediaan yang dikarenakan kesalahan perencanaan anggaran belanja pada perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Koreksi ke Belanja Modal

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Bagian Umum	9.600.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	47.750.000,00
3	Dinas Pendidikan	91.150.000,00
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	4.000.000,00
5	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	4.105.827.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja	4.400.000,00
6	Dinas Komunikasi Dan Informatika	18.275.000,00
7	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	18.345.000,00
8	Kecamatan Ajung	16.580.000,00
9	Kecamatan Kalisat	4.734.922,00
10	Kecamatan Mayang	8.300.000,00
11	Kecamatan Rambipuji	8.000.000,00
12	Puskesmas Jombang	900.000,00
13	Puskesmas Kencong	9.900.000,00
TOTAL		4.347.761.922,00

- 12) Pengurangan koreksi belanja sebesar **Rp61.050.000.00** dari belanja bahan lainnya ke

belanja sewa alat kesehatan umum lainnya Berupa sewa tabung gas pada Rumah Sakit Daerah Kalisat.

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Soebandi	61.050.000,00
TOTAL		61.050.000,00

- 13) Pengurangan persediaan dikarenakan Mutasi antar OPD sebesar Rp49.885.888.994,49 pada Dinas Kesehatan ke 50 puskesmas (BLUD) dan Dinas Perikanan berupa Pelampung yang diserahkan kepada OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.

Tabel Pengurangan Mutasi Antar OPD

NO	NAMA OPD	NILAI (Rp)
1	Dinas Kesehatan	49.825.025.994,49
2	Dinas Perikanan	60.863.000,00
TOTAL		49.885.888.994,49

Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp61.153.501.262,57 merupakan akumulasi saldo akhir persediaan yang tercatat dalam Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Daerah (SIPERDA) dan saldo akhir persediaan yang tercatat secara manual (excel), dengan rincian sebagai berikut:

Siperda Rp 16.845.327.489,54

Manual Rp 44.308.173.773,03

Jumlah Rp 61.153.501.262,57

Saldo akhir persediaan tersebut berdasarkan hasil *stock opname* dapat dirinci per jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 5. 105 Rincian Persediaan Per Jenis Persediaan

No.	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	666.886.081,90
2	Bahan Kimia	13.718.294.631,50
3	Bahan Bakar Dan Pelumas	18.565.500,00
4	Bahan Baku	7.740.000,00
5	Bahan/Bibit Tanaman	47.749.850,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.334.500,00
7	Isi Tabung Gas	14.227.370,00
8	Bahan Lainnya	8.062.432.836,80
9	Suku Cadang Alat Angkutan	60.056.925,00
10	Suku Cadang Alat Kedokteran	515.208.896,90
11	Suku Cadang Alat Laboratorium	7.850.000,00

No.	JENIS PERSEDIAAN	NILAI (Rp)
12	Suku Cadang Alat Pertanian	60.301.300,00
13	Suku Cadang Alat Bengkel	264.000,00
14	Alat Tulis Kantor	1.269.006.178,08
15	Kertas Dan Cover	343.387.394,78
16	Bahan Cetak	3.231.468.514,67
17	Benda Pos	21.034.000,00
18	Bahan Komputer	647.837.469,85
19	Perabot Kantor	474.694.336,27
20	Alat Listrik	3.024.729.270,30
21	Perlengkapan Dinas	866.545.990,00
22	Suvenir/Cendera Mata	19.425.000,00
23	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	357.383.075,77
24	Obat	18.750.540.692,25
25	Obat-Obatan Lainnya	2.521.577.559,50
26	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.294.747.944,00
27	Natura	17.990.945,00
28	Natura Dan Pakan Lainnya	131.221.000,00
TOTAL		61.153.501.262,57

Untuk jenis persediaan yang saldo persediaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 tidak ditampilkan dalam rincian tabel diatas.

Selain persediaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, terdapat persediaan Pemerintah Kabupaten Jember yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2024 yang kondisinya rusak/usang/kadaluarsa sehingga tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional perangkat daerah dan tidak dilaporkan di Neraca sehingga nilainya tidak mempengaruhi saldo akhir persediaan Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 106 Rincian Persediaan Rusak/Usang/Kadaluarsa tahun 2024

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Bahan Kimia	491.523.287,16
		Obat	6.160.767.758,52
		Bahan Lainnya	51.746.175,93
		Suku Cadang Alat Kedokteran	82.338.800,00
2.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Obat	3.223.459,00
		Obat Lainnya	3.703.644,00
3.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	Obat	118.217.998,27
		Bahan Lainnya	1.194.450,00
4.	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	Bahan Lainnya	1.871.100,00
		Obat	16.689.147,92
5.	Puskesmas Bangsalsari	Obat	290.406,00
6.	Puskesmas Curahnongko	Bahan Kimia	150.784,00

No	Nama OPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
		Obat	5.963.680,00
7.	Puskesmas Gumukmas	Bahan Kimia	2.947.080,80
		Obat	706.932,82
8.	Puskesmas Jenggawah	Obat	1.079.475,00
9.	Puskesmas Kemuningsari Kidul	Bahan Kimia	806.772,00
		Obat	8.382.217,00
10.	Puskesmas Ledokombo	Obat	2.538.930,00
11.	Puskesmas Mangli	Bahan Kimia	2.961.864,60
		Obat	8.985.482,13
12.	Puskesmas Mayang	Obat	3.424.429,00
13.	Puskesmas Nogosari	Bahan Kimia	122.494,90
		Obat	78.961,00
14.	Puskesmas Pakusari	Bahan Kimia	635.544,60
		Obat	9.387.718,00
15.	Puskesmas Paleran	Obat	2.804.519,25
16.	Puskesmas Panti	Bahan Kimia	218.956,00
		Obat	2.517.300,00
17.	Puskesmas Patrang	Obat	6.934.197,00
18.	Puskesmas Rambipuji	Obat	7.214.125,00
19.	Puskesmas Sabrang	Obat	18.540,00
20.	Puskesmas Semboro	Bahan Kimia	2.143.607,00
		Obat	3.806.955,38
21.	Puskesmas Sukorambi	Obat	9.455.110,00
22.	Puskesmas Sukorejo	Bahan Kimia	756.000,00
		Bahan Lainnya	1.055.805,08
		Obat	626.345,00
23.	Puskesmas Sumberbaru	Bahan Kimia	6.620.001,80
		Obat	7.355.598,40
24.	Puskesmas Sumbersari	Obat	39.330,00
25.	Puskesmas Tembokrejo	Bahan Kimia	156.934,00
		Obat	2.285.560,00
26.	Puskesmas Tempurejo	Bahan Kimia	1.096.816,00
		Obat	8.617.146,88
27.	Puskesmas Umbulsari	Bahan Kimia	1.863.426,00
		Obat	6.296.924,86
28.	Puskesmas Wuluhan	Bahan Kimia	611.380,00
		Obat	697.007,00
Total			7.052.930.177,30

Terdapat Penghapusan atas barang persediaan rusak/usang/kadaluarsa dengan cara dimusnahkan selama tahun 2024 sebesar Rp 2.213.866.136,71 pada Rumah Sakit Daerah Kalisat sebesar Rp48.534.709,26 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4/79/SEKDA/1.12/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan pada 48 Puskesmas di Kabupaten

Jember sebesar Rp2.165.331.427,45 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4 / 72 / SEKDA / 1.12 / 2024 tanggal 25 Juni 2024.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
154.820.404.803,49	140.052.940.901,00	14.767.463.902,49	10,54

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp154.820.404.803,49 dan Rp140.052.940.901,00, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp14.767.463.902,49 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan sebesar Rp14.767.463.902,49 atau 10,54 persen.

Investasi Jangka Panjang 2024 terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen sebesar Rp154.820.404.803,49 setelah dikurangi oleh penyisihan dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 107 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
A	Investasi Non Permanen					
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.385.999.202,00	(25.060,42)	0,00	22.055.000,00	1.363.919.141,58
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.735.000,00
Jumlah A		4.391.734.202,00	(25.060,42)	0,00	22.055.000,00	4.369.654.141,58
B	Investasi Permanen					
1	PDP Kabupaten Jember	33.079.551.905,00	402.676.589,00	15.077.966.008,00	0,00	48.560.194.502,00
2	PDAM Kabupaten Jember	79.006.670.246,00	0,00	0,00	713.178.694,51	78.293.491.551,49
3	Bank Jatim	27.966.718.750,00	0,00	0,00	0,00	27.966.718.750,00
Jumlah B		140.052.940.901,00	402.676.589,00	15.077.966.008,00	713.178.694,51	154.820.404.803,49

Adapun tentang masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut penjelasan:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
a) Investasi Non Permanen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan NRV dari Dana Bergulir senilai Rp4.369.654.141,58 yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 108 Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2024



No	OPD	2023 (Rp)	Koreksi	Pengurangan	(NRV)	2024 (Rp)
1	Dana Bergulir Bank Jatim	1.385.999.202,00	(25.060,42)	22.055.000,00	0,00	1.363.919.141,58
2	Dana Bergulir Hewan Ternak	3.005.735.000,00	0,00	0,00	0,00	3.005.735.000,00
	Jumlah	4.391.734.202,00	(25.060,42)	22.055.000,00	0,00	4.369.654.141,58

Saldo awal Dana Bergulir Bank Jatim adalah sebesar Rp1.385.999.202,00, pada tahun 2024 terjadi mutasi pengurangan karena adanya pembayaran sebesar Rp22.055.000,00 sehingga saldo akhir sebesar Rp1.363.919.141,58. Terdapat koreksi kurang sebesar Rp25.060,42 karena pembulatan angka setoran debitur dari tahun 2010 – 2023. Pencatatan Danabergulir sebesar Rp1.363.919.141,58 tersebut telah disisihkan atau diragukan tertagih sebesar Rp1.363.919.141,58 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

Saldo awal Dana Bergulir Hewan Ternak sebesar Rp3.005.735.000,00 dan tidak ada mutasi penambahan maupun pengurangan selama tahun 2024. Dari jumlah tersebut terdapat penyisihan atau diragukan tertagih sebesar Rp3.005.735.000,00 sehingga NRV yang disajikan dalam neraca adalah Rp0,00.

5.3.1.2.2 Investasi Permanen

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
b) Investasi Permanen	154.820.404.803,49	140.052.940.901,00

Nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.820.404.803,49. Nilai tersebut berasal dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada beberapa perusahaan, yang terdiri dari:

Tabel 5. 109 Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2024

No	Uraian	metode pencatatan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PDP Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	48.560.194.502,00	33.079.551.905,00
2	PDAM Kabupaten Jember	Metode Ekuitas	78.293.491.551,49	79.006.670.246,00
3	Bank Jatim	Metode Biaya	27.966.718.750,00	27.966.718.750,00
	Jumlah		154.820.404.803,49	140.052.940.901,00



Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp154.820.404.803,49 dalam bentuk penyertaan modal, yang terdiri atas penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Kabupaten Jember, PDAM Kabupaten Jember, dan Bank Jatim. Pencatatan atas penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan untuk penyertaan modal pada Bank Jatim menggunakan metode biaya (*cost method*). Perbedaan metode pencatatan tersebut dikarenakan jumlah kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada masing-masing perusahaan daerah tersebut. Berikut penjelasan penyertaan Investasi Permanen pada perusahaan daerah per 31 Desember 2024.

1. Pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
48.560.194.502,00	33.079.551.905,00	15.480.642.597,00	46,80

Saldo Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp48.560.194.502,00 dan Rp33.079.551.905,00 terjadi kenaikan sebesar Rp15.480.642.597,00 atau 46,80 persen.

PDP Kahyangan Jember telah didirikan sejak tahun 1969 berdasarkan perda nomor 1 tahun 1969. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan dilakukan di tahun 2020 sesuai Perda nomor 5 tahun 2020 sebesar Rp5.800.000.000,00. Penyertaan modal terbaru Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan dilakukan di tahun 2024 sesuai Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/182/1.12/ 2024 sebesar Rp15.000.000.000,00. Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2024 adalah sebesar 100 persen.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDP Kahyangan Jember per 31 Desember 2024 berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDP Kahyangan Jember Tahun 2024 Audited. Rincian perubahan ekuitas PDP Kahyangan Jember Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 110 Penyertaan Modal Pemerintah Pada PDP Kahyangan per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Modal Pemerintah Jember	16.885.227.715,00	15.000.000.000,00	0,00	31.885.227.715,00
2	Disvestasi Kebun Ketajik ke koperasi Ketajik Makmur	(870.868.103,00)	0,00	0,00	(870.868.103,00)



No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
3	Penggunaan Cadangan Umum	2.715.000.000,00	0,00	0,00	2.715.000.000,00
4	Cadangan	17.144.263.316,00	0,00	10.000.000,00	17.134.263.316,00
5	Laba/Rugi Tahun Berjalan	(2.391.394.434,00)	87.966.008,00	0,00	(2.303.428.426,00)
Total Ekuitas PDP		33.482.228.494,00	15.087.966.008,00	10.000.000,00	48.560.194.502,00

Mutasi tambah sebesar Rp15.087.966.008,00 terdiri dari penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp15.000.00.000,00 dan kenaikan laba sebesar Rp87.966.008,00 atas penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah pada Laporan Keuangan Audited PDP Kahyangan Jember Tahun 2024.

Mutasi Kurang sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari penggunaan dana cadangan sebesar untuk keperluan sosial dan pendidikan di tahun 2024.

2. Pada PDAM Kabupaten Jember

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
78.293.491.551,49	79.006.670.246,00	(713.178.694,51)	(0,90)

Saldo penyertaan modal pemerintah kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp78.293.491.551,49 dan Rp79.006.670.246,00 terjadi penurunan sebesar Rp713.178.694,51 atau 0,90 persen.

PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember telah didirikan sejak tahun 1975 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1975. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember terbaru dilakukan di tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan, Pelaksanaan dan Tata cara Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember dan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/382.1/1.12/2019 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.

Porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100 persen dan telah dinyatakan oleh Direktur sesuai surat pernyataan Nomor 690/390/436.62/2023 tanggal 11 April 2023.

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada PDAM Perumdam Tirta

Pandalungan Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 berdasarkan informasi Laporan Keuangan PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2024 Audited. Rincian perubahan ekuitas PDAM Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM per 31 Desember 2024

No	Uraian	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Modal Pemerintah Jember	41.778.656.151,00	0,00	0,00	41.778.656.151,00
2	Modal Pemerintah Pusat	1.592.999.981,00	0,00	0,00	1.592.999.981,00
3	Hibah	388.376.559,00	0,00	0,00	388.376.559,00
4	Penyertaan Pemerintah Yang Belum Jelas Statusnya	38.410.657.752,00	0,00	0,00	38.410.657.752,00
5	Akumulasi Laba (Rugi)	(3.164.020.197,00)	5.140.186.520,33	5.853.365.214,84	(3.877.198.891,51)
Total Ekuitas PDAM		79.006.670.246,00	5.140.186.520,33	5.853.365.214,84	78.293.491.551,49

Mutasi tambah sebesar Rp5.140.186.520,33 merupakan keuntungan tahun 2024. Mutasi Kurang sebesar Rp5.853.365.214,84 berasal dari:

1. Bagi Laba Pemerintah Daerah 55 persen dari tahun 2024 Rp4.227.361.599,45,
2. Pembayaran jasa produksi yang tidak dibagikan kepada pegawai sebesar Rp384.305.599,95,
3. Koreksi yang mempengaruhi rugi sebesar Rp1,56,
4. Pengakuan utang jangka panjang iuran PSL Dapenma sebesar Rp1.241.698.017,00.

1. Pada Bank Jatim

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
27.966.718.750,00	27.966.718.750,00	0,00	0,00

Saldo Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jember pada Bank Jatim per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp27.966.718.750,00 dan Rp27.966.718.750,00. tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai penyertaan modal dari awal berdiri sampai tahun 2024.

5.3.1.3 Aset Tetap

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap	5.581.976.123.515,91	5.721.644.054.344,41



Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.581.976.123.515,91 dan Rp5.721.644.054.344,41. Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 berasal dari nilai perolehan sebesar Rp11.226.487.098.583,40 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp5.648.156.354.735,85. Ringkasan aset tetap disajikan sebagai berikut:

Tabel Aset Tetap

ASET TETAP	SALDO AKHIR 2023 Audited	SALDO AKHIR 2024	KENAIKAN/PENURUNAN (%)
Tanah	1.497.631.646.038,32	1.479.307.853.536,01	(1,22)
Peralatan dan Mesin	1.700.939.457.597,54	1.762.452.394.551,63	3,61
Gedung dan Bangunan	2.338.714.217.138,97	2.398.406.515.487,05	2,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.181.979.525.235,39	5.284.380.906.537,39	1,97
Aset Tetap Lainnya	253.570.816.528,51	276.847.475.566,51	9,17
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.269.692.114,25	25.091.952.904,85	(0,70)
NILAI PEROLEHAN	10.998.105.354.653,00	11.226.487.098.583,40	2,07
Akumulasi Penyusutan	5.276.461.300.308,57	5.644.510.975.067,53	6,97
NILAI BUKU	5.721.644.054.344,41	5.581.976.123.515,91	(2,24)

Nilai aset tetap per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp139.667.930.828,50 atau 2,44 persen. Kenaikan aset tetap berasal dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Adapun rincian Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.581.976.123.515,91 dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	10.998.105.354.653,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	340.156.294.236,00
Jumlah	Rp	11.338.261.648.889,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	111.774.550.305,54
Aset Tetap per 31 Desember 2024	Rp	11.226.487.098.583,40
Penyusutan s/d Tahun 2024	Rp	5.644.510.975.067,53
Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2024	Rp	5.581.976.123.515,91



Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 tersebut meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tetap

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Tanah	1.497.631.646.038,32	1.593.944.000,00	19.917.736.502,31	1.479.307.853.536,01
2	Peralatan dan Mesin	1.700.939.457.597,54	98.477.502.687,00	36.964.565.732,91	1.762.452.394.551,63
3	Gedung dan Bangunan	2.338.714.217.138,97	81.616.551.361,00	21.924.253.012,92	2.398.406.515.487,05
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.181.979.525.235,39	105.092.780.727,00	2.691.399.425,00	5.284.380.906.537,39
5	Aset Tetap Lainnya	253.570.816.528,51	53.375.515.461,00	30.098.856.423,00	276.847.475.566,51
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.269.692.114,25	0,00	177.739.209,40	25.091.952.904,85
NILAI ASET		10.998.105.354.652,98	340.156.294.236,00	111.774.550.305,54	11.226.487.098.583,40
Akumulasi Penyusutan		5.276.461.300.308,57	399.680.056.089,45	31.630.381.330,50	5.644.510.975.067,53
NILAI BUKU		5.721.644.054.344,41	(59.523.761.853,45)	80.144.168.975,04	5.581.976.123.515,91

Saldo dan mutasi Aset Tetap pada masing-masing jenis per 31 Desember 2024 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.479.307.853.536,01	1.497.631.646.038,32	(18.323.792.502,31)	1,22

Nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.479.307.853.536,01 dan Rp1.497.631.646.038,32 terjadi penurunan nilai Aset Tetap-Tanah dibandingkan tahun lalu sebesar Rp18.323.792.502,31 atau sebesar 1,22 persen. Penurunan nilai Aset Tetap tanah ini karena adanya penambahan sebidang tanah dan adanya pengurangan koreksi serta hibah sebagian tanah.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.479.307.853.536,01 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.497.631.646.038,32
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.593.944.000,00
Jumlah	Rp	1.499.225.590.038,32
Pengurangan Tahun 2024	Rp	19.917.736.502,31
Nilai AT-Tanah Tahun 2024	Rp	1.479.307.853.536,01

Mutasi Aset Tetap-Tanah pada tahun 2024 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 112 Mutasi Aset Tetap–Tanah

JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Tanah	1.497.631.646.038,32	1.593.944.000,00	19.917.736.502,31	1.479.307.853.536,01
Jumlah	1.497.631.646.038,32	1.593.944.000,00	19.917.736.502,31	1.479.307.853.536,01

Pada Tahun 2024, terdapat penambahan sebanyak 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh dari penyerahan dari Yayasan GNI dan telah ditetapkan nilai perolehannya berupa tanah untuk bangunan eks. GNI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dan terdapat pengurangan bidang tanah sebanyak 3 (tiga) bidang yakni 1 (satu) bidang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 2 (dua) bidang tanah pada Puskesmas Gumukmas serta adanya reklasifikasi Aset Tetap tanah ke Aset lainnya (Kemitraan Pihak Ketiga) pada Tata Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang tanah, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 34 (tiga puluh empat) bidang tanah, Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) bidang tanah, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bidang tanah, serta pada Dinas Pemuda Olah Raga sebanyak 1 (satu) bidang tanah.

Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.593.944.000,00 berupa Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.593.944.000,00 karena adanya koreksi penetapan nilai perolehan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember berupa tanah untuk bangunan eks. GNI berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/433/1.12/2024 tentang Nilai Perolehan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung eks. GNI tanggal 9 Desember 2024.

Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp19.917.736.502,31 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp30.000.000,00 karena adanya koreksi atas 2 (dua) bidang tanah yang ada pada Puskesmas Gumukmas, 1 (satu) bidang tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp20.000.000,00 merupakan tanah milik desa berdasarkan surat hak pakai Desa Gumukmas Nomor: 0008 Tahun 2021 NIB : 12.34.03.04.10238 dan 1 (satu) bidang tanah dengan nilai perolehan Rp10.000.000,00 merupakan tanah milik desa berdasarkan surat hak pakai Desa Mayangan Nomor: 0037 Tahun 2021 NIB : 12.34.03.01.12547;
2. Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp11.500.000 merupakan koreksi dobel catat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember berdasarkan surat Permohonan Koreksi Terhadap Data BMD Nomor 000.2.5/2998/35.09/412/2024 tanggal 9 Desember 2024.

3. Adanya koreksi pengurangan nilai perolehan sebesar Rp4.224.000,00 merupakan pengurangan Hibah Sebagian tanah yang berlokasi di Jl. Samudra Pasai Sumbersari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/218/1.12/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan nilai perolehan asal Rp1.430.067.154,00;
4. Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap- Tanah sebesar Rp19.872.012.502,31 merupakan pengurangan reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ke Tiga) sebanyak 40 (empat puluh) bidang tanah pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp10.128.267.715,31, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang tanah sebesar Rp7.815.594.787,00, pada Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) bidang tanah sebesar Rp2.150.000,00, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bidang sebesar Rp1.349.000.000,00 serta pada Dinas Pemuda Olah Raga sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp577.000.000,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 113 Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ketiga)

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	jumlah	NILAI (Rp)
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Kemitraan Pihak Ketiga)				
1	Tanah	Bagian Tata Pemerintahan	2	10.128.267.715,31
2	Tanah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34	7.815.594.787,00
3	Tanah	Dinas Perhubungan	1	2.150.000,00
4	Tanah	Bagian Umum	2	1.349.000.000,00
5	Tanah	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1	577.000.000,00
SUB TOTAL			40	19.872.012.502,31

Aset Tetap-Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.479.307.853.536,01 tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang jumlahnya mencapai 6.167 bidang. Dari seluruh bidang tanah tersebut terdapat 827 bidang tanah yang telah bersertifikat sedangkan sisanya sebanyak 5.340 bidang tanah belum bersertifikat. Adapun Aset Tetap-Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.479.307.853.536,01 tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Sebanyak 6.167 bidang milik Pemerintah Kabupaten Jember, seluruhnya telah digunakan/ dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah tanpa mengubah status kepemilikan namun sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan status penggunaan atas barang milik daerah. Rincian atas penggunaan dan pemanfaatan Aset Tetap-Tanah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 114 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Tetap-Tanah

NO	KODE	URAIAN	JUMLAH
1	1.3.1.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	248
2	1.3.1.01.01.01.012	Dst.. - Tanah G. Tempat Tinggal	10
3	1.3.1.01.01.04.026	Dst.. - Tanah Bangunan Tempat Kerja	31
4	1.3.1.01.03.07.001	Tanah Untuk Jalan Nasional	16
5	1.3.1.01.02.07.001	Tanah Usaha	77
6	1.3.1.01.03.17.001	Tanah Kampung.	2
7	1.3.1.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	12
8	1.3.1.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	1
9	1.3.1.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.013
10	1.3.1.01.02.06.003	Tanah Padang Semak Belukar	1
11	1.3.1.01.01.02.006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel	1
12	1.3.1.01.02.01.003	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2
13	1.3.1.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	5
14	1.3.1.01.03.08.005	Alam Tanah Untuk Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	5
15	1.3.1.01.03.08.007	Tanah Untuk Bangunan Air Kotor	1
16	1.3.1.01.02.01.005	Tanah Sawah Irigasi	3
17	1.3.1.01.01.05.001	Tanah Untuk Bangunan Sarana Olah Raga Tertutup	8
18	1.3.1.01.01.06.007	Dst.. - Tanah Bangunan Tempat Ibadah	3
19	1.3.1.01.01.01.004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	4
20	1.3.1.01.02.03.002	Tanah Kebun Induk	15
21	1.3.1.01.01.02.003	Tanah Bangunan Gudang	17
22	1.3.1.01.02.02.001	Tanah Tegalan	1
23	1.3.1.01.03.08.006	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	1
24	1.3.1.01.02.06.002	Tanah Padang Rumput	3
25	1.3.1.01.03.13.003	Dst.. - Tanah Untuk Taman	2
26	1.3.1.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5
27	1.3.1.01.01.04.006	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	178
28	1.3.1.01.01.02.013	Tanah Bangunan Apotik	3
29	1.3.1.01.02.06.001	Tanah Padang Alang-Alang	2
30	1.3.1.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	51
31	1.3.1.01.03.07.003	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	2.747
32	1.3.1.01.03.08.001	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	918
33	1.3.1.01.01.02.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	11
34	1.3.1.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1
35	1.3.1.01.01.02.001	Tanah Bangunan Pasar	41
36	1.3.1.01.01.04.012	Tanah Bangunan Kandang Hewan	1
37	1.3.1.01.03.07.011	Dst.. - Tanah Untuk Jalan	38
38	1.3.1.01.01.04.013	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan	5
39	1.3.1.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	2
40	1.3.1.01.03.03.003	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	6
41	1.3.1.01.01.04.014	Tanah Bangunan Rumah Pendingin	1
42	1.3.1.01.01.04.003	Tanah Bangunan Rumah Sakit	8
43	1.3.1.01.03.12.005	Tanah Untuk Makam Umum	4
44	1.3.1.01.03.18.002	Dst.. - Emplasment	1

NO	KODE	URAIAN	JUMLAH
45	1.3.1.01.03.01.025	Dst.. - Tanah Lapangan Olah Raga	7
46	1.3.1.01.03.01.005	Tanah Lapangan Sepak Bola	14
47	1.3.1.01.03.07.004	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	641
TOTAL			6.167

2. Nilai 827 bidang tanah sebesar Rp304.393.005.905 merupakan bidang tanah yang telah bersertifikat. Rincian Aset Tetap-Tanah yang telah bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 115 Aset Tetap-Tanah Yang Bersertifikat

NO	OPD	TANAH BERSERTIFIKAT		
		JUMLAH	LUAS (m2)	NILAI (Rp)
1.	Badan Pendapatan Daerah	1	1.933	2.899.500.000,00
2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	4	51.161	2.282.832.000,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	110	1.610.293	67.658.736.860,00
4.	Bagian Tata Pemerintahan	2	27.628	1.393.903.984,69
5.	Bagian Umum	4	20.460	7.936.700.000,00
6.	Dinas Kesehatan	5	10.622	475.119.000,00
7.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2	17.479	4.359.741.000,00
8.	Dinas Pendidikan	465	1.878.994	101.484.306.460,00
9.	Dinas Perhubungan	7	24.273	3.029.959.000
10.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	39	176.662	39.191.516.432,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	6	7.879	2.820.378.000,00
12.	Dinas Perikanan	3	38.496	2.325.281.640,00
13.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	5	7.396	1.777.558.658,00
14.	Dinas Sosial	1	961	785.000.000,00
15.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	16	244.415	5.095.396.000,00
16.	Dinas Tenaga Kerja	1	3140	2.041.809.000,00
17.	Kecamatan Arjasa	1	1.330	68.500.000,00
18.	Kecamatan Balung	2	12.727	235.338.000,00
19.	Kecamatan Bangsalsari	2	17.998	685.934.000,00
20.	Kecamatan Jelbuk	3	13.471	56.328.700,00
21.	Kecamatan Jenggawah	2	100.400	249.395.500,00
22.	Kecamatan Jombang	1	2.000	120.000.000,00
23.	Kecamatan Kalisat	1	3.725	931.250.000,00
24.	Kecamatan Kaliwates	18	49.494	5.898.671.250,00
25.	Kecamatan Mayang	1	2.061	192.650.000,00
26.	Kecamatan Mumbulsari	2	8.382	30.506.000,00
27.	Kecamatan Pakusari	3	6.822	1.286.316.000,00
28.	Kecamatan Panti	3	16.240	144.147.800,00
29.	Kecamatan Patrang	23	97.704	1.989.554.700,00
30.	Kecamatan Rambipuji	4	11.453	2.810.318.500,00
31.	Kecamatan Silo	1	2.253	22.288.000,00
32.	Kecamatan Sukorambi	1	366	1.289.000,00



NO	OPD	TANAH BERSERTIFIKAT		
		JUMLAH	LUAS (m2)	NILAI (Rp)
33	Kecamatan Sukowono	2	5.606	52.879.000,00
34	Kecamatan Sumberbaru	1	569	3.907.000,00
35	Kecamatan Sumberjambe	3	3.722	62.922.000,00
36	Kecamatan Summersari	24	91.159	5.657.408.270,00
37	Kecamatan Tanggul	4	16.500	2.387.009.000,00
38	Kecamatan Tempurejo	1	1.284	38.520.000,00
39	Kecamatan Wuluhan	1	2.027	500.000.000,00
40	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	2	9.981	3.994.492.000,00
41	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3	35.134	17.169.619.000,00
42	Sekretariat Dewan Atau Dprd	1	4.774	4.938.850.000,00
43	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	2.580	1.290.000.000,00
44	Puskesmas Ajung	1	605	162.100.000,00
45	Puskesmas Arjasa	3	5.058	105.479.900,00
46	Puskesmas Balung	1	11.960	30.000.000
47	Puskesmas Bangsalsari	1	960	55.770.000
48	Puskesmas Banjarsengon	2	948	262.330.000
49	Puskesmas Gladakpakem	2	765	70.400.000
50	Puskesmas Gumukmas	1	2.108	138.000.000
51	Puskesmas Jelbuk	1	473	118.300.000
52	Puskesmas Jenggawah	2	2.197	421.525.000
53	Puskesmas Jombang	1	7.877	20.454.750
54	Puskesmas Kalisat	1	562	50.000.000
55	Puskesmas Kaliwates	2	11.045	1.219.000.000
56	Puskesmas Klatakan	1	1.104	183.630.000
57	Puskesmas Ledokombo	1	3.186	75.000.000
58	Puskesmas Mangli	1	717	150.000.000
59	Puskesmas Mayang	2	2.169	316.800.000
60	Puskesmas Pakusari	1	942	182.013.240
61	Puskesmas Panti	1	1.713	156.200.000
62	Puskesmas Patrang	2	1.940	457.125.000
63	Puskesmas Rambipuji	1	6.770	92.397.000
64	Puskesmas Rowotengah	1	1	177.000.000
65	Puskesmas Sabrang	1	1.232	1.188.883.260
66	Puskesmas Silo 1	1	1	130.000.000
67	Puskesmas Sukorejo	2	2.954	47.077.000
68	Puskesmas Sukowono	1	2.524	1.309.870.000
69	Puskesmas Sumberbaru	1	1	177.000.000
70	Puskesmas Sumberjambe	2	1.366	73.116.000
71	Puskesmas Summersari	4	397	319.160.000
72	Puskesmas Tanggul	3	7.626	321.543.000
73	Puskesmas Umbulsari	1	507	7.000.000
TOTAL		827	4.721.262	304.393.005.904,69



Dari 857 bidang tanah yang telah bersertifikat, sebanyak 36 bidang tanah bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember. Rincian Pemegang Hak atas tanah pada Sertifikat Hak Pakai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 116 Pemegang Hak Atas Tanah Pada Sertifikat Hak Pakai

NAMA PEMEGANG HAK ATAS TANAH PADA SERTIFIKAT HAK PAKAI	JUMLAH BIDANG TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Pemerintah Kabupaten Jember	791
JUMLAH	791
BUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat Di Jakarta	1
Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur	16
Kemendikbud	12
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	1
Departemen Transmigrasi Republik Indonesia	2
Departemen Perdagangan Republik Indonesia	1
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia	1
BUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER	
Departemen Pertanian Republik Indonesia	2
JUMLAH	36
TOTAL	827

3. Sebanyak 5340 bidang tanah belum bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp1.174.914.847.631,32. Rincian Aset Tetap-Tanah yang belum bersertifikat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 117 Aset Tetap-Tanah Yang Belum Bersertifikat

NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	1	910.000.000,00
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	1	100.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	7.299.364.200,00
4	Badan Pendapatan Daerah	1	5.400.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	63	9.391.292.386,11
6	Bagian Tata Pemerintah	1	144.000.000,00
7	Bagian Umum	-	-
8	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	-	-
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2	787.602.500,00
10	Dinas Kesehatan	1	100.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	10	4.505.487.000,00
12	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	3	65.150.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	8	759.355.400,00
14	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1	670.000.000,00

NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	2.501	845.471.807.366,55
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	300.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
18	Dinas Pendidikan	584	88.245.991.189,00
19	Dinas Perhubungan	5	3.337.320.000,00
20	Dinas Perikanan	5	895.463.400,00
21	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5	6.947.917.900,00
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2	589.370.000,00
23	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	643	41.787.696.865,29
24	Dinas Sosial	2	6.919.500.000,00
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	2	719.000.000,00
26	Dinas Tenaga Kerja	-	-
26	Kecamatan Ajung	36	1.521.135.000,00
27	Kecamatan Ambulu	47	951.984.800,00
28	Kecamatan Arjasa	24	518.409.000,00
29	Kecamatan Balung	33	439.140.000,00
30	Kecamatan Bangsalsari	57	937.456.850,00
31	Kecamatan Gumukmas	29	710.228.000,00
32	Kecamatan Jelbuk	32	795.278.500,00
33	Kecamatan Jenggawah	36	813.466.700,00
34	Kecamatan Jombang	39	783.488.000,00
35	Kecamatan Kalisat	36	1.588.572.300,00
36	Kecamatan Kaliwates	159	39.750.677.000,00
37	Kecamatan Kencong	18	301.474.000,00
38	Kecamatan Ledokombo	24	554.640.000,00
39	Kecamatan Mayang	32	660.245.500,00
40	Kecamatan Mumbulsari	36	524.233.000,00
41	Kecamatan Pakusari	45	6.297.974.000,00
42	Kecamatan Panti	33	229.625.000,00
43	Kecamatan Patrang	177	19.233.711.700,00
44	Kecamatan Puger	39	710.030.000,00
45	Kecamatan Rambipuji	47	3.322.122.751,68
46	Kecamatan Semboro	45	1.158.612.120,00
47	Kecamatan Silo	37	2.053.800.000,00
48	Kecamatan Sukorambi	32	2.739.179.500,00
49	Kecamatan Sukowono	17	921.978.000,00
50	Kecamatan Sumberbaru	36	528.750.000,00
51	Kecamatan Sumberjambe	13	231.930.000,00
52	Kecamatan Sumbersari	32	10.958.760.800,00
53	Kecamatan Tanggul	29	3.251.915.000,00
54	Kecamatan Tempurejo	35	324.509.500,00
55	Kecamatan Umbulsari	40	1.106.407.200,00
56	Kecamatan Wuluhan	39	605.641.952,69
57	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	1	4.786.507.000,00



NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
58	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1	53.665.000,00
59	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3	1.371.957.000,00
60	Sekretariat DPRD	-	0,00
62	Puskesmas Ajung	-	-
63	Puskesmas Ambulu	1	500.000.000,00
64	Puskesmas Andongsari	2	135.600.000,00
65	Puskesmas Arjasa	4	31.720.000,00
66	Puskesmas Balung	1	10.000.000,00
67	Puskesmas Bangsalsari	4	35.569.140,00
68	Puskesmas Banjarsengon	1	110.000.000,00
69	Puskesmas Cakru	1	30.320.100.000,00
70	Puskesmas Curahnongko	2	36.000.000,00
71	Puskesmas Gladakpakem	2	167.440.000,00
72	Puskesmas Gumukmas	1	10.000.000,00
73	Puskesmas Jelbuk	-	-
74	Puskesmas Jenggawah	4	198.500.000,00
75	Puskesmas Jombang	2	108.000.000,00
76	Puskesmas Kalisat	8	112.454.750,00
77	Puskesmas Kaliwates	10	57.152.600,00
78	Puskesmas Karangduren	2	220.000.000,00
79	Puskesmas Kasiyan	5	190.900.000,00
80	Puskesmas Kencong	2	35.000.000,00
81	Puskesmas Kemuningsari	3	4.443.412.420,00
82	Puskesmas Jember Kidul	4	120.225.000,00
83	Puskesmas Klatakan	1	20.000.000,00
84	Puskesmas Ledokombo	5	104.000.000,00
85	Puskesmas Mangli	1	20.000.000,00
86	Puskesmas Mayang	5	62.270.000,00
87	Puskesmas Mumbulsari	7	90.000.000,00
88	Puskesmas Nogosari	2	266.900.000,00
89	Puskesmas Pakusari	4	69.200.000,00
90	Puskesmas Paleran	4	61.999.840,00
91	Puskesmas Panti	4	66.600.000,00
92	Puskesmas Patrang	-	-
93	Puskesmas Puger	7	257.965.000,00
94	Puskesmas Rambipuji	6	61.000.000,00
95	Puskesmas Rowotengah	3	180.000.000,00
96	Puskesmas Sabrang	-	-
97	Puskesmas Semboro	1	35.120.000,00
98	Puskesmas Silo 1	2	90.000.000,00
99	Puskesmas Silo 2	1	150.560.000,00
100	Puskesmas Sukorejo	5	30.900.000,00
101	Puskesmas Sukowono	1	250.000.000,00
102	Puskesmas Sumberbaru	2	193.600.000,00



NO	OPD	JUMLAH BIDANG	NILAI
103	Puskesmas Sumberjambe	3	23.000.000,00
104	Puskesmas Sumbersari	-	-
105	Puskesmas Tanggul	-	-
106	Puskesmas Tembokrejo	3	18.735.500,00
107	Puskesmas Tempurejo	1	15.000.000,00
108	Puskesmas Umbulsari	2	22.000.000,00
Total		5340	1.174.914.847.631,32

Dari 5.340 bidang tanah yang belum bersertifikat, sebanyak 139 bidang tanah masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, jumlah tersebut merupakan akumulasi pendaftaran sampai dengan tahun 2024, adapun dalam proses sertifikasi tanah terdapat 3 tahapan yakni tahap pendaftaran ukur, tahap pemberian hak, dan tahap penertbitan SK Hak. Pada tahap pendaftaran ukur dilakukan pendaftaran berkas di Kantor Pertanahan Jember kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan berkas yang diajukan. Hasil dari tahapan ini adalah Peta Bidang Tanah (PBT).

Pada tahap pemberian Hak dilakukan verifikasi atas hasil pengukuran PBT oleh Panitia A yang beranggotakan unsur Kantor Pertanahan Jember. Hasil dari tahapan ini adalah SK Hak. Selanjutnya pada tahap Penerbitan SK Hak, dilakukan pendaftaran atas SK Hak yang sudah terbit untuk diterbitkan Sertifikat Hak Pakai. Pendaftaran pada tahun 2024 telah dilakukan pendaftaran sebanyak 41 bidang tanah yang masih dalam proses sertifikasi di Kantor Pertanahan Jember seluruhnya berada dalam tahap pendaftaran ukur.

4. Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya pemanfaatan dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas 32 bidang tanah dengan pendapatan sebesar Rp959.429.340 dan telah disetorkan keseluruhan ke rekening Kas Daerah.

Pemanfaatan aset tanah dilakukan melalui mekanisme sewa, sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Jember Nomor 188.45/87/1.12/2024 perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah. Rincian Aset Tetap Tanah yang telah digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka Optimalisasi PAD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 118 Aset Tetap Tanah dengan Optimalisasi PAD

NO	LOKASI BIDANG	NAMA PENYEWA	JANGKA WAKTU	LUAS	NILAI SEWA
1	Kelurahan Bintoro	Anto Purwanto	1 tahun	59.000	85.550.000
2	Kelurahan Bintoro	Anto Purwanto	1 tahun	60.904	88.310.800
3	Kelurahan Bintoro	Anto Purwanto	1 tahun	47.966	69.550.700
4	Kelurahan Bintoro	Anto Purwanto	1 tahun	81.200	113.680.000
5	Kelurahan Bintoro	Anto Purwanto	1 tahun	221.300	320.885.000
6	Kelurahan Bintoro	Andy Sungkono	1 tahun	8.899	11.791.175

NO	LOKASI BIDANG	NAMA PENYEWA	JANGKA WAKTU	LUAS	NILAI SEWA
7	Kelurahan Sempusari	Fauzi	1 tahun	4.795	3.236.625
8	Kelurahan Sempusari	Hari Wahyudi	1 tahun	2.063	2.733.475
9	Kelurahan Jumerto	Ismail	2 tahun	9.000	30.600.000
10	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	2.340	4.914.000
11	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	6.729	14.130.900
12	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	4.280	8.988.000
13	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	11.001	23.102.100
14	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	2.031	4.265.100
15	Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi	Tumbas Ginting	1 tahun	1.613	3.387.300
16	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	5.504	9.356.800
17	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	4.530	9.286.500
18	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	1.300	2.665.000
19	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	1.650	3.382.500
20	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	2.990	6.129.500
21	Kelurahan Mangli	Tumbas Ginting	1 tahun	4.761	9.760.050
22	Kelurahan Gebang	Tumbas Ginting	1 tahun	22.629	47.520.900
23	Kelurahan Gebang	Syamsul Rizal	5 tahun	1.695	18.645.000
24	Kelurahan Wirolegi	Firdaus	1 tahun	12.847	17.022.275
25	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	6.729	4.575.720
26	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	4.280	2.910.400
27	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	11.001	7.480.680
28	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	10.011	3.603.960
29	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	4.530	3.080.400
30	Kelurahan Mangli	Fathullah	4 bulan	4.761	3.237.480
31	Desa Kemuning Lor	Achmad Maulana Cholili	1 tahun	15.000	15.000.000
32	Desa Patemon	Miftahur Ridho	5 tahun	1.779	10.647.000
TOTAL					959.429.340

Selanjutnya dapat diinformasikan pula bahwa dalam pengelolaan aset tetap tanah masih terdapat beberapa permasalahan dengan pihak lain maupun masyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a) Tanah perolehan Akta Jual Beli No. 44, pada tahun 1986 Surjadi Setiawan Bupati Jember untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember melakukan transaksi jual beli tanah dengan Abdul Kahar Muzakir Direktur Utama PT Perkebunan XXVII dengan

nilai pembelian sebesar Rp16.603.915,00. Jual beli tanah tersebut dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 44 tanggal 19 Maret 1986 yang diterbitkan oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah Soesanto Adi Poernomo, S,H. Adapun tanah yang menjadi objek pelepasan hak tersebut adalah tanah milik PT Perkebunan XXVII sejumlah 38 bidang dengan total luasan 337.442 m2 yang tersebar di 11 Kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Sejak terjadinya transaksi pelepasan hak tersebut terdapat bidang tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat dan pada tanggal 2 Juli 1996 dilakukan peninjauan atau cek lokasi oleh tim yang ditugaskan pada saat itu sebanyak 7 (tujuh) orang. Hasil peninjauan/cek lokasi diketahui bahwa terdapat bidang-bidang yang ditempati warga, ada pula yang menjadi fasilitas pendidikan dan perkantoran serta ada yang telah diserahkan kepada masyarakat. Transaksi terakhir adalah pada tahun 2008 terdapat bidang yang telah dilepaskan haknya atas tanah yang berdiri bangunan Brigif 509 atas Verponding No. 117, selanjutnya pada tahun 2012 juga telah dilakukan pelepasan atas sebidang tanah Verponding No. 4591 dengan cara penggantian/pembelian oleh warga yang menempati lokasi tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/343/012/2012 tentang Penghapusan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Jember, sehingga saat ini jumlah tanah dalam daftar barang milik daerah perolehan akta 44 adalah sebanyak 25 bidang, tercatat pada akun Aset Tetap Tanah sebanyak 20 bidang dan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga sebanyak 5 bidang.

- b) Terdapat 32 (tiga puluh dua) bidang tanah yang belum tercatat dalam daftar barang milik daerah terdiri dari 23 bidang yang sudah bersertifikat dan 9 bidang yang belum bersertifikat, saat ini masih dalam proses perhitungan nilai perolehan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh nilai NJOP sebagai data sumber dalam menentukan nilai perolehan yang selanjutnya akan diusulkan untuk ditetapkan melalui SK Bupati dan ditetapkan status penggunaannya. Adapun daftar tanah belum tercatat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 119 Daftar Tanah Belum Tercatat

NO	NAMA	LOKASI	TAHUN	TITIK KOORDINAT	KET
1	Tanah Bangunan	Perumahan Milenia Jalan Mataram Blok A 10 Kel. Sempusari Kec. Kaliwates	1999	<u>-8.192698, 113.656993</u>	Omah Rembug SHP No.1757
2	Tanah Pesisir	Jalan Lintas Selatan Jember-Candipuro Desa Mojomulyo Kec. Puger	2022	<u>-8.378569, 113.430268</u>	SHP No.2
3	Tanah Pesisir	Jalan Lintas Selatan Jember-Candipuro Desa Mojomulyo Kec. Puger	2022	-8.378850, 113.427835	SHP No.3
4	Tanah Pesisir	Jalan Lintas Selatan Jember-Candipuro Desa Mojomulyo Kec. Puger	2022	-8.378617, 113.427014	SHP No.4

NO	NAMA	LOKASI	TAHUN	TITIK KOORDINAT	KET
5	Tanah Pesisir	Jalan Lintas Selatan Jember- Candipuro Dusun Getem Desa Mayangan Kec. Gumukmas	2021	<u>-8.389307, 113.406154</u>	SHP No.39
6	Tanah Kering	Jl. Branjangan, Semenggu, Bintoro, Kec. Patrang,		<u>-8.124524, 113.701203</u>	Belum SHP
7	Tanah Kering	, Jl. Manggar 9, Gebang Tengah, Gebang, Kec. Patrang,		<u>-8.163088, 113.690740</u>	Belum SHP
8	Pertanian	Jl. Yos Sudarso, Sumber Rejo, Wirolegi, Kec. Sumpusari,		-8.208271, 113.732594	Belum SHP
9	Pertanian	Jl. Cadika, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates		-8.180519, 113.661292	Belum SHP
10	Pertanian	Jl Cadika Gg3, Mrapa, Sempusari, Kec. Kaliwates		-8.178367, 113.658901	Belum SHP
11	Pertanian	Jl. Brigjen Syafiudin, Krajan, Sukorambi, Kec. Sukorambi,		-8.152013, 113.665439	Belum SHP
12	Tanah Kering	Jl. Gurami Mrapa, Sempusari, Kec. Kaliwates		-8.178329, 113.649317	Belum SHP
13	Pertanian	Jl. Branjangan, Semenggu, Bintoro, Kec. Patrang,		-8.134306, 113.700237	Belum SHP
14	Tanah	Jl. HOS Cokroaminoto, Kelurahan Jember Kidu, Jember Kidul, Kec. Kaliwates,		-8.174143, 113.693042	Belum SHP
15	PSU Dharma Alam	Kelurahan Sempusari	2024	-8.177332, 113.659937	SHP No.90
16	PSU Dharma Alam	Kelurahan Sempusari	2024	-8.176179, 113.661230	SHP No.95
17	PSU Dharma Alam	Kelurahan Sempusari	2024	-8.174840, 113.663147	SHP No.94
18	PSU Dharma Alam	Kelurahan Sempusari	2024	-8.176784, 113.663242	SHP No.93
19	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201900, 113.711537	SHP No.91
20	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.202752, 113.711545	SHP No.92
21	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.200984, 113.712403	SHP No.96
22	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201252, 113.711489	SHP No.97
23	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.202382, 113.711485	SHP No.98
24	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201557, 113.711424	SHP No.99
25	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201686, 113.711889	SHP No.100



NO	NAMA	LOKASI	TAHUN	TITIK KOORDINAT	KET
26	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201580, 113.713037	SHP No.101
27	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.200637, 113.710763	SHP No.102
28	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.202197, 113.711853	SHP No.103
29	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.202051, 113.712357	SHP No.104
30	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.201175, 113.712599	SHP No.105
21	PSU Taman Gading	Kelurahan Tegal Besar	2024	-8.200696, 113.711990	SHP No.106
32	PSU Grand Permata Ajung	Desa Ajung	2024	-8.204814, 113.663508	SHP No.89

c) Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang masih tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tanah yang telah diinvestasikan dalam penyertaan modal pada Perumdam Tirta Pandalungan dengan luas 663 m dan 1.516 m sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara Bidang Aset BPKAD dengan Perumdam Pandalungan tanggal 14 April 2025, selain itu terdapat pula 9 (Sembilan) bidang tanah yang selama ini digunakan oleh Perumdam Tirta Pandalungan namun masih belum ada proses penyertaan modalnya dan akan dilakukan pemanfaatan sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan barang milik daerah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
1.762.452.394.551,63	1.700.939.457.597,54	61.512.936.954,09	3,62

Nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.762.192.106.551,63 dan Rp1.700.939.457.597,54. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dibandingkan tahun lalu sebesar Rp61.512.936.954,09 atau sebesar 3,62 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.762.452.394.551,63 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.700.939.457.597,54
Penambahan Tahun 2024	Rp	98.477.502.687,00
Jumlah	Rp	1.799.416.960.284,54



Pengurangan Tahun 2024	Rp	36.964.565.732,91
Nilai AT-Peralatan dan Mesin Tahun 2024	Rp	1.762.452.394.551,63

Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 secara terinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 120 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

NO	JENIS AT-PERALATAN DAN MESIN	SALDO AWAL (Rp)	PENYESUAIAN TAMBAH KURANG SUB SUB AKUN AUDITED	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	REKLAS SUB SUB AKUN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Alat Besar	32.460.282.087,00	76.630.108,50	1.500.015.500,00	38.938.800,00	(379.777.402,00)	33.618.211.493,50
2	Alat Angkutan	289.190.567.487,21	(205.198.519,00)	8.690.797.652,00	1.636.704.600,00	(46.360.000,00)	295.993.102.020,21
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	14.190.051.864,00	483.220.060,00	69.195.534,00	26.622.884,00	386.552.000,00	15.102.396.574,00
4	Alat Pertanian	12.407.628.486,00	(243.613.707,00)	460.467.800,00	27.640.000,00	-	12.596.842.579,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	396.898.425.910,89	(2.012.751.618,66)	27.980.593.396,00	5.750.956.736,75	3.612.813.939,00	420.728.124.890,48
6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	52.515.494.842,58	1.649.123.354,66	7.317.980.065,00	369.958.398,44	(4.471.532.677,00)	56.641.107.186,80
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	465.231.632.092,65	(899.819.058,38)	14.950.853.703,00	11.929.692.761,83	(1.162.680.152,00)	466.190.293.823,44
8	Alat Laboratorium	84.873.166.465,07	315.670.115,38	2.416.965.459,00	2.891.538.936,49	1.108.030.434,00	85.822.293.536,96
9	Alat Persenjataan	1.817.980.360,00	334.634.333,00	0,00	0,00	-	2.152.614.693,00
10	Komputer	305.836.484.670,64	434.247.904,50	33.025.015.038,00	14.123.786.865,40	(245.987.360,00)	324.925.973.387,74
11	Alat Eksplorasi	78.703.250,00	(52.525.000,00)	63.600,00	63.600,00	-	26.178.250,00
12	Alat Pengeboran	11.000.000,00	-	0,00	0,00	-	11.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	2.927.444.217,00	15.800.000,00	234.184.550,00	1.304.650,00	932.275.000,00	4.108.399.117,00
14	Alat Peraga	700.000,00	-	9.886.150,00	0,00	-	10.586.150,00
15	Peralatan Proses/Produksi	920.820.189,00	485.504.100,00	1.730.000,00	0,00	266.666.218,00	1.674.720.507,00
16	Rambu – Rambu	40.903.633.976,50	(394.547.400,00)	694.200.000,00	0,00	-	41.203.286.576,50
17	Peralatan Olah Raga	675.441.699,00	13.625.327,00	1.125.554.240,00	167.357.500,00	-	1.647.263.766,00
JUMLAH		1.700.939.457.597,54	-	98.477.502.687,00	36.964.565.732,91	-	1.762.452.394.551,63

Penjelasan Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penambahan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp98.477.502.687,00 terdiri dari:
 - 1) Belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.483.245.460,00 terdiri dari belanja peralatan dan mesin berupa Alat Besar, Alat



Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat peraga, Peralatan Proses/Produksi, Rambu-rambu, dan Peralatan Olahraga.

- 2) Penambahan dari Hibah sebesar Rp2.458.909.532,00 terdiri dari penambahan hibah tahun 2024 di Dinas Kesehatan berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan dan Alat Laboratorium senilai Rp286.483.465,00 dari Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Berita Acara Serah Terima No KN.01.05-BIII.I-441-2024 dan KN.02.03-C.1.5-.12-2024 dan Hibah sebelum tahun 2024 di Dinas Kesehatan berupa Alat Laboratorium senilai Rp2.172.426.067,00 dari Kementerian Kesehatan RI Berita Acara Serah Terima No BJ.01.04-PPK4.2-452-2023. Hibah sebelum tahun 2024 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Alat Angkutan (mobil perpustakaan keliling) dan perlengkapan multimedia senilai Rp353.921.052,00 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 4218/NHPD/2021. Hibah sebelum tahun 2024 di Dinas Kesehatan berupa Alat Angkutan (Mobil) senilai Rp176.490.000,00 dari Bank Indonesia berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 26/9/Jr/P/B dan 028/1757/311/2024. Hibah sebelum tahun 2024 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Alat Angkutan (Mobil) senilai Rp 254.700.000,00 dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Mobil Hadiah Paritrana Nomor BA/131/122022 serta Hibah sebelum tahun 2024 di Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi dan Bagian Umum senilai Rp2.001.085.000,00 berupa Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (Panel Surya) dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi berdasarkan Berita Acara Serah Terima No : 114/BAST/BN.07/KPB/2023 dan 645/1234/35.09.313/2024.

Tabel 5. 121 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI			
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Dinas kesehatan	9.292.465,00
2	Alat Laboratorium	Dinas kesehatan	277.191.000,00
SUB TOTAL			286.483.465,00

Tabel 5. 122 Penambahan Hibah - Peralatan dan Mesin Sebelum Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI			
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Dinas kesehatan	115.496.250,00
SUB TOTAL			115.496.250,00
Penambahan Hibah dari Perpustakaan Nasional			

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Angkutan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	260.886.052,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.215.000,00
3	Alat besar	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.800.000,00
4	Komputer	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.020.000,00
SUB TOTAL			353.921.052,00
Penambahan Hibah dari Bank Indonesia			
1	Alat Angkutan	Dinas kesehatan	176.490.000,00
SUB TOTAL			176.490.000,00
Penambahan Hibah dari BPJS Ketenagakerjaan			
1	Alat Angkutan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah	254.700.000,00
SUB TOTAL			254.700.000,00
Penambahan Hibah dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi			
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Bagian Umum	743.916.250,00
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi	527.902.515,00
SUB TOTAL			1.271.818.765,00
TOTAL			2.172.426.067,00

- 3) Penambahan Hutang sebesar Rp2.001.085.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Peralatan Mesin yang berasal dari pengakuan hutang atas barang yang belum terbayar yaitu Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp58.035.000,00, Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp 1.908.000.000,00 dan Alat Laboratorium sebesar Rp35.050.000,00 pada BLUD-Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung.
- 4) Penambahan Koreksi Tahun 2024 didapat dari Koreksi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp566.490.172,00 yang terdiri dari Koreksi dari Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp489.997.922,00 dan Koreksi dari BOP Tahun 2024 sebesar Rp76.492.250,00. Koreksi tersebut merupakan belanja barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap.

Tabel Penambahan Koreksi – Koreksi Dari Persediaan Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Koreksi dari Persediaan Tahun 2024			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.220.000,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	4.000.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Tenaga Kerja	4.400.000,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Kecamatan Ajung	16.580.000,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	16.020.000,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Bagian Umum	9.600.000,00
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	42.400.000,00
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Kecamatan Kalisat	4.734.922,00
SUB TOTAL			98.954.922,00
1	Peralatan Olah Raga	Kecamatan Rambipuji	8.000.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
SUB TOTAL			8.000.000,00
1	Komputer	Pukesmas Jombang	900.000,00
2	Komputer	Dinas Pendidikan	48.750.000,00
3	Komputer	Dinas Komunikasi Dan Informatika	17.055.000,00
4	Komputer	Kecamatan Mayang	8.300.000,00
5	Komputer	Badan Pendapatan Daerah	47.750.000,00
SUB TOTAL			122.755.000,00
1	Alat Laboratorium	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	260.288.000,00
SUB TOTAL			260.288.000,00
TOTAL			489.997.922,00

Tabel Penambahan Koreksi – Koreksi Dari BOP Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Koreksi dari BOP Tahun 2024			
1	Komputer	Dinas Pendidikan	28.215.750,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	48.276.500,00
SUB TOTAL			76.492.250,00

- 5) Penambahan Koreksi Atas Pengakuan Aset Tetap Tahun Sebelumnya sebesar Rp698.418.200,00 terdiri dari Koreksi dari Bantuan Tidak Terduga (BTT) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp514.693.200,00 berdasarkan Putusan Pengadilan No : 7.Pdt.G.S/2024/PN Jmr dan No : 8.Pdt.G.S/2024/PN Jmr terdiri dari Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Besar, Koreksi dari Penetapan Nilai Perolehan sebesar Rp171.500.000,00 terdiri dari Alat Angkutan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp160.000.000,00 berdasarkan SK Bupati Jember No : 188.45/369/1.12/2024 dan Alat Angkutan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp11.500.000,00 berdasarkan SK Bupati No : 100.3.3.2/494/1.12/2024, serta Koreksi dari Persediaan sebesar Rp12.225.000,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung dan Puskesmas Kencong di Alat Kantor dan Rumah Tangga.
- 6) Penambahan dari Reklasifikasi Antar Akun Tahun 2024 senilai Rp34.269.354.323,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp3.245.127.500,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan terdapat Belanja pada Gedung dan Bangunan yang didalamnya terdapat peralatan dan mesin, Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya dari BOS pada Dinas Pendidikan senilai Rp29.780.856.823,00 yang merupakan peralatan mesin dan Penambahan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya dari BLUD senilai Rp7.664.000,00 pada Puskesmas Sumberbaru yang merupakan peralatan mesin, Penambahan Reklasifikasi

dari Aset Lain-Lain sebesar Rp1.235.706.000,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Lainnya sebelum tahun 2024 sebesar Rp1.101.151.000,00 pada Dinas Kesehatan, Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Aset Tidak Berwujud tahun 2024 sebesar Rp57.255.000,00 pada Puskesmas Silo I dan Penambahan Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain Aset Rusak Berat/Usang sebelum tahun 2024 senilai Rp77.300.000,00 pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5. 123 Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Reklas Dari Gedung Dan Bangunan Tahun 2024			
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	3.245.127.500,00
SUB TOTAL			3.245.127.500,00
Reklas Dari Aset Tetap Lainnya (BOS) Tahun 2024			
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	10.046.465.486,00
2	Alat Angkutan	Dinas Pendidikan	7.234.600,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pendidikan	23.226.900,00
4	Alat Besar	Dinas Pendidikan	38.885.500,00
5	Alat Eksplorasi	Dinas Pendidikan	63.600,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Dinas Pendidikan	41.961.000,00
7	Alat Keselamatan Kerja	Dinas Pendidikan	234.184.550,00
8	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	324.025.150,00
9	Alat Peraga	Dinas Pendidikan	9.886.150,00
10	Alat Pertanian	Dinas Pendidikan	48.806.300,00
11	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	274.921.150,00
12	Komputer	Dinas Pendidikan	18.651.062.197,00
13	Peralatan Olah Raga	Dinas Pendidikan	78.404.240,00
14	Peralatan proses/produksi	Dinas Pendidikan	1.730.000,00
SUB TOTAL			29.780.856.823,00
Reklas Dari Aset Tetap Lainnya (BLUD) Tahun 2024			
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	6.064.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Puskesmas Sumberbaru	1.600.000,00
SUB TOTAL			7.664.000,00
Reklas Dari Aset Tidak Berwujud Tahun 2024			
1	Komputer	Puskesmas Silo I	57.255.000,00
SUB TOTAL			57.255.000,00
Reklas Dari Aset Lain-Lain Lainnya Tahun 2024			
1	Alat Angkutan	Dinas Kesehatan	1.101.151.000,00
SUB TOTAL			1.101.151.000,00
Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2024			
1	Alat Angkutan	Dinas Kesehatan	77.300.000,00
SUB TOTAL			77.300.000,00
TOTAL			34.269.354.323,00

b. Pengurangan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp36.964.565.732,91 terdiri dari:

- 1) Penghapusan Barang sebesar Rp8.083.789.506,77 merupakan pengurangan atas pelaksanaan penghapusan barang sesuai SK Bupati Jember No. 188.45/326/1.12/2024 tanggal 17 Juli 2024 pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember

Tabel 5. 124 Penghapusan Barang Peralatan dan Mesin RSD Balung

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Angkutan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	84.480.000,00
		Sub Total	84.480.000,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	1.122.193.425,00
		Sub Total	1.122.193.425,00
1	Alat Kedokteran Kesehatan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	5.352.668.106,77
		Sub Total	5.352.668.106,77
1	Alat laboratorium	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	604.960.800,00
		Sub Total	604.960.800,00
1	Komputer	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	919.487.175,00
		Sub Total	919.487.175,00
		TOTAL	8.083.789.506,77

- 2) Pengurangan Hutang atas belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang barangnya telah diakui ditahun sebelumnya pada Puskesmas Cakru sebesar Rp1.505.682,00.
- 3) Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan atas belanja modal Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp804.820.493,00 terdiri dari Koreksi ke Persediaan sebesar Rp787.520.493,00 dan Koreksi ke Jasa Pemeliharaan (Software) sebesar Rp17.300.000,00.

Tabel 5. 125 Koreksi Tahun Berjalan - Peralatan dan Mesin ke Persediaan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Koreksi tahun berjalan – koreksi Ke Persediaan			
1	Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika	198.000.000,00
		Sub Total	198.000.000,00
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas tanggul	147.963,00
2	Alat Kedokteran dan Kesehatan	PuskesmasPanti	92.130,00
		Sub Total	240.093,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	6.600.000,00
		Sub Total	6.600.000,00
1	Alat laboratorium	Dinas Pendidikan	531.230.400,00
		Sub Total	531.230.400,00
1	Peralatan Olahraga	Dinas Sosial	51.450.000,00
		Sub Total	51.450.000,00
		SUB TOTAL	787.520.493,00

Tabel 5. 126 Koreksi Tahun Berjalan - Peralatan dan Mesin ke Jasa Pemeliharaan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Koreksi Tahun Berjalan - Koreksi ke Jasa Pemeliharaan (Software)			
1	Alat kantor dan Rumah tangga	Puskesmas sumberjambe	17.300.000,00
Sub Total			17.300.000,00
TOTAL			804.820.493,00

- 4) Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.244.137.098,14 yang terdiri dari Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp148.500.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Permainan Waterboom dan Puskesmas Klatakan berupa Paving dan Kanopi, Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp49.500.000,00 pada Puskesmas Tanggul berupa Software Mesin Antrian, Pengurangan Reklasifikasi ke Aset lain-lain (Aset Lain-Lain Lainnya) sebelum tahun 2024 sebesar Rp3.339.261.599,20 pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan berupa Aset yang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi Self Assesment tahun 2021 dan Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat/Usang) sebesar Rp15.706.875.498,94 sesuai usulan OPD. Rincian dari koreksi tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 127 Reklasifikasi atas Belanja Modal Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan			
1	Alat kantor dan rumah tangga	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	83.500.000,00
2	Alat kantor dan rumah tangga	Puskesmas Klatakan	65.000.000,00
Sub Total			148.500.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud			
1	Komputer	Puskesmas Tanggul	49.500.000,00
Sub Total			49.500.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Lain-lain Lainnya)			
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Ajung	24.548.951,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Andongsari	10.380.000,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Balung	4.443.665,22
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Bangsalsari	15.949.050,00
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Kaliwates	750.000,00
7	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Karangduren	3.842.486,97
8	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Kasiyan	5.631.000,00
9	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Jember Kidul	5.500.000,00
10	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Klatakan	18.450.000,00
11	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Lojejer	5.600.000,00



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
12	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Mangli	600.000,00
13	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Mayang	4.690.469,56
14	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Mumbulsari	4.785.000,00
15	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Pakusari	600.000,00
16	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Paleran	3.650.000,00
17	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Puger	3.877.500,00
18	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Rowotengah	1.046.000,00
19	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Rambipuji	5.650.000,00
20	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Semboro	4.642.500,00
21	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sukorambi	16.140.000,00
22	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Cakru	14.925.000,00
23	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Jenggawah	20.000.000,00
24	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Gumukmas	54.281.166,00
25	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Jelbuk	7.800.000,00
26	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Gladakpakem	350.000,00
27	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sukowono	30.858.000,00
28	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sumberbaru	7.151.000,00
29	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Summersari	5.723.269,56
30	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Tanggul	23.597.500,00
31	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Tempurejo	3.460.000,00
32	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Umbulsari	450.000,00
33	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Wuluhan	26.284.400,00
34	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	64.841.888,00
Sub Total			400.498.846,31
1	Komputer	Puskesmas Ajung	10.005.000,00
2	Komputer	Puskesmas Andongsari	5.005.000,00
3	Komputer	Puskesmas Arjasa	5.005.000,00
4	Komputer	Puskesmas Balung	9.925.025,00
5	Komputer	Puskesmas Kaliwates	5.005.000,00
6	Komputer	Puskesmas Karangduren	12.050.000,00
7	Komputer	Puskesmas Kasiyan	600.000,00
8	Komputer	Puskesmas Lojejer	36.325.025,00
9	Komputer	Puskesmas Mangli	5.800.000,00
10	Komputer	Puskesmas Mayang	14.930.025,00
11	Komputer	Puskesmas Mumbulsari	5.986.200,00
12	Komputer	Puskesmas Paleran	16.250.000,00
13	Komputer	Puskesmas Sabrang	9.925.025,00



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
14	Komputer	Puskesmas Rambipuji	18.125.000,00
15	Komputer	Puskesmas Silo 1	2.000.000,00
16	Komputer	Puskesmas Sukorambi	13.931.000,00
17	Komputer	Puskesmas Sukorejo	14.273.760,00
18	Komputer	Puskesmas Gumukmas	55.700.050,00
19	Komputer	Puskesmas Jelbuk	32.708.025,00
20	Komputer	Puskesmas Sukowono	75.423.075,00
21	Komputer	Puskesmas Sumberbaru	17.795.000,00
22	Komputer	Puskesmas Summersari	981.200,00
23	Komputer	Puskesmas Tanggul	26.875.881,50
24	Komputer	Puskesmas Wuluhan	146.220.068,39
25	Komputer	Dinas Kesehatan	262.194.000,00
Sub Total			803.038.359,89
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ajung	23.606.000,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ambulu	15.400.000,00
3	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Andongsari	10.183.750,00
4	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Arjasa	2.794.000,00
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Balung	22.560.000,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Bangsalsari	1.933.250,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kaliwates	15.966.500,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Karangduren	7.810.000,00
9	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kasiyan	4.180.000,00
10	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kencong	16.248.500,00
11	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kemuningsari	6.600.000,00
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jember Kidul	69.658.500,00
13	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Klatakan	12.430.000,00
14	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ledokombo	5.335.000,00
15	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Lojejer	1.045.000,00
16	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mangli	42.360.000,00
17	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mumbulsari	11.442.750,00
18	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Nogosari	1.472.000,00
19	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Pakusari	10.200.000,00
20	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Paleran	3.150.000,00
21	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Patrang	9.559.000,00
22	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rowotengah	5.500.000,00
23	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sabrang	14.935.000,00
24	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rambipuji	36.312.650,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
25	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Semboro	13.575.000,00
26	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 1	1.650.000,00
27	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorambi	18.778.500,00
28	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorejo	7.369.500,00
29	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Cakru	1.320.000,00
30	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Curahnongko	2.000.000,00
31	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jenggawah	7.106.000,00
32	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gumukmas	364.471.500,00
33	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jelbuk	1.320.000,00
34	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gladapakem	15.904.000,00
35	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukowono	15.788.505,77
36	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	72.077.750,00
37	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberjambe	2.985.000,00
38	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Summersari	197.924.576,26
39	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tanggul	100.922.750,00
40	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tempurejo	6.059.000,00
41	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Wuluhan	207.259.350,00
Sub Total			1.387.193.332,03
1	Alat Laboratorium	Puskesmas Andongsari	1.475.375,00
2	Alat Laboratorium	Puskesmas Balung	30.421.122,97
3	Alat Laboratorium	Puskesmas Kaliwates	770.000,00
4	Alat Laboratorium	Puskesmas Jember Kidul	1.408.176,00
5	Alat Laboratorium	Puskesmas Klatakan	455.082.825,00
6	Alat Laboratorium	Puskesmas Rowotengah	3.500.000,00
7	Alat Laboratorium	Puskesmas Semboro	1.475.375,00
8	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukorambi	1.475.375,00
9	Alat Laboratorium	Puskesmas Gumukmas	1.908.176,00
10	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberbaru	2.883.551,00
11	Alat Laboratorium	Puskesmas Summersari	101.359.358,00
12	Alat Laboratorium	Puskesmas Tanggul	1.408.176,00
13	Alat Laboratorium	Puskesmas Wuluhan	131.833.551,00
Sub Total			735.001.060,97
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Puskesmas Lojejer	7.500.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Puskesmas Jelbuk	2.980.000,00
3	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Puskesmas Summersari	2.000.000,00
Sub Total			12.480.000,00
1	Alat Angkutan	Puskesmas Rambipuji	650.000,00
Sub Total			650.000,00
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Puskesmas Gumukmas	400.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Sub Total			400.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang)			
1	Komputer	Inspektorat	51.165.000,00
2	Komputer	Bagian Hukum	113.617.950,00
3	Komputer	Bagian Kesejahteraan Rakyat	446.855.450,00
4	Komputer	Bagian Administrasi Pembangunan	83.580.000,00
5	Komputer	Dinas Kesehatan	91.150.000,00
6	Komputer	Dinas Sosial	690.987.738,00
7	Komputer	Dinas Tenaga Kerja	152.202.000,00
8	Komputer	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.468.933,33
9	Komputer	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	220.825.000,00
10	Komputer	Kecamatan Arjasa	194.193.500,00
11	Komputer	Kecamatan Kencong	37.337.400,00
12	Komputer	Kecamatan Mumbulsari	12.260.000,00
13	Komputer	Kecamatan Semboro	57.975.000,00
14	Komputer	Kecamatan Sumberjambe	79.214.090,00
15	Komputer	Kecamatan Tanggul	17.060.000,00
16	Komputer	Puskesmas Gladakpakem	53.976.175,00
17	Komputer	Puskesmas Gumukmas	24.265.931,33
18	Komputer	Puskesmas Jelbuk	1.400.000,00
19	Komputer	Puskesmas Kalisat	262.859.655,00
20	Komputer	Puskesmas Kaliwates	3.500.000,00
21	Komputer	Puskesmas Karangduren	80.500.218,00
22	Komputer	Puskesmas Kasiyan	59.697.705,00
23	Komputer	Puskesmas Kemuingsari	102.458.500,00
24	Komputer	Puskesmas Jember Kidul	25.395.444,00
25	Komputer	Puskesmas Ledokombo	261.560.425,00
26	Komputer	Puskesmas Mangli	69.493.650,00
27	Komputer	Puskesmas Mumbulsari	54.526.950,00
28	Komputer	Puskesmas Nogosari	18.250.396,33
29	Komputer	Puskesmas Pakusari	115.652.148,00
30	Komputer	Puskesmas Paleran	94.904.620,00
31	Komputer	Puskesmas Rambipuji	77.764.140,92
32	Komputer	Puskesmas Rowotengah	257.098.481,00
33	Komputer	Puskesmas Sabrang	71.155.325,00
34	Komputer	Puskesmas Semboro	67.667.400,00
35	Komputer	Puskesmas Sukorejo	151.817.815,00
36	Komputer	Puskesmas Summersari	123.710.600,00
37	Komputer	Puskesmas Tempurejo	120.729.475,00
38	Komputer	Puskesmas Wuluhan	64.754.597,61
39	Komputer	Kecamatan Umbulsari	65.332.000,00
40	Komputer	Puskesmas Sumberbaru	178.599.649,99
41	Komputer	Kecamatan Jenggawah	150.156.500,00
Sub Total			4.865.119.863,51



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Inspektorat	17.450.000,00
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Puskesmas Jember Kidul	1.500.000,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Puskesmas Ledokombo	700.000,00
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Kecamatan Umbulsari	350.000,00
Sub Total			20.000.000,00
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Inspektorat	12.500.000,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Bagian Hukum	25.876.000,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	170.681.070,00
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Bagian Administrasi Pembangunan	19.737.857,14
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	75.443.548,38
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan	9.050.000,00
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Sosial	640.537.011,00
8	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Tenaga Kerja	118.963.000,00
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	181.621.800,00
10	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	53.676.000,00
11	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Arjasa	162.876.000,00
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Kencong	22.661.400,00
13	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Mumbulsari	40.760.000,00
14	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Semboro	8.300.000,00
15	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Sumberjambe	54.065.000,00
16	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Tanggul	41.548.880,00
17	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Gladakpakem	30.712.630,44
18	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Gumukmas	37.476.900,00
19	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Jelbuk	2.000.000,00
20	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Kalisat	18.240.000,00
21	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Kaliwates	10.800.000,00
22	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Karangduren	61.955.587,31
23	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Kemuingsari	7.671.750,00
24	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Jember Kidul	24.288.000,00
25	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Ledokombo	281.433.789,99
26	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Mangli	77.400.000,00
27	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Mumbulsari	3.877.500,00
28	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Nogosari	1.500.000,00
29	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Pakusari	15.579.730,44
30	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Paleran	97.231.262,18

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
31	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Rambipuji	14.691.937,50
32	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Rowotengah	22.292.632,28
33	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Semboro	50.307.948,70
34	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Sukorejo	21.650.000,00
35	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Summersari	160.077.540,00
36	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Tempurejo	33.153.925,34
37	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Wuluhan	8.645.000,00
38	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Umbulsari	6.870.000,00
39	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Puskesmas Sumberbaru	57.911.921,74
40	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Wuluhan	1.952.250,00
41	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Kecamatan Jenggawah	179.866.400,00
Sub Total			2.865.884.272,44
1	Alat Angkutan	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	540.000.000,00
2	Alat Angkutan	Dinas Perhubungan	249.708.000,00
3	Alat Angkutan	Dinas Sosial	617.875.000,00
4	Alat Angkutan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	34.500.000,00
5	Alat Angkutan	Kecamatan Balung	11.900.000,00
6	Alat Angkutan	Kecamatan Sumberjambe	2.975.000,00
7	Alat Angkutan	Puskesmas Kalisat	30.000.000,00
8	Alat Angkutan	Puskesmas Ledokombo	20.000.000,00
9	Alat Angkutan	Kecamatan Umbulsari	2.975.000,00
10	Alat Angkutan	Puskesmas Mumbulsari	26.500.000,00
11	Alat Angkutan	Kecamatan Wuluhan	6.000.000,00
12	Alat Angkutan	Kecamatan Jenggawah	2.500.000,00
13	Alat Angkutan	Dinas Tenaga Kerja	5.000.000,00
Sub Total			1.549.933.000,00
1	Alat Besar	Kecamatan Tanggul	6.749.200,00
2	Alat Besar	Puskesmas Ledokombo	24.999.100,00
3	Alat Besar	Kecamatan Jenggawah	600.000,00
Sub Total			32.348.300,00
1	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.743.055.460,00
2	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Gladakpakem	76.289.778,00
3	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Gumukmas	190.612.341,00
4	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Jelbuk	44.306.049,00
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Kalisat	269.375.671,14
6	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Karangduren	51.710.519,19
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Kasiyan	34.687.462,00
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Kemuingsari	196.673.368,78
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Jember Kidul	20.455.200,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
10	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Ledokombo	364.701.431,19
11	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Mangli	35.982.144,00
12	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Mumbulsari	80.813.794,01
13	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Nogosari	44.926.750,00
14	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Pakusari	57.431.797,93
15	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Paleran	104.665.489,34
16	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Rambipuji	69.042.751,04
17	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Rowotengah	265.392.579,00
18	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Sabrang	276.060.869,11
19	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Semboro	211.164.583,33
20	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Sukorejo	246.518.265,74
21	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Summersari	77.582.577,41
22	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Tempurejo	95.120.814,60
23	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Wuluhan	36.107.221,90
24	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	467.348.821,32
Sub Total			5.060.025.739,03
1	Alat Keselamatan Kerja	Kecamatan Sumberjambe	1.219.000,00
Sub Total			1.219.000,00
1	Alat Laboratorium	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	728.494.813,00
2	Alat Laboratorium	Puskesmas Gladakpakem	750.000,00
3	Alat Laboratorium	Puskesmas Gumukmas	75.700.000,00
4	Alat Laboratorium	Puskesmas Kalisat	2.883.551,00
5	Alat Laboratorium	Puskesmas Kemuingsari	1.408.176,00
6	Alat Laboratorium	Puskesmas Ledokombo	106.777.100,00
7	Alat Laboratorium	Puskesmas Nogosari	6.000.000,00
8	Alat Laboratorium	Puskesmas Paleran	2.950.750,00
9	Alat Laboratorium	Puskesmas Rowotengah	2.883.551,00
10	Alat Laboratorium	Puskesmas Sabrang	2.950.750,00
11	Alat Laboratorium	Puskesmas Semboro	1.408.176,00
12	Alat Laboratorium	Puskesmas Tempurejo	1.408.176,00
13	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberbaru	6.311.532,52
Sub Total			939.926.575,52
1	Alat Pertanian	Puskesmas Gladakpakem	27.500.000,00
Sub Total			27.500.000,00
1	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Bagian Hukum	2.750.000,00
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Bagian Kesejahteraan Rakyat	16.478.000,00
3	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Bagian Administrasi Pembangunan	3.300.000,00
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Dinas Sosial	31.440.454,00
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Dinas Tenaga Kerja	1.800.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00
7	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	18.600.000,00
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Kecamatan Arjasa	7.375.000,00
9	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Kecamatan Semboro	9.850.000,00
10	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Kecamatan Sumberjambe	13.765.000,00
11	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Gladakpakem	5.314.050,00
12	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Gumukmas	9.877.200,00
13	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Kalisat	33.981.600,00
14	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Karangduren	8.874.050,00
15	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Kasiyan	7.407.900,00
16	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Jember Kidul	19.000.000,00
17	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Ledokombo	24.693.000,00
18	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Mangli	2.469.300,00
19	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Mumbulsari	7.407.900,00
20	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Nogosari	2.469.300,00
21	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Pakusari	7.013.000,00
22	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Paleran	5.314.050,00
23	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Sabrang	5.314.050,00
24	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Semboro	12.721.950,00
25	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Sukorejo	4.938.600,00
26	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Summersari	7.407.900,00
27	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Wuluhan	16.071.644,44
28	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Kecamatan Umbulsari	2.000.000,00
29	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Puskesmas Sumberbaru	31.804.800,00
30	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Kecamatan Jenggawah	14.500.000,00
Sub Total			335.738.748,44
1	Peralatan Olah Raga	Dinas Sosial	5.880.000,00
2	Peralatan Olah Raga	Dinas Tenaga Kerja	750.000,00
3	Peralatan Olah Raga	Kecamatan Sumberjambe	2.550.000,00
Sub Total			9.180.000,00
TOTAL			19.244.137.098,14

- 5) Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember harus dikeluarkan dari KIB/neraca dan dicatat secara terpisah sebagai ekstrakomtabel.

Hal sehingga akan mengurangi nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang telah tercatat pada KIB/neraca. Rincian pengurangan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin yang berasal dari ekstrakomtable tahun 2024 sejumlah Rp8.830.312.953,00 disajikan dalam table berikut:

Tabel 5. 128 Ekstrakomtable Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Alat Besar	Dinas Pendidikan	6.590.500,00
Sub Total			6.590.500,00
1	Alat Angkutan	Dinas Pendidikan	1.641.600,00
Sub Total			1.641.600,00
1	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Kesehatan	2.568.540,00
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Dinas Pendidikan	2.111.000,00
3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Puskesmas Sumberjambe	1.543.344,00
Sub Total			6.222.884,00
1	Alat Pertanian	Dinas Pendidikan	140.000,00
Sub Total			140.000,00
1	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Dinas Pendidikan	1.174.456.615,00
2	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	490.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Kasiyan	8.678.378,00
4	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Silo 2	450.000,00
5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Puskesmas Sukorambi	5.905.200,00
Sub Total			1.189.980.193,00
1	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Pendidikan	19.208.650,00
2	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Dinas Komunikasi Dan Informatika	400.000,00
3	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	1.330.000,00
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Puskesmas Kalisat	801.000,00
Sub Total			21.739.650,00
1	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	23.745.300,00
2	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ajung	994.922,00
3	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ambulu	3.344.421,00
4	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Andongsari	251.961,00
5	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Arjasa	3.499.821,00
6	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Balung	4.899.661,00
7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Bangsalsari	16.402.615,00
8	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Banjarsengon	2.009.261,00
9	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Cakru	251.961,00
10	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Curahnongko	394.922,00
11	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gladapakem	251.961,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
12	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Gumukmas	251.961,00
13	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jelbuk	251.961,00
14	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jenggawah	4.714.922,00
15	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jombang	2.981.961,00
16	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kalisat	795.211,00
17	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kaliwates	394.922,00
18	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Karangduren	251.961,00
19	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kasiyan	251.961,00
20	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kencong	7.794.922,00
21	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Kemuningsari	251.961,00
22	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Jember Kidul	251.961,00
23	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Klatakan	394.922,00
24	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Ledokombo	4.763.252,00
25	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Lojejer	251.961,00
26	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mangli	251.961,00
27	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mayang	2.794.922,00
28	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Mumbulsari	3.131.961,00
29	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Nogosari	251.961,00
30	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Pakusari	4.307.941,00
31	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Paleran	251.961,00
32	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Panti	3.391.714,00
33	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Patrang	251.961,00
34	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Puger	251.961,00
35	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rambipuji	251.961,00
36	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Rowotengah	251.961,00
37	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sabrang	251.961,00
38	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Semboro	251.961,00
39	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 1	251.961,00
40	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Silo 2	7.771.365,00
41	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorambi	251.961,00
42	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukorejo	394.922,00
43	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sukowono	13.434.922,00
44	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberbaru	394.922,00
45	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumberjambe	7.433.661,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
46	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Sumbersari	394.922,00
47	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tanggul	1.872.117,00
48	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tembokrejo	921.062,00
49	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Tempurejo	251.961,00
50	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Umbulsari	394.922,00
51	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Puskesmas Wuluhan	251.961,00
Sub Total			129.565.491,00
1	Alat Laboratorium	Dinas Pendidikan	49.532.100,00
2	Alat Laboratorium	Puskesmas Ajung	600.000,00
3	Alat Laboratorium	Puskesmas Ambulu	600.000,00
4	Alat Laboratorium	Puskesmas Andongsari	600.000,00
5	Alat Laboratorium	Puskesmas Arjasa	600.000,00
6	Alat Laboratorium	Puskesmas Balung	600.000,00
7	Alat Laboratorium	Puskesmas Bangsalsari	600.000,00
8	Alat Laboratorium	Puskesmas Banjarsengon	600.000,00
9	Alat Laboratorium	Puskesmas Cakru	600.000,00
10	Alat Laboratorium	Puskesmas Curahnongko	600.000,00
11	Alat Laboratorium	Puskesmas Gladakpakem	600.000,00
12	Alat Laboratorium	Puskesmas Gumukmas	600.000,00
13	Alat Laboratorium	Puskesmas Jelbuk	600.000,00
14	Alat Laboratorium	Puskesmas Jenggawah	600.000,00
15	Alat Laboratorium	Puskesmas Jombang	600.000,00
16	Alat Laboratorium	Puskesmas Kalisat	600.000,00
17	Alat Laboratorium	Puskesmas Kaliwates	600.000,00
18	Alat Laboratorium	Puskesmas Karangduren	600.000,00
19	Alat Laboratorium	Puskesmas Kasiyan	600.000,00
20	Alat Laboratorium	Puskesmas Kencong	600.000,00
21	Alat Laboratorium	Puskesmas Kemuningsari	600.000,00
22	Alat Laboratorium	Puskesmas Jember Kidul	600.000,00
23	Alat Laboratorium	Puskesmas Klatakan	600.000,00
24	Alat Laboratorium	Puskesmas Ledokombo	600.000,00
25	Alat Laboratorium	Puskesmas Lojejer	600.000,00
26	Alat Laboratorium	Puskesmas Mangli	600.000,00
27	Alat Laboratorium	Puskesmas Mayang	600.000,00
28	Alat Laboratorium	Puskesmas Mumbulsari	600.000,00
29	Alat Laboratorium	Puskesmas Nogosari	600.000,00
30	Alat Laboratorium	Puskesmas Pakusari	600.000,00
31	Alat Laboratorium	Puskesmas Paleran	600.000,00
32	Alat Laboratorium	Puskesmas Panti	600.000,00
33	Alat Laboratorium	Puskesmas Patrang	600.000,00
34	Alat Laboratorium	Puskesmas Puger	600.000,00
35	Alat Laboratorium	Puskesmas Rambipuji	600.000,00
36	Alat Laboratorium	Puskesmas Rowotengah	600.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
37	Alat Laboratorium	Puskesmas Sabrang	600.000,00
38	Alat Laboratorium	Puskesmas Semboro	600.000,00
39	Alat Laboratorium	Puskesmas Silo 1	600.000,00
40	Alat Laboratorium	Puskesmas Silo 2	600.000,00
41	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukorambi	1.027.350,00
42	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukorejo	600.000,00
43	Alat Laboratorium	Puskesmas Sukowono	600.000,00
44	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberbaru	600.000,00
45	Alat Laboratorium	Puskesmas Sumberjambe	600.000,00
46	Alat Laboratorium	Puskesmas Summersari	600.000,00
47	Alat Laboratorium	Puskesmas Tanggul	600.000,00
48	Alat Laboratorium	Puskesmas Tembokrejo	1.060.650,00
49	Alat Laboratorium	Puskesmas Tempurejo	600.000,00
50	Alat Laboratorium	Puskesmas Umbulsari	600.000,00
51	Alat Laboratorium	Puskesmas Wuluhan	600.000,00
Sub Total			80.420.100,00
1	Alat Eksplorasi	Dinas Pendidikan	63.600,00
Sub Total			63.600,00
1	Alat Keselamatan Kerja	Dinas Pendidikan	85.650,00
Sub Total			85.650,00
1	Komputer	Dinas Pendidikan	7.286.060.785,00
2	Komputer	Puskesmas Silo 2	1.075.000,00
Sub Total			7.287.135.785,00
1	Peralatan Olah Raga	Dinas Pendidikan	7.727.500,00
2	Peralatan Olah Raga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	99.000.000,00
Sub Total			106.727.500,00
TOTAL			8.830.312.953,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.398.406.515.487,05	2.338.714.217.138,97	59.692.298.348,08	2,55

Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.398.406.515.487,05 dan Rp2.338.714.217.138,97. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp59.692.298.348,08 atau sebesar 2,55 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp2.398.406.515.487,05 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.338.714.217.138,97
Penambahan Tahun 2024	Rp	81.616.551.361,00
Jumlah	Rp	2.420.330.768.499,97
Pengurangan Tahun 2024	Rp	21.924.253.012,92
Nilai AT-Gedung dan Bangunan	Rp	2.398.406.515.487,05

Jumlah tersebut merupakan mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 129 Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENYESUAIAN TAMBAH KURANG SUB SUB AKUN AUDITED	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	REKLAS SUB SUB AKUN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bangunan Gedung	2.308.915.200.035,97	(659.401.128,08)	80.739.710.464,00	21.924.253.012,92	(212.674.300,00)	2.366.858.582.058,97
2	Monumen	1.194.214.000,00	0,00	616.050.000,00	0,00	(616.050.000,00)	1.194.214.000,00
3	Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.604.803.103,00	659.401.128,08	260.790.897,00	0,00	828.724.300,00	30.353.719.428,08
TOTAL		2.338.714.217.138,97	0,00	81.616.551.361,00	21.924.253.012,92	0,00	2.398.406.515.487,05

Penambahan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp81.616.551.361,00 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal merupakan penambahan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang berasal dari realisasi belanja modal yang telah dianggarkan pada OPD yang bersangkutan. Rincian penambahan nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan dari belanja modal tahun 2024 sebesar Rp72.252.822.584,00 yang terdiri dari penambahan gedung baru dan rehabilitasi gedung dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 130 Belanja Modal Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	Bagian Umum	396.304.336,00	6 Bangunan Rehabilitasi
2	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	454.922.200,00	3 Bangunan Baru
3	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	34.779.103.258,00	77 Bangunan Baru 59 Bangunan Rehabilitasi
4	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	95.104.000,00	1 Bangunan Rehabilitasi
5	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	596.006.000,00	5 Bangunan Rehabilitasi
NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)	KETERANGAN
6	Bangunan Gedung	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	3.472.143.600,00	4 Bangunan Baru 9 Bangunan Rehabilitasi
7	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	30.206.628.000,00	1 Bangunan Baru 2 Bangunan Rehabilitasi
8	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	691.533.163,00	1 Bangunan Baru 3 Bangunan Rehabilitasi
9	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.398.059,00	1 Bangunan Rehabilitasi 1 Bangunan Baru
10	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	237.518.350,00	1 Bangunan Rehabilitasi
11	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	401.471.000,00	1 Bangunan Rehabilitasi
12	Bangunan Gedung	Puskesmas Pakusari	35.713.228,00	1 Bangunan Rehabilitasi
13	Bangunan Gedung	Puskesmas Sumbersari	99.175.493,00	1 Bangunan Rehabilitasi
14	Monumen	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	616.050.000,00	1 Bangunan Baru
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Kecamatan Bangsalsari	42.900.000,00	1 Bangunan Rehabilitasi
16	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Puskesmas Rambipuji	79.851.897,00	1 Bangunan Rehabilitasi
TOTAL			72.252.822.584,00	

- 2) Penambahan dari Hutang sebesar Rp80.632.130,00 terdiri dari Penambahan Hutang dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA sebesar Rp24.384.730,00 dan Penambahan Hutang dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp56.247.400,00 yang merupakan penambahan atas pengakuan hutang konsultan pengawasan yang belum terbayar di tahun 2024.
- 3) Penambahan koreksi tahun 2024 senilai Rp6.486.001.655,00 terdiri dari Penambahan koreksi dari Jasa Perencanaan sebesar Rp 1.677.200.711,00, penambahan koreksi dari Jasa Pengawasan sebesar Rp1.360.622.744,00 dan penambahan koreksi dari Jasa Konstruksi Pemeliharaan dimana penambahan koreksi tersebut merupakan penambahan yang berasal dari koreksi kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp3.448.178.200,00. Sedangkan koreksi kapitalisasi belanja pemeliharaan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Sebelum Tahun 2024 senilai Rp1.893.417.000,00 terdiri dari koreksi Penetapan Nilai Perolehan berupa Bangunan Eks. GNI pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.819.200.000,00 berdasarkan SK Bupati Jember No: 100.3.3.2/433/1.12/2024 dan Koreksi dari Jasa Perencanaan Alun-Alun Jember pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp74.217.000,00. Rincian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. 131 Penambahan Koreksi - Gedung dan Bangunan Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Jasa Perencanaan			
1	Bangunan Gedung	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	93.739.000,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	58.122.000,00
3	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan	50.462.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
4	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.846.500,00
5	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB	119.944.200,00
6	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	11.039.000,00
7	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.900.000,00
8	Bangunan Gedung	Kecamatan Bangsalsari	3.761.200,00
9	Bangunan Gedung	Kecamatan Patrang	3.775.300,00
10	Bangunan Gedung	Kecamatan Kencong	9.000.000,00
11	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	78.078.400,00
12	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	198.602.000,00
13	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	888.719.111,00
14	Bangunan Gedung	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	14.827.000,00
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Pendidikan	88.385.000,00
SUB TOTAL			1.677.200.711,00
Penambahan Koreksi Dari Jasa Pengawasan			
1	Bangunan Gedung	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.500.000,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	45.867.000,00
3	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan	17.250.000,00
4	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.072.500,00
5	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB	72.363.574,00
6	Bangunan Gedung	Dinas Perhubungan	5.088.000,00
7	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	60.346.700,00
8	Bangunan Gedung	Kecamatan Bangsalsari	2.516.800,00
9	Bangunan Gedung	Kecamatan Patrang	2.486.400,00
10	Bangunan Gedung	Kecamatan Kencong	5.200.000,00
11	Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	43.786.170,00
12	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	506.226.600,00
13	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	525.436.000,00
14	Bangunan Gedung	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	9.829.000,00
15	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Dinas Pendidikan	49.654.000,00
SUB TOTAL			1.360.622.744,00
Penambahan Koreksi Dari Jasa Konstruksi Pemeliharaan			
1	Bangunan Gedung	Bagian Administrasi Pembangunan	59.556.000,00
2	Bangunan Gedung	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	186.444.000,00
3	Bangunan Gedung	Dinas Perikanan	1.039.800.000,00
4	Bangunan Gedung	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59.599.333,00
5	Bangunan Gedung	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan KB	1.352.591.100,00
6	Bangunan Gedung	Dinas Tenaga Kerja	103.227.000,00
7	Bangunan Gedung	Kecamatan Patrang	25.081.637,00
8	Bangunan Gedung	Kecamatan Rambipuji	23.405.000,00
9	Bangunan Gedung	Kecamatan Kencong	53.075.000,00
10	Bangunan Gedung	Kecamatan Ledokombo	73.309.340,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
11	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	310.189.790,00
12	Bangunan Gedung	Kecamatan Ajung	28.900.000,00
13	Bangunan Gedung	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	133.000.000,00
SUB TOTAL			3.448.178.200,00
TOTAL			6.486.001.655,00

Tabel 5. 132 Penambahan Koreksi – Gedung Dan Bangunan Sebelum Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Penetapan Nilai perolehan			
1	Bangunan Gedung	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.819.200.000,00
SUB TOTAL			1.819.200.000,00
Penambahan Koreksi Dari Jasa Perencanaan			
1	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	74.217.000,00
SUB TOTAL			74.217.000,00
TOTAL			1.893.417.000,00

- 4) Penambahan Reklasifikasi Antar Akun Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp903.677.992,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan Dan Mesin senilai Rp148.500.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa waterboom sebesar Rp83.500.000,00 dan Puskesmas Klatakan sebesar Rp65.000.000,00 berupa paving dan kanopi. Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp668.747.425,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya sebesar Rp481.749.000,00 berupa Pengeboran dan Menara Air Alun-Alun Jember dan RSD dr. Soebandi sebesar Rp186.998.425,00 berupa Saluran Instalasi Pipa Gas Ruangan. Penambahan Reklasifikasi dari KDP senilai Rp86.430.567,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp65.280.567,00 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp21.150.000,00.

Tabel 5. 133 Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Reklasifikasi dari Peralatan Dan Mesin Tahun 2024			
1	Bangunan Gedung	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	83.500.000,00
2	Bangunan Gedung	Puskesmas Klatakan	65.000.000,00
SUB TOTAL			148.500.000,00
Reklasifikasi Dari Jalan, Jaringan Dan Irigasi (KIB D) Tahun 2024			
1	Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	481.749.000,00
2	Bangunan Gedung	Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi	186.998.425,00
SUB TOTAL			668.747.425,00
Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2024			

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Bangunan Gedung	Dinas Pendidikan	65.280.567,00
2	Bangunan Gedung	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	21.150.000,00
SUB TOTAL			86.430.567,00
TOTAL			903.677.992,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp21.924.253.012,92 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Aset karena penghapusan Gedung senilai Rp396.553.000,00 terdiri dari penghapusan Gedung pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM berupa Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp9.000.000,00 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/83/SEKDA/1.12/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Jember, Penghapusan paving alun-alun pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya sebesar Rp237.553.000,00 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/441/SEKDA/1.12/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember (Pembongkaran Alun-alun Kabupaten Jember) dan Penghapusan Bangunan Puskesmas Pembantu pada Puskesmas Kasiyan sebesar Rp150.000.000,00 berdasarkan SK Sekretaris Daerah No. 100.3.3.5/441/SEKDA/1.12/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Puskesmas Pembantu Mlokorejo Puskesmas Kasiyan Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
- 2) Pengurangan Hutang sebesar Rp2.355.250,00 merupakan koreksi atas pengakuan hutang pada tahun sebelumnya pada RSD Balung untuk pembayaran jasa pengawasan gedung Ruang Rawat Inap.
- 3) Koreksi Pengurangan ke Jasa Pemeliharaan senilai Rp216.513.171,00 terdiri dari koreksi atas Jasa Pemeliharaan pada Puskesmas Pakusari sebesar Rp8.200.768,00 berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Jasa Pemeliharaan pada Bagian Umum sebesar Rp208.312.403,00 berupa pemeliharaan taman.
- 4) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp21.308.831.591,92 merupakan pengurangan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Penjelasan atas pengurangan dari reklasifikasi antar akun adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar tahun 2024 sebesar Rp3.245.127.500,00 pada Dinas Pendidikan dikarenakan terdapat peralatan mesin pada Belanja Gedung dan Bangunan.
- b) Reklasifikasi ke Aset Jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp100.759.163,00 pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berupa Bangunan MCK dan Jalan Setapak Situs Duplang.
- c) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya-aset tetap renovasi tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebesar Rp824.071.000,00 dikarenakan terdapat belanja pemeliharaan gedung atas aset yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Jember (Rehab Kantor Kodim).
- d) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Rusak Berat/Usang) tahun 2024 sebesar Rp118.560.000,00 pada Dinas Sosial.
- e) Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Kemitraan Pihak Ketiga - Sewa) tahun 2024 sebesar Rp17.020.313.928,92 pada Bagian Umum senilai Rp 9.674.640.227,95 untuk Gedung Balai Serba Guna, Gedung JKLAB dan Gedung Wisa Daerah Praja Mukti serta pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp7.345.673.700,97 untuk Gedung GOR PKPSO. Aset tersebut disajikan di Properti Investasi (PI) pada neraca.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
5.284.380.906.537,39	5.181.979.525.235,39	102.401.381.302,00	1,98

Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.284.380.906.537,39 dan Rp5.181.979.525.235,39. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp102.401.381.302,00 atau sebesar 1,98 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp5.284.380.906.537,39 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.181.979.525.235,39
Penambahan Tahun 2024	Rp	105.092.780.727,00
Jumlah	Rp	5.287.072.305.962,39
Pengurangan Tahun 2024	Rp	2.691.399.425,00
Nilai AT-Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	Rp	5.284.380.906.537,39

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari

Tabel 5. 134 Mutasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENYESUAIAN TAMBAH KURANG SUB SUB AKUN AUDITED	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	REKLAS SUB AKUN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	3.368.764.802.837,82	3.956.013.870,29	92.703.146.002,00	2.022.652.000,00	0,00	3.463.401.310.710,10
2	Bangunan air / Irigasi	1.392.396.068.481,27	(3.756.074.870,29)	7.145.767.135,00	0,00	0,00	1.395.785.760.745,99
3	Instalasi	173.942.568.040,00	0,00	668.747.425,00	668.747.425,00	0,00	173.942.568.040,00
4	Jaringan	246.876.085.876,30	(199.939.000,00)	4.575.120.165,00	0,00	0,00	251.251.267.041,30
TOTAL		5.181.979.525.235,39	0,00	105.092.780.727,00	2.691.399.425,00	0,00	5.284.380.906.537,39

Penambahan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp105.092.780.727,00 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Penambahan aset dari belanja Modal merupakan realisasi pengadaan yang berasal dari APBD. Nilai Belanja modal Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp90.641.872.297,00 sebagai berikut :

Tabel 5. 135 Belanja Modal Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	75.084.830.000,00
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	8.062.196.000,00
Sub Total			83.147.026.000,00
1	Bangunan Air	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	6.848.148.872,00
Sub Total			6.848.148.872,00
1	Instalasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	459.699.000,00
2	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	186.998.425,00
Sub Total			646.697.425,00
Total			90.641.872.297,00

2. Penambahan Hibah Sebelum Tahun 2024 sebesar Rp10.343.094.465,00 terdiri dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp5.767.974.300,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Berita Acara Serah terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Jembatan Gantung Sabrang dari Kemetrrian PUPR Kepada Pemerintah Kabupaten Jember Nomor. Ps 0403/Bb8..06/30 tanggal 09 Jauari 2023 serta Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi sebesar Rp4.575.120.165,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa PJU Tenaga Surya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya berdasarkan Berita



Acara Serah Terima No: 114/BAST/BN.07/KPB/2023 dan 645/1234/35.09.313/2024 tanggal 12 Juli 2024.

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	5.767.974.300,00
Sub Total			5.767.974.300,00
1	Jaringan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	4.575.120.165,00
Sub Total			4.575.120.165,00
Total			10.343.094.465,00

3. Penambahan Koreksi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp3.967.968.202,00 terdiri dari Penambahan Koreksi dari Jasa Perencanaan sebesar Rp1.278.213.198,00, Penambahan Koreksi dari jasa Pengawasan sebesar Rp852.384.004,00, Penambahan Koreksi dari Konstruksi/Pemeliharaan sebesar Rp96.625.000,00, Penambahan Koreksi dari Hibah (Konstruksi/Pemeliharaan) sebesar Rp1.740.746.000,00, berikut tabel Penambahan Koreksi Tahun 2024:

Tabel 5. 136 Penambahan Koreksi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi dari Jasa Perencanaan			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	981.508.200,00
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	296.704.998,00
Sub Total			1.278.213.198,00
Penambahan Koreksi dari jasa Pengawasan			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	326.503.000,00
2	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	267.778.004,00
Sub Total			594.281.004,00
1	Bangunan Air	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	236.053.000,00
Sub Total			236.053.000,00
1	Instalasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	22.050.000,00
Sub Total			22.050.000,00
Total			852.384.004,00
Penambahan Koreksi dari Konstruksi/Pemeliharaan			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	96.625.000,00
Sub Total			96.625.000,00
Penambahan Koreksi dari Hibah (perencanaan)			
1	Jalan Dan Jembatan	Jalan Dan Jembatan	55.745.144,00
Sub Total			55.745.144,00
Penambahan Koreksi dari Hibah (Pengawasan)			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	50.376.243,00
Sub Total			50.376.243,00
Penambahan Koreksi dari Hibah (Konstruksi/Pemeliharaan)			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	1.740.746.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Sub Total			1.740.746.000,00
TOTAL			3.967.968.202,00

4. Penambahan Reklasifikasi sebesar Rp139.845.763,00 terdiri dari Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.759.163,00 terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa Bangunan MCK dan Jalan Setapak Situs Duplang dan Penambahan dari KDP sebesar Rp39.086.600,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berupa Rehab Jembatan Bintoro dan Rehab Jembatan Gladak-Pakem Mumbulsari km II+023 dan km 283 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Reklasifikasi Aset Tetap- Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	39.193.900,00
Sub Total			39.193.900,00
1	Bangunan Air	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	61.565.263,00
Sub Total			61.565.263,00
Reklasifikasi dari KDP			
1	Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	39.086.600,00
Sub Total			39.086.600,00
TOTAL			139.845.763,00

Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 Sebesar Rp2.691.399.425,00 tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Hibah Sebelum Tahun 2024 - Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wirolegi ke Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Timur sebesar Rp9.542.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan karena penghapusan berdasarkan SK Bupati Jember No. 188.45/218/1.12/2024 tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah untuk Jalan Kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur
- 2) Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp668.747.425,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya berupa Pengeboran dan Menara Air Alun-Alun Jember dan Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi berupa Saluran Instalasi Pipa Gas Ruangan.
- 3) Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan) sebesar Rp2.013.110.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya yang akan diserahkan/dihilangkan ke desa dalam bentuk jalan lingkungan / paving stone.

Tabel 5. 138 Pengurangan Nilai Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Pengurangan Hibah Sebelum Tahun 2024 - Jembatan Callendar Hamilton (CH) Wirolegi ke Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Timur			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	9.542.000,00
Sub Total			9.542.000,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan			
1	Instalasi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	481.749.000,00
2	Instalasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	186.998.425,00
Sub Total			668.747.425,00
Pengurangan Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan)			
Reklas ke Gedung dan Bangunan Tahun 2023			
1	Jalan Dan Jembatan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	2.013.110.000,00
Sub Total			2.013.110.000,00
Total			2.691.399.425,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
276.847.475.566,51	253.570.816.528,51	23.276.659.038,00	9,18

Nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp276.847.475.566,51 dan Rp253.570.816.528,51. Terjadi kenaikan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp23.276.659.038,00 atau sebesar 9,18 persen.

Perhitungan nilai Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp276.847.475.566,51. Adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	253.570.816.528,51
Penambahan Tahun 2024	Rp	53.375.515.461,00
Jumlah	Rp	306.946.331.989,51
Pengurangan Tahun 2024	Rp	30.098.856.423,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	Rp	276.847.475.566,51

Jumlah tersebut merupakan rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 139 Rincian Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENYESUAIAN TAMBAH KURANG SUB SUB AKUN AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	REKLAS SUB AKUN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	210.669.857.523,51	25.249.887.345,00	47.664.741.461,00	30.011.678.423,00	(507.171.088,00)	253.065.636.818,51



NO	JENIS	SALDO AWAL (Rp)	PENYESUAIAN TAMBAH KURANG SUB SUB AKUN AUDITED	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	REKLAS SUB AKUN	SALDO AKHIR (Rp)
2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	8.466.060.333,00	922.887.127,00	4.823.539.000,00	24.014.000,00	507.171.088,00	14.695.643.548,00
3	Hewan	669.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.900.000,00
4	Biota Perairan	951.820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.820.800,00
5	Tanaman	2.823.186.500,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.824.716.500,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	29.989.991.372,00	(26.174.304.472,00)	887.235.000,00	63.164.000,00	0,00	4.639.757.900,00
JUMLAH		253.570.816.528,51	0,00	53.375.515.461,00	30.098.856.423,00	0,00	276.847.475.566,51

Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp53.375.515.461,00 dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1) Belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.677.747.566,00 terdiri dari belanja modal Aset Tetap berupa Bahan Perpustakaan, Barang bercorak kesenian, kebudayaan dan olahraga, dan Aset Tetap Dalam Renovasi. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 140 Belanja Modal Aset Tetap-Aset tetap lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	47.575.583.566,00
2	Bahan Perpustakaan	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	61.000.000,00
3	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	978.000.000,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat	55.500.000,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	Puskesmas Sumberbaru	7.664.000,00
TOTAL			48.677.747.566,00

2) Penambahan hibah sebesar Rp28.157.895,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya dari hibah sebelum tahun 2024 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 4218/NHPD/2021 berupa koleksi buku.

3) Penambahan dari reklasifikasi antar akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp824.071.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi antar akun/antar KIB. Adapun penambahan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 berasal dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Dalam Renovasi pada Dinas



Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berupa Perbaikan/Rehab Kantor Kodim Jember.

- 4) Penambahan Koreksi Tahun 2024 didapat dari Koreksi berupa Belanja Persediaan sebesar Rp3.845.539.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berupa Alat Musik Modern. Koreksi tersebut merupakan belanja barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap.
- b. Pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp30.098.856.423,00 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
 - 1) Koreksi atas belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya sebesar Rp169.821.600,00 merupakan pengurangan yang berasal dari koreksi atas belanja modal Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya ke Pemeliharaan dan pengurangan yang berasal dari koreksi atas belanja modal Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya ke Persediaan dikarenakan belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap sehingga mengurangi nilai belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya tahun 2024. Rincian dari koreksi atas belanja modal Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 141 Koreksi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENGURANGAN KOREKSI KE PEMELIHARAAN			
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	70.261.600,00
SUB TOTAL			70.261.600,00
PENGURANGAN KOREKSI KE PERSEDIAAN			
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	99.560.000,00
SUB TOTAL			99.560.000,00
TOTAL			169.821.600,00

- 2) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp29.905.020.823,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB tahun 2024 ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.788.520.823,00 terdiri dari Dinas Pendidikan (BOS) sebesar Rp29.780.856.823,00 dan pada Puskesmas Sumberbaru senilai Rp7.664.000,00 serta pengurangan Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB tahun 2024 ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp116.500.000,00 terdiri dari Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. Soebandi senilai Rp61.000.000,00 dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat senilai Rp55.500.000,00. Rincian pengurangan Aset Tetap- Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi antar Akun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 142 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			
1	Bahan Perpustakaan	Dinas Pendidikan	29.780.856.823,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Puskesmas Sumberbaru	7.664.000,00
SUB TOTAL			29.788.520.823,00
REKLASIFIKASI KE ASET TIDAK BERWUJUD			
1	Bahan Perpustakaan	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	61.000.000,00
2	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	55.500.000,00
SUB TOTAL			116.500.000,00
TOTAL			29.905.020.823,00

- 3) Pengurangan dari koreksi ekstrakom sebesar Rp24.014.000,00 merupakan pengurangan Aset tetap-Aset tetap lainnya yang berasal dari ekstrakom tahun 2024 pada Dinas Pendidikan berupa Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dikarenakan tidak memenuhi kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember.

Sebagai informasi bahwa pada akun Aset Tetap Lainnya terdapat sejumlah Hewan dan Biota Perairan yang berada dalam kondisi mati namun belum diusulkan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
25.091.952.904,85	25.269.692.114,25	(177.739.209,40)	(0,70)

Nilai KDP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.091.952.904,85 dan Rp25.269.692.114,25. Terjadi penurunan nilai Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp177.739.209,40 atau sebesar 0,70 persen.

Perhitungan nilai KDP per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.831.800.947,25 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	25.269.692.114,25
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	25.269.692.114,25
Pengurangan Tahun 2024	Rp	177.739.209,40
Nilai KDP Tahun 2024	Rp	25.091.952.904,85



Jumlah tersebut merupakan rincian KDP milik Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari:

Tabel 5. 143 Kontruksi Dalam Pengerjaan

JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.269.692.114,25	0,00	177.739.209,40	25.091.952.904,85
TOTAL	25.269.692.114,25	0,00	177.739.209,40	25.091.952.904,85

Mutasi pengurangan nilai KDP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Saldo awal sebesar Rp25.269.692.114,25 merupakan nilai saldo akhir KDP tahun 2023 (*audited*).
- b. Pengurangan KDP Tahun 2024 sebesar Rp177.739.209,40 dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp125.517.167,00 merupakan pengurangan KDP yang berasal dari reklasifikasi antar akun/antar KIB sebelum tahun 2024 ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp86.430.567,00 dan pengurangan KDP yang berasal dari reklasifikasi antar akun/antar KIB sebelum tahun 2024 ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp39.086.600,00. Rincian pengurangan KDP dari Reklasifikasi Antar Akun disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 144 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun KDP Sebelum Tahun 2024

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.150.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pendidikan	65.280.567,00
SUB TOTAL			86.430.567,00
REKLASIFIKASI KE JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	39.086.600,00
SUB TOTAL			39.086.600,00
TOTAL			125.517.167,00

- 2) Pengurangan KDP sebesar Rp52.222.042,40 merupakan pengurangan KDP yang berasal dari koreksi karena putus kontrak dengan No Surat Pemutusan Kontrak 620.05/01/PK/PPK.PPJD/35.09.312/2022 tanggal 19 Januari 2022 akibat terkena bencana saat proses pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.
- c. Saldo akhir sebesar Rp25.091.952.904,85 merupakan saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tahun 2024. Adapun rincian saldo akhir KDP 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 145 Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
1	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung Samping Dispenduk	1970	49.100.000,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Perencanaan	1970	717.340.800,00
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Termyn Uang Muka	1970	1.254.729.800,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Gedung	1970	44.448.000,00
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsult. Pengawas	1970	49.000.000,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsult. Perencanaan	2023	47.576.000,00
7	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembangunan Gedung Rawat Jalan Poli 4 Rsd Soebandi (Perencanaan Di Rs Subandi)	2019	5.361.733.448,65
8	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Kontruksi Poli 4 Lantai Rsd	2020	6.251.039.609,44
9	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Pengawasan Gedung Rawat Jalan Lantai 4	2020	215.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Belanja Pengadaan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan 4 (Empat) Lantai	2018	346.000.000,00
11	Dinas Kesehatan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Belanja Pengadaan Konsultan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Lt 4	2018	44.946.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Gladak-Pakem Mumbulsari Km Iii+031 (Pengakuan Hutang)	2020	19.606.400,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Jembatan Lori (Pengakuan Hutang)	2020	19.561.800,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Peningkatan Jalan Matrip (5.2.2.21.02) (Koreksi)	2020	39.190.800,00
15	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	2020	19.595.400,00



NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
		Dalam Pengerjaan	Peningkatan Jalan Mastrip (5.2.2.21.02) (Pengakuan Hutang)		
16	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jarwo (5.2.2.21.02) (Koreksi)	2020	39.388.800,00
17	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Jarwo (5.2.2.21.02) (Pengakuan Hutang)	2020	19.694.400,00
18	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Rehabilitasi Dam Sangkah (Pengakuan Hutang)	2020	19.789.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Daerah Irigasi P. Lantur	2021	2.043.959.789,90
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Daerah Irigasi Candi	2021	370.860.926,62
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Dinding Penahan Jalan Patemon - Kramatsukoharjo Kec. Tanggul	2021	260.151.957,60
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Bnpb (Ji-Polo)	2023	39.556.800,00
23	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Dak (Bendung Tugusari, Bendung Kedinding, Saluran li Kaena)	2023	79.494.400,00
24	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Ded (Jalan Akses Masuk Kantor Pusat Pemerintahan - Bintoro)	2023	99.167.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Karang Bayat Dan Jembatan Kemuningsari Lor Badean)	2023	71.139.200,00
26	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Cakru Paseban 1 Dan Cakru Paseban 2	2023	4.393.333,34
27	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Sadengan Dan Jembatan Keting Kecik	2023	12.113.500,00
28	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Jembatan Jarwo (Review)	2023	63.377.600,00
29	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Eks Monumen Pesawat	2023	19.856.000,00
30	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pembangunan Palang Pintu Perlindungan Jalan Tawes	2023	4.759.875,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
31	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pos Jaga Jpl Sumberlesung	2023	13.828.530,00
32	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Pembangunan Palang Pintu Perlindungan Sumberlesung	2023	4.759.875,00
33	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Mangga	2023	4.158.940,00
34	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Langsep	2023	4.158.940,00
35	Dinas Perhubungan	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Pos Jaga Jpl Jalan Rasamala	2023	4.158.940,00
36	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Laporan Pendahuluan 20% Dan Pengembangan 10% Perencanaan Pembangunan Pasar Tanjung Dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar T.A 2019, Sebagaimana Permohonan Terlampir.	2019	698.005.770,00
37	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan Pasar Tanjung Tahun 2019 (Tahap Pengembangan Rancangan Dan Tahap Rancangan Detail)	2020	1.163.342.950,00
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Konsultan Perencanaan Pasar Kepatihan	2019	97.625.000,00
39	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Pembayaran Angsuran 80% Jasa Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Pasar Mangli Dalam Rangka Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar T.A 2019, Sebagaimana Permohonan Terlampir.	2019	35.200.000,00
40	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan/Detail Engineering Design Pasar Manggis	2018	98.700.000,00
41	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	- Uang Muka Konstruksi Pembangunan Pasar Manggis	2018	1.567.855.368,67
42	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	- Angsuran 55,462% Konstruksi Pembangunan Pasar Manggis	2018	2.562.573.368,03
43	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Manggis	2018	97.250.000,00
44	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan	Konstruksi Pembangunan Pasar Manggis (Sisa Nilai	2018	217.234.200,60

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
		Dalam Pengerjaan	Kontrak Yang Belum Terbayar)		
45	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Ambulu	2023	7.050.000,00
46	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Jenggawah	2023	7.050.000,00
47	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Menampu	2023	7.050.000,00
48	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Petung	2023	7.050.000,00
49	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Sukorejo	2023	7.050.000,00
50	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Umbulsari	2023	7.050.000,00
51	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Mayang	2023	7.050.000,00
52	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Kalisat	2023	7.050.000,00
53	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan - Pasar Hewan Jenggawah	2023	7.050.000,00
54	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Rehabilitasi Bangunan Gedung Dan Interior Kantor Kecamatan Jenggawah	2019	635.445.382,00
55	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Kantor Dlh	2023	17.706.000,00
56	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Screen House	2023	17.706.000,00
57	Dinas Lingkungan Hidup	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Konsultan Perencanaan Gedung Tpa Pakusari	2023	17.706.000,00
58	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Museum Daerah	2023	74.500.000,00
59	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Exterior + Interior Rajal (Perencanaan)	2022	26.919.000,00
60	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Masjid (Perencanaan)	2022	26.892.000,00

NO	OPD	NAMA ASET	KETERANGAN (RINCIAN) TAMBAHAN BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN
61	Bagian Umum	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	Jasa Perencanaan Rehab Gedung Ex Bpka	2023	16.206.000,00
Jumlah					25.091.952.904,85

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
5.644.510.975.067,53	5.276.461.300.308,57	368.049.674.758,96	6,98

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.644.510.975.067,53 dan Rp5.276.461.300.308,57. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp368.049.674.758,96 atau sebesar 6,98 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.644.510.975.067,53 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.276.461.300.308,57
Penambahan Tahun 2024	Rp	399.680.056.089,45
Jumlah	Rp	5.676.141.356.398,02
Pengurangan Tahun 2024	Rp	31.630.381.330,50
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	5.644.510.975.067,53

Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyajian nilai penyusutan dilakukan sebagai konsekuensi logis atas penyajian nilai aset tetap yang menggunakan metode harga perolehan. Penghitungan penyusutan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan secara tahunan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) pada jenis aset tetap non tanah, tanaman dan hewan. Adapun Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 146 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.372.346.539.097,17	153.394.838.886,76	26.884.853.679,83	1.498.856.524.304,10
2	Gedung dan Bangunan	903.681.930.636,41	37.237.330.417,47	4.735.735.650,67	936.183.525.403,21
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.998.928.522.623,74	206.338.356.621,97	9.542.000,00	3.205.257.337.245,71

NO	JENIS ASET	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR (Rp)
4	Aset Tetap Lainnya	1.504.307.951,25	2.709.530.163,25	250.000,00	4.213.588.114,50
NILAI AKUMULASI PENYUSUTAN		5.276.461.300.308,57	399.680.056.089,45	31.630.381.330,50	5.644.510.975.067,53

Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan Buletin Teknis SAP No. 18 dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember serta Peraturan Bupati Jember Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.644.510.975.067,53 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2023 **Rp 5.276.461.300.308,57**

Penambahan Tahun 2024:

Beban Penyusutan 2024	Rp	395.637.605.307,93
Mutasi Antar KIB B	Rp	1.178.451.000,00
Mutasi Masuk BTT 2020	Rp	410.273.417,14
Hibah Masuk KIB B	Rp	892.134.352,85
Koreksi Kurang Catat KIB B	Rp	171.500.000,00
Koreksi Masuk dari Persediaan ke KIB B	Rp	10.365.000,00
Koreksi Salah Catat KIB C	Rp	109.152.000,00
Koreksi Kurang Catat KIB C	Rp	35.960.078,57
Koreksi Penambahan dari KDP KIB C	Rp	6.528.056,70
Koreksi Angka Penyesuaian Dibelakang Koma KIB C	Rp	0,01
Hibah Masuk KIB D	Rp	574.834.466,25
Koreksi Penambahan dari KDP KIB D	Rp	14.232.660,00
Koreksi Kurang Catat KIB E	Rp	639.019.750,00

Jumlah Penambahan Tahun 2024 **Rp 399.680.056.089,45**

Pengurangan Tahun 2024:

Mutasi Keluar Antar KIB B	Rp	18.772.815.747,28
Penghapusan KIB B	Rp	8.081.277.406,76
Koreksi Lebih Catat KIB B	Rp	30.760.525,72
Koreksi Angka Penyesuaian Dibelakang Koma KIB B	Rp	0,07
Mutasi Keluar Antar KIB C	Rp	4.416.407.040,14
Koreksi Salah Catat KIB C	Rp	1.026.943,20

Koreksi Lebih Catat KIB C	Rp	153.288.947,33
Penghapusan KIB C	Rp	165.012.720,00
Hibah Keluar KIB D	Rp	9.542.000,00
Koreksi Lebih Catat KIB E	Rp	250.000,00
Jumlah Pengurangan Tahun 2024	Rp	31.630.381.330,50
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	5.644.510.975.067,53

5.3.1.3.8 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
1.498.856.524.304,10	1.372.346.539.097,17	126.509.985.206,93	9,22

Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.498.856.524.304,10 dan Rp1.372.346.539.097,17. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp126.509.985.206,93 atau sebesar 9,22 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.498.856.524.304,10 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.372.346.539.097,17
Penambahan Tahun 2024	Rp	153.394.838.886,76
Jumlah	Rp	1.525.741.377.983,93
Pengurangan Tahun 2024	Rp	26.884.853.679,83
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	1.498.856.524.304,10

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp153.394.838.886,76 merupakan dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp150.732.115.116,77 merupakan nilai penyusutan pada tahun pelaporan.
- 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya – Aset Rusak ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.178.451.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa kendaraan dinas yang masih dipergunakan.
- 3) Kurang catat akumulasi atas belanja BTT 2024 yang merupakan pembayaran berdasarkan putusan pengadilan atas Wasftafel tahun 2020 di KIB Peralatan dan Mesin sebesar Rp410.273.417,14 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- 4) Penambahan Hibah Masuk KIB Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Perpustakaan Nasional, dan Bank BI sebelum tahun 2024 sebesar Rp892.134.352,85 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Hibah Masuk KIB Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Umum	297.566.500,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	50.940.000,00
3	Dinas Kesehatan	177.452.468,75
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	141.539.815,60
5	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi	211.161.006,00
6	Puskesmas Arjasa	962.468,75
7	Puskesmas Banjarsengon	962.468,75
8	Puskesmas Gladakpakem	962.468,75
9	Puskesmas Jelbuk	962.468,75
10	Puskesmas Kalisat	962.468,75
11	Puskesmas Kaliwates	962.468,75
12	Puskesmas Jember Kidul	962.468,75
13	Puskesmas Ledokombo	962.468,75
14	Puskesmas Mangli	962.468,75
15	Puskesmas Pakusari	962.468,75
16	Puskesmas Patrang	962.468,75
17	Puskesmas Sukowono	962.468,75
18	Puskesmas Sumberjambe	962.468,75
19	Puskesmas Summersari	962.468,75
JUMLAH		892.134.352,85

- 5) Penambahan Koreksi Kurang Catat KIB Peralatan dan Mesin sebelum tahun 2024 yang baru di akui asetnya berdasarkan SK Bupati No: 188.45/369/1.12/2024 dan 100.3.3.2/494/1.12/2024 sebesar Rp171.500.000,00 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Koreksi Kurang Catat KIB Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	160.000.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.500.000,00
JUMLAH		171.500.000,00

- 6) Penambahan Koreksi Masuk KIB Peralatan dan Mesin dari Persediaan sebelum tahun 2024 sebesar Rp10.365.000,00 berupa Kipas Angin sebesar Rp465.000,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung dan sebesar Rp9.900.000,00 pada Puskesmas Kencong terinci sebagai berikut:

Tabel Koreksi Masuk KIB Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	465.000,00
2	Puskesmas Kencong	9.900.000,00
JUMLAH		10.365.000,00

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp26.884.853.679,83 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Reklasifikasi Keluar KIB Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain – Aset Rusak sebesar Rp18.772.815.747,28 terinci sebagai berikut:

Tabel Mutasi Keluar KIB Peralatan dan Mesin

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Hukum	142.243.950,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	634.014.520,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	106.617.857,14
4	Inspektorat	81.115.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	540.000.000,00
6	Dinas Kesehatan	493.629.436,38
7	Dinas Perhubungan	258.758.000,00
8	Dinas Sosial	1.984.715.554,00
9	Dinas Tenaga Kerja	278.715.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.785.133,33
11	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	2.785.208.600,60
12	Kecamatan Arjasa	364.444.500,00
13	Kecamatan Balung	11.900.000,00
14	Kecamatan Jenggawah	347.622.900,00
15	Kecamatan Kencong	59.998.800,00
16	Kecamatan Mumbulsari	53.020.000,00
17	Kecamatan Semboro	76.125.000,00
18	Kecamatan Sumberjambe	147.151.390,00
19	Kecamatan Tanggul	62.466.664,00
20	Kecamatan Umbulsari	77.527.000,00
21	Kecamatan Wuluhan	7.952.250,00
22	Puskesmas Ajung	58.159.951,00
23	Puskesmas Ambulu	15.400.000,00
24	Puskesmas Andongsari	27.044.125,00
25	Puskesmas Arjasa	7.799.000,00
26	Puskesmas Balung	67.232.773,19
27	Puskesmas Bangsalsari	17.882.300,00
28	Puskesmas Cakru	16.245.000,00
29	Puskesmas Curahnongko	2.000.000,00
30	Puskesmas Gladapakem	210.796.633,44
31	Puskesmas Gumukmas	795.768.264,33
32	Puskesmas Jelbuk	92.514.074,00



NO	OPD	JUMLAH
33	Puskesmas Jenggawah	27.106.000,00
34	Puskesmas Kalisat	617.340.477,14
35	Puskesmas Kaliwates	36.791.500,00
36	Puskesmas Karangduren	226.742.861,47
37	Puskesmas Kasiyan	112.204.067,00
38	Puskesmas Kencong	16.248.500,00
39	Puskesmas Kemuningsari	314.811.794,78
40	Puskesmas Jember Kidul	167.205.320,00
41	Puskesmas Klatakan	369.240.791,67
42	Puskesmas Ledokombo	1.028.173.258,68
43	Puskesmas Lojejer	50.470.025,00
44	Puskesmas Mangli	229.455.094,00
45	Puskesmas Mayang	19.620.494,56
46	Puskesmas Mumbulsari	195.340.094,01
47	Puskesmas Nogosari	74.618.446,33
48	Puskesmas Pakusari	206.476.676,37
49	Puskesmas Paleran	328.116.171,52
50	Puskesmas Patrang	9.559.000,00
51	Puskesmas Puger	3.877.500,00
52	Puskesmas Rambipuji	218.541.479,46
53	Puskesmas Rowotengah	557.713.243,28
54	Puskesmas Sabrang	380.341.019,11
55	Puskesmas Semboro	362.962.933,03
56	Puskesmas Silo I	3.650.000,00
57	Puskesmas Sukorambi	50.324.875,00
58	Puskesmas Sukorejo	440.218.893,88
59	Puskesmas Sukowono	122.069.580,77
60	Puskesmas Sumberbaru	834.343.260,31
61	Puskesmas Sumberjambe	2.985.000,00
62	Puskesmas Sumbersari	652.052.181,73
63	Puskesmas Tanggul	152.804.307,50
64	Puskesmas Tempurejo	259.931.390,94
65	Puskesmas Umbulsari	450.000,00
66	Puskesmas Wuluhan	637.175.833,34
JUMLAH		18.772.815.747,28

- 2) Penghapusan KIB Peralatan dan Mesin sebelum tahun 2024 sebesar Rp8.081.277.406,76 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung.
- 3) Pengurangan Koreksi Lebih Catat atas reklasifikasi sub akun dengan masa manfaat yang berbeda (awal 5 tahun menjadi 7 tahun berupa pompa air) di KIB Peralatan dan Mesin sebelum tahun 2024 sebesar Rp30.760.525,72 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- 4) Pengurangan Koreksi angka penyesuaian dibelakang koma sebesar Rp0,07.

5.3.1.3.9 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
936.183.525.403,21	903.681.930.636,41	32.501.594.766,80	3,60

Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp936.183.525.403,21 dan Rp903.681.930.636,41. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp32.501.594.766,80 atau sebesar 3,60 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 936.183.525.403,21 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	903.681.930.636,41
Penambahan Tahun 2024	Rp	37.237.330.417,47
Jumlah	Rp	940.919.261.053,88
Pengurangan Tahun 2024	Rp	4.735.735.650,67
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	936.183.525.403,21

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp37.237.330.417,47 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp37.085.690.282,19.
- 2) Penambahan Koreksi dikarenakan baru di akui asetnya di KIB Gedung dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan SK Bupati No 100.3.3.2/433/1.12/2024 sebesar Rp109.152.000,00 dengan tahun pencatatan asetnya di tahun 2024 tetapi tahun perolehan 2021 berdasarkan surat penyerahan dari Yayasan GNI.
- 3) Penambahan Koreksi Kurang Catat KIB Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp35.960.078,57 dikarenakan belum dihitung penyusutannya atas kapitalisasi tahun 2023 yang berasal dari jasa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Koreksi Kurang Catat KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Badan Pendapatan Daerah	593.999,98
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	685.994,00
3	Dinas Perhubungan	448.991,55
4	Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi	27.405.686,83
5	Kecamatan Balung	385.026,11
6	Kecamatan Kaliwates	2.915.547,25

NO	OPD	JUMLAH
7	Kecamatan Mayang	485.569,32
8	Kecamatan Sumbersari	3.039.263,53
JUMLAH		35.960.078,57

- 4) Penambahan Koreksi KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.528.056,70 merupakan penambahan koreksi yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pendidikan.
- 5) Penambahan Koreksi angka dibelakang koma sebesar Rp0,01.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp4.735.735.650,67 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan Koreksi salah catat dikarenakan rehab berpindah ke induk yang lain sebelum tahun 2024 sebesar Rp1.026.943,20 pada Dinas Pendidikan.
- 2) Pengurangan Koreksi Lebih Catat pada Puskesmas dikarenakan adanya penggabungan bangunan menjadi satu induk di KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp153.288.947,33 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Koreksi Lebih Catat KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Puskesmas Cakru	4.985.760,00
2	Puskesmas Kasiyan	9.000.000,00
3	Puskesmas Mayang	29.763.600,00
4	Puskesmas Mumbulsari	22.236.324,32
5	Puskesmas Sabrang	23.645.054,12
6	Puskesmas Semboro	1.200.937,50
7	Puskesmas Silo I	14.317.105,31
8	Puskesmas Sukorambi	24.826.059,42
9	Puskesmas Sumberbaru	23.314.106,67
JUMLAH		153.288.947,33

- 3) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan SK SEKDA No 100.3.3.5/83/SEKDA/1.12/2024, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan SK Bupati No 100.3.3.5/441/SEKDA/1.12/2024, dan Puskesmas Kasiyan bersarkan SK SEKDA No 188.4/56/SEKDA/1.12/2024 sebesar Rp165.012.720,00terinci sebagai berikut:

Tabel Penghapusan KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.000.000
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	57.012.720
3	Puskesmas Kasiyan	99.000.000

JUMLAH	165.012.720,00

- 4) Pengurangan Reklasifikasi Keluar KIB Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-Lain – Aset Rusak sebesar Rp26.847.000,00 pada Dinas Sosial.
- 5) Pengurangan Reklasifikasi Keluar KIB Gedung dan Bangunan ke Kemitraan Sebesar Rp4.389.560.040,14

Tabel Reklasifikasi KIB Gedung dan Bangunan

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Umum	1.579.862.418,98
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.809.697.621,16
JUMLAH		4.389.560.040,14

5.3.1.3.10 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
3.205.257.337.245,71	2.998.928.522.623,74	206.328.814.621,97	6,88

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.205.257.337.245,71 dan Rp2.998.928.522.623,74. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp206.328.814.621,97 atau sebesar 6,88 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.205.257.337.245,71 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	2.998.928.522.623,74
Penambahan Tahun 2024	Rp	206.338.356.621,97
Jumlah	Rp	3.205.266.879.245,71
Pengurangan Tahun 2024	Rp	9.542.000,00
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	3.205.257.337.245,71

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp206.338.356.621,97 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Jalan, Irigrasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp205.749.289.495,72.
- 2) Penambahan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp574.834.466,25 merupakan penambahan hibah yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp346.078.458,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA dengan tahun perolehan 2021 dan penambahan hibah yang

berasal dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi sebesar Rp228.756.008,25 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

- 3) Penambahan Koreksi KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.232.660,00 merupakan penambahan koreksi yang berasal dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar Rp9.542.000,00 merupakan pengurangan Hibah sebagian Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9.542.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA tahun perolehan 2008.

5.3.1.3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
4.213.588.114,50	1.504.307.951,25	2.709.280.163,25	180,10

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.213.588.114,50 dan Rp1.504.307.951,25. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Penyusutan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.709.280.163,25 atau sebesar 180,10 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.213.588.114,50 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1.504.307.951,25
Penambahan Tahun 2024	Rp	2.709.530.163,25
Jumlah	Rp	4.213.838.114,50
Pengurangan Tahun 2024	Rp	250.000,00
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2024	Rp	4.213.588.114,50

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.709.530.163,25 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp2.070.510.413,25.
- 2) Penambahan Koreksi Kurang Catat KIB Aset Tetap Lainnya sebesar Rp639.019.750,00 merupakan penambahan koreksi dikarenakan belum dihitung penyusutannya di tahun 2023 berupa Alat Musik Modern pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebesar dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Koreksi Kurang Catat KIB Aset Tetap Lainnya

NO	OPD	JUMLAH
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.750.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	632.269.750,00
JUMLAH		639.019.750,00

Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp250.000,00 merupakan Pengurangan Koreksi Lebih Catat karena kesalahan perhitungan tahun 2023 KIB Aset Tetap Lainnya sebesar Rp250.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

5.3.1.4 Aset Lainnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
172.333.449.187,41	323.090.567.039,14	(150.757.117.851,73)	(46,66)

Nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp172.333.449.187,41 dan Rp323.090.567.039,14. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp(150.757.117.851,73) atau sebesar 46,66 persen.

Perhitungan nilai buku Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp172.333.449.187,41 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	323.090.567.039,14
Penambahan Tahun 2024	Rp	(94.649.563.163,72)
Jumlah	Rp	228.441.003.875,42
Pengurangan Tahun 2024	Rp	56.107.554.688,01
Nilai Buku Aset Lainnya Tahun 2024	Rp	172.333.449.187,41

Mutasi Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Aset Lainnya

NO	JENIS ASET LAINNYA	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	104.750.000,00	0,00	0,00	104.750.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.428.624.651,00	36.892.326.431,23	1.528.000.000,00	40.792.951.082,23
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	1.528.000.000,00	4.658.822.018,33	1.528.000.000,00	4.658.822.018,33
3	Aset Tidak Berwujud	13.459.877.529,00	1.070.042.050,00	155.068.200,00	14.374.851.379,00
	<i>Akumulasi Amortisasi</i>	10.842.296.422,60	1.252.330.033,20	177.628.000,00	11.916.998.455,80
4	Aset Lain-Lain :	317.188.606.727,74	22.705.807.098,14	56.215.864.688,01	283.678.549.137,87
	<i>Akumulasi Penyusutan</i>	720.995.446,00	149.406.586.691,56	85.750.200,00	150.041.831.937,56
	Nilai Perolehan Aset Lainnya	336.181.858.907,74	60.668.175.579,37	57.898.932.888,01	338.951.101.599,10
	Nilai Buku Aset Lainnya	323.090.567.039,14	(94.649.563.163,72)	56.107.554.688,01	172.333.449.187,41



Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp60.668.175.579,37 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp710.617.050,00 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2024. Adapun rincian penambahan Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 150 Penambahan Belanja Modal Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Dari Belanja Modal			
1	Aset Tidak Berwujud	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	79.600.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah	294.544.050,00
3	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Silo 1	57.255.000,00
4	Aset Tidak Berwujud	Dinas Komunikasi dan Informatika	279.218.000,00
SUB TOTAL			710.617.050,00

2. Penambahan Koreksi Tahun 2024 sebesar Rp193.425.000,00 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari Koreksi dari Jasa Pemeliharaan Software. Adapun rincian penambahan Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 151 Penambahan Koreksi Tahun 2024 Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
Penambahan Koreksi Dari Jasa Pemeliharaan Software			
1	Aset Tidak Berwujud	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	59.000.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	74.925.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	Dinas Kesehatan	59.500.000,00
SUB TOTAL			193.425.000,00

3. Nilai Penambahan dari Reklasifikasi antar akun sebesar Rp44.138.373.030,43 merupakan penambahan Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Adapun rincian penambahan Reklasifikasi antar Akun pada Aset Lainnya tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 152 Reklasifikasi Antar Akun Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI TANAH			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Bagian Tata Pemerintahan	10.128.267.715,31
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Dinas Perhubungan	2.150.000,00
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	7.815.594.787,00
4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Bagian Umum	1.349.000.000,00
5	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	577.000.000,00

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
SUB TOTAL			19.872.012.502,31
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	81.115.000,00
2	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Ajung	58.159.951,00
3	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Ambulu	15.400.000,00
4	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Andongsari	27.044.125,00
5	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Arjasa	7.799.000,00
6	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Balung	67.349.813,19
7	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Bangsalsari	17.882.300,00
NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
8	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Kaliwates	22.491.500,00
9	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Karangduren	23.702.486,97
10	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Kasiyan	10.411.000,00
11	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Kencong	16.248.500,00
12	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Kemuningsari	6.600.000,00
13	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Jember Kidul	76.566.676,00
14	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Klatakan	485.962.825,00
15	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Ledokombo	5.335.000,00
16	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Lojejer	50.470.025,00
17	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Mangli	48.760.000,00
18	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Mayang	19.620.494,56
19	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Mumbulsari	22.213.950,00
20	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Nogosari	1.472.000,00
21	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Pakusari	10.800.000,00
22	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Paleran	23.050.000,00
23	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Patrang	9.559.000,00
24	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Puger	3.877.500,00
25	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Rowotengah	10.046.000,00
26	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sabrang	24.860.025,00
27	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Rambipuji	60.737.650,00
28	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Semboro	19.692.875,00
29	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Silo 1	3.650.000,00
30	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sukorambi	50.324.875,00
31	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sukorejo	21.643.260,00
32	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Cakru	16.245.000,00
33	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Curahnongko	2.000.000,00
34	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Jenggawah	27.106.000,00
35	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Gumukmas	476.760.892,00
36	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Jelbuk	44.808.025,00
37	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Gladakpakem	16.254.000,00
38	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sukowono	122.069.580,77
39	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sumberbaru	99.907.301,00
40	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Sumberjambe	2.985.000,00
41	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Summersari	307.988.403,82

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
42	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Tanggul	152.804.307,50
43	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Tempurejo	9.519.000,00
44	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Umbulsari	450.000,00
45	Aset Lain-Lain Lainnya	Puskesmas Wuluhan	511.597.369,39
46	Aset Lain-Lain Lainnya	Dinas Kesehatan	327.035.888,00
47	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Tanggul	49.500.000,00
SUB TOTAL			3.469.876.599,20
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Sosial	118.560.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Bagian Umum	9.674.640.227,95
NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.345.673.700,97
SUB TOTAL			17.138.873.928,92
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	2.013.110.000,00
SUB TOTAL			2.013.110.000,00
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	61.000.000,00
2	Aset Tidak Berwujud	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	55.500.000,00
SUB TOTAL			116.500.000,00
PENAMBAHAN REKLASIFIKASI DARI KEMITRAAN PIHAK KETIGA			
1	Aset Rusak Berat/ Usang	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA	1.528.000.000,00
SUB TOTAL			1.528.000.000,00
TOTAL			44.138.373.030,43

4. Terdapat Penambahan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.252.330.033,20 merupakan penambahan yang berasal dari beban penyusutan tahun 2024 sebesar Rp1.192.165.953,20, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp11.920.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, penambahan kurang catat sebesar Rp14.875.000,00 pada Dinas Perhubungan, penambahan koreksi kurang catat sebesar Rp33.369.080,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Soebandi yang belum dihitung pada tahun sebelumnya.
5. Terdapat Akumulasi Aset Lain-lain sebesar Rp149.406.586.691,56
6. Terdapat Penambahan Akumulasi Kemitraan Pihak Ketiga sebesar Rp4.658.822.018,33

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lainnya tahun 2024 sebesar Rp57.898.932.888,01 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang tahun 2024 merupakan Penghapusan dari Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp2.660.782.100,01 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengurangan Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	2.409.217.800,00
2	Aset Lain-Lain Lainnya	Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung	251.564.300,01
TOTAL			2.660.782.100,01

- Penghapusan Aset Rusak Berat/Usang dan Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp2.660.782.100,01 berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/326/1.12/2024 Tanggal 17 Juli 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/409/1.12/2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
2. Nilai Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihilangkan sebelum tahun 2024 sebesar Rp20.612.001.851,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihilangkan yang berasal dari Penghapusan Hibah ke Kelompok Tani pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/276/1.12/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Tanggul Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/278/1.12/2024 tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Balung Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/299/1.12/2024 tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Gumukmas Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/352/1.12/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Silo Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/371/1.12/2024 tanggal 3 September 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Ajung Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.



- Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/370/1.12/2024 tanggal 3 September 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Ambulu Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/374/1.12/2024 tanggal 6 September 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Bangsalsari Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/419/1.12/2024 tanggal 26 November 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Balai Penyuluh Pertanian Arjasa, Sumpersari, dan Sumberjambe Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Nilai Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihibahkan sebelum tahun 2024 sebesar Rp30.585.215.237,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihibahkan yang berasal dari Penghapusan Hibah ke Pemerintah Desa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/228/1.12/2024 tanggal 3 April 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Barat Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/231/1.12/2024 tanggal 16 April 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Timur Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/270/1.12/2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Selatan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/274/1.12/2024 tanggal 3 Juni 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Utara Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/300/1.12/2024 tanggal 27 Juni 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Utara



Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.

- Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/353/1.12/2024 tanggal 5 Agustus 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Barat Tahap II Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/375/1.12/2024 tanggal 6 September 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Timur Tahap II Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 - Berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 100.3.3.2/420/1.12/2024 tanggal 26 November 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan Kluster Jember Utara Tahap II Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
4. Nilai Pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihibahkan sebelum tahun 2024 sebesar Rp1.179.414.500,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah/Aset Yang Telah Dihibahkan yang berasal dari Penghapusan Hibah ke Lembaga Swasta pada Dinas Pendidikan berdasarkan SK Bupati Jember Nomor : 188.45/220/1.12/2024 tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penghapusan Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
 5. Nilai Pengurangan Koreksi Tahun 2024 ke Jasa Pemeliharaan sebesar Rp97.813.200,00 merupakan pengurangan Aset Tidak Berwujud pada Badan Pendapatan Daerah.
 6. Pengurangan dari Reklasifikasi Antar Akun sebesar Rp1.235.706.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap antar akun/antar KIB. Rincian pengurangan Aset Tetap-Aset Lainnya dari Reklasifikasi antar Akun disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. 153 Pengurangan Reklasifikasi Antar Akun Aset Tetap-Aset Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
REKLAS KE PERALATAN DAN MESIN			
1	Aset Lain-Lain Lainnya	Dinas Kesehatan	1.101.151.000,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	77.300.000,00
3	Aset Tidak Berwujud	Puskesmas Silo I	57.255.000,00
SUB TOTAL			1.235.706.000,00

7. Pengurangan reklasifikasi Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Lain-Lain sebesar Rp1.528.000.000,00 merupakan pengurangan yang berasal dari pengurangan reklasifikasi

Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.

8. Terdapat Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.528.000.000,00 merupakan pengurangan yang berasal dari pengurangan reklasifikasi Kemitraan Pihak Ketiga ke Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.
9. Terdapat Pengurangan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp177.628.000,00 merupakan pengurangan yang berasal dari pengurangan koreksi lebih catat karena kesalahan perhitungan tahun sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah.
10. Terdapat pengurangan akumulasi Aset Lain-lain sebesar Rp1.264.201.200,00

5.3.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
104.750.000,00	104.750.000,00	0,00	0,00

Nilai buku Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp104.750.000,00 dan Rp104.750.000,00. Tidak terdapat perubahan nilai Aset Lainnya- Tagihan Penjualan Angsuran pada tahun 2024.

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	104.750.000,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	0,00
Jumlah	Rp	104.750.000,00
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0,00
Nilai buku AL-Tagihan Penjualan Angsuran	Rp	104.750.000,00

5.3.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
40.792.951.082,23	5.428.624.651,00	35.364.326.431,23	651,44

Nilai Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.792.951.082,23 dan Rp5.428.624.651,00. Terjadi peningkatan nilai Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp35.364.326.431,23 atau sebesar 651,44 persen. Mutasi nilai Aset Lainnya- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp40.792.951.082,23 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	5.428.624.651,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	36.892.326.431,23
Jumlah	Rp	42.320.951.082,23

Pengurangan Tahun 2024	Rp	1.528.000.000,00
Nilai Al-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp	40.792.951.082,23

Aset yang berada dalam kemitraan pihak ketiga merupakan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang masih dalam status Kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk Bangun Guna Serah (BSG). Adapun aset tanah dalam kemitraan pihak ketiga adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan Jember Bussines Centre (JBC) berada di Jl. Trunojoyo Kecamatan Kaliwates Jember adalah sebesar Rp2.041.109.000,00. Pemerintah Kabupaten Jember melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Setia Guna Cipta Graha (PT. SGCG) yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 21 April 2004, perjanjian dimaksudkan untuk peningkatan pendayagunaan tanah hak pakai milik Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya agar tanah tersebut lebih bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan PAD. Ruang Lingkup PKS adalah pembangunan pusat perniagaan yaitu pembangunan suatu sentra bisnis seluas 5.000 m² diatas tanah seluas 1.976 m² yang merupakan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Jember sebagaimana sertifikat HP No. 64 Kelurahan Jember Kidul, nilai investasi sebesar kurang lebih Rp.8.000.000.000,00termasuk biaya pembongkaran bangunan yg ada. Pemerintah Kabupaten Jember selaku Pihak Pertama berhak untuk menerima kontribusi sebesar Rp20.000.000,00selama 25 tahun dengan total senilai Rp500.000.000,00yang harus dibayar dimuka seluruhnya dan sekaligus oleh PT. SGCG selaku Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 tahun sejak dimulainya pembangunan pusat perniagaan Jember Bussines Centre (JBC). Pemerintah Kabupaten Jember berkewajiban merubah status tanah untuk pusat perniagaan yang semula SHP menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten Jember dan mengizinkan Pihak Kedua untuk mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL tersebut. Selama masa Kerjasama, Pihak Kedua berhak menjual, menyewakan atau melakukan perbuatan hukum apapun juga yang bermaksud mengusahakan pusat perniagaan sehingga menjadi sentra kegiatan ekonomi produktif. Berdasarkan data dari BPN telah terbit HGB diatas HPL sebanyak 16 bidang yang berlaku selama 25 tahun dan berakhir pada tahun 2029.
2. Tanah yang digunakan untuk pembangunan Pasar Kencong Baru berada di Kecamatan Kencong Jember adalah sebesar Rp1.859.515.651,00. Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) terkait pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah yang diituturkan dalam Memorandum of Understanding Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Sroya Nomor 15 Tahun 2008 dan Nomor 070/BS/Permh-Pro/V/08 tanggal 15 Mei 2008. Selanjutnya kedua belah pihak

menindaklanjuti dengan perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Surroya Nomor 23 Tahun 2008 dan Nomor 190/BS/Permh-Pro/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008. Pada saat perjanjian tersebut aset tanah yang dijadikan obyek pemanfaatan merupakan aset tanah milik PT Perkebunan Nasional XI yang dipinjamkaikan kepada Pemerintah Kabpaten Jember, namun pada tahun 2015 tanah seluas 40.000 m² tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Berita Acara Tukar Menukar Aset antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Perkebunan Nusantara XI Nomor 5.1/MP/2015 dan Nomor XX-BA/15.000 tanggal 9 Februari 2015. Tanah PTPN XI yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jember berada dalam 4 Bidang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) luas keseluruhan 239.801 m² dengan rincian sebagai berikut:

- a) SHGB No. 83 seluas 58.960 m²
- b) SHGB No. 86 seluas 70.570 m²
- c) SHGB No. 201 seluas 47.661 m²
- d) SHGB No. 369 seluas 63.610 m²

Dewan Komisaris PTPN XI telah menerbitkan surat persetujuan penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tanah PTPN XI melalui surat No. DK-NUS11/14.069 tanggal 28 November 2014, sehingga status tanah sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jember.

Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa CV Bintang Surroya (BS) membangun Pasar Kencong dengan jangka waktu 18 bulan sampai dengan bulan Februari 2010. Kemudian investor berhak mengelola/mendayagunakan pasar tersebut dalam jangka waktu satu tahun dan/atau sampai dengan kios/los terjual 100 persen dengan kesepakatan dalam hal mana yang tercapai terlebih dahulu, untuk kemudian setelah itu investor menyerahkan kembali tanah dan bangunan pasar dan sarana pendukungnya beserta pendayagunaannya kepada Pemerintah Kabupaten Jember. Apabila sampai dengan masa pengelolaan berakhir masih terdapat kios/los yang belum terjual, pihak investor tetap berkewajiban melakukan penjualan kios/los sampai dengan 100 persen. Nilai investasi pembangunan Pasar Kencong Baru kurang lebih sebesar Rp35.254.700.000,00. Dalam Perjalanannya karena kesulitan keuangan pihak investor tidak dapat melanjutkan pembangunan sehingga minta perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan Pasar Kencong Baru sekaligus mengajukan mitra kerja investor yaitu PT Artha Wahana Persada (AWP) untuk menyelesaikan dan mengelola Pasar Kencong Baru. Perikatan antara CV BS dengan PT AWP dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Proyek Pembangunan Pasar Kencong Nomor BS/11/IX/2012 dan Nomor A WP/36/IX/2012 tanggal 17 September 2012. Atas pengajuan ini telah disetujui oleh Bupati Jember dengan tetap mengacu pada Perjanjian

Kerjasama Bangun Guna Serah Pasar Kencong di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan CV Bintang Surroya Nomor 23 Tahun 2008 dan Nomor 190/BS/Permh-Pro/VIII/08 tanggal 25 Agustus 2008. Adapun proses kelanjutan penyelesaian pembangunan Pasar Kencong Baru diberikan dalam jangka waktu 18 bulan sejak 30 September 2012 sesuai surat persetujuan dari Bupati Jember sampai dengan bulan Maret 2014, dengan masa pengelolaan diberikan selama 12 bulan sejak Pasar Baru Kencong 100 persen dibangun. Berdasarkan Laporan akhir kegiatan pembangunan Pasar Kencong Baru diketahui bahwa pasar telah selesai 100 persen pada minggu ke-2 bulan Mei 2013, namun Karena situasi dan kondisi pedagang saat itu, pedagang baru menempati kios dan los mulai bulan Maret 2014, dan PT AWP mulai mengelola Pasar Kencong Baru terhitung sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang.

3. Aset Tanah dalam status disewakan sebesar Rp19.872.012.502,31 merupakan pengurangan reklasifikasi ke Aset Lainnya (Kemitraan Pihak Ke Tiga) sebanyak 40 (empat puluh) bidang tanah pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang tanah sebesar Rp10.128.267.715,31, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 34 (tiga puluh empat) bidang tanah sebesar Rp7.815.594.787,00, pada Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) bidang tanah sebesar Rp2.150.000,00, pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) bidang sebesar Rp1.349.000.000,00 serta pada Dinas Pemuda Olah Raga sebanyak 1 (satu) bidang sebesar Rp577.000.000,00
4. Gedung yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp17.020.313.928,92 merupakan bangunan yang disewakan pada Bagian Umum sebesar Rp9.674.640.227,95 dan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga sebesar Rp7.345.673.700,97

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
14.374.851.379,00	13.459.877.529,00	914.973.850,00	6,80

Nilai buku Aset Lainnya- Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.374.851.379,00 dan Rp13.459.877.529,00. Terjadi peningkatan nilai buku Aset Lainnya dibandingkan tahun lalu sebesar Rp914.973.850,00 atau sebesar 6,80 persen. Mutasi nilai Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.374.851.379,00 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 5. 154 Rincian Aset Tak Berwujud

No	OPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00



No	OPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Bagian Organisasi	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00
3	Bagian Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5	Sekretarian Dewan Atau Dprd	58.025.000,00	74.925.000,00	0,00	132.950.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	465.667.600,00	0,00	0,00	465.667.600,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	640.431.000,00	0,00	0,00	640.431.000,00
8	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	188.250.000,00	138.600.000,00	0,00	326.850.000,00
9	Badan Pendapatan Daerah	1.781.328.750,00	294.544.050,00	97.813.200,00	1.978.059.600,00
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	508.000.000,00	0,00	0,00	508.000.000,00
11	Dinas Kesehatan	664.232.500,00	59.500.000,00	0,00	723.732.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
13	Dinas Pendidikan	44.574.000,00	0,00	0,00	44.574.000,00
14	Dinas Perhubungan	507.379.000,00	0,00	0,00	507.379.000,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	94.600.000,00
16	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.184.644.000,00	279.218.000,00	0,00	2.463.862.000,00
18	Dinas Perikanan	24.950.000,00	0,00	0,00	24.950.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	545.200.000,00	0,00	0,00	545.200.000,00
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	4.295.080.679,00	61.000.000,00	0,00	4.356.080.679,00
21	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.245.415.000,00	55.500.000,00	0,00	1.300.915.000,00
22	Puskesmas Tanggul	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
23	Puskesmas Silo 1	0,00	57.255.000,00	57.255.000,00	0,00
TOTAL		13.459.877.529,00	1.070.042.050,00	155.068.200,00	14.374.851.379,00

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
11.916.998.455,80	10.842.296.422,60	1.074.702.033,20	9,91

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.916.998.455,80 dan Rp10.842.296.422,60. Terjadi kenaikan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.074.702.033,20 atau sebesar 9,91 persen.

Perhitungan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.916.998.455,80 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	10.842.296.422,60
Penambahan Tahun 2024	Rp	1.252.330.033,20
Jumlah	Rp	12.094.626.455,80
Pengurangan Tahun 2024	Rp	177.628.000,00
Nilai Ak. Amortisasi ATB	Rp	11.916.998.455,80

Adapun rincian nilai akumulasi amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.916.998.455,80 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 155 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	AMORTISASI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN 2024 (Rp)	KOREKSI/REK LAS 2024 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
1	Bagian Hukum	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00
2	Bagian Organisasi	69.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00
3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4	Sekretariat Dewan	58.025.000,00	14.985.000,00	0,00	0,00	73.010.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	444.667.600,00	0,00	0,00	84.000.000,00	360.667.600,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	466.098.600,00	87.166.200,00	0,00	0,00	553.264.800,00
7	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	128.650.000,00	39.640.000,00	11.920.000,00	0,00	180.210.000,00
8	Badan Pendapatan Daerah	1.586.301.750,00	130.169.720,00	0,00	177.628.000,00	1.538.843.470,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	508.000.000,00	0,00	0,00	0,00	508.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	664.232.500,00	11.900.000,00	0,00	0,00	676.132.500,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	26.400.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	35.200.000,00
12	Dinas Pendidikan	31.359.000,00	3.735.000,00	0,00	0,00	35.094.000,00
13	Dinas Perhubungan	433.004.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	462.754.000,00
14	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	94.600.000,00	0,00	0,00	0,00	94.600.000,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00
16	Dinas Komunikasi	813.564.800,00	494.772.400,00	84.000.000,00	0,00	1.392.337.200,00



NO	OPD	SALDO AWAL (Rp)	AMORTISASI 2024 (Rp)	PENAMBAHAN 2024 (Rp)	KOREKSI/REK LAS 2024 (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
	dan Informatika					
17	Dinas Perikanan	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00
18	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	339.800.000,00	81.700.000,00	0,00	0,00	421.500.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	3.839.128.172,60	238.922.633,20	33.369.080,00	0,00	4.111.419.885,80
20	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	1.245.415.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	1.300.915.000,00
TOTAL		10.842.296.422,60	1.192.165.953,20	144.164.080,00	261.628.000,00	11.916.998.455,80

5.3.1.4.5 Aset Lain-lain

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
133.636.717.200,31	316.467.611.281,74	(182.830.894.081,43)	(57,77)

Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp133.636.717.200,31 dan Rp316.467.611.281,74. Terjadi penurunan nilai buku Aset Lain-lain dibandingkan tahun lalu sebesar Rp182.830.894.081,43 atau sebesar 57,77 persen. Perhitungan nilai buku Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.636.717.200,31 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	316.467.611.281,74
Penambahan Tahun 2024	Rp	(127.841.432.639,42)
Jumlah	Rp	188.626.178.642,32
Pengurangan Tahun 2024	Rp	54.989.461.442,01
Nilai Buku AL-Aset Lain-lain Tahun 2024	Rp	133.636.717.200,31

Adapun rincian nilai Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp133.636.717.200,31 dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 156 Rincian Aset Lainnya-Aset Lain-lain

NO	JENIS	SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Lain-Lain :				
	a. Aset Rusak Berat/Usang	24.964.800.455,00	17.353.435.498,94	2.486.517.800,00	39.831.718.153,94
	<i>Ak. Penyusutan</i>	512.398.946,00	40.182.862.439,61	1.226.403.246,00	39.468.858.139,61
	<i>Nilai Buku</i>	24.452.401.509,00	223.480.438,02	1.260.114.554,00	362.860.014,33
	Fasilitas TDF	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	154.541.272.838,60	2.013.110.000,00	52.376.631.588,00	104.177.751.250,60



NO	JENIS	SALDO	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah Dihilangkan				
	c. Aset Lain-Lain Lainnya	137.682.533.434,14	3.339.261.599,20	1.352.715.300,01	139.669.079.733,33
	Ak. Penyusutan	208.596.500,00	110.364.377.297,95	0,00	110.572.973.797,95
	Nilai Buku	137.473.936.934,14	141.553.912,83	0,00	29.096.105.935,38
Nilai Perolehan Aset Lain-lain		317.188.606.727,74	22.705.807.098,14	56.215.864.688,01	283.678.549.137,87
Nilai Buku Aset Lain-lain		316.467.611.281,74	(127.841.432.639,42)	54.989.461.442,01	133.636.717.200,31

Bahwa Akumulasi Penyusutan yang disajikan pada Aset Lain-lain merupakan Akumulasi Penyusutan atas Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya dengan membawa Akumulasi Penyusutannya sedangkan untuk Aset Tetap yang direklasifikasi ke Aset Lainnya sebelum berlakunya Sistem Akuntansi berbasis akrual tidak disusutkan.

Penjelasan rinci atas penambahan Nilai Aset Lain-lain sebesar Rp22.705.807.098,14 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.706.875.498,94 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang yang berasal Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 157 Reklasifikasi Barang Aset Rusak Berat/Usang

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	Inspektorat	81.115.000,00
2	Aset Rusak Berat/Usang	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	540.000.000,00
3	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Hukum	142.243.950,00
4	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	634.014.520,00
5	Aset Rusak Berat/Usang	Bagian Administrasi Pembangunan	106.617.857,14
6	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Kesehatan	166.593.548,38
7	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Perhubungan	258.758.000,00
8	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Sosial	1.986.720.203,00
9	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Tenaga Kerja	278.715.000,00
10	Aset Rusak Berat/Usang	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	242.890.733,33
11	Aset Rusak Berat/Usang	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	2.799.151.273,00
12	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Arjasa	364.444.500,00
13	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Balung	11.900.000,00
14	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Kencong	59.998.800,00
15	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Mumbulsari	53.020.000,00
16	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Semboro	76.125.000,00
17	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Sumberjambe	153.788.090,00
18	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Tanggul	65.358.080,00
19	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Gladapakem	194.542.633,44



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
20	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Gumukmas	337.932.372,33
21	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Jelbuk	47.706.049,00
22	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Kalisat	617.340.477,14
23	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Kaliwates	14.300.000,00
24	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Karangduren	203.040.374,50
25	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Kasiyan	101.793.067,00
26	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Kemuingsari	308.211.794,78
27	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Jember Kidul	90.638.644,00
28	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Ledokombo	1.084.864.846,18
29	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Mangli	185.345.094,00
30	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Mumbulsari	146.626.144,01
31	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Nogosari	73.146.446,33
32	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Pakusari	195.676.676,37
33	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Paleran	305.066.171,52
34	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Rambipuji	161.498.829,46
35	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Rowotengah	547.667.243,28
36	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Sabrang	355.480.994,11
37	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Semboro	343.270.058,03
38	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Sukorejo	424.924.680,74
39	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Sumbersari	368.778.617,41
40	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Tempurejo	250.412.390,94
41	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Wuluhan	125.578.463,95
42	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Umbulsari	77.527.000,00
43	Aset Rusak Berat/Usang	Puskesmas Sumberbaru	768.476.725,57
44	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Wuluhan	7.952.250,00
45	Aset Rusak Berat/Usang	Kecamatan Jenggawah	347.622.900,00
SUB TOTAL			15.706.875.498,94

2. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.339.261.599,20 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5. 158 Reklasifikasi Barang Aset Lain-Lain Lainnya

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
1	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Ajung	58.159.951,00
2	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Ambulu	15.400.000,00
3	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Andongsari	27.044.125,00
4	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Arjasa	7.799.000,00
5	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Balung	67.349.813,19
6	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Bangsalsari	17.882.300,00
7	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Kaliwates	22.491.500,00
8	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Karangduren	23.702.486,97
9	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Kasiyan	10.411.000,00



NO	JENIS SUB AKUN	O P D	NILAI (Rp)
10	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Kencong	16.248.500,00
11	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Kemuningsari	6.600.000,00
12	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Jember Kidul	76.566.676,00
13	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Klatakan	485.962.825,00
14	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Ledokombo	5.335.000,00
15	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Lojejer	50.470.025,00
16	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Mangli	48.760.000,00
17	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Mayang	19.620.494,56
18	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Mumbulsari	22.213.950,00
19	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Nogosari	1.472.000,00
20	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Pakusari	10.800.000,00
21	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Paleran	23.050.000,00
22	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Patrang	9.559.000,00
23	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Puger	3.877.500,00
24	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Rowotengah	10.046.000,00
25	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sabrang	24.860.025,00
26	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Rambipuji	60.737.650,00
27	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Semboro	19.692.875,00
28	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Silo 1	3.650.000,00
29	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sukorambi	50.324.875,00
30	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sukorejo	21.643.260,00
31	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Cakru	16.245.000,00
32	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Curahnongko	2.000.000,00
33	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Jenggawah	27.106.000,00
34	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Gumukmas	476.760.892,00
35	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Jelbuk	44.808.025,00
36	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Gladapakem	16.254.000,00
37	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sukowono	122.069.580,77
38	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sumberbaru	99.907.301,00
39	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sumberjambe	2.985.000,00
40	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Sumbersari	307.988.403,82
41	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Tanggul	152.804.307,50
42	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Tempurejo	9.519.000,00
43	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Umbulsari	450.000,00
44	Aset Lain-Lainnya	Puskesmas Wuluhan	511.597.369,39
45	Aset Lain-Lainnya	Dinas Kesehatan	327.035.888,00
SUB TOTAL			3.339.261.599,20

3. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp118.560.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang pada Dinas Sosial.
4. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.013.110.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam

Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan yang berasal reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

5. Nilai Penambahan Reklasifikasi dari Kemitraan Pihak Ketiga sebesar Rp1.528.000.000,00 merupakan penambahan Aset Lain-lain- Aset Rusak Berat/Usang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA.

Sedangkan Penjelasan rinci atas Pengurangan Nilai Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp56.215.864.688,01 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Penghapusan Barang Aset Rusak Berat merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lain- Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp2.409.217.800,00 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung.
2. Nilai Pengurangan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.300.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain-Aset Rusak Berat/Usang yang berasal dari Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan.
3. Nilai Pengurangan Hibah sebelum tahun 2024 sebesar Rp52.376.631.588,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel Pengurangan Hibah Barang Aset Lain-Lain Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan

NO	JENIS SUB AKUN	O P D	PENGHAPUSAN BARANG
1	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	20.612.001.851,00
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	30.585.215.237,00
3	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah / Aset Yang Telah D hibahkan	Dinas Pendidikan	1.179.414.500,00
SUB TOTAL			52.376.631.588,00

4. Nilai Penghapusan Barang merupakan Penghapusan dari Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain Lainnya sebesar Rp251.564.300,01 pada Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung.
5. Nilai Pengurangan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.101.151.000,00 merupakan Pengurangan Aset Lain-lain- Aset Lain-Lain Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan.



5.3.1.4.6 Akumulasi Aset Lain-lain

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Presentase
150.041.831.937,56	720.995.446,00	149.320.836.491,56	20.710,37

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp150.041.831.937,56 dan Rp720.995.446,00. Terjadi Kenaikan Akumulasi Aset Lain-lain dibandingkan tahun lalu sebesar Rp149.320.836.491,56 atau sebesar 20.710,37 persen. Perhitungan Akumulasi Aset Lainnya-Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp150.041.831.937,56 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	720.995.446,00
Penambahan Tahun 2024	Rp	149.406.586.691,56
Jumlah	Rp	150.127.582.137,56
Pengurangan Tahun 2024	Rp	85.750.200,00
Akumulasi Aset Lain-lain Tahun 2024	Rp	150.041.831.937,56

Penambahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp150.041.831.937,56 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 6) Beban Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp247.372.438,45
- 7) Penambahan Koreksi Kurang Catat Aset Lain-lain sebesar Rp128.831.551.505,83 merupakan penambahan koreksi dikarenakan belum dihitung penyusutannya di tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel Koreksi Kurang Catat Aset Lain-lain

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Hukum	36.971.000,00
2	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	818.364.020,00
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	260.292.030,00
4	Bagian Organisasi	156.973.000,00
5	Bagian Administrasi Pembangunan	114.725.833,33
6	Bagian Tata Pemerintahan	5.920.000,00
7	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	44.679.000,00
8	Bagian Umum	3.503.777.064,00
9	Inspektorat	588.863.000,00
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.689.009.568,24
11	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	1.292.405.250,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	547.866.006,32
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	955.804.350,00
14	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	530.058.000,00
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.560.250,00

NO	OPD	JUMLAH
16	Badan Pendapatan Daerah	604.390.351,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	303.082.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	358.349.000,00
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.327.947.750,00
20	Dinas Kesehatan	5.330.763.490,00
21	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Km	841.914.590,42
22	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	6.390.792.327,23
23	Dinas Pendidikan	47.462.977.550,99
24	Dinas Perhubungan	3.304.167.567,25
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	5.295.093.517,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	3.967.957.685,00
27	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	1.879.863.130,29
28	Dinas Sosial	587.284.445,00
29	Dinas Tenaga Kerja	265.031.500,00
30	Dinas Lingkungan Hidup	1.703.391.806,00
31	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	124.685.000,00
32	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	678.695.690,00
33	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.464.381.400,00
34	Dinas Perikanan	196.276.875,00
35	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	51.975.000,00
36	Dinas Komunikasi Dan Informatika	38.950.000,00
37	Satuan Polisi Pamong Praja	4.398.813.600,00
38	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung	474.092.042,99
39	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi	25.868.156.016,41
40	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	694.352.500,00
41	Kecamatan Ajung	240.077.666,66
42	Kecamatan Ambulu	62.398.000,00
43	Kecamatan Arjasa	25.706.000,00
44	Kecamatan Balung	840.000,00
45	Kecamatan Bangsalsari	1.327.947.750,00
46	Kecamatan Gumukmas	79.777.000,00
47	Kecamatan Jelbuk	99.291.000,00
48	Kecamatan Jenggawah	163.608.300,00
49	Kecamatan Jombang	29.305.000,00
50	Kecamatan Kalisat	8.800.000,00
51	Kecamatan Kaliwates	225.178.000,00
52	Kecamatan Kencong	108.473.367,00
53	Kecamatan Ledokombo	68.683.500,00
54	Kecamatan Mayang	73.030.000,00
55	Kecamatan Mumbulsari	90.644.166,67
56	Kecamatan Pakusari	87.600.000,00
57	Kecamatan Panti	89.115.000,00
58	Kecamatan Patrang	348.057.736,00
59	Kecamatan Puger	135.947.400,00



NO	OPD	JUMLAH
60	Kecamatan Rambipuji	134.600.500,00
61	Kecamatan Semboro	71.975.000,00
62	Kecamatan Silo	58.867.000,00
63	Kecamatan Sukorambi	110.382.218,00
64	Kecamatan Sukowono	39.470.000,00
65	Kecamatan Sumberbaru	77.675.000,00
66	Kecamatan Sumberjambe	58.968.255,00
67	Kecamatan Sumpalsari	216.810.663,33
68	Kecamatan Tanggul	216.318.500,00
69	Kecamatan Tempurejo	28.560.500,00
70	Kecamatan Umbulsari	120.889.000,00
71	Kecamatan Wuluhan	185.901.776,70
JUMLAH		128.831.551.505,83

- 8) Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain sebesar Rp20.300.815.747,28 terperinci sebagai berikut:

NO	OPD	JUMLAH
1	Bagian Hukum	142.243.950,00
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	634.014.520,00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	106.617.857,14
4	Inspektorat	81.115.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	540.000.000,00
6	Dinas Kesehatan	493.629.436,38
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sda	1.528.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	258.758.000,00
9	Dinas Sosial	1.984.715.554,00
10	Dinas Tenaga Kerja	278.715.000,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	239.785.133,33
12	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat	2.785.208.600,60
13	Kecamatan Arjasa	364.444.500,00
14	Kecamatan Balung	11.900.000,00
15	Kecamatan Jenggawah	347.622.900,00
16	Kecamatan Kencong	59.998.800,00
17	Kecamatan Mumbulsari	53.020.000,00
18	Kecamatan Semboro	76.125.000,00
19	Kecamatan Sumberjambe	147.151.390,00
20	Kecamatan Tanggul	62.466.664,00
21	Kecamatan Umbulsari	77.527.000,00
22	Kecamatan Wuluhan	7.952.250,00
23	Puskesmas Ajung	58.159.951,00
24	Puskesmas Ambulu	15.400.000,00
25	Puskesmas Andongsari	27.044.125,00
26	Puskesmas Arjasa	7.799.000,00
27	Puskesmas Balung	67.232.773,19
28	Puskesmas Bangsalsari	17.882.300,00



NO	OPD	JUMLAH
29	Puskesmas Cakru	16.245.000,00
30	Puskesmas Curahnongko	2.000.000,00
31	Puskesmas Gladapakem	210.796.633,44
32	Puskesmas Gumukmas	795.768.264,33
33	Puskesmas Jelbuk	92.514.074,00
34	Puskesmas Jenggawah	27.106.000,00
35	Puskesmas Kalisat	617.340.477,14
36	Puskesmas Kaliwates	36.791.500,00
37	Puskesmas Karangduren	226.742.861,47
38	Puskesmas Kasiyan	112.204.067,00
39	Puskesmas Kencong	16.248.500,00
40	Puskesmas Kemuningsari	314.811.794,78
41	Puskesmas Jember Kidul	167.205.320,00
42	Puskesmas Klatakan	369.240.791,67
43	Puskesmas Ledokombo	1.028.173.258,68
44	Puskesmas Lojejer	50.470.025,00
45	Puskesmas Mangli	229.455.094,00
46	Puskesmas Mayang	19.620.494,56
47	Puskesmas Mumbulsari	195.340.094,01
48	Puskesmas Nogosari	74.618.446,33
49	Puskesmas Pakusari	206.476.676,37
50	Puskesmas Paleran	328.116.171,52
51	Puskesmas Patrang	9.559.000,00
52	Puskesmas Puger	3.877.500,00
53	Puskesmas Rambipuji	218.541.479,46
54	Puskesmas Rowotengah	557.713.243,28
55	Puskesmas Sabrang	380.341.019,11
56	Puskesmas Semboro	362.962.933,03
57	Puskesmas Silo I	3.650.000,00
58	Puskesmas Sukorambi	50.324.875,00
59	Puskesmas Sukorejo	440.218.893,88
60	Puskesmas Sukowono	122.069.580,77
61	Puskesmas Sumberbaru	834.343.260,31
62	Puskesmas Sumberjambe	2.985.000,00
63	Puskesmas Sumbersari	652.052.181,73
64	Puskesmas Tanggul	152.804.307,50
65	Puskesmas Tempurejo	259.931.390,94
66	Puskesmas Umbulsari	450.000,00
67	Puskesmas Wuluhan	637.175.833,34
JUMLAH		20.300.815.747,28

- 9) Reklasifikasi dari Gedung Bangunan ke Aset Lain-lain sebesar Rp26.847.000 pada Dinas Sosial



Pengurangan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp85.750.200,0000 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Pengurangan lebih catat dikarenakan terdapat penghapusan pada tahun 2022 sesuai surat Keputusan nomer 188.45/159/1.12/2022 tanggal 18 maret 2022 dan 2023 sesuai surat Keputusan nomer 188.45/160/1.12/2023 tanggal 3 mei 2023 namun akumulasi penyusutan yang mengikutinya tidak dilakukan pengurangan sehingga akumulasi penyusutan melebihi nilai perolehan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Sebesar Rp85.750.200,00

5.3.1.5 Properti Investasi

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
30.343.854.412,90	0,00	30.343.854.412,90	100

Properti investasi merupakan properti yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset, atau keduanya dikelompokkan sebagai properti investasi.

Properti Investasi Kabupaten Jember pada tahun 2024 saat ini secara aplikasi BMD, kode barang properti investasi masih jadi satu kesatuan dengan kemitraan pihak ketiga karena belum tersedianya kode barang Properti Investasi.

Nilai properti investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp35.002.676.431,23 dan Rp0,00 terjadi kenaikan nilai properti investasi sebesar Rp35.002.676.431,23 atau 100 persen merupakan reklasifikasi atas tanah dan bangunan yang disewakan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	0,00
Penambahan Tahun 2024 (Reklasifikasi atas Tanah dan Bangunan yang disewakan)	Rp	35.002.676.431,23
Jumlah	Rp	35.002.676.431,23
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 2024	Rp	(4.658.822.018,33)
Nilai Properti Investasi Tahun 2024	Rp	30.343.854.412,90

Penambahan nilai properti investasi sebesar Rp35.002.676.431,23 yang berasal dari reklasifikasi aset tetap. Reklasifikasi dari aset tetap akibat adanya penetapan perjanjian sewa dan potensi penerimaan pendapatan sewa dari aset tetap tersebut

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Reklasifikasi dari aset tetap tanah	17.982.362.502,31

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
2	Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan	17.020.313.928,92
Jumlah		35.002.676.431,23

Penjelasan atas rincian masing-masing nilai penambahan properti investasi tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

5.3.1.5.1 Properti Investasi Tanah

Nilai properti investasi tanah sebesar Rp17.982.362.502,31 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 159 Rincian Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024

NAMA OPD	PROPERTI INVESTASI TANAH (Rp)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.925.944.787,00
Dinas Perhubungan	2.150.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	577.000.000,00
Bagian Tata Pemerintah	10.128.267.715,31
Bagian Umum	1.349.000.000,00
JUMLAH	17.982.362.502,31

Nilai properti investasi tanah **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebesar Rp5.925.944.787,00 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Satuan	Lokasi
Tanah Akta 44	1970	1	70.000,00	1.779	m ²	Kelurahan Patemon
Tanah Akta 44	1970	1	200.850,00	145.551	m ²	Kelurahan Bintoro - Lingkungan Mojan
Tanah Akta 44	1970	1	206.750,00	4.135	m ²	Kelurahan Antirogo
Tanah Akta 44	1970	1	475.000,00	9.500	m ²	Kelurahan Tegal Besar
Tanah Akta 44	1970	1	741.500,00	14.830	m ²	Kelurahan Tegal Besar
Tanah Akta 44	1970	1	794.800,00	64.919	m ²	Kelurahan Bintoro - Semenggu
Pertanian	2002	1	21.820.000,00	61.681	m ²	Area Sawah/Kulon, Baratan, Kec. Patrang
Masjid Rembangan	2005	1	25.800.000,00	17.386	m ²	Darungan, Kemuning Lor, Arjasa
Tanah Sawah	1970	1	30.000.000,00	3.018	m ²	Jl Jubung, Mangli
Gedung Islamiah	1998	1	34.130.500,00	2.198	m ²	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang
Rumah Penduduk	1970	1	34.310.000,00	47.966	m ²	Kelurahan Bintoro
Tanah Sawah	1970	1	37.620.000,00	3.539	m ²	Jl Jubung, Mangli
Tanah Sawah	1970	1	50.000.000,00	5.000	m ²	Kelurahan Mangli
Rumah Kavling	1970	1	62.313.500,00	8.899	m ²	Kelurahan Bintoro
Pertanian	1996	1	83.744.000,00	2.226	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1996	1	94.428.000,00	2.510	m ²	Jl. Cadika, Gerdu, Sempusari, Kec. Kaliwates
Pertanian	1996	1	101.651.000,00	2.702	m ²	Tanjung, Mangli, Kaliwates
Pertanian	1996	1	110.718.000,00	2.943	m ²	Kelurahan Mangli
Tanah Lapang	2001	1	124.068.500,00	7.990	m ²	Lingk. Jomerto Lor, Jumerto, Patrang
Gedung Islamiah	1998	1	130.031.000,00	9.635	m ²	Jl. Merak Perum. Kedawung Asri - Kelurahan Gebang
Pertanian	1996	1	136.526.000,00	3.629	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1993	1	154.627.000,00	10.709	m ²	Jambutan, Antirogo, Summersari
Pertanian	1996	1	161.017.880,00	4.280	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	1996	1	188.970.000,00	5.023	m ²	Kelurahan Mangli

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Satuan	Lokasi
Pertanian	1996	1	253.151.000,00	6.729	m ²	Tanjung, Mangli, Kaliwates
Tanah Tegal	1970	1	300.000.000,00	234.354	m ²	Semenggu, Bintoro, Patrang
Kebun Tebu	1970	1	300.000.000,00	11.970	m ²	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi
Kebun Tebu	1970	1	301.900.000,00	22.618	m ²	Durjo, Karangpring, Kec. Sukorambi
Pertanian	1996	1	318.537.007,00	8.467	m ²	Kelurahan Mangli
Pertanian	2001	1	379.592.500,00	4.795	m ²	Jl. Hayam Muruk, Sempusari, Kaliwates
Kebun Tebu	1970	1	493.500.000,00	4.875	m ²	Lengkong Barat, Mrawan, Mayang
Kebun Tebu	1970	1	800.000.000,00	62.944	m ²	Dsn Semenggu
Pertanian	2001	1	1.195.000.000,00	2.390	m ²	Kelurahan Mangli
Jumlah			5.925.944.787,00			

Nilai properti investasi tanah **Dinas Perhubungan** sebesar Rp2.150.000,00 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Perluasan Term.Arjasa (Sertifikat No.7)	2000	1	2.150.000	10490 m ²	Terminal Arjasa

Nilai properti investasi tanah **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** sebesar Rp577.000.000,00 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Tanah Bangunan GOR PKPSO Kaliwates Jember	1970	1	577.000.000,00	1790 m ²	Jl.Nusantara Jember

Nilai properti investasi tanah **Bagian Tata Pemerintahan** sebesar Rp10.128.267.715,31 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Jember Sport Garden	2014	1	8.139.937.066,69	19265 m ²	Jember Sport Garden
Jember Sport Garden	2013	1	1.988.330.648,62	34296 m ²	Jember Sport Garden
Jumlah			10.128.267.715,31		

Nilai properti investasi tanah **Bagian Tata Umum** sebesar Rp1.349.000.000,00 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Luas	Lokasi
Wisma Daerah Jbr 1	1989	1	670.000.000,00	3735 m ²	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235
EX. Kantor Dinas Sosial (JKLAB)	1970	1	679.000.000,00	679 m ²	Jl. PB Sudirman No.38, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang
Jumlah			1.349.000.000,00		

5.3.1.5.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Nilai properti investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.020.313.928,92 terinci sebagai berikut :

Tabel 5. 160 Rincian Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

NAMA OPD	PROPERTI INVESTASI GEDUNG DAN BANGUNAN (Rp)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.345.673.700,97
Bagian Umum	9.674.640.227,95
JUMLAH	17.020.313.928,92

Nilai properti investasi Gedung dan Bangunan **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** pada sebesar Rp7.345.673.700,97 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian)	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Lokasi
Bangunan GOR PKPSO Jember	1990	1	4.000.000.000,00	Jl.Nusantara Jember
Rehabilitasi GOR PKPSO Jember	2016	-	1.040.517.550,00	Jl.Nusantara Jember
Rehab 2021 : Rehab Lapangan	2021	-	1.262.183.312,97	Jl.Nusantara Jember
Rehab Bangunan	2022	-	1.042.972.838,00	Jl.Nusantara Jember
Jumlah			7.345.673.700,97	

Nilai properti investasi Gedung dan Bangunan **Bagian Umum** pada sebesar Rp9.674.640.227,95 terinci sebagai berikut :

Keterangan (Rincian) Tambahan Barang	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Lokasi
Gedung Bsg (Balai Serba Guna)	2014	1	2.084.600.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Perencanaan Rehab Gedung Bsg	2015	0	49.500.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Pengawasan Rehab Pagar & Taman Gedung Bsg	2015	0	34.700.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab Pagar & Taman Gedung Bsg	2015	0	1.047.000.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Pembuatan Sumur Bor Dan Tandon Air Bersih Balai Serba Guna Kab. Jember	2017	0	99.250.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab Sedang/Berat Gedung BSG	2018	0	198.450.000,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2021 : Gedung Bsg (Pekerjaan Lantai Paket 1)	2021	0	199.968.120,09	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2021 : Gedung Bsg (Taman)	2021	0	202.421.316,97	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2021 : Gedung Bsg (Lantai Aula Bsg)	2021	0	215.157.946,74	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2021 : Gedung BSG (Pemeliharaan Toilet Dan Pintu BSG)	2021	0	201.216.060,45	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2021 : Gedung Bsg (Pemeliharaan Pagar Belakang Gedung Bsg)	2021	0	176.430.096,70	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Keterangan (Rincian) Tambahan Barang	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Lokasi
Rehab 2022	2022	0	152.049.100,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2023 : Rehab Gedung Balai Serba Guna	2023	0	254.616.500,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Rehab 2023 : Rehab Taman Gedung Balai Serba Guna	2023	0	197.552.590,00	Jl. Nusantara No.2, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Bangunan Kantor Dinas Sosial Lama (Sekarang Menjadi JEKLAB)	1975	1	592.038.500,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Bangunan Kontruksi Bagunan Gedung Dinas Sosial (Rehab)	2010	0	37.600.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Bangunan Kontruksi Penunjang Gedung Kantor (Paving Dinas Sosial)	2011	0	35.045.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Bangunan Pembangunan MCK Dinas Sosial	2012	0	73.230.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Pembangunan Mck Dinas Sosial Dinas Sosial	2012	0	39.703.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Instansi Listrik	2000	0	13.062.200,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Rehabilitasi Pagar Gedung Kantor Di Dinas Sosial Kab. Jember	2016	0	45.045.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Rehabilitasi Ruang Front Office	2016	0	22.586.000,00	Jl.PB.Sudirman Nomor 38,Jember Lor,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember
Konstruksi/Pembelian Wisma Surabaya Prajamukti	2013	1	99.000.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Perencanaan Rehab Atap Dan Pengecatani Wisda Praja Mukti Surabaya	2015	0	31.920.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab Atap Wisda Praja Mukti Surabaya	2015	0	198.900.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab Pengecatan Wisda Praja Mukti Surabaya	2015	0	199.100.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Pengawasan Rehab Atap Dan Pengecatan Wisda Sby	2015	0	21.000.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehabilitasi Gedung Wisda Praja Mukti Surabaya	2016	0	225.600.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab Wisma Daerah Di Surabaya	2017	0	733.484.000,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Atap Paket 1)	2021	0	215.144.991,01	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Jaringan Listrik)	2021	0	167.388.209,73	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Kamar Dan Ruang Paket 1)	2021	0	217.904.763,31	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Kamar Dan Ruang Paket 2)	2021	0	217.904.763,31	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Kamar Dan Ruang Paket 3)	2021	0	216.836.250,27	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya

Keterangan (Rincian) Tambahan Barang	Tahun	Jumlah	Harga Perolehan	Lokasi
(Pemeliharaan Kamar Mandi Wisda)	2021	0	196.114.176,37	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Lantai Paket 1)	2021	0	216.172.577,57	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
(Pemeliharaan Lantai Paket 2)	2021	0	204.714.268,43	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab 2022	2022	0	190.516.375,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab 2023 : Pemeliharaan Gedung Wisma Daerah Prajamukti	2023	0	252.472.950,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Rehab 2023 : Pemeliharaan Taman	2023	0	99.245.472,00	Jl. Gayung Kebonsari No.53-55, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya
Jumlah			9.674.640.227,95	

5.1.3.5.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Penyajian nilai penyusutan properti investasi dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Penghitungan penyusutan aset properti investasi pada Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) pada jenis aset properti investasi non tanah.

Akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(4.658.822.018,33) dengan mutasi perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	4.389.560.040,14
Penambahan Tahun 2024	Rp	269.261.978,19
Jumlah	Rp	4.658.822.018,33
Pengurangan Tahun 2024	Rp	0.00
Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2024	Rp	4.658.822.018,33

Mutasi penambahan akumulasi penyusutan properti investasi tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.389.560.040,14 terinci sebagai berikut :

No	Nama OPD	Jumlah
1	Bagian Umum	1.579.862.418,98
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	2.809.697.621,16
Jumlah		4.389.560.040,14

- b. Penambahan sebesar Rp269.261.978,19 merupakan penambahan dari perhitungan beban penyusutan properti investasi tahun 2024. Beban penyusutan properti investasi telah dihitung secara sistematis. Metode yang digunakan adalah metode garis lurus dengan masa manfaat yang ditetapkan adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Berikut rincian

penambahan beban penyusutan properti investasi tahun 2024 :

No	Nama OPD	Jumlah
1	Bagian Umum	170.653.802,54
2	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	98.608.175,65
Jumlah		269.261.978,19

5.3.2 KEWAJIBAN

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
139.884.670.453,64	73.215.584.795,52	66.669.085.658,12	91,06

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp139.884.670.453,64 dan Rp73.215.584.795,52. Terjadi kenaikan nilai Kewajiban Jangka Pendek dibandingkan tahun lalu sebesar Rp66.669.085.658,12 atau 91,06 persen.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp139.884.670.453,64 sedangkan per 31 Desember 2023 Rp73.215.584.795,52. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 161 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
1	Pendapatan Diterima Dimuka	7.352.084.381,97	0,00	2.097.590.807,00	7.231.101.831,97	2.218.573.357,00
2	Utang Belanja	64.409.938.300,43	(30.595.160,41)	159.242.163.027,60	88.061.963.963,21	135.559.542.204,41
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.453.562.113,12	20.515.000,00	2.080.774.115,01	1.448.296.335,90	2.106.554.892,23
Jumlah		73.215.584.795,52	(10.080.160,41)	163.420.527.949,61	96.741.362.131,08	139.884.670.453,64

5.3.2.1 Pendapatan Diterima Dimuka

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.218.573.357,00	7.352.084.381,97	(5.133.511.024,97)	(69,82)

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.218.573.357,00 dan Rp7.352.084.381,97 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp5.133.511.024,97 atau 69,82 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023.

Saldo pendapatan diterima dimuka pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.218.573.357,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 162 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - Bapenda	1.770.653.914,00	1.370.616.532,00	1.770.653.914,00	1.370.616.532,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi				
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan- Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum - Dinas Perhubungan	5.100.416.749,97	0,00	5.100.416.749,97	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-lain PAD				
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah Bangunan Sewa Lahan Gedung/Bangunan - RS.dr. Soebandi	73.500.000,00	31.500.000,00	73.500.000,00	31.500.000,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri - Kantor Kasda dan Lahan ATM - BPKAD	31.525.000,00	0,00	31.525.000,00	0,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja - RS. Kalisat	14.000.000,00	0,00	6.000.000,00	8.000.000,00
	- Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri - BPKAD	361.988.718,00	695.474.275,00	249.006.168,00	808.456.825,00
Jumlah		7.352.084.381,97	2.097.590.807,00	7.231.101.831,97	2.218.573.357,00

1) Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron - Bapenda

Pajak Reklame - Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, merupakan pendapatan yang diterima dari reklame dengan masa sewa mulai dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 terdapat pengurangan pajak reklame di 2024 sebesar Rp1.770.653.914,00 dan penambahan Rp1.370.616.532,00 sehingga yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp1.370.616.532,00.

2) Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah - Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum – Dinas Perhubungan

Pendapatan diterima dimuka retribusi Parkir tepi jalan umum - Dinas Perhubungan terdiri dari 2 yaitu parkir berlanggan yang dipungut oleh SAMSAT dan parkir berlanggan (Nomor Luar Propinsi) yang dipungut harian oleh juru parkir berupa karcis. Pada tahun 2024 terdapat tambahan retribusi parkir tepi jalan umum (sudah dibayarkan pada saat jatuh tempo pajak kendaraan bermotor) sebesar Rp5.100.416.749,97 dan dimana retribusi tersebut sudah dijalankan masa retribusinya. Saldo pendapatan diterima dimuka retribusi parkir tepi jalan

umum sebesar Rp5.100.416.749,97 merupakan pendapatan diterima dimuka untuk Parkir tepi jalan umum pada tahun 2024.

3) Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa Tanah - Sewa Gedung/Lahan Untuk ATM – RS dr. Soebandi

Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa Gedung untuk Kantor Kas Bank Pembangunan Daerah Jawa timur Tbk. Berdasarkan Akta Notaris Siti Lestariningsih, SH Nomor 42 tanggal 22 Desember 2020 antara Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Kantor Cabang Jember tentang Perjanjian Sewa Menyewa sebagian dari bangunan lengkap dengan bagian-bagiannya berukuran 7,26 m x 5,83 m yang terletak di Rumah Sakit Daerah dr Soebandi dan dibangun untuk Kantor Kas RS. dr Soebandi. Jangka waktu sewa 5 tahun terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 10 Oktober 2025 dengan besar sewa selama 5 tahun senilai Rp210.000.000,00 atau sebesar 3.500.000,00 per bulan. Pada tahun 2024 pengurangan pendapatan diterima dimuka lainnya atas sewa lahan ATM di RS dr. Soebandi sebesar Rp73.500.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Lahan ATM RS dr. Soebandi sebesar Rp31.500.000,00.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Retribusi atas Sewa Lahan ATM – BPKAD

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember merupakan sewa gedung aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Kabupaten Jember dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Jember Nomor : 028/578/35.09.412/2020 dan Nomor : 059/599/JBR/UM&AKT/Srt tanggal 3 Februari 2020, merupakan perjanjian sewa atas gedung Kantor Kas dan Rumah ATM yang berada didalam komplek Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Jember Jalan Sudarman No. 1 Jember (Kantor Kas berada disebelah barat gedung eks. BPKAD Jember dan lahan untuk rumah ATM berada di sebelah selatan pos pintu keluar Kantor Pemerintah Kabupaten Jember). Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Februari 2025, Besarnya sewa selama 5 Tahun sebesar Rp143.075.000,00 yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp0,00. Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa Gedung Aset Pemkab Jember sebesar Rp31.525.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa gedung aset Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Sewa atas Gedung/Lahan Untuk ATM – RS Kalisat

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan RSD Kalisat Jember merupakan sewa Lahan ATM aset pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Aset Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Akta Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi Nomor: 18 tanggal 6 April 2021 perjanjian sewa antara RSD Kalisat - Jember dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pembantu Kalisat - Jember, merupakan sewa lahan untuk Rumah ATM yang berada didalam komplek RSD Kalisat Jalan PB. Sudirman No.31 Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Jangka waktu sewa selama 5 Tahun dimulai dari 01 April 2021 sampai dengan 01 April 2026, besarnya sewa selama 5 tahun sebesar Rp33.500.000,00 sudah termasuk biaya pajak penghasilan sebesar 10 persen yang diakui sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2024. Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan ATM di RS Kalisat Jember sebesar Rp6.000.000,00 sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga saldo pendapatan diterima dimuka untuk Sewa Lahan ATM RS Kalisat Jember tahun 2024 sebesar Rp8.000.000,00.

6) Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri – BPKAD

Penyewaan atas aset pemerintah yang disewakan BPKAD Kabupaten Jember merupakan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Sewa Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Jember. Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016, paragraf keenam pasal 130 tentang pembayaran sewa, penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Daerah dilakukan setelah dilakukan pembayaran. Penambahan pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp695.474.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Pendapatan Diterima Dimuka selama tahun 2024

No.	Nama Penyewa	Instansi	Jangka Waktu Sewa	Periode	Jmlah Pembayaran	Pengakuan Sewa	
						Berjalan	Sisa pendapatan diterima dimuka
1	Anto Purwanto	Perorangan	1	Tahun	85.550.000,00	21.387.500,00	64.162.500,00
2	Anto Purwanto	Perorangan	1	Tahun	88.310.800,00	22.077.700,00	66.233.100,00
3	Anto Purwanto	Perorangan	1	Tahun	69.550.700,00	17.387.675,00	52.163.025,00
4	Anto Purwanto	Perorangan	1	Tahun	113.680.000,00	28.420.000,00	85.260.000,00
5	Anto Purwanto	Perorangan	1	Tahun	320.885.000,00	80.221.250,00	240.663.750,00
6	Andy Sungkono	Perorangan	1	Tahun	11.791.175,00	2.947.793,75	8.843.381,25
7	Fauzi	Yayasan Tradisi Berguru Nusantara Bidayatul Hidayah Alfauzi	1	Tahun	3.236.625,00	809.156,25	2.427.468,75
8	Hari Wahyudi	Perorangan	1	Tahun	2.733.475,00	683.368,75	2.050.106,25
9	Ismail	Perorangan	2	Tahun	30.600.000,00	3.825.000,00	26.775.000,00
10	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	4.914.000,00	1.228.500,00	3.685.500,00

No.	Nama Penyewa	Instansi	Jangka Waktu Sewa	Periode	Jmlah Pembayaran	Pengakuan Sewa	
						Berjalan	Sisa pendapatan diterima dimuka
11	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	14.130.900,00	3.532.725,00	10.598.175,00
12	Tumbas Ginting	PT MITRATANI DUA TUJUH	1	Tahun	8.988.000,00	2.247.000,00	6.741.000,00
13	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	23.102.100,00	5.775.525,00	17.326.575,00
14	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	4.265.100,00	1.066.275,00	3.198.825,00
15	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	3.387.300,00	846.825,00	2.540.475,00
16	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	9.356.800,00	2.339.200,00	7.017.600,00
17	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	9.286.500,00	2.321.625,00	6.964.875,00
18	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	2.665.000,00	666.250,00	1.998.750,00
19	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	3.382.500,00	845.625,00	2.536.875,00
20	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	6.129.500,00	1.532.375,00	4.597.125,00
21	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	9.760.050,00	2.440.012,50	7.320.037,50
22	Tumbas Ginting	Pt Mitratani Dua Tujuh	1	Tahun	47.520.900,00	11.880.225,00	35.640.675,00
23	Syamsul Rizal	Perorangan	5	Tahun	18.645.000,00	932.250,00	17.712.750,00
24	Firdaus	Perorangan	1	Tahun	17.022.275,00	4.255.568,75	12.766.706,25
25	A. Maulana Cholili	Perorangan	1	Tahun	15.000.000,00	8.750.000,00	6.250.000,00
TOTAL					923.893.700,00	228.419.425,00	695.474.275,00

Tabel 5. 164 pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-lain PAD - Sewa Tanah - Tanah untuk Bangunan Industri - BPKAD	361.988.718,00	695.474.275,00	249.006.168,00	808.456.825,00
Jumlah		361.988.718,00	695.474.275,00	249.006.168,00	808.456.825,00

5.3.2.2 Utang Belanja

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
135.559.542.204,41	64.409.938.300,43	71.149.603.903,98	110,46

Utang belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp135.559.542.204,41 dan Rp64.409.938.300,43 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp71.149.603.903,98 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Nilai Utang belanja mengalami kenaikan sebesar Rp71.149.603.903,98 atau 110,46 persen.

Utang belanja Pemerintah Kabupaten Jember per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.559.542.204,41 yang terdiri atas:

Tabel 5. 165 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	5.798.615.660,00	38.456.938,00	32.988.392.072,14	13.633.140.516,85	25.192.324.153,29
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	53.579.552.850,52	(16.830.056,01)	124.196.438.555,46	73.910.269.314,36	103.848.892.035,61
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	967.311.962,00	0,00	2.001.085.000,00	516.198.882,00	2.452.198.080,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.461.659.233,78	0,00	56.247.400,00	2.355.250,00	3.515.551.383,78
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	601.026.739,65	(52.222.042,40)	0,00	0,00	548.804.697,25
6	Utang Belanja Bagi Hasil	1.771.854,48	0,00	0,00	0,00	1.771.854,48
JUMLAH		64.409.938.300,43	(30.595.160,41)	159.242.163.027,60	88.061.963.963,21	135.559.542.204,41

1. Utang Belanja Pegawai

Utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.192.324.153,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 166 Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
A	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	128.026.376,00	37.515.498,00	3.044.456.501,42	128.026.376,00	3.081.971.999,42
1	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN -Tunjangan Keluarga PNS - Kecamatan Ajung	0,00	0,00	13.027.658,00	0,00	13.027.658,00
	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN -Tunjangan Keluarga PNS - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	1.430.818,00	0,00	1.430.818,00
2	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - Kecamatan Ajung	0,00	0,00	59.180.000,00	0,00	59.180.000,00
	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS - BKPSDM	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00
3	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS					
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS - BKPSDM	0,00	0,00	1.774.950,00	0,00	1.774.950,00
4	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS					

No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Wuluhan	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Ajung	0,00	0,00	14.650.000,00	0,00	14.650.000,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PNS - Kecamatan Jombang	0,00	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PNS - DIPEMASDES	0,00	0,00	10.785.000,00	0,00	10.785.000,00
5	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS					
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS- DISNAKER	0,00	0,00	21.199.805,00	0,00	21.199.805,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kalisat	0,00	0,00	2.699.340,00	0,00	2.699.340,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS Dinas Perhubungan	0,00	0,00	28.341.916,00	0,00	28.341.916,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - INSPEKTORAT	0,00	0,00	57.444.016,00	0,00	57.444.016,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Satpol PP	0,00	0,00	13.672.940,00	0,00	13.672.940,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	28.528.106,00	0,00	28.528.106,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - PTSP	0,00	0,00	4.537.707,00	0,00	4.537.707,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Ajung	0,00	0,00	12.063.157,00	0,00	12.063.157,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Sosial	0,00	0,00	6.222.029,00	0,00	6.222.029,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - BPBD	0,00	0,00	29.357.744,00	0,00	29.357.744,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Umbulsari	0,00	0,00	14.994.312,00	0,00	14.994.312,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - BAPEDA	0,00	0,00	29.816.529,00	0,00	29.816.529,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	0,00	0,00	40.020.959,00	0,00	40.020.959,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Patrang	0,00	0,00	50.091.409,00	0,00	50.091.409,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Tempurejo	0,00	0,00	7.620.126,00	0,00	7.620.126,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kencong	0,00	0,00	3.069.787,00	0,00	3.069.787,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Kaliwates	0,00	0,00	49.865.249,00	0,00	49.865.249,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Sumberjambe	0,00	0,00	6.758.679,00	0,00	6.758.679,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Gumukmas	0,00	0,00	5.786.822,00	0,00	5.786.822,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pemuda Olahraga	0,00	0,00	9.246.339,00	0,00	9.246.339,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - DISPERINDAG	0,00	0,00	47.700.635,00	0,00	47.700.635,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS- Kecamatan Puger	0,00	0,00	7.317.187,00	0,00	7.317.187,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - SEKWAN	0,00	0,00	35.030.457,00	0,00	35.030.457,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Summersari	0,00	0,00	43.514.327,00	0,00	43.514.327,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	1.151.692.675,00	0,00	1.151.692.675,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	14.458.255,00	0,00	14.458.255,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - Kecamatan Jombang	0,00	0,00	4.915.822,00	0,00	4.915.822,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN- PPh/Tunjangan Khusus PNS - DIPEMASDES	0,00	0,00	31.461.437,00	0,00	31.461.437,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-	0,00	37.515.498,00	101.520.754,00	0,00	139.036.252,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
	PPH/Tunjangan Khusus PNS - SEKRETARIAT DAERAH					
6	Utang Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					
	Utang Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Dinas Ketahanan Pangan dan Pernakan	0,00	0,00	771.202,00	0,00	771.202,00
	Utang Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - BKPSDM	0,00	0,00	12.184.312,00	0,00	12.184.312,00
	Utang Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	636.885.073,00	0,00	636.885.073,00
7	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS					
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Ajung	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Umbulsari	0,00	0,00	978,00	0,00	978,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Gumukmas	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - BKPSDM	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - Kecamatan Jombang	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS - DIPEMASDES	0,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
8	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS					
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS - RS Balung	109.055.721,00	0,00	318.017.551,42	109.055.721,00	318.017.551,42
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - RS Kalisat	18.970.655,00	0,00	16.537.936,00	18.970.655,00	16.537.936,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - RS Soebandi	0,00	0,00	83.921.848,00	0,00	83.921.848,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN - BKPSDM	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
9	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK - RS Soebandi	0,00	0,00	1.630.400,00	0,00	1.630.400,00
B	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.670.589.284,00	0,00	29.938.524.167,72	13.505.114.140,85	22.103.999.310,87



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD					
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	432.500.000,00	0,00	432.500.000,00
2	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN					
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Karangduren	38.939.424,00	0,00	0,00	38.939.424,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Rambipuji	140.929.920,00	0,00	316.188.600,00	140.929.920,00	316.188.600,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ajung	158.497.700,00	0,00	0,00	158.497.700,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mangli	83.027.874,00	0,00	0,00	0,00	83.027.874,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Dinas Kesehatan	457.255.649,00	0,00	0,00	0,00	457.255.649,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Subandi	3.397.798.933,00	0,00	3.014.743.617,00	3.397.798.933,00	3.014.743.617,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- RS. Balung	808.536.026,00	0,00	8.990.300.318,72	9.183.344.405,85	615.491.938,87
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN - RS. Kalisat	534.271.983,00	0,00	445.844.381,00	534.271.983,00	445.844.381,00
	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan (Clinical Instructor) - RS Kalisat	45.141.775,00	0,00	0,00	45.141.775,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mayang	0,00	0,00	100.675.208,00	0,00	100.675.208,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Jelbuk	0,00	0,00	175.634.000,00	0,00	175.634.000,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	87.537.000,00	0,00	87.537.000,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Semboro	0,00	0,00	96.808.440,00	0,00	96.808.440,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	175.922.153,00	0,00	175.922.153,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	277.407.570,00	0,00	277.407.570,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sukorambi	0,00	0,00	71.999.081,00	0,00	71.999.081,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Puskesmas Lojejer	0,00	0,00	397.866.164,00	0,00	397.866.164,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Wuluhan	0,00	0,00	99.940.300,00	0,00	99.940.300,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN- Puskesmas Kencong	0,00	0,00	156.535.714,00	0,00	156.535.714,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	152.388.751,00	0,00	152.388.751,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Mumbulsari	0,00	0,00	336.760.698,00	0,00	336.760.698,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	84.741.100,00	0,00	84.741.100,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	123.610.171,00	0,00	123.610.171,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	99.374.961,00	0,00	99.374.961,00
	Utang Belanja Insentif Bagi Asn Atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan (Clinical Instructor) - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	162.662.280,00	0,00	162.662.280,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	60.116.139,00	0,00	60.116.139,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Paleran	0,00	0,00	88.899.124,00	0,00	88.899.124,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kasiyan	0,00	0,00	128.150.000,00	0,00	128.150.000,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	232.161.096,00	0,00	232.161.096,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	349.997.400,00	0,00	349.997.400,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	239.724.304,00	0,00	239.724.304,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	116.911.553,00	0,00	116.911.553,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	157.659.820,00	0,00	157.659.820,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Ambulu	0,00	0,00	203.275.300,00	0,00	203.275.300,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	106.659.385,00	0,00	106.659.385,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Banjarsengon	0,00	0,00	41.356.757,00	0,00	41.356.757,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	276.105.182,00	0,00	276.105.182,00
3	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Puskesmas Ajung	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00	0,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
	Utang Belanja Honorarium - Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan - Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00
4	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-				
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Lojejer	0,00	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
5	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK					
	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK-TPG PPPK - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	8.370.977.600,00	0,00	8.370.977.600,00
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK					
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK-Tamsil Guru PPPK - Dinas Pendidikan	0,00	0,00	3.752.250.000,00	0,00	3.752.250.000,00
C	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	5.411.403,00	0,00	5.411.403,00
	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD - Sekretariat DPRD	0,00	0,00	5.411.403,00	0,00	5.411.403,00
D	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	941.440,00	0,00	0,00	941.440,00
1	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	0,00	445.300,00	0,00	0,00	445.300,00
2	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	penambahan	pengurangan	2024 (Rp)
3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	0,00	458.640,00	0,00	0,00	458.640,00
4	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
5	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - Sekretariat Daerah	0,00	28.080,00	0,00	0,00	28.080,00
JUMLAH		5.798.615.660,00	38.456.938,00	32.988.392.072,14	13.633.140.516,85	25.192.324.153,29

- Terdapat pengakuan Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Sebesar Rp8.370.977.600,00. Tunjangan Profesi Guru (TPG) merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalisme mereka. Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang **belum terbayar** adalah TPG-PNS pada triwulan III sebesar Rp29.134.800,00 untuk 3 Orang ASN karena SK turun terlambat dan TPG-PPPK pada Triwulan IV sebesar Rp8.341.842.800 untuk 863 orang Non ASN karena kekurangan pagu anggaran. Selain hal tersebut, pengakuan utang belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga disebabkan oleh **tidak adanya pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024**.
- Terdapat Pengakuan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND - Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND sebesar Rp4.281.500.000,00 untuk 2.964 orang tenaga PNS dan PPPK. Terdapat kekurangan anggaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) pada tahun 2024 dan dana tersebut telah masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp3.706.896.200,00. Selain hal tersebut, utang belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ANSD juga disebabkan oleh **tidak adanya pergeseran APBD Tahun Anggran 2024**.

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp103.848.892.035,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 167 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
A	Utang Belanja Barang	36.333.614.002,15	(16.824.056,01)	81.938.677.617,13	47.218.784.417,89	71.036.683.145,38
B	Utang Belanja Jasa	16.182.983.308,33	(6.000,00)	36.436.202.333,33	24.841.599.925,47	27.777.579.716,19
C	Utang Belanja Pemeliharaan	75.194.830,00	0,00	1.168.405.119,00	533.463.236,00	710.136.713,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
D	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	35.757.500,00	0,00	35.757.500,00
E	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	987.760.710,04	0,00	4.617.395.986,00	1.316.421.735,00	4.288.734.961,04
JUMLAH		53.579.552.850,52	(16.830.056,01)	124.196.438.555,46	73.910.269.314,36	103.848.892.035,61

A. Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.036.683.145,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Rincian Utang Belanja Barang Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia Dr. Subandi	5.210.598.124,00	0,00	0,00	9.047.088.182,06	5.210.598.124,00	9.047.088.182,06
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	0,00	6.984.140,00	0,00	6.984.140,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Kimia - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - RS. Balung	4.605.675,00	0,00	0,00	148.079.419,00	147.475.266,00	5.209.828,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	0,00	4.526.000,00	0,00	4.526.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	0,00	2.252.000,00	0,00	2.252.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	22.039.284,00	0,00	22.039.284,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	0,00	25.920.000,00	0,00	25.920.000,00

NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	0,00	23.350.000,00	0,00	23.350.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	0,00	20.330.000,00	0,00	20.330.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Kasiyan	0,00	0,00	0,00	9.340.000,00	0,00	9.340.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	39.726.312,00	0,00	39.726.312,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	0,00	17.100.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	25.915.000,00	0,00	25.915.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	0,00	21.770.686,00	0,00	21.770.686,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Panti	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas						
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - RS Balung	0,00	0,00	0,00	64.994.000,00	58.433.000,00	6.561.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	143.190,00	0,00	143.190,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	0,00	2.194.000,00	0,00	2.194.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	0,00	2.056.500,00	0,00	2.056.500,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Patrang	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	1.732.000,00	0,00	1.732.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Utang Belanja Bahan Isi Tabung Gas - Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya						
	Utang Belanja Bahan-Bahan Lainnya - RS Kalisat	91.836.085,00	0,00	0,00	501.750.515,00	91.836.085,00	501.750.515,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan - RS Subandi	3.100.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.540,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - RS Subandi	12.886.616.683,95	0,00	0,00	24.580.577.269,27	12.889.717.223,95	24.577.476.729,27
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya -	0,00	0,00	0,00	12.997.500,00	0,00	12.997.500,00

NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Puskesmas Curahnongko						
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Sumber Sari	0,00	0,00	0,00	16.468.754,00	0,00	16.468.754,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	0,00	9.719.381,00	0,00	9.719.381,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
	Utang Belanja Bahan - Bahan Lainnya - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	0,00	2.586.000,00	0,00	2.586.000,00
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Alat Angkutan						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Alat Angkutan - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	1.276.500,00	0,00	1.276.500,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Alat Angkutan - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	0,00	12.926.500,00	0,00	12.926.500,00
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Alat Kedokteran						
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - RS Balung	0,00	0,00	0,00	318.255.156,00	292.241.063,00	26.014.093,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	0,00	11.378.000,00	0,00	11.378.000,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	21.320.040,00	0,00	21.320.040,00
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	13.745.600,00	0,00	13.745.600,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	5.681.080,00	0,00	5.681.080,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	6.020.600,00	0,00	6.020.600,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover						
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - RS. Balung	0,00	0,00	0,00	231.571.500,00	0,00	231.571.500,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	13.386.500,00	0,00	13.386.500,00

NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - RS. Balung	0,00	0,00	0,00	475.182.500,00	1.300,00	475.181.200,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	0,00	1.177.500,00	0,00	1.177.500,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	9.057.000,00	0,00	9.057.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00	0,00	8.980.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	0,00	5.462.000,00	0,00	5.462.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00	0,00	3.825.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	0,00	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	0,00	11.566.000,00	0,00	11.566.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - uskesmas Kaliwates						
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	0,00	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	7.203.900,00	0,00	7.203.900,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	7.198.500,00	0,00	7.198.500,00
10	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - RS. Balung	0,00	0,00	0,00	222.656.000,00	156.117.500,00	66.538.500,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
	Utang Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	14.124.000,00	0,00	14.124.000,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - BTT	15.920.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920.970,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	4.950.100,00	0,00	4.950.100,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	5.198.000,00	0,00	5.198.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	5.053.600,00	0,00	5.053.600,00
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan						



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Kantor-Perlengkapan Dinas						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
15	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						
	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - RS. Balung	0,00	0,00	0,00	251.614.800,00	0,00	251.614.800,00
	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	152.500,00
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan						
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS. Subandi	9.217.088.983,25	0,00	0,00	14.485.289.467,71	9.217.088.983,25	14.485.289.467,71
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Kalisat	0,01	0,00	(0,01)	604.989.811,48	0,00	604.989.811,48
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - RS Balung	3.876.320.435,95	0,00	(186.056,00)	11.222.273.012,89	7.729.591.278,71	7.368.816.114,13
	Utang Belanja Obat-Obatan - Obat - Puskesmas Cakru	486.455,00	0,00	0,00	0,00	486.455,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	20.371.680,00	0,00	20.371.680,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	32.875.000,00	0,00	32.875.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Summersari	0,00	0,00	0,00	2.419.500,00	0,00	2.419.500,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-	0,00	0,00	0,00	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Obatan - Puskesmas Karangduren						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	0,00	22.156.300,00	0,00	22.156.300,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	0,00	24.761.000,00	0,00	24.761.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	0,00	68.189.600,00	0,00	68.189.600,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	60.065.500,00	0,00	60.065.500,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	1.199.998,00	0,00	1.199.998,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	0,00	8.498.000,00	0,00	8.498.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	6.468.636,00	0,00	6.468.636,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Panti	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	0,00	22.914.548,00	0,00	22.914.548,00
17	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya						
	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - RS Balung	3.695.161.768,74	0,00	0,00	13.830.501.808,77	8.791.372.282,73	8.734.291.294,78



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	0,00	2.877.120,00	0,00	2.877.120,00
	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	14.155.500,00	0,00	14.155.500,00
	Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	9.594.285,00	0,00	9.594.285,00
18	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - RS Balung	42.813.031,25	0,00	0,00	1.312.786.796,95	722.073.206,25	633.526.621,95
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	0,00	22.545.000,00	0,00	22.545.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00	13.050.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	0,00	13.545.000,00	0,00	13.545.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura - Puskesmas Wuluhan	0,00	0,00	0,00	18.315.000,00	0,00	18.315.000,00
19	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat - RS Balung	1.750.500,00	0,00	0,00	169.949.600,00	96.472.100,00	75.228.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Curahnongko	0,00	442.000,00	0,00	4.939.000,00	0,00	5.381.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Ajung	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Rapat - Puskesmas Patrang	0,00	0,00	0,00	1.989.000,00	0,00	1.989.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
20	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan						
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS. Subandi	674.145.550,00	0,00	0,00	1.314.308.544,00	674.145.550,00	1.314.308.544,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan - Dinas Kesehatan	113.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.880.000,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan - RS Balung	8.012.200,00	0,00	0,00	1.168.685.600,00	804.337.000,00	372.360.800,00
	Utang Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas BLUD :						
	- Puskesmas Gumukmas	7.560.000,00	0,00	0,00	51.975.000,00	7.560.000,00	51.975.000,00
	- Puskesmas Wuluhan	10.575.000,00	0,00	0,00		10.575.000,00	0,00
	- Puskesmas Ambulu	23.580.000,00	0,00	0,00	40.770.000,00	23.580.000,00	40.770.000,00
	- Puskesmas Sabrang	3.285.000,00	0,00	0,00	27.945.000,00	3.285.000,00	27.945.000,00
	- Puskesmas Andongsari	2.925.000,00	0,00	0,00	17.775.000,00	2.925.000,00	17.775.000,00
	- Puskesmas Tempurejo	18.085.000,00	0,00	0,00	86.805.000,00	0,00	104.890.000,00
	- Puskesmas Curahnongko	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00
	- Puskesmas Silo II	6.660.000,00	0,00	0,00	25.605.000,00	6.660.000,00	25.605.000,00
	- Puskesmas Mayang	14.130.000,00	0,00	0,00	116.505.000,00	14.130.000,00	116.505.000,00
	- Puskesmas Mumbulsari	8.100.000,00	0,00	0,00	10.980.000,00	8.100.000,00	10.980.000,00
	- Puskesmas Jenggawah	16.065.000,00	0,00	0,00	93.555.000,00	15.390.000,00	94.230.000,00
	- Puskesmas Ajung	12.285.000,00	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	0,00
	- Puskesmas Rambipuji	17.100.000,00	0,00	0,00	14.198.000,00	17.100.000,00	14.198.000,00
	- Puskesmas Nogosari	3.420.000,00	0,00	0,00	13.365.000,00	0,00	16.785.000,00
	- Puskesmas Karangduren	34.695.000,00	0,00	0,00	22.725.000,00	0,00	57.420.000,00
	- Puskesmas Umbulsari	9.720.000,00	0,00	0,00	10.794.000,00	9.720.000,00	10.794.000,00
	- Puskesmas Paleran	49.263.000,00	0,00	(16.638.000,00)	44.820.000,00	32.625.000,00	44.820.000,00
	- Puskesmas Semboro	14.175.000,00	0,00	0,00	59.012.000,00	14.175.000,00	59.012.000,00
	- Puskesmas Jombang	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	- Puskesmas Rowotengah	8.280.000,00	0,00	0,00	19.727.000,00	8.280.000,00	19.727.000,00
	- Puskesmas Tanggul	14.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00
	- Puskesmas Klatakan	10.665.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	10.665.000,00	4.800.000,00
	- Puskesmas Bangsalsari	2.112.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	5.280.000,00
	- Puskesmas Panti	13.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.995.000,00
	- Puskesmas Arjasa	54.765.000,00	0,00	0,00	55.980.000,00	54.765.000,00	55.980.000,00
	- Puskesmas Ledokombo	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00
	- Puskesmas Sumberjambe	12.915.000,00	0,00	0,00	48.505.000,00	12.915.000,00	48.505.000,00
	- Puskesmas Sukowono	19.890.000,00	0,00	0,00	51.345.000,00	19.890.000,00	51.345.000,00
	- Puskesmas Jelbuk	16.785.000,00	0,00	0,00	33.975.000,00	16.785.000,00	33.975.000,00
	- Puskesmas Kaliwates	4.950.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	4.950.000,00	6.300.000,00
	- Puskesmas Sumpersari	8.460.000,00	0,00	0,00	18.495.000,00	8.460.000,00	18.495.000,00
	- Puskesmas Gladakpakem	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.000,00
	- Puskesmas Patrang	0,00	0,00	0,00	15.570.000,00	0,00	15.570.000,00
	- Puskesmas Cakru	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	0,00	12.285.000,00
	- Puskesmas Kasiyan	0,00	0,00	0,00	8.515.800,00	0,00	8.515.800,00
	- Puskesmas Kencong	0,00	0,00	0,00	11.490.000,00	0,00	11.490.000,00
	- Puskesmas Sukorambi	0,00	0,00	0,00	3.105.000,00	0,00	3.105.000,00
	- Puskesmas Silo I	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00
	- Puskesmas Mangli	0,00	0,00	0,00	20.825.000,00	0,00	20.825.000,00
	- Puskesmas Tembokrejo	0,00	0,00	0,00	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00
21	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - BTT	36.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.860.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Tempurejo	2.620.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,00	6.180.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Curahnongko	442.000,00	(442.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas	2.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Lapangan - Puskesmas Silo II						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Karangduren	3.575.000,00	0,00	0,00	9.776.000,00	0,00	13.351.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Semboro	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Summersari	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	0,00	442.000,00	0,00	442.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Puger	0,00	0,00	0,00	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	0,00	4.589.000,00	0,00	4.589.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	0,00	28.050.000,00	0,00	28.050.000,00
22	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga						
	Utang Belanja Barang Pakai Habis-	0,00	0,00	0,00	8.365.000,00	0,00	8.365.000,00



NO	Keterangan	2023	Reklas	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	pengurangan	2024
		(Rp)					(Rp)
	Pakaian Olahraga - Puskesmas Rowotengah						
Total		36.333.614.002,15	0,00	(16.824.056,01)	81.938.677.617,13	47.218.784.417,89	71.036.683.145,38

B. Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.777.579.716,19 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 169 Rincian Utang Belanja Jasa Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Dinas Kesehatan	2.387.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.387.000.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Curahnongko	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara -Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Rowotengah	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara -Puskesmas Patrang	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Puskesmas Jemberkidul	9.869.600,00	0,00	0,00	9.869.600,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Jasa Tenaga Kesehatan - Dinas Kesehatan	702.086.241,00	0,00	9.036.173.988,00	0,00	9.738.260.229,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - BTT	996.884.500,00	0,00	0,00	0,00	996.884.500,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Summersari	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	152.077.847,00	0,00	152.077.847,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Jombang	0,00	0,00	119.088.959,00	0,00	119.088.959,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur -Puskesmas Sukorambi	0,00	0,00	48.836.000,00	0,00	48.836.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Lojejer	0,00	0,00	122.749.195,00	0,00	122.749.195,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	44.113.099,00	0,00	44.113.099,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	96.582.337,00	0,00	96.582.337,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Paleran	0,00	0,00	67.906.338,00	0,00	67.906.338,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Kasiyan	0,00	0,00	94.350.000,00	0,00	94.350.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	226.861.909,00	0,00	226.861.909,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	92.894.800,00	0,00	92.894.800,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	181.911.233,00	0,00	181.911.233,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	162.141.130,00	0,00	162.141.130,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Ambulu	0,00	0,00	199.824.700,00	0,00	199.824.700,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan - Honor Instruktur - Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	65.813.600,00	0,00	65.813.600,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	6.449.600,00	0,00	6.449.600,00



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum					
	Utang Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - RS Balung	1.427.500,00		60.840.000,00	61.162.500,00	1.105.000,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli - Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - RS Balung	0,00	0,00	1.133.674.293,00	658.317.784,00	475.356.509,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	8.328.400,00	0,00	8.328.400,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan - RS Balung	0,00	0,00	634.885.248,00	460.855.200,00	174.030.048,00
8	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	12.277.322,00	0,00	12.277.322,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Sabrang	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Andongsari	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO -Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	12.592.125,00	0,00	12.592.125,00
9	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi - RS Balung	0,00	0,00	208.375.500,00	21.943.000,00	186.432.500,00
10	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah					
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Kalisat	40.400.670,00	0,00	8.400.480,00	40.400.670,00	8.400.480,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Balung	44.780.999,00	0,00	328.961.708,00	210.342.871,00	163.399.836,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - RS Soebandi	114.762.900,00	0,00	284.056.050,00	114.762.900,00	284.056.050,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Silo I	0,00	0,00	4.370.127,00	0,00	4.370.127,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	4.108.732,00	0,00	4.108.732,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Puger	0,00	0,00	1.927.687,00	0,00	1.927.687,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	12.621.278,00	0,00	12.621.278,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Curahngongko	0,00	0,00	6.618.586,00	0,00	6.618.586,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Gumukmas	0,00	0,00	1.429.999,00	0,00	1.429.999,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Karangduren	0,00	0,00	6.047.096,00	0,00	6.047.096,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	2.029.691,00	0,00	2.029.691,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sumberjambe	0,00	0,00	4.579.996,00	0,00	4.579.996,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	1.377.166,75	0,00	1.377.166,75
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	3.766.231,00	0,00	3.766.231,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Sukowono	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Panti	0,00	0,00	3.750.457,00	0,00	3.750.457,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah - Puskesmas Nogosari	0,00	0,00	3.103.921,00	0,00	3.103.921,00
	Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah -Puskesmas Mangli	0,00	0,00	12.144.500,00	0,00	12.144.500,00
11	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	44.014.163,00	(3.000,00)	35.436.658,00	44.011.163,00	35.436.658,00
12	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	69.939.156,00	(3.000,00)	76.573.874,00	69.847.613,00	76.662.417,00
13	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.585.288.642,00	0,00	4.432.537.674,00	4.585.288.642,00	4.432.537.674,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Internet	119.711.716,00	0,00	155.851.961,00	119.711.716,00	155.851.961,00
16	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman					
	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman - BTT	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman - RS Soebandi	0,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00
17	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3					
	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	980.974.100,00	0,00	0,00	980.974.100,00	0,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - Puskesmas Jenggawah	0,00	0,00	3.448.500,00	0,00	3.448.500,00
	Utang Belanja Jasa Kantor- Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan - Puskesmas Cakru	0,00	0,00	701.300,00	0,00	701.300,00
19	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN- RS Balung	136.847.506,00	0,00	394.061.653,40	136.847.506,00	394.061.653,40
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - RS Kalisat	19.875.017,00	0,00	19.912.422,00	19.875.017,00	19.912.422,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - RS Soebandi	0,00	0,00	153.421.280,00	0,00	153.421.280,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	2.132.320,00	0,00	2.132.320,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	16.632.098,00	0,00	16.632.098,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	7.329.850,00	0,00	7.329.850,00
20	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					0,00
	Utang Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	777.000,00		82.333.000,00	83.110.000,00	0,00
21	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Dinas Perhubungan	0,00	0,00	6.894.302,00	0,00	6.894.302,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sumberbaru	0,00	0,00	462.635,00	0,00	462.635,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Arjasa	0,00	0,00	790.500,00	0,00	790.500,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Klatakan	0,00	0,00	813.360,00	0,00	813.360,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Tempurejo	0,00	0,00	1.741.565,00	0,00	1.741.565,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan	0,00	0,00	1.331.166,00	0,00	1.331.166,00



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sumberjambe					
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Sukorejo	0,00	0,00	2.499.000,00	0,00	2.499.000,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - RS dr Soebandi	0,00	0,00	113.819.178,00	0,00	113.819.178,00
	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	1.066.897,00	0,00	1.066.897,00
22	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya					
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya - BTT	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00
	Utang Belanja sewa alat kantor lainnya - RS Balung	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00
	Utang Belanja sewa alat kantor lainnya - RS Soebandi	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
23	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata					
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya - Sewa Alat Kedokteran Mata - RS. Kalisat	28.800.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00
24	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum					0,00
	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum - RS. Balung	5.217.000,00	0,00	57.387.000,00	62.604.000,00	0,00
25	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar					0,00
	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - BPKAD	1.833.333,33	0,00	0,00	0,00	1.833.333,33
26	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural - DPU Binamarga	0,00	0,00	4.865.130,00	0,00	4.865.130,00
27	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi					



NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain - DPU Bina Marga	0,00	0,00	19.519.600,00	0,00	19.519.600,00
28	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur - DPU Binamarga	0,00	0,00	19.873.000,00	0,00	19.873.000,00
29	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air - Bina Marga	37.192.000,00	0,00	4.877.400,00	0,00	42.069.400,00
30	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	489.158.600,00	0,00	9.689.800,00	0,00	498.848.400,00
31	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					
	Utang Belanja Jasa konsultansi Konstruksi -Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur - RS dr. Subandi	858.924.000,00	0,00	0,00	0,00	858.924.000,00
32	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi - Bina Marga	53.879.750,00	0,00	0,00	0,00	53.879.750,00
33	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air					

NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air - Bina Marga	84.616.922,00	0,00	0,00	0,00	84.616.922,00
34	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian - RS dr. Subandi	0,00	0,00	16.428.000,00	0,00	16.428.000,00
35	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan					
	Utang Belanja Jasa Konsultansi Lainnya -Jasa Konsultansi Lainnya - RS Balung	7.992.000,00	0,00	203.799.610,00	211.791.610,00	0,00
36	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan					
	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan - Puskesmas Panti	0,00		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
37	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - RS. Balung	1.245.184.099,00	0,00	13.630.925.841,18	13.906.678.139,47	969.431.800,71
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - Puskesmas Mangli	23.572.126,00	0,00	0,00	23.572.126,00	0,00
38	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Subandi	2.359.153.620,00	0,00	2.004.386.301,00	2.359.153.620,00	2.004.386.301,00
	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN - RS Kalisat	626.456.923,00	0,00	572.308.691,00	626.456.923,00	572.308.691,00
	Utang Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan - RS Kalisat	3.223.225,00	0,00	0,00	3.223.225,00	0,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Gladakpakem	0,00	0,00	112.129.436,00	0,00	112.129.436,00

NO	Keterangan	2023	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024
		(Rp)				(Rp)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kencong	0,00	0,00	45.270.479,00	0,00	45.270.479,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Rambipuji	0,00	0,00	169.111.400,00	0,00	169.111.400,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Kemuningsari	0,00	0,00	245.037.512,00	0,00	245.037.512,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Mumbulsari	0,00	0,00	63.880.712,00	0,00	63.880.712,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN - Puskesmas Mangli	0,00	0,00	119.271.249,00	0,00	119.271.249,00
39	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					
	Utang Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software - RS Kaliwates	0,00	0,00	7.758.900,00	0,00	7.758.900,00
JUMLAH		16.182.983.308,33	(6.000,00)	36.436.202.333,33	24.841.599.925,47	27.777.579.716,19

C. Utang Belanja Pemeliharaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp710.136.713,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
a	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Electric Generating Set - RS. Balung	0,00	39.250.000,00	0,00	39.250.000,00
b	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	31.663.830,00	132.791.391,00	159.445.236,00	5.009.985,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Puger	0,00	6.176.595,00	0,00	6.176.595,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Tembokrejo	0,00	5.256.960,00	0,00	5.256.960,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - uskesmas Curahnongko	0,00	15.536.670,00	0,00	15.536.670,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Gumukmas	0,00	4.457.850,00	0,00	4.457.850,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Lojejer	0,00	3.055.275,00	0,00	3.055.275,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Tempurejo	0,00	16.244.850,00	0,00	16.244.850,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Kaliwates	0,00	14.342.310,00	0,00	14.342.310,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sumberjambe	0,00	6.504.600,00	0,00	6.504.600,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang -Puskesmas Sukorejo	0,00	14.499.700,00	0,00	14.499.700,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Rowotengah	0,00	36.303.105,00	0,00	36.303.105,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Paleran	0,00	20.956.800,00	0,00	20.956.800,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Andongsari	0,00	8.244.525,00	0,00	8.244.525,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Mangli	0,00	8.757.900,00	0,00	8.757.900,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sabrang	0,00	4.055.940,00	0,00	4.055.940,00
c	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS Balung	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Curahnongko	0,00	5.755.350,00	0,00	5.755.350,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - RS dr. Soebandi	0,00	49.457.160,00	0,00	49.457.160,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Sukowono	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
d	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin				
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin - RS Balung	24.880.000,00	47.301.000,00	24.880.000,00	47.301.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Silo I	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Curahnongko	0,00	9.779.100,00	0,00	9.779.100,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Jombang	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Tempurejo	0,00	10.223.100,00	0,00	10.223.100,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang - Puskesmas Mangli	0,00	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00
f.	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - RS Balung	0,00	31.080.000,00	0,00	31.080.000,00
g	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum - RS Balung	0,00	265.932.488,00	0,00	265.932.488,00
h	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer - Puskesmas Curahnongko	0,00	3.754.750,00	0,00	3.754.750,00
i	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya - Puskesmas Curahnongko	0,00	5.261.250,00	0,00	5.261.250,00
j	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya - Puskesmas Silo I	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
k	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air				
	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air - Puskesmas Silo I	0,00	4.856.250,00	0,00	4.856.250,00
l	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan				
	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - RS Balung	18.651.000,00	359.687.000,00	349.138.000,00	29.200.000,00
	Utang Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - Puskesmas Ajung	0,00	15.031.000,00	0,00	15.031.000,00



No	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
m	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya				
	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya - Puskesmas Tembokrejo	0,00	2.479.200,00	0,00	2.479.200,00
Jumlah		75.194.830,00	1.168.405.119,00	533.463.236,00	710.136.713,00

D. Utang Belanja Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.757.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
a.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Puskesmas Glodapakem	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Puskesmas Mangli	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
b.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Jombang	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Paleran	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Puskesmas Sukowono	0,00	17.020.000,00	0,00	17.020.000,00
c.	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Puskesmas Jenggawah	0,00	3.837.500,00	0,00	3.837.500,00
Jumlah		0,00	35.757.500,00	0,00	35.757.500,00

E. Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.288.734.961,04 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Jasa yang diberikan kpd pihak ke 3 - bagi hasil Retribusi Parkir - Dinas Perhubungan	69.701.400,00	0,00	69.701.400,00	0,00
2	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - RS Subandi	870.554.250,00	3.975.156.824,00	870.554.250,00	3.975.156.824,00
3	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - RS Kalisat	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00
4	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - BPKAD	40.933.060,04	0,00	0,00	40.933.060,04
5	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - RS Balung	0,00	640.789.162,00	369.594.085,00	271.195.077,00
6	Utang Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - Puskesmas Rambipuji	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
Jumlah		987.760.710,04	4.617.395.986,00	1.316.421.735,00	4.288.734.961,04

3. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.452.198.080,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 170 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga				
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel- RS Balung	0,00	39.385.000,00	0,00	39.385.000,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih - BTT	965.806.280,00	0,00	514.693.200,00	451.113.080,00
	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - RS Balung	0,00	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00
2	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam - RS Balung	0,00	1.908.000.000,00	0,00	1.908.000.000,00
3	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium				
	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum - RS Balung	0,00	35.050.000,00	0,00	35.050.000,00
4	Utang Belanja Modal Komputer				
	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer - Peralatan Personal Komputer - Puskesmas Cakru	1.505.682,00	0,00	1.505.682,00	0,00
JUMLAH		967.311.962,00	2.001.085.000,00	516.198.882,00	2.452.198.080,00

4. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.515.551.383,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 171 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Cipta Karya	0,00	19.909.600,00	0,00	19.909.600,00
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja - Pertokoan, koperasi Pasar - Disperindag	3.459.303.983,78	0,00	0,00	3.459.303.983,78
3	Utang Belanja Modal Bangunan Kesehatan - RS. Balung	2.355.250,00	0,00	2.355.250,00	0,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum - Cipta Karya	0,00	36.337.800,00	0,00	36.337.800,00
Jumlah		3.461.659.233,78	56.247.400,00	2.355.250,00	3.515.551.383,78

Tabel Rincian Utang Belanja Modal Bangunan - Pertokoan, Koperasi Pasar - Disperindag Per 31 Desember 2024

	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Konstruksi Pembangunan Pasar Manggis Tahun 2018	217.234.200,60	0,00	0,00	217.234.200,60
2	Konstruksi Pembangunan Pasar Tegalbesar Tahun 2018	225.926.688,89	0,00	0,00	225.926.688,89
3	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Pembangunan Pasar Bungur Tahun 2018 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2019)	358.897.685,54	0,00	0,00	358.897.685,54
4	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Pembangunan Pasar Tegalbesar Tahun 2018 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2019)	78.611.178,75	0,00	0,00	78.611.178,75



	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
5	Konsultan Pengawasan Pasar Balung Lama Tahun 2019 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum di Bayar)	9.847.200,00	0,00	0,00	9.847.200,00
6	Pengakuan KDP Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon (Selisih Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan)	211.874.180,00	0,00	0,00	211.874.180,00
7	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Fisik Pasar Balung Kulon(Sisa Nilai Kontrak Yang Belum Dibayarkan pada tahun 2020)	1.332.367.400,00	0,00	0,00	1.332.367.400,00
8	Konsultan Pengawasan Pasar Balung Kulon Tahun 2019 (Sisa Nilai Kontrak Yang Belum di Bayar tahun 2020)	24.640.000,00	0,00	0,00	24.640.000,00
9	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Fisik Pasar Mayang(Retensi Masa Pemeliharaan)	221.150.850,00	0,00	0,00	221.150.850,00
10	Konsultan Pengawasan Pasar Mayang(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	9.881.800,00	0,00	0,00	9.881.800,00
11	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Fisik Pasar Puger(Retensi Masa Pemeliharaan)	299.999.150,00	0,00	0,00	299.999.150,00
12	Konsultan Pengawasan Pasar Puger(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	9.867.600,00	0,00	0,00	9.867.600,00
13	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Fisik Pasar Sempolan(Retensi Masa Pemeliharaan)	223.006.850,00	0,00	0,00	223.006.850,00
14	Konsultan Pengawasan Pasar Sempolan(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	7.386.900,00	0,00	0,00	7.386.900,00
15	Pengakuan Nilai Fisik 100 persen Konstruksi Fisik Pasar Bungur(Retensi Masa Pemeliharaan)	221.247.300,00	0,00	0,00	221.247.300,00
16	Konsultan Pengawasan Pasar Bungur(Retensi Konstruksi Fisik Masa Pemeliharaan)	7.365.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00
Jumlah		3.459.303.983,78	0,00	0,00	3.459.303.983,78

5. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp548.804.697,25 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 172 Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

No	Keterangan	2023 (Rp)	koreksi	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten - Bina Marga	52.222.042,40	(52.222.042,40)	0,00	0,00	0,00
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi - Bina Marga	548.804.697,25	0,00	0,00	0,00	548.804.697,25
Jumlah		601.026.739,65	(52.222.042,40)	0,00	0,00	548.804.697,25

Terdapat Koreksi saldo awal sebesar Rp52.222.042,40 atas utang belanja modal jalan – jalan Kabupaten – DPU Bina Marga. Paket pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dinding Penataan Jalan Patemon – Kramatsukoharjo Km 3650 dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 19 Januari 2022 dikarenakan penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dilakukan pembayaran Utang.



6. Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.771.854,48 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 173 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48
Jumlah		1.771.854,48	0,00	0,00	1.771.854,48

5.3.2.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.106.554.892,23	1.453.562.113,12	652.992.779,11	44,92

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.106.554.892,23 dan Rp1.453.562.113,12, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp652.992.779,11 atau 44,92 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.106.554.892,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 174 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2024

NO	Keterangan	2023 (Rp)	Koreksi Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	2024 (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi	4.401.716,00	0,00	0,00	0,00	4.401.716,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. dr. Soebandi	701.233.114,90	0,00	691.837.241,01	701.233.114,90	691.837.241,01
3	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - RS. Balung	0,00	0,00	16.574,00	0,00	16.574,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah - Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - BPKAD	747.063.221,14	20.515.000,00	1.388.920.300,00	747.063.221,00	1.409.435.300,14
5	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS	864.061,08	0,00	0,00	0,00	864.061,08
Jumlah		1.453.562.113,12	20.515.000,00	2.080.774.115,01	1.448.296.335,90	2.106.554.892,23

1. Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi adalah kelebihan

- pembayaran piutang retribusi jasa umum - pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi – Dinas Informasi dan Komunikasi sebesar Rp4.401.716,00.
2. Utang Kelebihan Pembayaran Lain - Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - Uang Titipan Pasien - RS. dr. Soebandi dengan nomer rekening 0031019508 an RS. Dr. Soebandi sebesar Rp691.837.241,01.
 3. Utang Kelebihan Pembayaran Lain - Lain PAD yang SAH - Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD - RS. Balung sebesar Rp16.574,00.
 4. Utang Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Utang Kelebihan Pembayaran BKK dari PemProv - BPKAD per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.409.435.300,14. Terdapat Pengembalian Utang BKK Provinsi yang disetor tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp747.063.221,00 dan Penambahan Utang BKK Provinsi yang belum disetor sebesar Rp1.388.920.300,00. Terdapat Koreksi Tambah sebesar Rp20.515.000,00 karena temuan dari Inspektorat Provinsi pada OPD BPBD.
 5. Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan - Pendapatan Hibah Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp864.061,08. Terdapat pengembalian sisa uang Kas Dana BOS tahun 2024 yang disetor ke Kas Daerah tanggal 15 Desember 2024 namun belum dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp864.061,08.

5.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2024
Ekuitas	(Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	6.566.521.869.621,01
Surplus/Defisit-LO	104.751.745.709,96
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(124.952.861.782,99)
Saldo per 31 Desember 2024	6.546.320.753.547,98

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
104.751.754.709,96	(30.215.863.158,62)	134.967.617.868,58	(446,68)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Surplus LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp104.751.754.709,96. Nilai Surplus LO mengalami kenaikan sebesar Rp134.967.617.868,58. Surplus LO Tahun 2024 terdiri dari Surplus

dari Kegiatan Operasional sebesar Rp105.696.464.684,47 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp944.718.974,51 serta Surplus/(Defisit).

Surplus dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp105.696.464.684,47 diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp3.931.422.590.236,19 dan Beban Operasional sebesar Rp3.825.726.125.551,72.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp944.718.974,51, diperoleh dari Defisit dari Penghapusan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp231.540.280,00 dan Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan penurunan nilai investasi sebesar Rp713.178.694,51.

5.4.1 Kegiatan Operasional

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
105.696.473.684,47	(20.202.208.346,11)	125.898.682.030,58	(623,19)

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jember adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pendapatan Pajak-LO, Retribusi-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan Lain-lain PAD yang Sah; Pendapatan Transfer-LO dan Lain-Lain Pendapatan- LO.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Penyisihan Piutang.

Surplus Tahun 2024 dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp105.696.473.684,47. Nilai Surplus tersebut bertambah signifikan sebesar Rp125.898.682.030,58 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar minus Rp20.202.208.346,11.

5.4.1.1 Pendapatan – LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
3.931.422.590.236,19	3.696.524.159.662,47	234.898.430.573,72	6,35

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Jember yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan-LO diakui

pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi yakni adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Berdasarkan asal dan jenisnya, pendapatan-LO diklasifikasikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp3.931.422.590.236,19 atau mengalami kenaikan sebesar 6,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pendapatan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp3.931.422.590.236,19 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO sebesar Rp856.102.304.460,76, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp3.029.623.907.586,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sebesar Rp45.696.378.189,43. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024 lebih tinggi sebesar Rp34.898.430.573,72 atau 6,35 persen dibanding Tahun 2023 sebesar Rp3.696.524.159.662,47. Besaran Pendapatan Operasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 175 Rincian Pendapatan-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	856.102.304.460,76	804.422.910.827,10	6,42
2.	Pendapatan Transfer-LO	3.029.623.907.586,00	2.829.210.767.574,18	7,08
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	45.696.378.189,43	62.890.481.261,19	(27,34)
	Jumlah	3.931.422.590.236,19	3.696.524.159.662,47	6,35

5.4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
856.102.304.460,76	804.422.910.827,10	51.679.393.633,66	6,42

Pendapatan Asli Daerah – LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah – LO, Retribusi Daerah – LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO serta Lain-lain PAD yang Sah – LO yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah – LO adalah sebesar Rp856.102.304.460,76. Nilai pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp51.679.393.633,66 atau 6,42 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp804.422.910.827,10. Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 176 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pajak Daerah-LO	339.084.830.467,00	322.681.587.375,00	5,08
2.	Retribusi Daerah-LO	395.151.129.676,90	28.735.437.509,34	1.275,14



NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	10.389.766.938,70	9.902.099.552,70	4,92
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	111.476.577.378,16	443.103.786.390,06	(74,84)
	Jumlah	856.102.304.460,76	804.422.910.827,10	6,42

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah –LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
339.084.830.467,00	322.681.587.375,00	16.403.243.092,00	5,08

Pendapatan pajak daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp16.403.243.092,00 dari tahun 2023 sebesar Rp322.681.587.375,00 menjadi Rp339.084.830.467,00 di tahun 2024 atau naik 5,08 persen dari tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 177 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pajak Hotel-LO	7.051.296.896,00	7.373.270.993,00	(4,37)
2.	Pajak Restoran-LO	38.195.557.681,00	29.732.987.436,00	28,46
3.	Pajak Hiburan-LO	4.207.377.480,00	3.329.412.260,00	26,37
4.	Pajak Reklame-LO	8.118.710.168,00	5.818.949.623,00	39,52
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	105.747.179.990,00	97.719.447.053,00	8,22
6.	Pajak Parkir-LO	1.589.873.212,00	2.137.821.831,00	(25,63)
7.	Pajak Air Tanah-LO	954.945.310,00	816.127.027,00	17,01
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.359.768.200,00	9.038.905.199,00	(18,58)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	87.647.104.931,00	91.552.300.937,00	(4,27)
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	78.213.016.599,00	75.162.365.016,00	4,06
	Jumlah	339.084.830.467,00	322.681.587.375,00	5,08

Pendapatan Pajak daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, sehingga nilai pendapatan pajak daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar ketentuan pajak daerah yang diterbitkan pada tahun 2024. Secara umum, Pendapatan Pajak-LO yang mengalami kenaikan pada pendapatan Pajak reklame sebesar 39,52 persen, sedangkan pajak parkir mengalami penurunan sebesar 25,63 persen dikarenakan penghapusan parkir berlangganan. Berikut rincian masing-masing pendapatan pajak daerah-LO tahun 2024:

a. Pajak Hotel – LO

Pendapatan Pajak Hotel – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.051.296.896,00. Pendapatan

Pajak Hotel – LO mengalami penurunan sebesar 4,37 persen apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Hotel – LO tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 178 Rincian Pendapatan Pajak Hotel-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Pajak Hotel-LO	7.051.296.896,00	7.309.185.353,00	(3,53)
b.	Pajak Pesanggrahan-LO	0,00	64.085.640,00	(100,00)
	Jumlah	7.051.296.896,00	7.373.270.993,00	(4,37)

b. Pajak Restoran – LO

Pendapatan Pajak Restoran – LO tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 28,46 persen dibandingkan dengan Pajak Restoran – LO tahun 2023 sebesar Rp29.732.987.436,00 menjadi Rp38.195.557.681,00 pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 179 Rincian Pendapatan Pajak Restoran-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	38.195.557.681,00	14.912.917.001,00	156,12
b.	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	0,00	5.705.747.605,00	(100,00)
c.	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	0,00	3.173.051.533,00	(100,00)
d.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	0,00	5.941.271.297,00	(100,00)
	Jumlah	38.195.557.681,00	29.732.987.436,00	28,46

c. Pajak Hiburan – LO

Pajak Hiburan-LO pada tahun 2024 sebesar Rp4.207.377.480,00, terjadi peningkatan sebesar 26,37 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 180 Rincian Pendapatan Pajak Hiburan-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Pajak Tontonan Film-LO	4.207.377.480,00	1.882.793.364,00	123,46
b.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	0,00	55.815.000,00	(100,00)
c.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	0,00	214.077.801,00	(100,00)
d.	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	0,00	1.006.836.039,00	(100,00)
e.	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	72.809.520,00	(100,00)
f.	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	97.080.536,00	(100,00)
	Jumlah	4.207.377.480,00	3.329.412.260,00	26,37

d. Pajak Reklame – LO

Pendapatan Pajak Reklame – LO pada tahun 2024 sebesar Rp8.118.710.168,00, terjadi peningkatan sebesar 39,52 persen dari realisasi Pajak Reklame – LO tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 181 Rincian Pendapatan Pajak Reklame-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	8.118.710.168,00	4.669.224.087,00	73,88
b.	Pajak Reklame Kain-LO	0,00	977.853.036,00	(100,00)
c.	Pajak Reklame Selebaran-LO	0,00	129.060.000,00	(100,00)
d.	Pajak Reklame Berjalan-LO	0,00	42.812.500,00	(100,00)
	Jumlah	8.118.710.168,00	5.818.949.623,00	39,52

e. Pajak Penerangan – LO

Pajak Penerangan – LO tahun 2024 sebesar Rp105.747.179.990,00 atau meningkat sebesar 8,22 persen dari realisasi Pajak Penerangan–LO tahun 2023 sebesar Rp97.917.447.053.

f. Pajak Parkir – LO

Pajak Parkir-LO pada tahun 2024 sebesar Rp1.589.873.212,00 atau mengalami penurunan sebesar 25,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.137.821.831,00.

g. Pajak Air Tanah–LO

Pajak Air Tanah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp954.945.310,00 atau meningkat sebesar 17,01 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp816.127.027,00.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO tahun 2024 sebesar Rp7.359.768.200,00 menurun sebesar 18,58 persen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan–LO tahun 2023 sebesar Rp9.038.905.199,00.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan–LO

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO tahun 2024 sebesar Rp87.647.104.931,00 menurun sebesar 4,27 persen dari tahun 2023 sebesar Rp91.552.300.937,00

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) – LO tahun 2024 sebesar Rp78.213.016.599,00 meningkat sebesar 4,06 persen dari tahun 2023 sebesar Rp75.162.365.016,00.

5.4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
395.151.129.676,90	28.735.437.509,34	366.415.692.167,90	1.275,14



Pendapatan retribusi daerah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Retribusi jasa daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp395.151.129.676,90 mengalami kenaikan sebesar Rp366.415.692.167,90 atau 1.275,14 persen dari pendapatan retribusi daerah-LO tahun 2023. Peningkatan signifikan ini dikarenakan adanya reklasifikasi pendapatan lain lain PAD ke Pendapatan Retribusi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 182 Rincian Retribusi-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Retribusi Jasa Umum - LO	386.207.768.998,90	23.055.694.648,34	1.575,11
b.	Retribusi Jasa Usaha - LO	4.941.418.795,00	3.828.856.048,00	29,06
c.	Retribusi Perizinan tertentu - LO	4.001.941.883,00	1.850.886.813,00	116,22
	Jumlah	395.151.129.676,90	28.735.437.509,34	1.275,14

a. Retribusi Jasa Umum – LO

Retribusi jasa umum-LO tahun 2024 sebesar Rp386.207.768.998,90, mengalami kenaikan sebesar 1.575,11 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp23.055.694.648,34. Retribusi Jasa Umum-LO terdiri dari:

Tabel 5. 183 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	369.607.686.928,93	344.493.500,00	107.190,18
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	951.213.500,00	407.953.000,00	133,17
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-LO	0,00	7.460.000,00	(100,00)
e.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	6.808.728.749,97	10.619.752.093,34	(35,89)
f.	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	8.816.983.620,00	6.934.927.190,00	27,14
g.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	16.616.200,00	1.952.703.295,00	(99,15)
h.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	3.045.000,00	(100,00)
i.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	6.540.000,00	349.474.000,00	(98,13)
j.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	10.650.000,00	(100,00)
k.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	2.425.236.570,00	(100,00)
	Jumlah	386.207.768.998,90	23.055.694.648,34	1.575,11

b. Retribusi Jasa Usaha – LO

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2024 sebesar Rp4.941.418.795,00 meningkat sebesar 15,25 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.828.856.048,00. Retribusi Jasa Usaha-LO dimaksud terdiri dari:

Tabel 5. 184 Rincian Retribusi Jasa Usaha-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	690.229.295,00	112.621.045,00	512,88
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	2.600.000,00	(100,00)
3.	Retribusi Terminal-LO	42.180.000,00	40.252.000,00	4,79
4.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	600.753.000,00	515.484.501,00	16,54
5.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	610.050.000,00	653.668.001,00	(6,67)
6.	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	241.830.000,00	168.690.000,00	43,36
7.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.506.695.000,00	2.065.540.501,00	21,36
8.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	249.681.500,00	270.000.000,00	(7,53)
Jumlah		4.941.418.795,00	3.828.856.048,00	29,06

c. Retribusi Perizinan Tertentu – LO

Retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2024 sebesar Rp4.001.941.883,00, jika dibandingkan dengan tahun 2023 meningkat sebesar 116,22 persen dari Retribusi perizinan tertentu-LO tahun 2023 sebesar Rp1.850.886.813,00. Rincian retribusi perizinan tertentu-LO sebagai berikut:

Tabel 5. 185 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	1.139.051.683,00	(100,00)
2.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	0,00	1.900.000,00	(100,00)
3.	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	0,00	36.060.000,00	(100,00)
4.	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	1.482.849.840,00	673.875.130,00	120,05
5.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.519.092.043,00	0,00	0,00
Jumlah		4.001.941.883,00	1.850.886.813,00	116,22

5.4.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
10.389.766.938,70	9.902.099.552,70	487.667.386,00	4,92

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - LO tahun 2024 sebesar Rp10.389.766.938,70 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan Pemerintah Kabupaten Jember pada perusahaan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik sebesar Rp487.667.386,00 atau 4,92 persen dari tahun 2023 sebesar Rp9.902.099.552,70 dengan rincian:

Tabel 5. 186 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD -LO	77.966.008,00	0,00	0,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	6.084.439.331,25	5.939.012.393,75	2,45
3.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	4.227.361.599,45	3.963.087.158,95	6,67
Jumlah		10.389.766.938,70	9.902.099.552,70	4,92

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO dalam hal ini Bank Jatim sebesar Rp6.084.439.331,25 merupakan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jember di tahun 2024 dan dicatat menggunakan metode biaya.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO sebesar Rp4.227.361.599,45 merupakan pengakuan laba yang diperoleh oleh Perumdam Tirta Pandalungan Kabupaten Jember tahun 2024. Sedangkan Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (PDP Kahyangan)- LO sebesar Rp77.966.008,00 merupakan pengakuan laba yang diperoleh oleh Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Kabupaten Jember tahun 2024. Penyertaan modal pada PDP Kahyangan Kabupaten Jember dan PDAM (Perumdam Tirta Pandalungan) Kabupaten Jember dicatat menggunakan metode ekuitas.

5.4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
111.476.577.378,16	443.103.786.390,06	(331.627.209.011,90)	(74.84)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO menurun sebesar Rp289.558.888.837,79 atau 74.84 persen dari tahun 2023 sebesar Rp443.104.650.451,14 menjadi Rp111.476.577.378,16 di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 187 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah –LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	4.236.953.188,00	154.140.227,00	2.648,77
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	7.068.337.233,00	13.876.495.360,00	(49,06)

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
3.	Jasa Giro-LO	4.487.406.842,78	2.800.604.538,69	60,23
4.	Pendapatan Bunga-LO	710.273.972,58	1.638.520.547,87	(56,65)
5.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	44.720.845,00	421.376.932,00	(89,39)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	400.560.178,00	1.309.590.256,73	(69,41)
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	379.253.188,00	(143.902.247,00)	(363,55)
9.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.893.056.358,87	2.372.604.285,78	(20,21)
10.	Pendapatan dari BLUD-LO	92.256.015.571,93	420.674.356.488,99	(78,07)
JUMLAH		111.476.577.378,16	443.103.786.390,06	(74,84)

5.4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
3.029.623.907.586,00	2.829.210.767.574,18	200.413.140.011,82	7,08

Pendapatan transfer-LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp3.029.623.907.586,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.413.4140.011,82 atau 7,08 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp2.829.210.767.574,18 yang terdiri dari:

Tabel Rincian Pendapatan Transfer-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.724.233.462.486,00	2.501.420.374.553,18	8,91
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	305.390.445.100,00	327.790.393.021,00	(6,83)
Jumlah		3.029.623.907.586,00	2.829.210.767.574,18	7,08

5.4.1.1.1.5 Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
2.724.233.462.486,00	2.501.420.374.553,18	222.813.087.932,82	8,91

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO mengalami kenaikan sebesar Rp222.813.087.932,82 atau sebesar 8,91 persen di tahun 2024 sebesar Rp2.724.233.462.486,00 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp2.501.420.374.553,18 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 188 Rincian Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat -LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	217.238.300.409,00	189.483.152.986,18	14,65

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.832.793.869.706,00	1.704.938.164.985,00	7,50
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	104.185.840.707,00	45.036.717.101,00	131,34
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	564.315.161.664,00	561.962.339.481,00	0,42
5.	Insentif Fiskal-LO	5.700.290.000,00	0,00	0,00
Jumlah		2.724.233.462.486,00	2.501.420.374.553,18	8,91

Dana Bagi Hasil (DBH) – LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) – LO mengalami penurunan sebesar 14,65 persen dari tahun 2023 sebesar Rp189.483.152.986,18 menjadi Rp217.238.300.409,00 di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 189 Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	DBH PBB-LO	27.319.496.409,00	13.044.290.000,00	109,44
2.	DBH PPh Pasal 21-LO	25.221.603.000,00	24.664.264.986,18	2,26
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	2.207.948.000,00	3.043.988.000,00	(27,47)
4.	DBH CHT-LO	126.063.961.000,00	109.261.811.000,00	15,38
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LO	23.103.616.000,00	27.812.985.000,00	(16,93)
6.	DBH SDA Gas Bumi-LO	3.987.976.800,00	2.083.438.000,00	91,41
7.	DBH SDA Perusahaan Panas Bumi-LO	50.431.200,00	57.008.000,00	(11,54)
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	2.340.800,00	5.102.000,00	(54,12)
9.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	6.353.671.200,00	5.914.870.000,00	7,42
10.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	1.042.290.000,00	1.559.521.000,00	(33,17)
11.	DBH SDA Perikanan-LO	1.884.966.000,00	2.035.875.000,00	(7,41)
Jumlah		217.238.300.409,00	189.483.152.986,18	14,65

Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) – LO meningkat sebesar 7,50 persen dari tahun 2023 sebesar Rp1.704.938.164.985,00 menjadi Rp1.832.793.869.706,00 di tahun 2024. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) – LO terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 190 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	DAU-LO	1.832.793.869.706,00	1.639.549.754.985,00	11,79
2.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	0,00	4.400.000.000,00	(100,00)

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
3.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	0,00	60.988.410.000,00	(100,00)
Jumlah		1.832.793.869.706,00	1.704.938.164.985,00	7,50

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO mengalami peningkatan sebesar 131,34 persen dari tahun 2023 sebesar Rp45.036.717.101,00 menjadi Rp104.185.840.707,00 di tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	245.265.800,00	303.164.500,00	(19,10)
2.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	16.058.831.419,00	14.366.655.100,00	11,78
3.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	10.268.836.000,00	19.007.481.151,00	(45,97)
4.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	3.455.996.570,00	3.647.625.000,00	(5,25)
5.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.784.955.200,00	815.159.750,00	118,97
6.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	20.719.899.898,00	0,00	0,00
7.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	27.365.361.722,00	0,00	0,00
8.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	1.812.000.000,00	0,00	0,00
9.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	1.836.788.000,00	0,00	0,00
10.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	497.160.999,00	2.152.472.000,00	(76,90)
11.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	1.491.481.001,00	0,00	0,00
12.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	913.164.700,00	3.877.836.000,00	(76,45)
13.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	2.739.494.100,00	0,00	0,00
14.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.340.000.000,00	0,00	0,00
15.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	0,00	474.823.600,00	(100,00)
16.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	0,00	391.500.000,00	(100,00)
17.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	5.772.142.624,00	0,00	0,00
18.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	213.346.400,00	0,00	0,00
19.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	576.677.974,00	0,00	0,00
20.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	2.796.645.000,00	0,00	0,00
21.	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)-LO	4.297.793.300,00	0,00	0,00
Jumlah		104.185.840.707,00	45.036.717.101,00	131,34

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO meningkat sebesar 0,42 persen



dari tahun 2023 sebesar Rp561.962.339.481,00 menjadi Rp564.315.161.664,00 di tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	0,00	240.115.204.579,00	(100,00)
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	0,00	8.765.000.000,00	(100,00)
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	212.538.150.215,00	225.305.159.651,00	(5,67)
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	8.528.945.000,00	5.387.805.048,00	58,30
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	42.646.992.000,00	(100,00)
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan-LO	0,00	2.389.190.650,00	(100,00)
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	20.050.335.000,00	(100,00)
10.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	177.092.100,00	275.624.569,00	(35,75)
11.	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	20.383.213.647,00	15.410.142.924,00	32,27
12.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	350.721.326,00	266.551.000,00	31,58
13.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.171.965.800,00	1.026.781.100,00	111,53
14.	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	0,00	323.552.960,00	(100,00)
15.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	237.863.266.384,00	0,00	0,00
16.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	7.155.000.000,00	0,00	0,00
17.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	41.588.493.200,00	0,00	0,00
18.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	675.000.000,00	0,00	0,00
19.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler-LO	1.393.680.000,00	0,00	0,00
20.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00	0,00
21.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	9.154.653.996,00	0,00	0,00
22.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	22.244.979.996,00	0,00	0,00
Jumlah		564.315.161.664,00	561.962.339.481,00	0,42

5.4.1.1.1.6 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
305.390.445.100,00	327.790.393.021,00	(22.399.947.921,00)	(6,83)

Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO mengalami penurunan sebesar minus Rp22.399.947.921,00 atau minus 6,83 persen dari tahun 2023 sebesar Rp327.790.393.021,00 menjadi Rp305.390.445.100,00 di tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 191 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	293.673.542.400,00	316.163.950.200,00	(7,11)
2.	Bantuan Keuangan	11.716.902.700,00	11.626.442.821,00	0,78
Jumlah		305.390.445.100,00	327.790.393.021,00	(6,83)

Pendapatan Bagi Hasil – LO

Pendapatan Bagi Hasil – LO menurun sebesar 7,11 persen dari tahun 2023 sebesar Rp316.163.950.200,00 menjadi Rp293.673.542.400,00 di tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 192 Rincian Pendapatan Bagi Hasil – LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	73.387.072.200,00	72.760.694.500,00	0,86
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	41.260.703.300,00	41.806.470.900,00	(1,31)
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	78.159.257.400,00	103.393.126.800,00	(24,41)
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	494.527.600,00	665.371.600,00	(25,68)
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	100.371.981.900,00	97.538.286.400,00	2,91
Jumlah		293.673.542.400,00	316.163.950.200,00	(7,11)

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang meningkat sebesar 0,78 persen dari tahun 2023 sebesar Rp11.626.442.821,00 menjadi Rp11.716.902.700,00 di tahun 2024.

5.4.1.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
45.696.378.189,43	62.890.481.261,19	(17.194.103.071,76)	(27,34)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah-LO merupakan Pendapatan Hibah -LO berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO mengalami penurunan sebesar minus Rp17.194.103.071,76 atau sebesar minus 27,34 dari tahun 2023 sebesar Rp62.890.481.261,19 menjadi Rp45.696.378.189,43 di tahun 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 193 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	39.997.665.478,43	62.455.731.261,19	(35,96)
2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	5.482.222.711,00	434.750.000,00	1.161,01
3.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	216.490.000,00	0,00	0,00
Jumlah		45.696.378.189,43	62.890.481.261,19	(27,34)

Pendapatan hibah terdiri dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah Non Medis dari Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan) sebesar Rp212.956.380,00, Hibah Obat-obatan dari Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan) sebesar Rp32.437.514.503,43, Hibah Form E-KTP TA. 2024 (Dispendukcapil) Rp1.213.772.200,00, Hibah Kit Hemocue dan Microcuvettes dari Kementerian Kesehatan (Dinas Kesehatan) sebesar Rp286.483.465,00 dan Hibah dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Dirjen Baru Terbarukan dan Konversi Energi Jalan dan Peralatan Mesin (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Cipta Karya) sebesar Rp5.846.938.930,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya terdiri dari Hibah Insektisida dan Fungisida dari UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Suarabaya sebesar Rp284.500.000,00 dan Hibah Obat dan Bahan Lainnya dari BKKBN Provinsi Jawa Timur sebesar Rp5.197.722.711,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri berupa Hibah dari Bank Indonesia sebesar Rp216.490.000,00.

5.4.1.2 Beban

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
3.825.726.125.551,72	3.716.726.368.008,58	108.999.757.543,14	2,93

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam tahun yang bersangkutan yang menurunkan ekuitas. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban Operasional pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.825.726.125.551,72 dan Rp3.716.725.503.947,50. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban Pemerintah Kabupaten Jember mengalami peningkatan sebesar Rp108.999.757.543,14 atau 2,93 persen. Rincian beban tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Pegawai	1.420.707.502.025,00	1.361.606.427.997,47	4,34
	Beban Barang dan Jasa	1.388.134.247.357,62	1.400.953.008.156,81	(0,92)
2.	Beban Persediaan	293.430.487.246,51	329.927.698.045,78	(11,06)
3.	Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	57.835.262.001,00	49.830.165.278,00	16,06
4.	Beban Jasa	948.245.517.348,00	929.101.977.141,30	2,06



NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
5.	Beban Pemeliharaan	23.966.910.341,11	25.526.175.853,73	(6,11)
6.	Beban Perjalanan Dinas	64.656.070.421,00	66.566.991.838,00	(2,87)
7.	Beban Hibah	359.230.316.277,09	289.926.844.563,22	23,90
8.	Beban Bantuan Sosial	16.972.075.800,00	29.185.958.000,00	(41,85)
9.	Beban Penyisihan Piutang	33.021.207.805,24	32.728.135.970,80	0,90
10.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	397.346.405.677,77	401.930.534.961,20	(1,14)
11.	Beban Transfer	210.314.370.609,00	200.394.594.298,00	4,95
12.	Beban Tidak Terduga	0,00	864.061,08	(100,00)
	Jumlah	3.825.726.125.551,72	3.716.726.368.008,58	2,93

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan beberapa nilai beban yakni beban jasa. pemeliharaan, perjalanan dinas dan bantuan sosial. Di sisi lain, terdapat nilai beban yang meningkat seperti beban persediaan, hibah, beban penyisihan piutang dan beban tranfer. Adapun penjelasan rinci untuk masing-masing jenis beban di atas adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Beban Pegawai

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.420.707.502.025,00	1.361.606.427.997,47	59.101.074.027,53	4,34

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Beban Pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud.

Beban pegawai sebesar Rp1.420.707.502.025,00 naik sebesar atau 4,34 persen dari tahun 2023 sebesar Rp1.361.606.427.997,47 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 194 Rincian Beban Pegawai

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	882.144.351.625,42	840.769.908.231,00	4,92
b.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	152.411.636.707,00	140.048.099.565,00	8,83
c.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	353.651.564.301,58	348.396.985.021,47	1,51
d.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.911.414.432,00	29.929.200.178,00	(0,06)
e.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	924.696.325,00	1.129.766.202,00	(18,15)

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
f.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.663.838.634,00	1.332.468.800,00	24,87
	Jumlah	1.420.707.502.025,00	1.361.606.427.997,47	4,34

Penjelasan masing-masing beban pegawai adalah sebagai berikut:

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 41.374.443.394,42 atau 4,92 persen dari tahun 2023 sebesar Rp840.769.908.231,00 menjadi Rp882.144.351.625,42 tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan ASN

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Gaji Pokok ASN	668.533.940.746,00	639.765.067.357,00	4,50
2.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	63.020.394.947,00	59.545.717.321,00	5,84
3.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	8.202.559.000,00	8.200.040.746,00	0,03
4.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	32.650.625.950,00	34.016.584.605,00	(4,02)
5.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.475.665.000,00	15.963.415.153,00	(3,06)
6.	Beban Tunjangan Beras ASN	36.856.711.269,00	37.308.437.512,00	(1,21)
7.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.250.926.446,00	2.482.705.611,00	151,78
8.	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.646.148,00	8.774.262,00	9,94
9.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	45.658.548.993,42	38.036.452.671,00	20,04
10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.371.189.133,00	1.497.279.082,00	(8,42)
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	4.114.143.993,00	3.945.433.911,00	4,28
	Jumlah	882.144.351.625,42	840.769.908.231,00	4,92

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban tambahan penghasilan ASN tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp140.048.099.565,00 dan Rp152.411.636.707,00, atau meningkat sebesar Rp12.363.537.142,00 atau 8,83 persen yang terdiri dari:

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan ASN

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	151.305.663.162,00	140.048.099.565,00	8,04
2.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	187.391.100,00	0,00	0,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	74.105.200,00	0,00	0,00
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	844.477.245,00	0,00	0,00
	Jumlah	152.411.636.707,00	140.048.099.565,00	8,83

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.254.579.280,11 atau sebesar 1,51 persen dari tahun 2023 sebesar Rp341.095.836.701,58 menjadi Rp353.651.564.301,58 di tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	8.224.637.500,00	10.416.601.006,00	(21,04)
3.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	183.706.327.872,00	196.774.677.215,00	(6,64)
4.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	903.000.000,00	1.109.500.000,00	(18,61)
5.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	106.501.036.333,58	98.515.453.800,47	8,11
6.	Beban Honorarium	13.291.193.300,00	16.265.452.000,00	(18,29)
7.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	34.800.000,00	(100,00)
8.	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	33.379.369.296,00	18.374.501.000,00	81,66
9.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	7.646.000.000,00	6.906.000.000,00	10,72
Jumlah		353.651.564.301,58	348.396.985.021,47	1,51

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban gaji dan tunjangan DPRD tahun 2024 sebesar turun sebesar Rp17.785.746,00 atau 0,06 persen dari tahun 2023 sebesar Rp29.929.200.178,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Uang Representasi DPRD	1.112.580.000,00	1.106.385.000,00	0,56
2.	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	132.178.200,00	131.680.500,00	0,38
3.	Beban Tunjangan Beras DPRD	168.883.440,00	143.970.960,00	17,30
4.	Beban Uang Paket DPRD	95.340.000,00	94.720.500,00	0,65
5.	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.613.241.000,00	1.604.258.250,00	0,56
6.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.905.900,00	135.898.350,00	(8,09)
7.	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.156.425,00	14.768.250,00	(71,86)
8.	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.746.500.000,00	0,84
9.	Beban Tunjangan Reses DPRD	722.505.000,00	1.457.505.000,00	(50,43)
10.	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.591.659,00	787.090,00	610,42
11.	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.778.117.808,00	10.736.626.278,00	0,39
12.	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.880.000.000,00	5.743.500.000,00	2,38
13.	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	453.915.000,00	12.600.000,00	3.502,50
Jumlah		29.911.414.432,00	29.929.200.178,00	(0,06)

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 sebesar Rp924.696.325,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.069.877,00 atau 18,15 persen dibanding tahun 2023 sebesar Rp1.129.766.202,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
2.	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00
3.	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
4.	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160,00	7.097.160,00	0,00
5.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.623.755,00	644.522,00	151,93
6.	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	360,00	42.000	(14,29)
7.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.483.520,00	5.486.880,00	(0,06)
8.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	112.320,00	0,00
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	336.960,00	0,00
10.	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	750.106.250,00	956.151.940,00	(21,55)
Jumlah		924.696.325,00	1.129.766.202,00	(18,15)

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.663.838.634,00 dan Rp1.332.468.800,00 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp331.369.834,00 atau 24,87 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.288.000,00	314.496.000,00	(8,33)
2.	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.375.550.634,00	1.017.972.800,00	35,13
Jumlah		1.663.838.634,00	1.332.468.800,00	24,87

Beban Barang dan Jasa

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
1.388.134.247.357,62	1.400.953.008.156,81	(12.818.760.799,19)	(0,92)

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban barang dan jasa terdiri atas beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dan beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat senilai Rp1.400.953.008.156,81 turun sebesar Rp12.818.760.799,19



atau 0,92 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.388.134.247.357,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Barang dan Jasa

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Beban Persediaan	351.265.749.247,51	379.757.863.323,78	(7,50)
	- Beban Persediaan	293.430.487.246,51	321.552.901.867,78	(8,75)
	- Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan	57.835.262.001,00	49.830.165.278,00	16,06
2.	Beban Jasa	948.245.517.348,00	929.101.977.141,30	2,06
3.	Beban Pemeliharaan	23.966.910.341,11	25.526.175.853,73	(6,11)
4.	Beban Perjalanan Dinas	64.656.070.421,00	66.566.991.838,00	(2,87)
	Jumlah	1.388.134.247.357,62	1.400.953.008.156,81	(0,92)

5.4.1.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2024 terinci atas Beban Persediaan dan Beban Barang Habis Pakai Non Persediaan, sebesar Rp351.265.749.247,51 menurun sebesar 7,50 persen dari tahun 2023 sebesar Rp379.757.863.323,78 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Persediaan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
293.430.487.246,51	321.552.901.867,78	(28.122.414.621,27)	(8,75)

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak, Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp293.430.487.246,51 menurun 8,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp321.552.901.867,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 195 Realisasi Beban Persediaan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.006.115.106,10	12.825.909.532,00	1,41
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	24.161.479.866,01	27.211.896.865,37	(11,21)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.972.039.585,00	18.969.436.171,00	(10,53)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	853.919.455,00	1.324.755.600,00	(35,54)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	222.144.500,00	317.692.825,00	(30,08)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	102.960.877,00	105.000.760,00	(1,94)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	386.829.470,00	649.483.766,00	(40,44)
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.300.000,00	0,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	52.161.320.807,11	46.615.632.435,02	11,90
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.064.933.699,00	3.593.643.948,00	(42,54)
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	141.449.000,00	(100,00)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.138.098.521,26	1.358.275.992,33	(16,21)

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	539.150.350,00	9.608.700,00	5.511,06
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	8.068.165,00	(100,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	117.147.318,00	678.154.700,00	(82,73)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	38.381.180,00	57.023.500,00	(32,69)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.532.387,00	376.394.747,00	(98,00)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.682.743.041,02	6.541.748.552,63	(43,70)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.465.955.252,22	3.403.350.055,50	1,84
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.725.050.534,16	16.478.678.236,88	(28,85)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.459.000,00	768.551.004,90	(42,69)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	6.472.500,00	12.907.500,00	(49,85)
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.184.697.663,36	4.807.004.313,27	(12,95)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.468.924.383,66	3.568.346.150,40	(30,81)
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.820.345.579,29	4.130.945.155,42	(55,93)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.670.913.534,00	5.348.080.823,00	(50,06)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	529.542.039,00	661.256.626,00	(19,92)
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.035.277.245,00	2.862.476.602,00	(28,90)
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.761.226.242,36	4.637.052.829,44	(40,45)
30	Beban Obat-Obatan-Obat	94.970.828.165,15	85.597.027.494,91	10,95
31	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.684.112.852,89	15.609.611.527,74	0,48
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.273.681.478,72	40.310.878.554,53	(42,26)
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.460.000,00	47.813.125,00	(4,92)
34	Beban Natura dan Pakan-Natura	4.136.945.501,20	3.695.574.273,44	11,94
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	300.545.000,00	353.350.000,00	(14,94)
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	128.187.900,00	408.895.754,00	(68,65)
37	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	11.225.109,00	13.255.000,00	(15,31)
38	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	133.773.000,00	(100,00)
39	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	697.110.000,00	245.245.000,00	184,25
40	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	164.335.906,00	40.950.000,00	301,31
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	536.988.401,00	856.194.227,00	(37,28)
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.875.596.813,00	2.390.152.268,00	(21,53)
43	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	221.892.500,00	12.295.000,00	1.704,74
44	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.091.779,00	30.660.000,00	(50,78)
45	Beban Pakaian Siaga	0,00	33.600.000,00	(100,00)
46	Beban Pakaian KORPRI	3.150.000,00	0,00	0,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	256.443.877,00	375.352.358,00	(31,68)
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	845.864.047,00	674.919.660,00	25,33
49	Beban Pakaian Olahraga	2.421.397.060,00	3.110.680.069,00	(22,16)
50	Beban Pakaian Paskibraka	167.700.000,00	137.450.000,00	22,01
51	Beban Pakaian Jas/Safari	40.970.721,00	12.400.000,00	230,41
Jumlah		293.430.487.246,51	321.552.901.867,78	(8,75)



Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

2. Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
57.835.262.001,00	58.204.961.456,00	356.784.455,00	0,64

Beban barang tak habis pakai pada tahun 2024 sebesar Rp57.835.262.001,00 mengalami penurunan dari beban barang habis pakai non persediaan tahun 2023 sebesar Rp58.204.961.456,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,64 persen terinci sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Barang Pakai Habis Non Persediaan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	23.697.014.012,00	30.729.054.151,00	(22,88)
2	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.522.190.705,00	3.576.567.363,00	(29,48)
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6.270.000,00	0,00	0,00
4	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.049.329.862,00	8.374.796.178,00	(3,89)
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	14.457.090.469,00	12.600.865.013,00	14,73
6	Beban Komponen-Komponen Lainnya	31.105.000,00	191.242.000,00	(83,74)
7	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	2.732.436.751,00	(100,00)
8	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	9.072.261.953,00	0,00	0,00
		57.835.262.001,00	58.204.961.456,00	(0,64)

Beban makanan dan minuman aktivitas lapangan pada tahun 2023 sebesar Rp8.374.796.178,00 pada beban persediaan direklas ke beban barang pakai habis non persediaan sehingga jumlah total beban persediaan sebesar Rp321.552.901.867,78.

5.4.1.2.3 Beban Jasa

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
948.245.517.348,00	929.101.977.141,30	19.143.540.206,70	2,06

Beban Jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 19.143.540.206,70 atau 2,06 persen dari tahun 2023 sebesar Rp929.101.977.141,30 menjadi Rp948.245.517.348,00 di tahun

2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 196 Realisasi Beban Jasa

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	2.700.000,00	(100,00)
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.652.470.250,00	17.474.701.078,00	(33,32)
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.039.650.000,00	3.211.345.300,00	(36,49)
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	31.660.782.000,00	27.791.095.199,00	13,92
5	Beban Honorarium Rohaniwan	118.850.000,00	125.290.000,00	(5,14)
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	54.300.000,00	44.200.000,00	22,85
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	467.300.000,00	(100,00)
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.411.202.000,00	9.632.700.000,00	(85,35)
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	563.600.000,00	568.300.000,00	(0,83)
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	70.133.744.000,00	36.010.845.565,00	94,76
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	108.225.348.443,00	74.176.823.709,47	45,90
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	41.902.000,00	(100,00)
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.951.012.309,00	1.987.320.143,00	48,49
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11.204.580.000,00	11.539.675.000,00	(2,90)
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	56.468.000,00	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	4.636.650.000,00	9.255.250.000,00	(49,90)
17	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	483.500.000,00	0,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	67.942.220,00	252.072.449,00	(73,05)
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	47.190.345.982,00	81.242.360.619,00	(41,91)
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.739.500.000,00	1.202.650.000,00	44,64
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	40.065.611.199,00	41.742.797.664,00	(4,02)
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.087.939.307,00	6.042.875.019,00	(15,80)
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.300.395.865,00	15.263.740.444,00	(6,31)
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.928.422.430,00	4.275.684.192,00	(31,51)
25	Beban Jasa Tenaga Caraka	394.550.000,00	442.600.000,00	(10,86)
26	Beban Jasa Tenaga Supir	6.652.440.020,00	443.548.586,00	1.399,82
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	346.334.124,00	210.818.795,00	64,28
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	733.959.945,00	108.556.250,00	576,11
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.600.000,00	21.460.528,00	14,63
30	Beban Jasa Tata Rias	54.668.919,00	24.750.000,00	120,88
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.219.436.082,00	1.549.372.648,00	(21,29)
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	19.913.000,00	137.005.467,00	(85,47)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	973.715.100,00	765.000,00	127.183,02
34	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	182.881.630,00	(100,00)
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.661.081.432,00	2.083.444.280,00	(20,27)
36	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	40.231.063.535,00	42.859.701.325,00	(6,13)
37	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	13.800.000,00	13.202.900,00	4,52
38	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	38.237.094,00	75.226.496,00	(49,17)
39	Beban Jasa Kalibrasi	1.015.287.890,00	534.255.326,00	90,04
40	Beban Jasa Pengolahan Sampah	2.348.602.280,00	1.868.029.039,00	25,73
41	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	45.000.000,00	27.000.000,00	66,67



NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
42	Beban Jasa Pengukuran Tanah	379.923.000,00	667.836.780,00	(43,11)
43	Beban Jasa Jalan/Tol	14.786.000,00	0,00	0,00
44	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.626.741.977,00	1.232.777.670,00	275,31
45	Beban Tagihan Telepon	6.227.897.815,00	5.828.583.899,00	6,85
46	Beban Tagihan Air	844.689.180,00	751.190.244,00	12,45
47	Beban Tagihan Listrik	54.813.438.346,00	55.903.861.180,89	(1,95)
48	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	72.990.223,00	90.325.000,00	(19,19)
49	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.057.756.205,00	7.624.616.603,00	(7,43)
50	Beban Paket/Pengiriman	219.218.062,00	183.279.356,00	19,61
51	Beban Penambahan Daya	74.206.879,00	107.019.380,00	(30,66)
52	Beban Registrasi/Keanggotaan	16.418.700,00	14.022.300,00	17,09
53	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	776.148.448,00	1.096.267.540,00	(29,20)
54	Beban Pengolahan Air Limbah	124.170,75	0,00	0,00
55	Beban Lembur	8.822.526.000,00	9.990.974.910,00	(11,70)
56	Beban Medical Check Up	149.034.000,00	157.359.000,00	(5,29)
57	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	39.844.578.266,14	38.505.217.560,23	3,48
58	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.634.085.500,00	3.488.530.450,00	4,17
59	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	95.567.953.600,00	57.825.110.000,00	65,27
60	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.780.552.500,00	7.775.154.500,00	12,93
61	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.044.460.645,40	12.177.159.308,00	(25,73)
62	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.991.837.163,00	6.957.441.591,00	43,61
63	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.576.251.802,00	1.127.177.764,00	128,56
64	Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	36.100.273.605,00	56.352.251.926,00	(35,94)
65	Beban Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	12.211.200,00	0,00	0,00
66	Beban Sewa Tanah	45.000.000,00	0,00	0,00
67	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	12.705.000,00	(100,00)
68	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	0,00	69.801.100,00	(100,00)
69	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga	0,00	1.500.000,00	(100,00)
70	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	2.000.000,00	(100,00)
71	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	0,00	1.130.436.800,00	(100,00)
72	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.308.638.123,00	3.406.554.666,00	26,48
73	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	46.405.000,00	(100,00)
74	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	49.027.500,00	(100,00)
75	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	104.141.324,00	(100,00)
76	Beban Sewa Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	156.783.000,00	(100,00)
77	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	1.838.772.277,00	5.155.866.403,00	(64,34)
78	Beban Sewa Mebel	110.555.336,00	54.189.510,00	104,02
79	Beban Sewa Alat Pendingin	17.648.500,00	11.657.000,00	51,40
80	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	530.177.732,00	468.834.066,00	13,08
81	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	107.950.000,00	(100,00)
82	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	139.400.000,00	304.250.000,00	(54,18)
83	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata	180.000.000,00	262.800.000,00	(31,51)
84	Beban Sewa Peralatan Umum	58.037.000,00	81.984.000,00	(29,21)
85	Beban Sewa Komputer Jaringan	197.500.000,00	200.200.000,00	(1,35)
86	Beban Sewa Gas-Liquid Distillation Equipment	61.050.000,00	0,00	0,00
87	Beban Sewa Bangunan Gudang	135.100.000,00	45.600.000,00	196,27



NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
88	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	64.706.500,00	270.797.375,00	(76,11)
89	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.250.000,00	0,00	0,00
90	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	1.023.560.560,00	(100,00)
91	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.198.000,00	4.165.000,00	(71,24)
92	Beban Sewa Hotel	493.496.448,00	1.838.730.643,00	(73,16)
93	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	2.846.435,67	5.692.871,33	(50,00)
94	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	86.160.000,00	86.010.000,00	0,17
95	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya	9.584.850,00	4.990.000,00	92,08
96	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.100.000,00	11.345.076,00	(55,05)
97	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	21.067.800,00	295.082.000,00	(92,86)
98	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	0,00	266.014.922,15	(100,00)
99	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	117.484.000,00	18.050.000,00	550,88
100	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	3.184.011.602,00	3.839.722.170,00	(17,08)
101	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	493.489.965,00	(100,00)
102	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	488.340.856,00	246.246.400,00	98,31
103	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.689.800,00	267.148.000,00	(96,37)
104	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	298.166.202,00	(100,00)
105	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	223.079.350,00	(100,00)
106	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.950.557.196,00	2.052.269.247,41	(4,96)
107	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	242.535.072,00	177.711.900,00	36,48
108	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	16.576.000,00	0,00	0,00
109	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	0,00	334.687.200,00	(100,00)
110	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	163.278.500,00	174.223.500,00	(6,28)
111	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	50.000.000,00	0,00	0,00
112	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	263.617.510,00	417.260.469,00	(36,82)
113	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	289.923.788,00	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	48.673.500,00	98.530.800,00	(50,60)
115	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	42.000.000,00	73.700.000,00	(43,01)
116	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	478.179.675,00	495.986.400,00	(3,59)
117	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.491.639.140,00	3.256.717.000,00	(54,20)
118	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	1.275.559.500,00	1.774.013.387,00	(28,10)
119	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	293.700.000,00	570.838.500,00	(48,55)



NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
120	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	2.900.000,00	7.433.000,00	(60,98)
121	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	45.498.750,00	(100,00)
122	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.486.571.146,00	1.814.985.848,00	37,00
123	Beban Sosialisasi	249.023.500,00	499.105.800,00	(50,11)
124	Beban Bimbingan Teknis	3.030.555.750,00	3.532.694.419,00	(14,21)
125	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	392.002.000,00	(100,00)
126	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	11.375.000,00	18.637.500,00	(38,97)
127	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	63.862.500,00	70.512.500,00	(9,43)
128	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.500.000,00	7.550.000,00	(13,91)
129	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	14.096.875,00	13.650.679,00	3,27
130	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	231.562.500,00	262.012.500,00	(11,62)
131	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.843.750,00	3.845.000,00	(26,04)
132	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.421.875,00	2.038.125,00	(30,24)
133	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00
134	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	123.500.000,00	123.500.000,00	0,00
135	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	146.250.000,00	161.150.000,00	(9,25)
136	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.630.925.841,18	13.876.801.412,94	(1,77)
137	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	463.971.848,00	(100,00)
138	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	18.950.220,00	75.800.880,00	(75,00)
139	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	361.490,00	722.980,00	(50,00)
140	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.119.017.144,00	74.156.843.399,88	(10,84)
141	Beban Barang Jasa BOS	141.723.779.690,86	142.129.260.791,00	(0,29)
Jumlah		948.245.517.348,00	929.101.977.141,30	2,06

5.4.1.2.4 Beban Pemeliharaan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
23.966.910.341,11	25.526.175.853,73	(1.559.265.512,62)	(6,11)

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 sebesar Rp23.966.910.341,11 turun sebesar 6,11 persen dari tahun 2023 sebesar Rp25.526.175.853,73.



Tabel 5. 197 Realisasi Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a	Beban Pemeliharaan Tanah	17.660.000,00	0,00	0,00
b	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.874.470.112,00	18.221.897.436,99	(7,39)
c	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.666.133.187,11	5.733.752.352,74	(1,18)
d	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.026.641.842,00	1.171.901.962,00	(12,40)
e	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	230.690.000,00	398.624.102,00	(42,13)
	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	151.315.200,00	0,00	0,00
	Jumlah	23.966.910.341,11	25.526.175.853,73	(6,11)

5.4.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
64.656.070.421,00	66.566.991.838,00	(1.910.921.417,00)	(2,87)

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 adalah sebesar Rp64.656.070.421,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.910.921.417,00 atau 2,87 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp66.566.991.838,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 198 Realisasi Beban Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a	Beban Perjalanan Dinas Biasa	36.278.294.021,00	38.285.606.758,00	(5,24)
c	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.623.809.754,00	25.595.550.487,00	(3,80)
d	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.506.307.448,00	1.652.720.000,00	112,15
e	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	247.659.198,00	1.033.114.593,00	(76,03)
	Jumlah	64.656.070.421,00	66.566.991.838,00	(2,87)

5.4.1.2.6 Beban Hibah

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
359.230.316.277,09	289.926.844.563,22	69.303.471.713,87	23,9

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/ daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan

dari RKUD atau entitas pelaporan. Beban hibah tahun 2024 sebesar Rp359.230.316.277,09 meningkat sebesar Rp69.303.471.713,87 atau 23,9 persen dari tahun 2023 sebesar Rp289.926.844.563,22 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 199 Realisasi Beban Hibah

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	54.253.535.084,09	0,00	0,00
b	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	55.989.613.860,00	39.184.255.000,00	42,89
c	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	61.615.204.100,00	58.563.225.329,22	5,21
d	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	44.800.662.650,00	(100,00)
e	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	885.162.800,00	1.728.600.000,00	(48,79)
f	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	80.401.810.453,00	58.797.416.547,00	36,74
g	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	22.835.950.504,00	(100,00)
h	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	1.075.000.000,00	(53,49)
i	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	252.800.000,00	0,00	0,00
j	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.015.239.766,00	21.289.906.387,00	(1,29)
k	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	34.774.284.267,00	35.527.043.146,00	(2,12)
l	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	6.124.784.997,00	6.124.785.000,00	(0,00)
m	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	41.934.200.950,00	0,00	0,00
n	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.483.680.000,00	0,00	0,00
Jumlah		359.230.316.277,09	289.926.844.563,22	23,9

5.4.1.2.9 Beban Bantuan sosial

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
16.972.075.800,00	29.185.958.000,00	(12.213.882.200,00)	(41,85)

Beban Bantuan Sosial merupakan merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah sebagai akibat dari aktivitas pemerintah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial maupun bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif baik dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp16.972.075.800,00 turun sebesar Rp12.213.882.200,00 atau 41,85 persen dari tahun 2023 sebesar Rp29.185.958.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 200 Realisasi Beban Bantuan Sosial

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
a	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.430.775.000,00	12.037.900.000,00	(38,27)
b	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	9.541.300.800,00	14.460.308.000,00	(34,02)
c	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.687.750.000,00	(100,00)
Jumlah		16.972.075.800,00	29.185.958.000,00	(41,85)

5.4.1.2.10 Beban Penyisihan Piutang

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
33.021.207.805,24	32.728.135.970,80	293.071.834,44	0,90

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2024. Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 sebesar Rp33.021.207.805,24 naik sebesar Rp atau 0,90 persen dari tahun 2023 sebesar Rp32.728.135.970,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 201 Realisasi Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	31.188.107.362,74	30.952.007.189,77	0,76
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	639.995.349,78	572.652.545,78	11,76
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	506.916.430,72	896.471.607,27	(43,45)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	686.188.662	299.049.261,98	129,46
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	7.955.366,00	(100,00)
Jumlah		33.021.207.805,24	32.728.135.970,80	0,90



a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp31.188.107.362,74 dan Rp30.952.007.189,77 di tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 0,76 persen, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	119.732.841,32	(172.157.182,74)	(169,56)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	(73.212.578,99)	94.117.009,90	(177,71)
3	Beban Penyisihan Pajak Hiburan	8.959.610,06	734.599,10	1.119,66
4	Beban Penyisihan Pajak Reklame	118.638.554,56	249.428.984,59	(52,32)
5	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	(688.122,90)	(2.370.025,85)	(70,97)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	132.350,47	422.937,52	(68,71)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	506.466,36	315.098,36	60,73
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.473.437,00	(3.360.656,50)	(233,29)
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	31.009.564.804,86	30.785.708.728,26	0,73
10	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	(832.302,87)	(100,00)
Jumlah		31.188.107.362,74	30.952.007.189,77	(0,76)

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Rp691.565.923,418 pada tahun 2024 dan Rp572.652.545,78 pada tahun 2023, sehingga terjadi penurunan sebesar 220,77 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(20.869.533,00)	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah	(1.310.691.740,19)	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Los	90.165,00	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	620.867.832,73	567.880.817,13	9,33
5	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.231.852,05	4.602.228,65	296,15
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	805.500,00	169.500,00	375,22
Jumlah		(691.565.923,41)	572.483.045,78	(220,77)

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan merupakan Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perumdam Tirta Pandalungan dan PDP Kahyangan pada tahun 2024 sebesar Rp506.916.430,72 dan pada tahun 2023 sebesar Rp896.471.607,27 sehingga terjadi penurunan sebesar 43,45 persen

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tahun 2024 sebesar Rp2.017.749.935,19 sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp299.049.261,98 sehingga terjadi peningkatan signifikan sebesar 574,72 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(3.000.000,00)	0,00	0,00
b	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2	(42.391.978,00)	(143.902.247,00)	(70,54)
c	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	(460.975,00)	460.975,00	(200,00)
d	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	0,00	(2.471.428,0000)	(100,00)
e	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	0,00	444.961.961,98	(100,00)
f	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	2.063.602.888,19	0,00	100,00
Jumlah		2.017.749.935,19	299.049.261,98	574,72

Terjadi peningkatan signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari pengembalian.

e. Beban Penyisihan Piutang Lainnya pada tahun 2024 tidak terdapat Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

5.4.1.2.11 Beban Penyusutan dan Amortisasi

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
397.346.405.677,77	401.930.534.961,20	(4.584.129.283,43)	(1,14)

Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar Rp4.584.129.283,43 atau 1,14 persen dari tahun 2024 sebesar Rp397.346.405.677,77 menjadi sebesar Rp401.930.534.961,20 di tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5. 202 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (%)
a	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	150.732.115.116,77	155.964.582.104,12	(3,35)
b	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.085.690.282,19	36.109.802.101,23	2,70
c	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	205.749.289.495,72	208.631.782.386,40	(1,38)
d	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.070.510.413,25	244.513.066,25	746,79
e	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga	247.372.438,45	0,00	0,00
f	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.192.165.953,20	979.855.303,20	21,67
g	Beban Penyusutan Properti Investasi	269.261.978,19	0,00	0,00
Jumlah		397.346.405.677,77	401.930.534.961,20	(1,14)

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp150.732.115.116,77 turun sebesar 3,35 persen dari tahun 2023 sebesar Rp155.964.582.104,26 terinci sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.925.284.943,05	2.486.618.855,37	(22,57)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	17.653.023.231,00	19.378.901.642,40	(8,91)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	932.138.833,30	959.708.277,70	(2,87)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	422.108.002,50	367.550.026,14	14,98
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.342.239.532,69	36.160.654.707,20	3,27
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.278.305.786,64	4.081.724.641,15	(19,68)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	40.455.879.688,26	48.320.695.990,00	(16,28)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.547.398.122,96	4.384.114.417,72	3,72
9	Beban Penyusutan Senjata Api	131.753.083,25	98.429.337,50	33,86
10	Beban Penyusutan Komputer	40.937.380.721,60	37.375.044.160,10	9,53
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.745.216,67	1.745.216,67	0,00
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	806.282.911,00	542.970.436,00	48,49
14	Beban Penyusutan Alat Peraga	2.117.230,00	140.000,00	1.412,31
15	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	334.944.101,35	281.264.857,67	19,08
16	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.610.293.327,50	1.406.554.077,50	14,48
17	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	350.120.385,00	117.365.461,00	1,98
Jumlah		150.732.115.116,77	155.964.582.104,12	(3,35)

- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan



Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebesar Rp36.109.802.103,09 dan pada tahun 2024 sebesar Rp37.085.690.282,19 sehingga terjadi peningkatan sebesar 2,70 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	36.459.950.652,59	35.515.196.691,85	2,66
2	Beban Penyusutan Monumen	23.878.680,00	23.878.680,00	0,00
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	601.860.949,60	570.726.729,38	5,46
Jumlah		37.085.690.282,19	36.109.802.101,23	2,70

c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami penurunan sebesar 1,44 persen dari tahun 2023 sebesar Rp208.752.269.902,53 menjadi Rp205.749.289.495,72 di tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	164.956.346.210,75	167.983.583.137,08	(1,80)
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	30.703.698.498,12	30.673.332.466,59	0,10
3	Beban Penyusutan Instalasi	4.570.357.614,62	4.570.357.614,62	0,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	5.518.887.172,23	5.404.509.168,11	2,12
Jumlah		205.749.289.495,72	208.631.782.386,40	(1,38)

d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp244.513.066,25 pada tahun 2023 dan Rp2.070.510.413,25 pada tahun 2024 merupakan Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik.

e. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp247.372.438,45 pada tahun 2024 merupakan Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kerjasama Penyediaan dengan Infrastruktur.

f. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp979.855.303,20 pada tahun 2023 dan Rp1.192.165.953,20 pada tahun 2024 merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software.

g. Beban Penyusutan Properti Investasi

Beban Penyusutan Properti Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp 269.261.978,19 merupakan penyusutan preperiti investasi bangunan Gedung.

5.4.1.2.12 Beban Transfer

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
210.314.370.609,00	200.394.594.298,00	9.919.776.311,00	4,95

Beban Transfer meningkat sebesar Rp9.919.776.311 atau 4,95 persen dari tahun 2023 sebesar Rp200.394.594.298,00 menjadi Rp210.314.370.609,00 di tahun 2024, terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 203 Realisasi Beban Transfer

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Bagi Hasil	22.876.438.492,00	22.500.000.000,00	1,67
2	Beban Bantuan Keuangan	187.437.932.117,00	177.894.594.298,00	5,36
Jumlah		210.314.370.609,00	200.394.594.298,00	4,95

a. Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen dari tahun 2023 sebesar Rp22.500.000.000,00 menjadi Rp22.876.438.492,00 di tahun 2024 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 204 Realisasi Beban Bagi Hasil

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.894.674.000,00	18.703.050.930,00	6,37
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.981.764.492,00	3.796.949.070,00	(21,47)
Jumlah		22.876.438.492,00	22.500.000.000,00	1,67

b. Beban Bantuan Keuangan

Beban bantuan keuangan tahun 2023 meningkat 5,36 persen dari tahun sebelumnya Rp177.894.594.298,00 menjadi Rp187.437.932.117,00 dengan rincian:

Tabel 5. 205 Realisasi Beban Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	177.147.531.077,00	(100,00)

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	187.437.932.117,00	747.063.221,00	24.989,97
Jumlah		187.437.932.117,00	177.894.594.298,00	5,36

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan / Penurunan	Persentase
(944.718.974,51)	(10.013.654.812,51)	9.068.935.838,00	(90,57)

Jumlah surplus/ defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar minus Rp944.718.974,51 dan minus Rp10.013.654.812,51 Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp9.068.935.838,00 atau sebesar 90,57 persen dari tahun 2023. Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

5.4.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp944.718.974,51. Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 206 Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO

NO	URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan (persen)
1.	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	231.540.280,00	(4.036.750.214,27)	(105,74)
2.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	713.178.694,51	(5.976.904.598,24)	(111,93)
Jumlah		944.718.974,51	(10.013.654.812,51)	(109,00)

5.4.3 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat nilai pada pos luar biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	4.124.860.085.583,47	3.957.351.787.540,85
Arus Kas Keluar	(3.558.780.861.560,57)	(3.570.058.313.301,66)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	566.079.224.022,90	387.293.474.239,19

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas dari Aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2024. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp566.079.224.022,90 dan Rp387.293.474.239,19 dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Kas Masuk	4.124.860.085.583,47	3.957.351.787.540,85	167.508.298.042,62	4,23
Arus Kas Keluar	(3.558.780.861.560,57)	(3.570.058.313.301,66)	11.277.181.741,09	0,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	566.079.224.022,90	387.293.474.239,19	178.785.749.783,71	46,16

Dengan demikian, terdapat kenaikan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp178.785.749.783,71 atau 46,16 persen dari TA 2023.

Tabel 5. 207 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas:		

URAIAN	2024	2023
Penerimaan Pajak Daerah	301.523.590.641,00	288.151.785.388,00
Penerimaan Retribusi Daerah	346.940.142.283,82	27.374.994.636,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.439.331,25	7.189.012.393,75
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	113.884.233.541,40	441.705.646.749,10
Penerimaan Dana Bagi Hasil	217.238.300.409,00	210.923.988.652,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.832.793.869.706,00	1.704.938.164.985,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	104.185.840.707,00	45.036.717.101,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	564.315.161.664,00	561.962.339.481,00
Penerimaan Dana Desa	325.303.772.200,00	322.996.582.400,00
Penerimaan Insentif Fiskal	5.700.290.000,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	293.673.542.400,00	334.510.008.600,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.716.902.700,00	11.626.442.821,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		936.104.334,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	4.124.860.085.583,47	3.957.351.787.540,85
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	1.401.352.250.469,71	1.361.120.333.591,47
Pembayaran Barang dan Jasa	1.298.171.536.917,86	1.354.258.354.206,19
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	306.794.019.443,00	270.995.238.880,00
Pembayaran Bantuan Sosial	16.972.075.800,00	29.185.958.000,00
Pembayaran Tak Terduga	1.261.756.421,00	31.854.315.147,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.894.674.000,00	18.703.050.930,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.981.764.492,00	3.796.949.070,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	511.352.784.017,00	500.144.113.477,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.558.780.861.560,57	3.570.058.313.301,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	566.079.224.022,90	387.293.474.239,19

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

5.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp301.945.235.807,00 dan Rp288.151.785.388,00.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Pajak Daerah	301.523.590.641,00	288.151.785.388,00	13.371.805.253,00	4,64

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan pajak daerah sebesar Rp13.371.805.253,00 atau 4,64 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp346.940.142.283,82 dan Rp27.374.994.636,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Retribusi Daerah	346.940.142.283,82	27.374.994.636,00	319.565.147.647,82	1.167,36

Dengan demikian, terdapat kenaikan retribusi daerah sebesar Rp319.565.147.647,82 atau 1.167,36 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp7.584.439.331,25 dan Rp7.189.012.393,75.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.439.331,25	7.189.012.393,75	395.426.937,50	5,50

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp395.426.937,50 atau 5,50 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp113.884.233.541,40 dan Rp441.705.646.749,10.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	113.884.233.541,40	441.705.646.749,10	(327.821.413.207,70)	(74,22)

Dengan demikian terdapat penurunan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar minus Rp327.821.413.207,70 atau minus 74,22 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp217.238.300.409,00 dan Rp210.923.988.652,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	217.238.300.409,00	210.923.988.652,00	6.314.311.757,00	2,99

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp6.314.311.757,00 atau 2,99 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp1.832.793.869.706,00 dan Rp1.704.938.164.985,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.832.793.869.706,00	1.704.938.164.985,00	127.855.704.721,00	7,50

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp127.855.704.721,00 atau 7,50 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp104.185.840.707,00 dan Rp45.036.717.101,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	104.185.840.707,00	45.036.717.101,00	59.149.123.606,00	131,34

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik sebesar



Rp59.149.123.606,00 atau 131,34 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.564.315.161.664,00 dan Rp561.962.339.481,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	564.315.161.664,00	561.962.339.481,00	2.352.822.183,00	0,42

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik sebesar Rp2.352.822.180,00 atau 0,42 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.9 Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.325.303.772.200,00 dan Rp.322.996.582.400,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Dana Desa	325.303.772.200,00	322.996.582.400,00	2.307.189.800,00	0,71

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Dana Desa sebesar Rp2.307.189.800,00 atau 0,71 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.10 Penerimaan Insentif Fiskal

Penerimaan Insentif Fiskal TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp5.700.290.000,00 dan untuk TA. 2023 tidak ada Insentif Fiskal.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Insentif Fiskal	5.700.290.000,00	0,00	5.700.290.000,00	~

Dengan demikian, tidak ada selisih karena di TA.2023 tidak ada insentif fiskal.

5.5.1.1.11 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp293.673.542.400,00 Rp334.510.008.600,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	293.673.542.400,00	334.510.008.600,00	(40.836.466.200,00)	(12,21)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar minus Rp40.836.466.200,00 atau minus 12,21 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.12 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.11.716.902.700,00 dan Rp11.626.442.821,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.716.902.700,00	11.626.442.821,00	90.459.879,00	0,78

Dengan demikian, terdapat kenaikan penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp90.459.879,00 atau 0,78 persen dari TA 2023.

5.5.1.1.13 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp936.104.334,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Hibah	0,00	936.104.334,00	(936.104.334,00)	(100)

Dengan demikian, terdapat penurunan penerimaan Hibah sebesar minus Rp936.104.334,00 atau minus 100 persen dari TA 2023.

Arus masuk kas dari kegiatan operasional merupakan penerimaan yang diakui sebagai pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pendapatan non APBD sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:



Tabel Perbedaan Arus Masuk Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Masuk Kas:			
Penerimaan Pajak Daerah	301.523.590.641,00	301.523.590.641,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	346.940.142.283,82	346.940.142.283,82	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.584.439.331,25	7.584.439.331,25	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	113.884.233.541,40	118.118.461.729,40	(4.234.228.188,00)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	217.238.300.409,00	217.238.300.409,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.832.793.869.706,00	1.832.793.869.706,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	104.185.840.707,00	104.185.840.707,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	564.315.161.664,00	564.315.161.664,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	325.303.772.200,00	325.303.772.200,00	0,00
Insentif Fiskal	5.700.290.000,00	5.700.290.000,00	
Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	293.673.542.400,00	293.673.542.400,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	11.716.902.700,00	11.716.902.700,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK	4.124.860.085.583,47	4.129.094.313.771,47	(4.234.228.188,00)

Terdapat selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi di LAK dengan total pendapatan daerah LRA sebesar minus Rp4.234.228.188,00 merupakan penjualan atas aset peralatan dan mesin.

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

5.5.1.2.1 Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp1.401.352.250.469,71 dan Rp1.361.120.333.591,47.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Penerimaan Hibah	1.401.352.250.469,71	1.361.120.333.591,47	40.231.916.878,24	2,96

Dengan demikian, terdapat kenaikan Pembayaran Pegawai sebesar minus Rp40.231.916.878,24 atau 2,69 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp1.298.171.536,86 dan Rp1.354.258.354.206,19.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Barang dan Jasa	1.298.171.536.917,86	1.354.258.354.206,19	(56.086.817.288,33)	(4,14)

Dengan demikian, terdapat penurunan pembayaran Barang dan Jasa sebesar minus Rp56.086.817.288,33 atau minus 4,14 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.3 Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp306.794.019.443,00 dan Rp270.995.238.880,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Hibah	306.794.019.443,00	270.995.238.880,00	35.798.780.563,00	13,21

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Hibah sebesar Rp35.798.780.56,00 atau 13,21 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.4 Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp16.972.075.800,00 dan Rp29.185.958.000,00.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bantuan Sosial	16.972.075.800,00	29.185.958.000,00	(12.213.882.200,00)	(41,85)

Dengan demikian, terdapat penurunan pembayaran Bantuan Sosial sebesar minus Rp12.213.882.200,00 atau minus 41,85 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.5 Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp 1.261.756.421,00 dan Rp31.854.315.147,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Tak Terduga	1.261.756.421,00	31.854.315.147,00	(30.592.558.726,00)	(96,04)

Dengan demikian, terdapat penurunan Pembayaran Tak Terduga sebesar minus Rp30.592.558.726,00 atau minus 96,04 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.6 Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp19.894.674.000,00 dan Rp18.703.050.930,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	19.894.674.000,00	18.703.050.930,00	1.191.623.070,00	6,37

Dengan demikian terdapat kenaikan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp1.191.623.070,00 atau 6,37 persen dari TA 2023.

5.5.1.2.7 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp2.981.764.492,00 dan Rp3.796.949.070,00.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.981.764.492,00	3.796.949.070,00	(815.184.578,00)	(21,47)

Dengan demikian terdapat penurunan Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar minus Rp815.184.578,00 atau minus 21,47 persen dari TA. 2023.

5.5.1.2.8 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.511.352.784.017,00 dan Rp500.144.113.477,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	persentase
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	511.352.784.017,00	500.144.113.477,00	11.208.670.540,00	2,24

Dengan demikian, terdapat kenaikan pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp11.208.670.540,00 atau 2,24 persen dari TA 2023.

Tidak terdapat selisih antara arus masuk kas di LAK dan total pendapatan daerah LRA. Arus keluar kas dari kegiatan operasional merupakan realisasi belanja pegawai serta realisasi belanja barang dan jasa LRA tahun berjalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Arus Keluar Kas LAK dan LRA pada Aktivitas Operasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Keluar Kas:			
Pembayaran Pegawai	1.401.352.250.469,71	1.401.352.250.469,71	0,00
Pembayaran Barang	1.298.171.536.917,86	1.298.171.536.917,86	0,00
Pembayaran Bunga	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	306.794.019.443,00	306.794.019.443,00	0,00
Pembayaran Bantuan Sosial	16.972.075.800,00	16.972.075.800,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	1.261.756.421,00	1.261.756.421,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.894.674.000,00	19.894.674.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.981.764.492,00	2.981.764.492,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	511.352.784.017,00	511.352.784.017,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	3.558.780.861.560,57	3.558.780.861.560,57	0,00



5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	4.234.228.188,00	74.863.727,00
Arus Keluar Kas	285.766.304.957,00	232.163.748.376,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(281.532.076.769,00)	(232.088.884.649,26)

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi berupa penjualan atas peralatan dan mesin pada tahun 2024. Aktivitas Investasi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar minus Rp281.532.076.769,00 dan minus Rp232.088.884.649,26 dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	4.234.228.188,00	74.863.727,00	4.159.364.461,00	5555,91
Arus Keluar Kas	285.766.304.957,00	232.163.748.376,26	53.602.556.580,74	23,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(281.532.076.769,00)	(232.088.884.649,26)	(49.443.192.119,74)	21,30

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp49.443.192.119,74 atau 21,30 persen dari TA 2023.

5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp4.234.228.188,00 dan Rp74.863.727,00

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Total arus masuk kas	4.234.228.188,00	74.863.727,00	4.159.364.461,00	5555,91

Dengan demikian, tidak terdapat selisih arus masuk kas dari aktivitas investasi.



Tabel 5. 208 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas:		
Penjualan atas Tanah		0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	4.234.228.188,00	74.863.727,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.234.228.188,00	74.863.727,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	58.483.245.460,00	79.716.522.691,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	72.252.822.584,00	54.635.641.878,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	90.641.872.297,00	43.233.220.730,76
Perolehan Aset Tetap Lainnya	48.677.747.566,00	54.351.340.328,00
Perolehan Aset Lainnya	710.617.050,00	227.022.748,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	285.766.304.957,00	232.163.748.376,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(281.532.076.769,00)	(232.088.884.649,26)

5.5.2.2 Arus Keluar Kas

5.5.2.2.1 Perolehan Tanah

Perolehan Tanah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dengan demikian, tidak terdapat Perolehan Tanah dari TA 2023.

5.5.2.2.2 Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp58.483.245.460,00
Rp79.716.522.691,00.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Peralatan dan Mesin	58.483.245.460,00	79.716.522.691,00	(21.233.277.231,50)	(26,64)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Peralatan dan Mesin sebesar minus Rp21.233.277.231,50 atau minus 26,64 persen dari TA.2023.

5.5.2.2.3 Perolehan Gedung dan Bangunan

Perolehan Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp72.252.822.584,00 dan Rp54.635.641.878,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Gedung dan Bangunan	72.252.822.584,00	54.635.641.878,00	17.617.180.706,00	32,24

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.617.180.706,00 atau 32,24 persen dari TA.2023

5.5.2.2.4 Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp90.641.872.297,00 dan Rp43.233.220.730,76.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	90.641.872.297,00	43.233.220.730,76	47.408.651.566,24	109,66

Dengan demikian, terdapat kenaikan Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar minus Rp47.408.651.566,24 atau 109,66 persen dari TA.2023

5.5.2.2.5 Perolehan Aset Tetap Lainnya

Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp48.677.747.566,00 dan Rp54.351.340.328,00.



URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Tetap Lainnya	48.677.747.566,00	54.351.340.328,00	(5.673.592.762,00)	(10,44)

Dengan demikian, terdapat penurunan Perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar minus Rp5.673.592.762,00 atau minus 10,44 persen dari TA.2023.

5.5.2.2.6 Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp710.617.050,00 dan Rp227.022.748,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Perolehan Aset Lainnya	710.617.050,00	227.022.748,00	483.594.302,00	213,02

5.5.2.2.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Rp0,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00

Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp15.000.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi di LRA, tidak terdapat perbedaan pengakuan pada arus masuk kas pada aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbedaan Arus Masuk Kas dan Keluar LAK dan LRA pada Aktivitas Investasi

URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Masuk Kas:			
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	4.234.228.188,00	0,00	4.234.228.188,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00



URAIAN	LAK	LRA	SELISIH
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	4.234.228.188,00	0,00	4.234.228.188,00
Arus Keluar Kas			
Perolehan Tanah	0,00	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	58.483.245.460,00	58.483.245.460,00	0,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	72.252.822.584,00	72.252.822.584,00	0,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan jaringan	90.641.872.297,00	90.641.872.297,00	0,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	48.677.747.566,00	48.677.747.566,00	0,00
Perolehan Aset Lainnya	710.617.050,00	710.617.050,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	285.766.304.957,00	285.766.304.957,00	0,00

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Masuk	22.055.000,00	53.942.500,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	22.055.000,00	53.942.500,00

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka



panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar minus Rp.14.977.945.000,00 dan Rp53.942.500,00, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	22.055.000,00	53.942.500,00	(31.887.500,00)	(59,11)
Arus Keluar Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	22.055.000,00	53.942.500,00	(31.887.500,00)	(59,11)

Dengan demikian, terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar minus Rp31.887.500,00 atau minus 59,11 persen dari TA 2023.

5.5.3.1 Arus Masuk Kas

5.5.3.1.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.22.055.000,00 dan Rp53.942.500,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22.055.000,00	53.942.500,00	(31.887.500,00)	(59,11)

Dengan demikian, terdapat penurunan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar minus Rp31.887.500,00 atau minus 59,11 persen dari TA.2023.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp22.055.000,00 dan Rp53.942.500,00.

Tabel 5. 209 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00

URAIAN	2024	2023
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	22.055.000,00	53.942.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	22.055.000,00	53.942.500,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dalam Negeri-Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	22.055.000,00	53.942.500,00

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
Arus Masuk Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.897,02
Arus Keluar Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	3,02

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, Beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi akibat potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah tersebut bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3,02, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Arus Masuk Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.897,02	(8.435.047.927,02)	(4,73)
Arus Keluar Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00	(8.435.047.924,00)	(4,73)



Arus Kas Bersih				
dari Aktivitas	0,00	3,02	(3,02)	100,00
Transitoris				

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar minus Rp3,02 merupakan koreksi kesalahan transfer atas pengembalian belanja perjalanan dinas yang seharusnya di transfer pada Virtual Account BNI Direct tetapi langsung di transfer ke Rekening Giro Puskesmas Kemuningsari Kidul pada tahun 2023 berdasarkan hasil Rekonsiliasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyesuaikan Kas pada Puskesmas bersangkutan dan dilakukan pemotongan pada penyaluran tahap berikutnya.

5.5.4.1 Arus Masuk Kas

5.5.4.1.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp169.714.374.970,00 dan Rp178.149.422.897,02.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00	(8.435.047.924,00)	(4,73)

Dengan demikian, terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp8.435.047.927,02 atau minus 4,73 persen dari TA 2023.

5.5.4.1.2 Penerimaan Lain – Lain

Penerimaan Lain - lain TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar 0,00 dan Rp3,02.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Penerimaan Lain - lain	0,00	3,02	(3,02)	100,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas

5.5.4.2.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA. 2024 dan TA. 2023 adalah sebesar Rp169.714.374.970,00 dan Rp178.149.422.894,00.

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00	(8.435.047.924,00)	4,73

Dengan demikian, terdapat penurunan pada Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar minus Rp8.435.047.924,00 atau 4,73 persen dari TA 2023.

Tabel 5. 210 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Transitoris

URAIAN	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00
Penerimaan Lain – Lain	0,00	3,02
Jumlah Arus Masuk Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.897,02
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00
Jumlah Arus Keluar Kas	169.714.374.970,00	178.149.422.894,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	3,02

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa potongan gaji pegawai, dana yang harus disetorkan kepada pihak ketiga serta perhitungan pajak yang harus disetorkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 211 Rincian Perhitungan Pihak Ketiga

NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8 persen	36.512.049.140,00	36.512.049.140,00
2	Iuran Wajib Pegawai 4 persen	19.862.325.721,00	19.862.325.721,00
3	Iuran Wajib Pegawai 1 persen	4.966.486.258,00	4.966.486.258,00
4	Iuran Wajib Pegawai 3,25 persen	5.491.939.861,00	5.491.939.861,00
5	Iuran Wajib Pegawai PPPK 4 persen	7.113.483.742,00	7.113.483.742,00
6	Iuran Wajib Pegawai PPPK 1 persen	1.778.368.399,00	1.778.368.399,00
7	JKK PNS	1.002.452.515,00	1.002.452.515,00
8	JKM PNS	3.007.760.109,00	3.007.760.109,00
9	JKK PPPK	369.021.445,00	369.021.445,00
10	JKM PPPK	1.107.018.551,00	1.107.018.551,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	39.416.442.953,00	39.416.442.953,00
12	Pajak Penghasilan Ps 21	41.813.771.561,00	41.813.771.561,00
13	Pajak Penghasilan Ps 22	1.621.852.562,00	1.621.852.562,00



NO	Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
14	Pajak Penghasilan Ps 23	2.136.855.632,00	2.136.855.632,00
15	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	3.514.546.521,00	3.514.546.521,00
	JUMLAH	169.714.374.970,00	169.714.374.970,00

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	284.569.202.253,90	155.258.532.092,95

Kenaikan kas bersih sebesar Rp284.569.202.253,90 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (Rp)	31 DESEMBER 2023 (Rp)
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	566.079.224.022,90	387.293.474.239,19
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(281.532.076.769,00)	(232.088.884.649,26)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	22.055.000,00	53.942.500,00
4	Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris	0,00	3,02
	TOTAL	284.569.202.253,90	155.258.532.092,95

5.5.6 Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya-BOK

URAIAN	2024 (Audited)	2023 (Audited)	Selisih	Persentase
Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya -BOK	276.596.479.800,86	121.337.947.707,91	155.258.532.092,95	127,96

Dengan demikian, terdapat kenaikan Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara Penerimaan & Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di BLUD & Kas Dana BOS & Kas Lainnya - BOK sebesar Rp155.258.532.092,95 atau 127,96 persen dari TA. 2023

Saldo Awal kas sebesar Rp121.337.947.707,91 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 212 Perhitungan Saldo Awal Kas

NO	URAIAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Saldo awal Kas di Kas Daerah	234.552.670.324,51	Saldo Kas di Rekening Giro BUD
2	Utang Kasda pada Bank Jatim	(375.000)	Dinas Perhubungan dan Bakesbangpol
2	Saldo awal Kas awal di Bendahara Penerimaan	956.095.399,17	Kas di penampungan Bapenda ,Disperindag dan Rs
3	Saldo awal Kas awal di BLUD	36.880.823.767,7	Saldo awal Kas BLUD di 3 RSD
5	Saldo awal Kas dana BOS	55.451.081,48	Saldo Awal Kas BOS di sekolah
6	Saldo awal Kas Lainnya - BOK	4.151.814.228,00	Saldo awal Kas FKTP di 50 Puskesmas
SALDO AWAL KAS		276.596.479.800,86	

5.5.6.1 Saldo Awal Kas di Kas Daerah

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
234.552.670.324,51	62.782.444.703,37

Saldo tersebut merupakan saldo awal kas pada tanggal 1 Januari 2024 yang merupakan saldo akhir kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp234.552.670.324,51.

5.5.6.2 Saldo Awal Kas utang kasda

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
(375.000,00)	0,00

Utang Kasda minus Rp375.000,00 merupakan merupakan double Qris pada dinas Perhubungan pada Tahun 2023 sebesar minus Rp105.000,00 dan kesalahan input Bank Jatim pada Bakesbangpol sebesar minus Rp270.000,00 pada tahun 2023.

5.5.6.3 Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
956.095.399,17	1.478.913.719,40

Saldo awal kas di Bendahara Penerimaan adalah Rp956.095.399,17

5.5.6.4 Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
0,00	0,00

Saldo awal kas di Bendahara Pengeluaran adalah Rp0,00.

5.5.6.5 Saldo Awal Kas di BLUD

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
36.880.823.767,70	36.136.229.028,60

Saldo awal kas di BLUD sebesar Rp36.880.823.767,70.

5.5.6.6 Saldo Awal Kas Bendahara BOS

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
55.451.081,48	165.143.044,54

Saldo awal kas di Bendahara BOS sebesar Rp55.451.081,48

5.5.6.7 Saldo Awal Kas Lainnya - BOK

1 Jan 2024	1 Jan 2023
Rp	Rp
4.151.814.228,00	20.775.217.212,00

Saldo awal kas di Bendahara BOK sebesar Rp4.151.814.228,00.

5.5.7 Saldo Akhir Kas di Kasda , Kas di Bendahara Penerimaan , Kas di Bendahara Pengeluaran , Kas di BLUD , Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK, Setelah Reklasifikasi

31 Des 2024	31 Des 2023
Rp	Rp
561.165.412.054,76	276.596.479.800,86

Saldo Akhir Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada BOK dengan rincian sebagai berikut:



URAIAN	JENIS KAS (Rp)
Kas di Kas Daerah	505.269.820.888,31
Kas di Bendahara Penerimaan	1.457.940.835,73
Kas di BLUD	51.050.090.277,10
Kas Dana BOS	63.455.375,62
Kas Dana BOK Puskesmas	3.324.374.678,00
Total	561.165.682.054,76

5.5.8 Saldo Akhir Kas Lainnya (Termasuk Nilai Reklasifikasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran)

31 Des 2024	31 Des 2023
<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
691.837.241,01	701.233.114,90

Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp691.837.241,01 merupakan rekening titipan pasien.

5.5.9 Saldo Akhir Kas

31 Des 2024	31 Des 2023
<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
561.857.519.295,77	277.297.712.915,76

Saldo akhir kas sebesar Rp561.857.519.295,77 merupakan saldo kas seluruh bendahara entitas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember per tanggal 31 Desember 2024. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 5. 213 Perhitungan Saldo Akhir Kas

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	284.569.202.253,90	155.258.532.092,95
2	Saldo awal kas	276.596.479.800,86	121.337.947.707,91
3	Saldo Akhir Kas Lainnya	691.837.241,01	701.233.114,90
Saldo Akhir Kas		561.857.519.295,77	277.297.712.915,76

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.



Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1 Ekuitas Awal

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
6.566.521.869.621,01	6.599.768.110.679,52	(33.246.241.058,51)	1,00

Jumlah ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp6.566.521.869.621,01 yang berasal dari ekuitas akhir Tahun 2023, sedangkan ekuitas awal Tahun 2023 adalah sebesar Rp6.599.768.110.679,52

5.6.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
104.751.745.709,96	(30.215.863.158,62)	134.967.608.868,58	100

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada tahun 2024 adalah senilai Rp104.751.745.709,96 dengan perhitungan sebagai berikut:

1	Pendapatan-LO	Rp	3.931.422.590.236,19
2	Beban	Rp	(3.825.726.125.551,72)
	Surplus/Defisit Operasi	Rp	105.696.464.684,47
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(944.718.974,51)
4	Pos LuarBiasa	Rp	(0,00)
	Surplus/Defisit-LO	Rp	104.751.745.709,96

Penjelasan mengenai Pendapatan LO dan Beban sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(124.952.861.783,00)	(3.030.377.899,89)	(121.922.483.883,11)	100

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tahun 2024 adalah sebesar Rp(124.952.861.783,00) sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp(3.030.377.899,89). Perubahan yang signifikan tersebut dipengaruhi oleh koreksi saldo awal yang terdiri dari:

1. Koreksi Saldo Awal Kas
2. Koreksi Saldo Awal Piutang
3. Koreksi Saldo Awal Persediaan
4. Koreksi Saldo Awal Investasi

5. Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal
6. Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap
7. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
8. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi
9. Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek
10. Koreksi Ekuitas Lainnya

Adapun penjelasan serta rincian dari masing-masing koreksi saldo awal diatas adalah sebagai berikut:

5.6.3.1 Koreksi Saldo Awal Kas

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada koreksi saldo awal kas pada tahun 2025 maupun 2024.

5.6.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(338.341.235,95)	(2.928.196.255,00)	2.589.855.019,05	88 ,45

Koreksi Saldo Awal Piutang pada tahun 2024 senilai Rp(338.341.235,95) mengalami penurunan senilai Rp2.589.855.019,05 atau sebesar 88,45 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp76.996,00 dan pengurangan senilai Rp338.418.231,95. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	Opd	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi – Blud	Koreksi Tambah Saldo awal Piutang Asuransi Lain	31.996,00
2	Puskesmas Curahnongko	Jurnal penyesuaian piutang atas kelebihan bayar hutang makan minum pasien tahun 2023	45.000,00
TOTAL			76.996,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	Opd	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Puskesmas Ambulu	koreksi saldo awal piutang non kapitasi TA 2024	6.972.500,00
2	Puskesmas Klatakan	koreksi saldo awal piutang non kapitasi TA 2024	1.550.000,00
3	Puskesmas Bangsalsari	koreksi saldo awal piutang non kapitasi TA 2024	255.800,00

NO	Opd	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
4	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Kurang Saldo awal Piutang Asuransi Lain	143.451.105,00
5	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Kurang Saldo awal Piutang Masyarakat Miskin	37.816.400,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Saldo Awal Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PDAM)	0,95
7	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi piutang jasa raharja tahun 2024	62.172.311,00
8	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Saldo awal pajak restoran	30.014.615,00
9	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Saldo awal pajak hotel	6.235.500,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi penurunan Piutang Pajak karena perbaikan SPTPD dan Kesalahan pencatatan	49.950.000,00
TOTAL			338.418.231,95

5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Persediaan

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(510.200.000,00)	(4.768.118.201,37)	4.257.918.201,37	89,30

Terdapat koreksi nilai persediaan tahun 2024 yakni Koreksi Kurang Nilai Persediaan atas barang diserahkan masyarakat karena barang tersebut sudah diserahkan ke masyarakat pada tahun 2020 sesuai dengan susulan BAST yang ada yakni pada OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Investasi

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
424.731.589,00	53.942.500,00	370.789.089,00	100

Pada tahun 2024 terdapat koreksi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian sebesar Rp22.055.000,00 dan koreksi saldo awal investasi pada PDP kahyangan sebesar Rp402.676.589,00.

5.6.3.5 Koreksi Saldo Awal Penyertaan Modal

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat koreksi saldo awal penyertaan modal pada tahun 2024.

5.6.3.6 Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
2.480.445.147,83	846.031.040,34	1.634.414.107,49	193,19

Koreksi Saldo Awal Nilai Perolehan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp2.480.445.147,83 mengalami kenaikan sebesar Rp1.634.414.107,49 atau 193,19 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp10.693.803.697,00 dan pengurangan senilai Rp8.213.358.549,17. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Kesehatan	Mutasi Masuk Dari KEMENKES Berupa Alat Laboratorium	115.496.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya Atas Jembatan Gantung Sabrang	5.767.974.300,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penambahan Koreksi Sepeda Motor Karena Sk Ta 2024 (Beserta Akumulasinya)	11.500.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Penambahan Nilai Perolehan Gedung Dan Bangunan Dari Jasa Perencanaan	74.217.000,00
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyesuaian Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya, Dengan BAST Tahun 2021 (peralatan dan mesin)	353.921.052,00
6	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyesuaian Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya, Dengan BAST Tahun 2021 (Buku)	28.157.895,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Penambahan Aset Tetap Dari Pembayaran Utang BTT	514.693.200,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Penetapan Nilai Perolehan (Shp No 108/Hp/Bpn.35.09/lx/2024)	1.593.944.000,00
9	BPKAD	Koreksi Penetapan Nilai Perolehan Kendaraan Dari Bpjs Ketenagakerjaan	160.000.000,00
10	BPKAD	Koreksi Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya Dari BPJS Ketenagakerjaan	254.700.000,00
11	BPKAD	Koreksi Penetapan Nilai Perolehan Gedung Ex GNI	1.819.200.000,00
TOTAL			10.693.803.697,00

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Penyesuaian Penghapusan Aset Tetap Tahun 2024	9.000.000,00
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Penghapusan Aset Tetap (Kendaraan Bermotor Khusus)	84.480.000,00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Penghapusan Aset Tetap Peralatan Mesin (Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran, Alat Komputer Dll)	7.999.309.506,77
4	Puskesmas Gumukmas	Koreksi Kurang Atas Tanah Karena Tanah Tersebut Tercatat Sebagai Tanah Milik Desa (SURAT HAK MILIK DESA GUMUKMAS NO 0008 TAHUN 2021 NIB : 12.34.03.04.10238)	30.000.000,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Dobel Catat Dengan Tanah Mutasi Dari Kecamatan Sumberbaru Dengan Nilai Perolehan 70.262.000	11.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Review Inspektorat Penghapusan KDP karena Putus Kontrak	52.222.042,40
7	Dinas Sosial	Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung milik Dinsos yang pindah ke Aset lain lain	26.847.000,00
Total			8.213.358.549,17

5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
5.447.993.041,24	(25.156.303.860,51)	30.604.296.901,75	121,66

Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2024 sebesar Rp5.447.993.041,24 mengalami kenaikan sebesar Rp30.604.296.901,75 atau sebesar 121,66 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp9.404.961.847,32 dan pengurangan senilai Rp3.956.974.514,08. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Kecamatan Kaliwates	Koreksi Akumulasi Karena Kurang Catat Akumulasi Atas Penambahan Rehab Gedung	0,01
2	Kecamatan Kaliwates	Koreksi Akumulasi Karena Kurang Catat Akumulasi Atas Penambahan Rehab Gedung	0,01
3	Kecamatan Pakusari	Koreksi Selisih Perhitungan Akumulasi Penyusutan Ta. 2024	0,01
4	Kecamatan Jelbuk	Koreksi Pembulatan Koma Penyusutan	0,01
5	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Koreksi Penyusutan Gedung Yang Dilakukan Penghapusan Ta 2024	9.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Pengurangan Hibah	9.542.000,00
7	Puskesmas Cakru	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	44.200.000,00
8	Puskesmas Sabrang	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	168.822.794,12
9	Puskesmas Mayang	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	190.740.000,00
10	Dinas Pendidikan	Koreksi Lebih Catat Bangunan Dan Gedung TA. 2024	1.026.943,18
11	Puskesmas Semboro	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	67.123.537,50
12	Puskesmas Kasiyan	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun Xxx/Jp/Pkmkasiyan/2024	9.000.000,00
13	Puskesmas Sukorambi	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	77.682.000,00



NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
14	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Selisih Penyusutan Aset Ta. 2024 Karena Penghapusan Aset Peralatan Mesin	8.081.277.406,77
15	Puskesmas Silo I	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	123.539.550,00
16	Puskesmas Sumberjambe	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	277.639.024,39
17	Puskesmas Sumberbaru	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	296.285.267,00
18	Puskesmas Mumbulsari	Koreksi Akumulasi Karen Reklas Sub Akun Dari Rumah Negara Menjadi Gudang Tertutup	22.236.324,32
19	Dinas Sosial	koreksi review inspektorat reklas KIB Akm Penyusutan (Akm Gedung ke ekuitas)	26.847.000,00
TOTAL			9.404.961.847,32

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Dinas Kesehatan	Mutasi Masuk Dari KEMENKES Berupa Alat Laboratorium	962.469,00
2	Kecamatan Kaliwates	Koreksi Akumulasi Karena Kurang Catat Akumulasi Atas Penambahan Rehab Gedung	2.915.547,23
3	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Nilai Perolehan Bangunan Gedung Kantor	593.999,98
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Koreksi Penyusutan Karena Kurang Cata Nilai Rehab Tahun 2023	685.994,00
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penambahan Koreksi Sepeda Motor Karena Sk Ta 2024 (Beserta Akumulasinya)	11.500.000,00
6	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Koreksi Penyusutan Karena Kurang Catat 2023	6.750.000,00
7	Kecamatan Balung	Koreksi Akumulasi Karena Koreksi Nilai Perolehan (Pengecatan) 2024	385.026,11
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Penyesuaian Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya, Dengan BAST Tahun 2021	141.539.816,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Penambahan Hibah (Perselisihan)	346.078.458,00
10	Puskesmas Cakru	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	39.214.240,00
11	Puskesmas Sabrang	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	145.177.740,00
12	Puskesmas Mayang	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	160.976.400,00
13	Dinas Perhubungan	Koreksi Penyusutan Karena Induk Digabung Dengan Induk, Dan Rehab Menjadi Induk	448.991,55
14	Puskesmas Semboro	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	65.922.600,00
15	Puskesmas Sukorambi	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	52.855.940,58
16	BPKAD	Koreksi Penetapan Nilai Perolehan Kendaraan Dari Bpjs Ketenagakerjaan	160.000.000,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan	Penyesuaian Penambahan Hibah Tahun Sebelumnya	50.940.000,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
	Dan Aset Daerah - Skpd	Dari Bpjs Ketenagakerjaan	
18	Dinas Kesehatan	Mutasi Masuk Hibah Dari Bank Indonesia	176.490.000,00
19	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi Atas Reklas Persediaan Alat Listrik Ke Alat Pendingin Dan Selisih Penyusutan	465.000,00
20	Puskesmas Silo I	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	109.222.444,69
21	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan Tahun Sebelumnya	27.405.686,83
22	Puskesmas Sumberjambe	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	277.639.024,39
23	Puskesmas Sumberbaru	Koreksi Akumulasi Disebabkan Oleh Penggabungan Induk Bangunan Yang Ter Reklas Sub Akun	272.971.160,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Penetapan Nilai Perolehan Gedung Ex Gni	109.152.000,00
25	Kecamatan Mayang	Koreksi Akumulasi Karena Pengurangan Komponen Masuk Kedalam Jasa (Koreksi Tahun 2023)	485.569,33
26	Kecamatan Sumbersari	Koreksi Akumulasi Karena Kurang Catat Akumulasi Atas Penambahan Rehab Gedung	3.039.263,53
27	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Koreksi Kurang Catat Tahun Sebelumnya Alat Musik Modern	632.019.750,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Akumulasi Pemecahan Alat Pembersih Menjadi Alat Rumah Tangga Lainnya Dan Pompa	379.512.891,43
29	Dinas Kesehatan	Koreksi Akumulasi Hb Meter Atas Hibah Kemenkes, Dan Keluar Ke Puskesmas	13.474.562,50
30	Sekretariat Daerah	Koreksi Review Inspektorat Penambahan Hibah Dari Kementrian Energi Dan Sumberdaya Mineral Dierjen Energo Baru, Terbarukan Dan Konvenrsi Energi	297.566.500,00
31	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Review Penambahan Akm (hasil penambahan aset tetap, reklas dari KDP ke JIJ)	14.232.660,00
32	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Review Inspektorat Penambahan Akm Peralatan Mesin Karena Mendapat Hibah Dari Kementrian	211.161.005,97
33	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Review Penambahan Akm Penyusutan Karena Barang Hibah Dari Kementrian	228.756.008,26
34	Puskesmas Kencong	Koreksi Review Karena Perpindahan Dari Persediaan Ke Aset Tetap (Akumulasi Penyusutannya)	9.900.000,00
35	Dinas Pendidikan	Koreksi review penambahan aset tetap dari KDP (akumulasi Penyusutannya)	6.528.056,70
TOTAL			3.956.968.806,08



5.6.3.8 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(129.806.788.385,81)	(190.722.966,00)	(129.616.065.419,81)	100

Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi tahun 2024 sebesar Rp(129.806.788.385,81) mengalami kenaikan sebesar Rp129.616.065.419,81 jika dibanding tahun 2023 sebesar Rp190.722.966,00. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp2.234.918.524,81 dan pengurangan senilai Rp132.041.706.910,63. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Pendapatan Daerah	koreksi lebih catat amortisasi software karena kesalahan perhitungan	177.628.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	85.750.200,00
3	Dinas Pendidikan	Koreksi Pembulatan koma aset lain2	0,01
4	Kecamatan Jenggawah	koreksi review inspektorat reklas KIB Akm Penyusutan	1.828.700,00
5	Dinas Pendidikan	Koreksi atas Pengurangan Perhitungan Akumulasi Aset lain lain hibah, karena barang hibah tersebut sudah tidak ada di KIB namun masih terhitung Penyusutannya	1.969.711.624,80
TOTAL			2.234.918.524,81

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Koreksi software (aset dan amortisasi) tahun 2024	11.920.000,00
2	Dinas Perhubungan	Koreksi Penyusutan Karena Kurang Catat Aplikasi Langit Jember	14.875.000,00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Kurang Catat Amortisasi Aset Tak Berwujud-Software di Tahun sebelumnya	33.369.080,00
4	Dinas Kesehatan	Koreksi Akumulasi Aset Rusak/Lain Karena Reklas Dari Kib B	1.178.451.000,00
5	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	3.967.957.685,00
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.292.405.250,00
7	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	5.295.093.517,00
8	Dinas Sosial	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	587.284.445,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.689.009.568,24
10	Dinas Tenaga Kerja	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	265.031.500,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.703.391.806,00
12	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	124.685.000,00
13	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	678.695.690,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.464.381.400,00
15	Dinas Perikanan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	196.276.875,00
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	51.975.000,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	38.950.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	4.398.813.600,00
19	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	547.866.006,32
20	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	955.804.350,00
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	530.058.000,00
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	87.560.250,00
23	Badan Pendapatan Daerah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	604.390.351,00
24	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	474.092.042,99
25	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	25.868.156.016,41
26	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Kalisat - Blud	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	694.352.500,00
27	Kecamatan Ajung	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	240.077.666,66
28	Kecamatan Ambulu	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	62.398.000,00
29	Kecamatan Arjasa	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	25.706.000,00
30	Kecamatan Balung	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	840.000,00
31	Kecamatan Bangsalsari	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.327.947.750,00

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
32	Kecamatan Gumukmas	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	79.777.000,00
33	Kecamatan Jelbuk	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	99.291.000,00
34	Inspektorat	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	588.863.000,00
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	303.082.000,00
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	358.349.000,00
37	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.327.947.750,00
38	Dinas Kesehatan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	5.330.763.490,00
39	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	841.914.590,42
40	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	6.390.792.327,23
41	Dinas Perhubungan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	3.304.167.567,25
42	Sekretariat Daerah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	4.941.701.947,33
43	Kecamatan Jenggawah	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	165.437.000,00
44	Kecamatan Jombang	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	29.305.000,00
45	Kecamatan Kalisat	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	8.800.000,00
46	Kecamatan Kaliwates	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	225.178.000,00
47	Kecamatan Kencong	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	108.473.367,00
48	Kecamatan Ledokombo	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	68.683.500,00
49	Kecamatan Wuluhan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	185.901.776,70
50	Kecamatan Mayang	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	73.030.000,00
51	Kecamatan Umbulsari	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	120.889.000,00
52	Kecamatan Mumbulsari	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	90.644.166,67
53	Kecamatan Tempurejo	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	28.560.500,00
54	Kecamatan Pakusari	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	87.600.000,00



NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
		Rusak	
55	Kecamatan Tanggul	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	216.318.500,00
56	Kecamatan Panti	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	89.115.000,00
57	Kecamatan Summersari	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	216.810.663,33
58	Kecamatan Patrang	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	348.057.736,00
59	Kecamatan Sumberjambe	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	58.968.255,00
60	Kecamatan Sumberbaru	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	77.675.000,00
61	Kecamatan Sukowono	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	39.470.000,00
62	Kecamatan Sukorambi	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	110.382.218,00
63	Kecamatan Silo	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	58.867.000,00
64	Kecamatan Semboro	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	71.975.000,00
65	Kecamatan Rambipuji	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	134.600.500,00
66	Kecamatan Puger	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	135.947.400,00
67	Dinas Pendidikan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	49.432.689.175,79
68	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Koreksi Perhitungan Penyusutan Aset Lainnya - Rusak	1.879.863.130,29
Total			132.041.706.910,63

5.6.3.9 Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
10.080.160,40	29.134.802.931,00	(29.124.722.770,60)	99,97

Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek tahun 2024 sebesar Rp(42.141.882,00) mengalami penurunan sebesar Rp(29.124.722.770,60) atau 99,97 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan senilai Rp 16.830.056,00 dan pengurangan senilai Rp58.971.938,00. Adapun rincian penambahan adalah sebagai berikut:

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Badan Kepegawaian Dan	koreksi utang telisa 2024	6.000,00



NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
	Pengembangan Sdm		
2	Puskesmas Paleran	Koreksi saldo awal hutang belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan TA 2024	16.638.000,00
3	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung – Blud	Koreksi utang belanja obat tahun 2023	186.056,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	Koreksi Penghapusan utang belanja modal KDP karena putus kontrak	52.222.042,40
TOTAL			69.052.098,40

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Sekretariat Daerah	Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai Setda 2024	38.456.938,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah - Skpd	Koreksi utang BKK karena temuan inspektorat Provinsi	20.515.000,00
TOTAL			58.971.938,00

5.6.3.10 Koreksi Ekuitas Lainnya

2024 (Audited)	2023 (Audited)	Kenaikan/Penurunan	Persentase
(2.660.782.099,70)	(21.813.088,35)	(2.638.969.011,35)	100

Koreksi Ekuitas Lainnya tahun 2024 sebesar Rp(2.660.782.099,70) mengalami penurunan sebesar Rp(2.638.969.011,35) dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan senilai Rp0,68 dan pengurangan senilai Rp2.660.782.100,38. Adapun penambahan disebabkan karena koreksi koma akumulasi penyusutan sebesar Rp0,67 pada BPKAD dan koreksi koma sebesar Rp0,01 pada RSD Kalisat.

Sedangkan rincian pengurangan adalah sebagai berikut :

NO	OPD	KETERANGAN	NILAI KOREKSI
1	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Dr Soebandi - Blud	Koreksi saldo awal pembulatan Koma	0,01
2	Rumah Sakit Daerah (Rsd) Balung - Blud	Penghapusan Aset Barang Rusak Berat/Usang	2.660.782.100,01
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Koreksi koma akumulasi penyusutan asset tetap	0,36
Total			2.660.782.100,38



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili Dan Operasional Entitas

6.1.1 Domisili

Kabupaten Jember secara geografis terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur. Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya –Banyuwangi.

Karakter topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 0 – 3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl, yaitu 1.240,77 km² (37,68 persen) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu 31,34 km² (0,95 persen).

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km² atau 329.333,94 Ha dengan batas wilayah administarsi Kabupaten Jember adalah :

- Utara : Kabupaten Bondowoso dan sedikit Kabupaten Probolinggo
- Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Kabupaten Lumajang

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46 Km² atau 15,9 persen dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76 persen.

6.1.2 Operasional Entitas

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terdiri dari:.

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penatagunaan Tanah

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Perlindungan Khusus Anak
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7. Program Administrasi Pemerintahan Desa
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
2. Program Pengelolaan Pelayaran

3. Program Pengelolaan Penerbangan
4. Program Pengelolaan Perkeretaapian
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)
5. Program Pengembangan Umkm
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Pengelolaan Permuseuman
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Program Pengelolaan Arsip

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
2. Program Penyuluhan Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Program Pengembangan Ekspor
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sekretariat Daerah

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Sekretariat Dprd

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Penelitian Dan Pengembangan
5. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Keuangan

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepegawaian

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pendidikan Dan Pelatihan

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa Dan Politik

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 24 November 2016 yang berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember

6.3 Penerimaan Dana Dak Fisik, Non Fisik Dan Bkk

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, Kabupaten Jember menerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pemerintah Pusat dengan besaran realisasi pendapatan dan belanja selama TA. 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Realisasi Pendapatan DAK Fisik TA. 2024

NO	DAK REGULER	OPD	SALUR	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	SISA NILAI SALUR	KETERANGAN
1	2	3	7	8	9	12
1	Paud	Dispendik	245.265.800,00	245.265.800,00	0,00	
2	SD	Dispendik	16.058.831.419,00	16.224.635.218,00	(165.803.799,00)	
3	SMP	Dispendik	10.268.836.000,00	10.268.836.000,00		
4	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Investasi Stunting	Dinkes	3.455.996.570,00	3.455.996.570,00	0,00	
5	Pengendalian Sistem Kesehatan	Dinkes	5.985.489.024,00	5.985.489.024,00	0,00	
6	Keluarga Berencana	DP3AKB	2.361.633.174,00	2.361.633.174,00	0,00	
7	Air Minum	Cipta Karya	1.988.641.101,00	1.988.642.000,00	(899,00)	
8	Sanitasi	Cipta Karya	3.652.658.800,00	3.652.658.800,00	0,00	
9	Jalan	Bina Marga	21.112.590.710,00	20.748.829.000,00	363.761.710,00	
10	Jalan- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	Bina Marga	26.972.670.910,00	26.778.579.508,00	194.091.402,00	
11	Irigasi – Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	Bina Marga	4.136.645.000,00	4.136.645.000,00	0,00	
12	Pertanian – Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan	Pertanian & Peternakan	6.109.793.300,00	6.109.793.300,00		

NO	DAK REGULER	OPD	SALUR	REALISASI S/D 31 DESEMBER 2023	SISA NILAI SALUR	KETERANGAN
1	2	3	7	8	9	12
	(Pertanian, Perikanan dan Hewani)					
13	Kelautan dan Perikanan – Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewani)	Perikanan	1.836.788.000,00	1.836.788.000,00	0,00	
	JUMLAH		104.185.839.808,00	103.793.791.394,00	392.048.414,00	

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2024 sebesar Rp104.185.839.808,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp103.793.791.394,00, sehingga sisa Dana Alokasi Khusus Fisik TA. 2024 di RKUD sebesar Rp392.048.414,00.

Tabel 6. 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja DAK Non Fisik TA. 2024

BIDANG	SISA TAHUN LALU (2023)	Pagu Perpes 104/2021	Salur	Potongan DAK Non Fisik 2024	Bersih DAK Non Fisik 2024	Realisasi SP2D	SISA Anggaran
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	3.277.639.004	12.432.293.000	12.432.293.000	3.277.639.004	9.154.653.996	9.441.485.594	2.990.807.406
Dana Bantuan Operasional PAUD Reguler	0,00	41.996.800.000	41.588.493.200	0,00	41.588.493.200	41.378.266.400	210.226.800
Dana Bantuan Operasional PAUD Kinerja	0,00	675.000.000	675.000.000	0,00	675.000.000	675.000.000	0,00
Dana BOP Kesetaraan Reguler	0,00	1.652.540.000	1.393.680.000	0,00	1.393.680.000	1.393.680.000	0,00
Dana BOP Kesetaraan kinerja	0,00	90.000.000	90.000.000	0,00	90.000.000	90.000.000	0,00
Dana Bantuan Operasional KB	1.028.756.353	21.411.970.000	21.411.970.000	1.028.756.353	20.383.213.647	20.232.928.891	1.179.041.109
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM (PK2UMK)	71.354.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354.550
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	11.134.584.985	450.803.770.000	212.538.150.215	0,00	212.538.150.215	208.753.346.800	14.919.388.400
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil)	196.055.048	12.055.122.000	8.528.945.000	0,00	8.528.945.000	4.364.250.000	4.360.750.048
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian (KPP)	114.934.200	2.286.900.000	2.286.900.000	114.934.200	2.171.965.800	2.179.003.481,00	107.896.519
Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	16.100.900	193.193.000	96.596.500	16.100.900	177.092.100	59.783.600,00	133.409.400
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	55.278.674	406.000.000	406.000.000	55.278.674	350.721.326	290.720.696,00	115.279.304
BIDANG	SISA TAHUN LALU (2023)	Pagu Perpes 104/2021	Salur	Potongan DAK Non Fisik 2024	Bersih DAK Non Fisik 2024	Realisasi SP2D	SISA Anggaran
Dana Penguatan Kapasitas	668.241.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BIDANG	SISA TAHUN LALU (2023)	Pagu Perpes 104/2021	Salur	Potongan DAK Non Fisik 2024	Bersih DAK Non Fisik 2024	Realisasi SP2D	SISA Anggaran
Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (PK2SIKM)							
Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Reguler	55.450.849,48	237.903.360.000	237.863.266.384	0,00	237.863.266.384	237.877.762.089,86	40.955.143,62
Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Kinerja	232	7.155.000.000	7.155.000.000	0,00	7.155.000.000	7.132.500.000,00	22.500.232
Dana Bantuan Operasi Kesehatan (BOK) Puskesmas	4.152.209.004	26.397.189.000	22.244.979.996	0,00	26.397.189.000	23.072.914.322	3.324.274.678
JUMLAH	20.720.604.804,48	808.311.292.000,00	568.711.274.295,00	4.492.709.131,00	568.467.370.668,00	556.941.641.874,00	27.475.883.590,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023 di RKUD sebesar Rp20.720.604.804,48 yang terdiri dari realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp568.711.274.295,00 dan sisa Dana tahun lalu sebesar Rp20.720.604.804,48, Pemotongan sebesar Rp4.492.709.131,00 sehingga pendapatan yang diterima setelah pemotongan sebesar Rp568.467.370.668,00 Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp556.941.641.874,00 sehingga sisa dana Alokasi Khusus Non Fisik TA. 2024 di RKUD sebesar Rp27.475.883.590,00.

Selain anggaran dari Pusat Kabupaten Jember di Tahun 2024 juga mendapatkan anggaran dari Propinsi yang berupa Bantuan Keuangan Khusus yang diberikan untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Hari Jadi Propinsi dengan rincian sebagai berikut :



**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN		REALISASI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	SISA DANA BKK		KETERANGAN
			TGL PENERIMA AN	NILAI (Rp)		NILAI (Rp)	TGL PENYETO RAN	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN :			8.150.400,00	7.516.240.000	634.160.000		
	a.	BPPDGS	11 Juni 2024	7.402.800.000	7.402.800.000	1.560.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan jumlah santri dan lembaga
	b.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD	30 April 2024	597.600.000	0,00	597.600.000	Masih di RKUD	Tidak dicairkan karena sudah dianggarkan di APBD dan tidak boleh double accounting sesuai juknis
	c.	Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS	29 April 2024	150.000.000	115.000.000	35.000.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan jumlah guru Non PNS
2	KESEHATAN			1.860.902.700	1.208.400.000	652.502.700		
	a.	Pemenuhan Honorarium Perawat Ponkesdes	4 April 2024	1.320.600.000	1.046.250.000	274.350.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena di DPA hanya untuk 10 bulan
	b.	Pemenuhan Honorarium Dokter Puskesmas	4 April 2024	180.000.000	78.750.000	101.250.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena di DPA hanya untuk 10 bulan
	c.	Pendamping an Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh kader (Bunda Anak Impian/BUAI AN)	4 April 2024	119.564.500		119.564.500	Masih di RKUD	Tidak dicairkan karena tidak masuk ke DPA
	d.	Konseling dari Pintu ke Pintu (KOPIKU)	4 April 2024	84.894.700	83.400.000	1.494.700	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan jumlah kunjungan
	e.	BUAIAN Pendamping an Bumil KEK dalam Pencegahan Stunting	4 April 2024	119.477.000		119.477.000	Masih di RKUD	Tidak dicairkan karena tidak masuk ke DPA
	f.	SAJADAH Santri Jatim Sehat dan Berkah	4 April 2024	36.366.500	31.783.200	36.366.500	Masih di RKUD	Tidak dicairkan karena tidak masuk ke DPA
3	BANTUAN KEUANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN			1.705.600.000	1.603.342.400	102.257.600		



NO.	URAIAN		REALISASI PENERIMAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS		REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS	SISA DANA BKK		KETERANGAN
			TGL PENERIMAAN	NILAI (Rp)		NILAI (Rp)	TGL PENYETORAN	
	APARATUR PERANGKAT DESA							
	a.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	25 Juni 2024	60.000.000	23.972.400	36.027.600	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
	b.	Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	2 Agustus 2024	1.645.600.000	1.579.370.000	66.230.000	Masih di RKUD	Ada sisa karena menyesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan
		JUMLAH		11.716.902.700,00	10.327.982.400,00	1.388.920.300,00		

6.4 Penyelesaian Kerugian Daerah

Guna optimalisasi pemulihan terhadap kerugian daerah, maka dibuatlah Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/222/1.12/2023 tentang Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024, Dalam Keputusan Bupati dapat kita sampaikan bahwa dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap keuangan dan barang daerah serta penyelesaian kerugian daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih tertib,obyektif dan akuntabel. Berdasarkan hasil monitor kerugian daerah tahun 2024, berikut mutasi atas saldo kerugian daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember :

Tabel 6. 3 Mutasi Pemulihan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024

No.	Jenis Kerugian	Saldo Kerugian Daerah 2021	Penambahan 2022	Penambahan 2023	Setor Kasda	Saldo Kerugian Daerah 2024	Ket
		Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		Nilai (Rp)	
1.	Kekurangan Volume	2.471.494.820,89	109.772.348,00	281.993.459,80	270.717.058,31	2.592.543.570,38	
2.	Kelebihan Bayar Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kelebihan Bayar Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Kelebihan Bayar Bansos	1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	595.000.000,00	915.000.000,00	
5.	Denda Keterlambatan	455.014.224,44	0,00	0,00	25.000.000,00	430.014.224,44	
JUMLAH TOTAL		3.946.509.045,33	599.772.348,00	281.993.459,80	890.717.058,31	3.937.557.794,82	



Penjelasan atas tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Di tahun 2021 berdasarkan temuan BPK terdapat Saldo Kerugian Daerah dengan total kerugian senilai Rp3.946.509.045,33 yang terdiri dari Kekurangan Volume senilai Rp2.471.494.820,89 dan Kelebihan Bayar Bansos senilai Rp1.020.000.000,00, Denda keterlambatan sebesar Rp455.014.224,44, di tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp599.772.348,00 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp109.772.348,00 dan kelebihan bayar bansos sebesar Rp490.000.000,00. Ditahun 2023 terdapat penambahan sebesar Rp281.993.459,80 yang terdiri dari kekurangan volume sebesar Rp281.993.459,80 sampai dengan tahun 2024 tidak ada penambahan. Adapun Kerugian Daerah ditahun 2021 sampai tahun 2023 sudah ada yang ditindaklanjuti untuk kekurangan volume sebesar Rp270.717.058,31 dan kelebihan pembayaran bansos sebesar Rp.595.000.000,00 dan denda keterlambatan sebesar Rp25.000.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. 4 Pemulihan Keuangan Daerah Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Tahun 2024

NO	OPD	NAMA PENYEDIA	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	NILAI KERUGIAN 2023	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
1	RSD BALUNG	CV.WJT	251,94					251,94
		CV.RRP	36,34					36,34
2	RSD SOEBANDI	CV.JC	44,11					44,11
		CV.ICS	304.430.146,20					304.430.146,20
1	Dpu Bina Marga	CV.Buwat		11.257.334,00				11.257.334,00
		CV.AKJ	152.535.536,35	16.142.544,00				168.678.080,35
		CV. ARK	110.906.227,29	3.112.758,00				114.018.985,29
		CV. DBJ	119.329.750,41	8.086.894,00				127.416.644,41
		CV. IDP	199.746.353,45	6.131.664,00				205.878.017,45
		CV. AWR	260.117.004,30	14.484.492,00				274.601.496,30
		CV. TBA	232.249.879,31	14.202.936,00				246.452.815,31
		CV. EPT	196.699.600,00	4.747.530,00				201.447.130,00
		CV. EPM	95.933.963,65	12.055.890,00		2.055.890,00	22/11/2024	105.933.963,65
		CV. ASL	144.528.700,00	7.093.328,00				151.622.028,00
		CV. RDJ	60.516.213,27	7.706.688,00				68.222.901,27
		CV. EPM	146.984.965,27	4.750.290,00				151.735.255,27
		CV. RJM	38.323.097,71					38.323.097,71
		CV. SWJ	14.579.673,80					14.579.673,80
		CV. RDJ	18.253.286,57					18.253.286,57
		CV. MTP	21.248.579,40					21.248.579,40
		CV. MKT	2.249.827,14					2.249.827,14
		CV. RDM	10.575.050,07					10.575.050,07
		CV. CTK	33.587.742,99					33.587.742,99



NO	OPD	NAMA PENYEDIA	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	NILAI KERUGIAN 2023	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
1	DPU Bina Marga							
	DPU Bina Marga	CV.pagah lancara			13.578.096,00	13.578.096,00	4 april 2024 6 Nov 2024	0,00
		CV.Berlian			878.256,00	878.256,00	4 april 2024	0,00
		Cv.Elextra			19.903.519,25	6.000.000,00	4 April 2024 19 April 2024	13.903.519,25
		CV. Nawasena Alodia Utama			19.873.795,20	19.873.795,20	4 April 2024 19 April 2024	0,00
		CV. Mashuri Seccesindo			26.581.023,75	26.581.024,00	4 April 2024	-0,25
		CV.Sari Raya			20.640.799,20	20.640.799,00	5 April 2024	0,20
		PT.Sunan Muria			522.920,00	522.920,00	4 April 2024	0,00
		CV. Bima Putra Nusantara			18.696.505,54	5.000.000	2/08/2024	13.696.505,54
		CV.Bima Putra Nusantara			4.531.258,20	4.531.258,20	02 Agts 2024	0,00
		CV.Maju			5.444.122,62	5.444.122,62	12 Juni 2024	0,00
1	Bag.Umum	CV. RJA	33.357.334,17					33.357.334,17
		CV. DP	2.750.980,00			1.000.000	11/09/2023	1.750.980,00
		CV. PPP	7.212.950,87					7.212.950,87
		CV. AC	25.416.654,42			7.500.000	05/10/2022 dan 11/09/2023	17.916.654,42
		CV. BC	19.165.317,43					19.165.317,43
		CV. HS	19.165.317,43					19.165.317,43
		CV. RPP	42.824.457,90					42.824.457,90
		CV. PGT	5.767.733,25			5.767.733,25	14/03/2024	Lunas
		CV. ELT	12.239.452,91					12.239.452,91
		CV. ACS	26.552.188,29					26.552.188,29
		CV. SA	8.710.038,76					8.710.038,76
		CV. AB	29.046.774,15					29.046.774,15
		CV. KM	16.339.505,64					16.339.505,64
		CV. AW	13.561.710,79					13.561.710,79
		CV. HK	15.876.066,35					15.876.066,35
		CV. BP	7.399.556,06					7.399.556,06



NO	OPD	NAMA PENYEDIA	Nilai Kerugian 2021	Nilai Kerugian 2022	NILAI KERUGIAN 2023	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
		CV. PS	1.687.852,90					1.687.852,90
		CV. PEC	21.625.000,00					21.625.000,00
2.	CIPTA KARYA	CV. FS Jaya Konstruksi			22.093.285,00	22.093.285,00	16 April 2024	0,00
3.	TPHP	CV. Babur Rizqi			129.249.879,04	129.249.879,04	13 Mei 2024	0,00
JUMLAH TOTAL			2.471.494.820,89	109.772.348,00	281.993.459,80	270.717.058,31		2.592.543.570,38

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Kekurangan Volume di tahun 2021 sebesar Rp2.471.494.820,89 dan sudah disetorkan sebesar Rp270.717.058,31 di tahun 2023 dan 2024, sehingga saldo nilai kerugian di tahun 2024 tersebut sebesar Rp2.592.543.570,38. Untuk kelebihan pembayaran Bansos dari kasus tersebut ditahun 2021 dan 2022 sebesar Rp1.510.000.000,00 ada penyetoran ke kasda sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp595.000.000,00, sehingga saldo sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp915.000.000,00 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. 5 Mutasi Pengembalian Bansos Tahun 2024

NO	OPD	NILAI KERUGIAN 2021	NILAI KERUGIAN 2022	NILAI KERUGIAN 2023	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
1	DINAS PENDIDIKAN	1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	595.000.000,00		915.000.000,00
JUMLAH TOTAL		1.020.000.000,00	490.000.000,00	0,00	595.000.000,00		915.000.000,00

Dari tabel tersebut dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pengembalian Bansos di tahun 2024, dengan nilai kerugian sebesar Rp1.510.000.000,00 dari kasus tersebut sampai tahun 2024 sudah ditindak lanjuti sebesar Rp595.000.000,00 sehingga saldo sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp915.000.000,00.

Tabel 6. 6 Mutasi Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan Tahun 2024

NO	OPD	NAMA PENYEDIA	NILAI DENDA	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
	Tahun 2021					
1	DPU BINA MARGA	CV. BJT	10.052.786,89			10.052.786,89
		CV. KSD	27.966.018,43			27.966.018,43
		CV. EPT	83.751.241,98			83.751.241,98
		CV. CTK	205.271.658,85			205.271.658,85
		CV. RDM	26.701.986,72			26.701.986,72
		CV. UDT	3.739.838,75			3.739.838,75
		CV. MTP	7.172.273,26			7.172.273,26
		CV. RDJ	46.529.974,35	25.000.000	31/07/2024	21.529.974,35



NO	OPD	NAMA PENYEDIA	NILAI DENDA	SETOR KASDA	TANGGAL SETOR	SALDO
		CV. AGS	22.174.609,09			22.174.609,09
		CV. UDT	7.455.012,48			7.455.012,48
		CV. SWJ	14.198.823,64			14.198.823,64
JUMLAH TOTAL			455.014.224,44	25.000.000		430.014.224,44

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan bahwa Daftar perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah dari hasil pemeriksaan BPK RI berupa Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan di tahun 2021, dengan nilai kerugian sebesar Rp455.014.224,44 dari kasus tersebut sampai tahun 2024 ada yang ditindaklanjuti sebesar Rp.25.000.000,00 Jadi sisa kerugian daerah yang belum disetorkan di Tahun 2024 sebesar Rp430.014.224,44.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai pentahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya, laporan keuangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, masih terdapat banyak sekali tantangan seiring dengan kompleksitas transaksi keuangan yang semakin beragam

serta perubahan regulasi dalam perencanaan dan penganggaran termasuk kebijakan penggunaan aplikasi sistem informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerapan penatausahaan dan pelaporan SIPD RI masih terdapat banyak pencatatan ganda yang masuk dalam laporan dan entry data yang tidak terekam, hal ini merupakan tantangan tersendiri karena masih banyak terdapat kekurangan menu pelaporan dan kesalahan transaksi yang harus dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sehingga respon cukup memakan waktu namun dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, maka laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Selain implementasi SIPD RI, terdapat pula permasalahan dalam penerapan PPK BLUD Puskesmas. Di Kabupaten Jember terdapat 50 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit Daerah (RSD) yang menerapkan PPK BLUD. Dalam implementasinya, fleksibilitas penggunaan anggaran mengakibatkan beberapa Puskesmas di Kabupaten Jember merealisasikan belanja melampaui anggaran sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan bahwa fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh- jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2024 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten Jember telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD pada tahun 2024 dengan melaksanakan rekomitmen atas upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh pada tahun 2023.

Kami berharap dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi

seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Jember di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih baik.

BUPATI JEMBER


MUHAMMAD FAWAIT

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipsahkan

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	17/01/2024	4.1.04.01.03.0005 - Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.09/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1 1/2024	859.000,00
2	02/09/2024	4.1.04.01.03.0005 - Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1 2/2024	1.205.000,00
3	15/10/2024	4.1.04.01.03.0005 - Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.09/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1 2/2024	1.775.000,00
4	28/10/2024	4.1.04.01.03.0005 - Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.09/11.0/000335/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/1 1/2024	2.725.000,00
5	30/12/2024	4.1.04.01.08.0001 - Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	35.09/11.0/000103/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/0 1/2025	4.236.953.188,00
JUMLAH				4.243.517.188,00



Lampiran 2 Hasil Sewa BMD

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	10/01/2024	Setoran Sewa Gedung BSG	35.09/11.0/037122/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/03/2024	7.500.000,00
2	16/01/2024	SEWA GEDUNG JKLAB	35.09/11.0/064610/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	1.500.000,00
3	16/01/2024	Pembayaran sewa alat berat excavator cat 304 C CR dan self loader isuzu giga lokasi desa Ajung, kec. Ajung TA.2024	35.09/11.0/000063/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.120.000,00
4	24/01/2024	Sewa Gedung BSG	35.09/11.0/064609/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	7.500.000,00
5	30/01/2024	Pembayaran sewa alat berat baby roller atlas copco lokasi Kel. Antirogo, Kec. Sumbersari TA.2024	35.09/11.0/000071/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	320.000,00
6	31/01/2024	Pembayaran sewa alat berat baby roller atlas copco lokasi Kel. Patrang, Kec. Patrang TA.2024	35.09/11.0/000069/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	320.000,00
7	31/01/2024	Pembayaran sewa alat berat excavator zaxis 210 LC dan truck trailer hino lokasi Ds. Kesilir, Kec. Wuluhan TA.2024	35.09/11.0/000070/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	10.200.000,00
8	01/02/2024	Sewa Kamar Wisma Daerah Praja Mukti Surabaya	35.09/11.0/064607/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	10.550.000,00
9	06/02/2024	Pembayaran sewa alat berat excavator zaxis 210 LC lokasi Desa Kesilir, Kec. Wuluhan TA.2024	35.09/11.0/000062/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	3.600.000,00
10	13/02/2024	Pembayaran sewa alat berat baby roller atlas copco lokasi Desa Wringin Telu, Kec. Puger TA.2024	35.09/11.0/000061/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	320.000,00
11	19/02/2024	Pembayaran sewa alat berat tandem roller bomag 4 ton lokasi desa rambipuji, kecamatan rambipuji TA.2024	35.09/11.0/000060/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	800.000,00
12	27/02/2024	Pembayaran sewa alat berat excavator cat 304 C CR lokasi Desa Patemon, Kecamatan Pakusari TA.2024	35.09/11.0/000059/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.600.000,00
13	05/03/2024	Pembayaran bongkaran bangunan Ex. Pustu Mlokorejo Pkm Kasiyan Kec. Puger Kab. Jember no. kasda 1746	35.09/11.0/000081/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
14	22/03/2024	Sewa kamar Wisma Daerah Praja Mukti Surabaya	35.09/11.0/064606/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	14.950.000,00
15	25/03/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi desa Klompangan, kec. Ajung TA.2024	35.09/11.0/000058/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	320.000,00
16	03/04/2024	Sewa Kamar Wisma Daerah Surabaya	35.09/11.0/064605/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	9.300.000,00
17	23/04/2024	Hasil sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/095817/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/05/2024	3.750.000,00
18	23/04/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem roller bomag 4 ton lokasi Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono	35.09/11.0/000057/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	800.000,00
19	06/05/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Kamar Wisma Daerah Surabaya)	35.09/11.0/140429/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	8.150.000,00
20	07/05/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung Balai Serba Guna Jember)	35.09/11.0/140428/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	7.500.000,00
21	13/05/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG Jember)	35.09/11.0/112066/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/05/2024	7.500.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
22	14/05/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat threewheel roller barata 6 ton lokasi desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari; Excavator kobelco SK 50 P	35.09/11.0/000056/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	8.000.000,00
23	27/05/2024	Pembayaran biaya sewa lahan Pemkab Jember di Desa Kemuning Lor Kec. Arjasa an. Achmad Maulana Cholili dng luas 15.000M2 periode tahun 2024-2025 dgn no. kasda 5526	35.09/11.0/000163/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	15.000.000,00
24	28/05/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator CAT 304 C CR lokasi desa grenden, kecamatan puger; baby roller atlas copco lokasi panti TA. 2024	35.09/11.0/000055/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.720.000,00
25	04/06/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Kamar Wisma Daerah Surabaya)	35.09/11.0/140427/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	23.250.000,00
26	13/06/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator kobelco SK 50 P lokasi Desa Sumberketempa, Kalisat dan baby roller atlas copco lokasi Kec. Paiton, Probolinggo TA. 2024	35.09/11.0/000054/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	5.440.000,00
27	19/06/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/174340/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	5.000.000,00
28	26/06/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung J klab)	35.09/11.0/210588/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/07/2024	500.000,00
29	09/07/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat threewheel roller barata 6 ton lokasi Desa Tanggul wetan,Kecamatan tanggul, Jember	35.09/11.0/000068/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.200.000,00
30	11/07/2024	Hasil Sewa BMD (Pendapatan Sewa Wisma Daerah Praja Mukti Suarabaya)	35.09/11.0/285264/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/08/2024	18.600.000,00
31	18/07/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat threewheel roller barata 6 ton lokasi Desa Tanggul wetan,Kecamatan tanggul, Jember dan baby roller atlas copco lokasi Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang TA. 2024	35.09/11.0/000053/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.120.000,00
32	19/07/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG Jember)	35.09/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/09/2024	3.750.000,00
33	24/07/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator kobelco SK 50 P lokasi Desa Slateng; baby roller atlas copco lokasi Desa Tanggul Wetan; excavator cat 304 C CR lokasi Desa Glundengan	35.09/11.0/000067/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	5.920.000,00
34	01/08/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator kobelco SK 50 P lokasi Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang TA. 2024	35.09/11.0/000052/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	800.000,00
35	06/08/2024	Hasil Sewa BMD (Lapangan Basket Jember)	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/09/2024	950.000,00
36	13/08/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator kobelco SK 50 P lokasi Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah TA. 2024	35.09/11.0/000051/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.400.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
37	13/08/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa lahan Parkir BSG)	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/01/2025	7.500.000,00
38	20/08/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator kobelco SK 50 P lokasi Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah TA. 2024	35.09/11.0/000066/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.600.000,00
39	27/08/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat threewheel roller barata 6 ton lokasi Desa Jatian, Kecamatan Pakusari; tandem roller bomag 4 ton lokasi Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates TA. 2024	35.09/11.0/000050/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	3.200.000,00
40	28/08/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates TA. 2024	35.09/11.0/000065/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	640.000,00
41	04/09/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat excavator zaxis 200 dan self loader isuzu giga lokasi Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto; threewheel roller barata 6 ton lokasi Desa Karangharjo Kecamatan Silo TA. 2024	35.09/11.0/000049/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	5.200.000,00
42	05/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung Balai Serba Guna Jember)	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/09/2024	7.500.000,00
43	05/09/2024	Hasil Sewa BMD (Lapangan Basket BSG)	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/09/2024	600.000,00
44	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 8.899M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahun an. Andy Sungkono dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000310/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	11.791.175,00
45	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 221.300M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahun an. Anto Purwanto dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000311/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	320.885.000,00
46	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 81.200M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahun an. Anto Purwanto dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000312/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	113.680.000,00
47	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 47.966M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahun an. Anto Purwanto dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000313/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	69.550.700,00
48	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 60.904M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahun an. Anto Purwanto dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000314/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	88.310.800,00
49	05/09/2024	Pembayaran Biaya sewa lahan Pemkab Jember Luas 59.000M2 di Kelurahan Bintoro selama 1 tahunan. Anto Purwanto dgn no. kasda 11453	35.09/11.0/000315/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	85.550.000,00
50	09/09/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates TA. 2024	35.09/11.0/000064/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	960.000,00
51	10/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung Jklab)	35.09/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	500.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
52	11/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Lahan Parkir Gedung BSG)	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	1.500.000,00
53	12/09/2024	Pembayaran biaya sewa lahan Pemkab Jember di Kelurahan Sempusari Luas 2.063M2 an. Hari Wahyudi dng no. kasda 11873	35.09/11.0/000296/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.733.475,00
54	12/09/2024	Pembayaran biaya sewa lahan Pemkab Jember di Kelurahan Wirolegi Luas 12.847M2 an. Firdaus dng no. kasda 11873	35.09/11.0/000297/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	17.022.275,00
55	13/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	3.750.000,00
56	13/09/2024	Pembayara Biaya Sewa Tanah Pemkab Jember di Kel. Gebang dng no. kasda 11930	35.09/11.0/000292/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	18.645.000,00
57	13/09/2024	Pembayaran Biaya Sewa Lahan Pemkab Jember di Kel. Jumerto Luas 9000M2 selama 2 thn An. Ismail dgn no. kasda 11930	35.09/11.0/000293/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	30.600.000,00
58	13/09/2024	Pembayaran Biaya Sewa Lahan Pemkab Jember di Kel. Sempusari Luas 4795M2 selama 1 thn An. Fauzi dgn no. kasda 11930	35.09/11.0/000294/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.236.625,00
59	17/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Lahan Parkir Gedung BSG)	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	1.500.000,00
60	17/09/2024	Pembayaran Biaya Sewa Lahan Pemkab Jember pada BPKAD dgn no. kasda 11981	35.09/11.0/000288/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	81.621.100,00
61	18/09/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Lahan Parkir BSG)	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	3.000.000,00
62	19/09/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat threewheel roller sakai 10 ton dan self loader isuzu giga lokasi Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates; excavator kobelco SK 50 P lokasi Desa Mulyorejo Kecamatan Silo TA. 2024	35.09/11.0/000048/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	6.200.000,00
63	30/09/2024	Pembayaran Biaya Sewa Lahan Pemkab Jember di Kel. Mangli Luas 41.312 M2 selama 4 bln (Periode Juli-Oktobre 2024) An. H. Fathulla dgn no. kasda	35.09/11.0/000274/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	24.888.640,00
64	02/10/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	7.500.000,00
65	04/10/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Lapangan Basket BSG)	35.09/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/10/2024	250.000,00
66	11/10/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco dan pickup lokasi Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates TA. 2024	35.09/11.0/000047/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	940.000,00
67	31/10/2024	Pembayara Sewa Lahan BPKAD PT Mitra Tani dng no. kasda 14489	35.09/11.0/000325/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	65.267.550,00
68	04/11/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/11/2024	142.500.000,00
69	21/11/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/11/2024	7.500.000,00
70	22/11/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem roller bomag 4 ton dan self loader isuzu giga lokasi kelurahan tegal gede kec.	35.09/11.0/000012/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	4.280.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Kaliwates; baby roller atlas copco lokasi desa garahan kec. silo TA. 2024		
71	26/11/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	7.500.000,00
72	28/11/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi desa jambewangi kec. Sempu; kelurahan sumbersari kec. sumbersari TA. 2024	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/12/2024	640.000,00
73	03/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi lemah bang kulon kec. Singojuruh; kelurahan jember lor kec. patrang TA. 2024	35.09/11.0/000044/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	640.000,00
74	10/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat baby roller atlas copco lokasi kec. Banyuglugur kab. situbondo TA. 2024	35.09/11.0/000033/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	320.000,00
75	10/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem woller bomag 4 ton dan self loader isuzu giga lokasi kelurahan kaliwates kec. kaliwates TA. 2024	35.09/11.0/000036/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.400.000,00
76	18/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem roller bomag 4 ton lokasi desa sucopangepok kec. Jelbuk; excavator zaxis cat 304 c cr lokasi desa krangkongan kec. umbulsari TA. 2024	35.09/11.0/000024/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.200.000,00
77	19/12/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	15.000.000,00
78	19/12/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa Gedung BSG)	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	112.500.000,00
79	24/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem roller bomag 4 ton lokasi desa sucopangepok kec. jelbuk TA. 2024	35.09/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	400.000,00
80	26/12/2024	Hasil Sewa BMD (Sewa lahan Parkir BSG)	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/4.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.500.000,00
81	30/12/2024	Pembayaran sewa pemakaian alat berat tandem roller bomag 4 ton lokasi desa gambiran kec. Kalisat; threewheel roller barata 6 ton lokasi desa sempolan kec. silo TA. 2024	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/1.03.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.800.000,00
82	31/12/2024	Jurnal koreksi Audited atas pendapatan sewa atas sewa wisma daerah dan gedung balai serba guna Rp450.350.000 dan Sewa Peralatan BMD milik Bina Marga Rp78.420.000	35.09/09.0/000003/JU/JURNAL-UMUM/4.01.0.00.0.00.01.0000/05/2025	(450.350.000,00)
83	31/12/2024	Jurnal koreksi Audited atas pendapatan sewa atas sewa wisma daerah dan gedung balai serba guna Rp450.350.000 dan Sewa Peralatan BMD milik Bina Marga Rp78.420.000	35.09/09.0/000001/JU/JURNAL-UMUM/1.03.0.00.0.00.01.0000/05/2025	(78.420.000,00)
	JUMLAH			949.782.340,00



Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	29/01/2024	Setoran PT. Imasco Tambang Raya dan PT. Dwi Joyo Utomo	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	545.032.000,00
2	27/02/2024	Kontribusi PT. Imasco Tambang Raya	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	520.756.000,00
3	15/03/2024	Setoran PT. Imasco Tambang Raya	35.09/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	412.072.000,00
4	17/07/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	111.184.000,00
5	14/09/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	365.662.000,00
6	26/09/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/02/2025	1.736.794.000,00
7	14/10/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000100/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/11/2024	852.574.000,00
8	28/11/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000018/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/12/2024	940.184.000,00
9	16/12/2024	Setoran PT. Imasco	35.09/11.0/000071/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.02.0000/01/2025	1.007.240.000,00
JUMLAH				6.491.498.000,00
TOTAL				7.441.280.340,00



Lampiran 3 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	02/09/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000317/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	6.052.300,00
2	30/09/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	3.217.893,00
3	09/10/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000041/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	600.000,00
4	30/10/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000334/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.740.377,00
5	15/11/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000581/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	21.000.000,00
6	20/11/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000578/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	24.032,00
7	26/11/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000028/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	185.810,00
8	26/11/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000029/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	66.918.920,00
9	02/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000014/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	12.701,00
10	05/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	29.520,00
11	06/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000070/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.801.801,00
12	12/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000068/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	130.944.000,00
13	13/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000065/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	162.592,00
14	13/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000066/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	209.684,00
15	16/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000063/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	883.500,00
16	17/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000061/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	20.854,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
17	18/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000102/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	598.752,00
18	19/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000044/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	526.020,00
19	20/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000096/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	322.162,00
20	20/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000100/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	748.110,00
21	21/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000094/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	322.476,00
22	21/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000095/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	160.777,00
23	22/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000041/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	802.892,00
24	22/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000091/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	241.382,00
25	22/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000092/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	482.635,00
26	22/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000093/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	643.445,00
27	22/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000119/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	271.404,00
28	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000075/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	202.351,00
29	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000076/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	287.027,00
30	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000077/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	644.141,00
31	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000079/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	321.380,00
32	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000078/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	240.600,00
33	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas	35.09/11.0/000080/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	482.841,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
34	23/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000090/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	29.997.000,00
35	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000069/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	482.832,00
36	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000070/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	802.338,00
37	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000071/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	534.487,00
38	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000072/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	398.590,00
39	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000073/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	284.849,00
40	24/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000074/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	321.142,00
41	25/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000066/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	482.530,00
42	25/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000067/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	481.797,00
43	25/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000068/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	480.000,00
44	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000055/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	480.489,00
45	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000056/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	480.776,00
46	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000057/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	478.241,00
47	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000058/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	381.446,00
48	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000059/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.934.422,00
49	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000060/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	669.357,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
50	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000061/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.121.211,00
51	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000062/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	321.467,00
52	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000063/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	670.792,00
53	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000064/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.507.860,00
54	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000065/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	335.034,00
55	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000112/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	313.605,00
56	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000113/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.090.014,00
57	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000114/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	355.616,00
58	26/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000145/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	630.288,00
59	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000019/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	240.505,00
60	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000020/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	708.005,00
61	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000021/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.090.508,00
62	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000022/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	361.384,00
63	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000023/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.328.827,00
64	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000024/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	958.216,00
65	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000025/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	965.297,00
66	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas	35.09/11.0/000026/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	965.097,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
67	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000027/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	405.268,00
68	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000028/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	965.324,00
69	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000029/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.612.270,00
70	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000030/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	864.659,00
71	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000032/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	105.518,00
72	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000031/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	967.178,00
73	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000033/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.162.092,00
74	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000034/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.352.312,00
75	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000035/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.835.380,00
76	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000036/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.672.528,00
77	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000037/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.302.528,00
78	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000038/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.336.528,00
79	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000039/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	3.250.000,00
80	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000040/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	4.385.832,00
81	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000042/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	249.056,00
82	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000044/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.558.464,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
83	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000043/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	847.460,00
84	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000045/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	941.232,00
85	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000046/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	645.160,00
86	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000048/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	743.444,00
87	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000047/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	672.130,00
88	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000049/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	658.300,00
89	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000050/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.992.448,00
90	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000051/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.120.698,00
91	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000052/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.061.204,00
92	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000053/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.472.510,00
93	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000054/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	196.376,00
94	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000108/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.816.000,00
95	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000110/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	481.432,00
96	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000109/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.812.800,00
97	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000111/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	482.446,00
98	27/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000146/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.820.800,00
99	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas	35.09/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.126.754,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
100	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	480.570,00
101	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	477.944,00
102	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.013.392,00
103	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000010/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.673.328,00
104	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000012/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.635.584,00
105	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.436.700,00
106	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000013/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.178.096,00
107	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000015/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.260.364,00
108	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000014/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.110.960,00
109	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000016/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	976.192,00
110	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000018/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	8.333.496,00
111	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000017/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	947.832,00
112	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000105/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	10.000,00
113	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000107/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.256.144,00
114	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000106/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	5.000,00
115	28/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000152/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.675.232,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
116	29/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000104/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.970.000,00
117	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.802.672,00
118	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.388.604,00
119	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.208.224,00
120	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.011.184,00
121	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000132/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.695.800,00
122	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000133/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	4.286.700,00
123	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000136/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	3.505.100,00
124	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000137/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.197.700,00
125	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000139/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.257.200,00
126	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000143/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.214.700,00
127	30/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000144/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.710.000,00
128	31/12/2024	4.1.04.11.01.0001 - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	35.09/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	168.928,00
		JUMLAH		400.560.178,00

Lampiran 4 Pendapatan dari Pengembalian

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
1	02/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000572/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
2	02/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000573/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	45.000.000,00
3	04/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000569/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	12.076.856,45
4	04/01/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000570/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.690.000,00
5	04/01/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000571/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.500.000,00
6	05/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000568/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	92.195.000,00
7	08/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000567/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	28.581.222,00
8	09/01/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000564/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	502.685,00
9	09/01/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000565/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.013.880,00
10	09/01/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000566/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.317.980,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
11	10/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000563/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.850.000,00
12	11/01/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000562/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	92.120,00
13	15/01/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000561/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.076.296,00
14	16/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000559/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	10.000.000,00
15	17/01/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000556/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	434.520,00
16	17/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000558/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.800.000,00
17	17/01/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000557/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.803.068,00
18	19/01/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000555/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.041.640,00
19	19/01/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000554/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.282.140,00
20	25/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000553/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	250,00
21	29/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	35.09/11.0/000552/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.604,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
22	31/01/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000551/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
23	01/02/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000548/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	248,15
24	06/02/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000545/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	24.436.960,00
25	06/02/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000546/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
26	07/02/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000543/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
27	07/02/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000544/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.175.737,00
28	07/02/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000547/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	962.900,00
29	15/02/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000542/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.500.000,00
30	04/03/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000537/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.500.000,00
31	04/03/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000538/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	780.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
32	06/03/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000535/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	15.000.000,00
33	06/03/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000536/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	14.045.460,00
34	07/03/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000532/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.100.180,00
35	07/03/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000534/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.561.686,00
36	14/03/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000530/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.767.733,25
37	14/03/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000529/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	15.339.505,64
38	18/03/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000527/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	114.828,00
39	25/03/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000526/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	9.837.832,00
40	02/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000518/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.782.500,00
41	02/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000519/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	320.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
42	02/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000520/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.490.000,00
43	02/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000521/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.040.000,00
44	02/04/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000523/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.500.000,00
45	02/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000522/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	320.000,00
46	03/04/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000512/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.160.000,00
47	03/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000514/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	10.462.500,00
48	03/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000513/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	9.192.592,87
49	03/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000515/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	6.890.000,00
50	03/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000516/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	40.390.000,00
51	03/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-	35.09/11.0/000517/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	850.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Perjalanan Dinas Dalam Kota		
52	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000495/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	26.581.024,00
53	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000494/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
54	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000496/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	522.920,00
55	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000497/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.218.967,69
56	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000498/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.924.755,76
57	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000500/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	200.000,00
58	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000499/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	27.500.000,00
59	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000501/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.250.000,00
60	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000502/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
61	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000503/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.500.000,00
62	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000504/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.800.000,00
63	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000505/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	7.723.156,64
64	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000506/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	878.256,00
65	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000507/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	800.441,18
66	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000508/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.586.885,13
67	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000509/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.000.000,00
68	04/04/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000510/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	6.430.000,00
69	04/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000511/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.300.000,00
70	05/04/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	35.09/11.0/000483/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	28.763.270,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS		
71	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000484/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	90.645.913,80
72	05/04/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000486/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.158.752,00
73	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000485/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	20.640.799,20
74	05/04/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	35.09/11.0/000487/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.200.000,00
75	05/04/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000488/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.949.696,00
76	05/04/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000489/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	12.465.552,00
77	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000491/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.428.500,00
78	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000490/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	10.383.901,00
79	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000492/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	74.310.500,00
80	05/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-	35.09/11.0/000493/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.405.296,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Perjalanan Dinas Dalam Kota		
81	16/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000481/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	22.093.285,00
82	17/04/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	35.09/11.0/000480/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.395.000,00
83	19/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000476/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	14.873.795,20
84	19/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000477/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
85	19/04/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000478/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.767.600,00
86	19/04/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000479/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	8.371.600,00
87	06/05/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000172/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	10.374.648,00
88	06/05/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000473/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.391.036,00
89	07/05/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000471/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.420.300,00
90	13/05/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000469/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	67.903.960,48



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
91	13/05/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000470/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	129.249.879,04
92	14/05/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000468/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	803.996,00
93	20/05/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000466/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	9.819.200,00
94	29/05/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000462/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.852.140,00
95	29/05/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000463/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.643.022,00
96	29/05/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000464/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	217.260,00
97	29/05/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000465/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	284.910,00
98	04/06/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000458/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	10.925.000,00
99	05/06/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000201/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	70.203.982,00
100	12/06/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000455/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.444.122,62
101	27/06/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan	35.09/11.0/000453/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
102	02/07/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000448/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	434.520,00
103	02/07/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000449/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	433.320,00
104	04/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000447/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	71.011.274,00
105	09/07/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000446/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	20.515.000,00
106	15/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000445/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	968.332,00
107	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000431/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
108	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000432/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
109	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000433/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
110	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000434/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
111	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	35.09/11.0/000435/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
112	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000436/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
113	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000437/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
114	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000439/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
115	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000438/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.000.000,00
116	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000440/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	18.253.286,57
117	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000442/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	25.000.000,00
118	31/07/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000441/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	25.000.000,00
119	02/08/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000428/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.531.258,20
120	02/08/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000427/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
121	06/08/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000266/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	14.989.458,00
122	07/08/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000425/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	289.680,00
123	07/08/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000426/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	379.880,00
124	08/08/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000422/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	19.036.692,00
125	08/08/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000424/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.358.000,00
126	08/08/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000423/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	362.100,00
127	14/08/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000419/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	289.680,00
128	14/08/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	35.09/11.0/000420/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.556.000,00
129	14/08/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000421/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	20.205.320,00
130	02/09/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	35.09/11.0/000411/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	289.680,00
131	02/09/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	35.09/11.0/000413/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	217.260,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS		
132	02/09/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000412/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	290.312,00
133	02/09/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000414/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	312.690,00
134	05/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000410/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	20.368.570,00
135	06/09/2024	4.1.04.15.08.0007 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	35.09/11.0/000307/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	540.000,00
136	10/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000302/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	8.000.000,00
137	10/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000303/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.000.000,00
138	10/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000304/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	40.000.000,00
139	10/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000305/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	25.000.000,00
140	10/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000306/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	52.000.000,00
141	12/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan	35.09/11.0/000284/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	948.285,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
142	12/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000298/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	35.000.000,00
143	27/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	5.000.000,00
144	30/09/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000275/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	855.700,00
145	07/10/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000393/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	26.027.882,00
146	10/10/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000040/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	15.000.000,00
147	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000358/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	362.100,00
148	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000359/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	460.350,00
149	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000362/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	434.520,00
150	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000363/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	376.740,00
151	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	35.09/11.0/000364/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	144.840,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS		
152	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000365/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	118.660,00
153	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000366/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.331.320,00
154	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000367/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.479.170,00
155	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000368/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.027.760,00
156	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000369/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.533.484,00
157	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000370/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	217.260,00
158	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000371/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	273.348,00
159	15/10/2024	4.1.04.15.08.0012 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PPPK	35.09/11.0/000372/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	362.100,00
160	15/10/2024	4.1.04.15.08.0004 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK	35.09/11.0/000373/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	298.516,00
161	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000374/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	144.840,00
162	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja	35.09/11.0/000375/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	184.140,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS		
163	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000376/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	724.200,00
164	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000377/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	949.700,00
165	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000378/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	144.840,00
166	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000379/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	126.860,00
167	15/10/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000039/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.501.000,00
168	15/10/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000038/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.738.000,00
169	21/10/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000344/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	15.277.710,00
170	21/10/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000001/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	3.266.676,00
171	05/11/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000403/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	80.299.526,00
172	06/11/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000398/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	12.078.096,00

No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
173	06/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000399/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	362.100,00
174	06/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000400/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	365.196,00
175	06/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000401/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	144.840,00
176	06/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000402/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	148.946,00
177	11/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000407/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.114.060,00
178	11/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000408/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	2.060.362,00
179	22/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000586/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	3.910.680,00
180	22/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000587/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	4.094.586,00
181	22/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000588/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.158.720,00
182	22/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000589/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	1.555.424,00
183	22/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000590/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	144.840,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
184	22/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000591/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	139.264,00
185	22/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000592/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	217.260,00
186	22/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000593/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	208.896,00
187	22/11/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000594/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2024	5.700.000,00
188	22/11/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000032/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.055.890,00
189	26/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000030/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	362.100,00
190	26/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000031/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	2.054.050,00
191	28/11/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN- Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000026/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.013.880,00
192	28/11/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000027/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	1.459.220,00
193	05/12/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000010/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2024	14.977.662,00
194	18/12/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	35.09/11.0/000151/JUR- PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	163.517.126,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa		
195	20/12/2024	4.1.04.15.08.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	35.09/11.0/000120/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	12.256.200,00
196	23/12/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000081/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.303.560,00
197	23/12/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000082/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.069.806,00
198	23/12/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000083/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	362.100,00
199	23/12/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000084/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	398.260,00
200	23/12/2024	4.1.04.15.08.0011 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	35.09/11.0/000085/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	3.186.480,00
201	23/12/2024	4.1.04.15.08.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	35.09/11.0/000086/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.859.156,00
202	27/12/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000148/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.464.200,00
203	27/12/2024	4.1.04.15.04.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	35.09/11.0/000149/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	1.241.535,00
204	31/12/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.09/11.0/000121/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.169.000,00
205	31/12/2024	4.1.04.15.04.0003 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan	35.09/11.0/000123/JUR-PEND/SSP/5.02.0.00.0.00.01.0000/01/2025	2.077.000,00



No	TANGGAL	URAIAN	NO BUKTI	JUMLAH
		Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota		
206	31/12/2024	4.1.04.15.90.0001 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	35.09/09.0/000002/JU/JURNAL-UMUM/1.02.0.00.0.00.01.0019/05/2025	394.776,00
		JUMLAH		1.985.251.358,87

Lampiran 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	50.000.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	634.158.000,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.342.660.000,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	611.620.000,00
5	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	67.265.300,00
6	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.692.395.000,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	314.800.000,00
8	DINAS KESEHATAN	13.595.882.969,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	2.130.250.000,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.570.805.000,00
11	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	347.161.500,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.679.661.700,00
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	195.952.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	896.791.250,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	40.700.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1.103.978.800,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	177.135.500,00
18	DINAS PENDIDIKAN	10.687.250.200,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	627.750.000,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	761.150.000,00
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	890.316.215,00
22	DINAS SOSIAL	1.131.904.300,00
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	232.019.000,00
24	DINAS TENAGA KERJA	206.287.300,00
25	INSPEKTORAT	278.050.000,00
26	KECAMATAN AJUNG	81.350.000,00
27	KECAMATAN AMBULU	70.900.000,00
28	KECAMATAN BALUNG	78.955.000,00
29	KECAMATAN BANGSALSARI	87.320.000,00
30	KECAMATAN GUMUKMAS	62.900.000,00
31	KECAMATAN JELBUK	14.950.000,00
32	KECAMATAN JENGGAWAH	24.600.000,00
33	KECAMATAN JOMBANG	82.250.000,00
34	KECAMATAN KALISAT	35.700.000,00
35	KECAMATAN KALIWATES	11.150.000,00
36	KECAMATAN KENCONG	31.230.000,00
37	KECAMATAN LEDOKOMBO	22.142.200,00
38	KECAMATAN MAYANG	92.950.000,00
39	KECAMATAN MUMBULSARI	56.475.000,00
40	KECAMATAN PAKUSARI	66.476.000,00
41	KECAMATAN PANTI	30.573.000,00

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
42	KECAMATAN PATRANG	289.230.000,00
43	KECAMATAN PUGER	42.700.000,00
44	KECAMATAN RAMBIPUJI	61.300.000,00
45	KECAMATAN SEMBORO	103.135.000,00
46	KECAMATAN SILO	77.325.000,00
47	KECAMATAN SUKORAMBI	17.750.000,00
48	KECAMATAN SUMBERBARU	34.000.000,00
49	KECAMATAN SUMBERJAMBE	47.128.000,00
50	KECAMATAN TANGGUL	62.130.000,00
51	KECAMATAN TEMPUREJO	47.475.000,00
52	KECAMATAN UMBULSARI	55.790.000,00
53	KECAMATAN WULUHAN	7.450.000,00
54	PUSKESMAS AJUNG	127.247.600,00
55	PUSKESMAS AMBULU	69.625.676,00
56	PUSKESMAS ANDONGSARI	13.316.665,00
57	PUSKESMAS ARJASA	92.731.860,00
58	PUSKESMAS BALUNG	97.177.700,00
59	PUSKESMAS BANGSALSARI	156.770.654,00
60	PUSKESMAS BANJARSENGON	89.761.040,00
61	PUSKESMAS CAKRU	19.235.682,00
62	PUSKESMAS GLADAKPAKEM	9.017.642,00
63	PUSKESMAS GUMUKMAS	17.950.000,00
64	PUSKESMAS JEMBERKIDUL	33.950.000,00
65	PUSKESMAS JENGGAWAH	60.620.000,00
66	PUSKESMAS JOMBANG	16.130.000,00
67	PUSKESMAS KALISAT	248.614.809,00
68	PUSKESMAS KALIWATES	69.160.000,00
69	PUSKESMAS KASIYAN	147.020.224,00
70	PUSKESMAS KEMUNINGSARI	13.800.000,00
71	PUSKESMAS KENCONG	155.485.000,00
72	PUSKESMAS KLATAKAN	112.704.960,00
73	PUSKESMAS LEDOKOMBO	511.440.044,00
74	PUSKESMAS MAYANG	32.175.000,00
75	PUSKESMAS MUMBULSARI	145.789.200,00
76	PUSKESMAS NOGOSARI	21.340.000,00
77	PUSKESMAS PAKUSARI	58.795.765,00
78	PUSKESMAS PALERAN	5.500.000,00
79	PUSKESMAS PANTI	324.920.122,00
80	PUSKESMAS PATRANG	63.500.000,00
81	PUSKESMAS PUGER	37.220.000,00
82	PUSKESMAS RAMBIPUJI	101.450.000,00
83	PUSKESMAS ROWOTENGAH	235.679.937,00
84	PUSKESMAS SABRANG	72.470.338,00
85	PUSKESMAS SEMBORO	117.120.000,00

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
86	PUSKESMAS SILO II	114.402.004,00
87	PUSKESMAS SUKORAMBI	79.340.050,00
88	PUSKESMAS SUKOREJO	76.670.000,00
89	PUSKESMAS SUKOWONO	236.502.000,00
90	PUSKESMAS SUMBERJAMBE	385.708.817,00
91	PUSKESMAS SUMBERSARI	119.250.000,00
92	PUSKESMAS TANGGUL	368.211.428,00
93	PUSKESMAS TEMBOKREJO	25.089.760,00
94	PUSKESMAS TEMPUREJO	15.300.000,00
95	PUSKESMAS UMBULSARI	164.190.000,00
96	PUSKESMAS WULUHAN	11.322.000,00
97	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	1.872.324.173,00
98	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	1.240.572.070,00
99	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	128.002.050,00
100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	361.120.000,00
101	SEKRETARIAT DAERAH	795.407.956,00
102	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.250.835.000,00
	JUMLAH	58.483.245.460,00

Lampiran 6 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	3.472.143.600,00
2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	691.533.163,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	454.922.200,00
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	48.398.059,00
5	DINAS PENDIDIKAN	34.779.103.258,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	95.104.000,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	596.006.000,00
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	30.822.678.000,00
9	KECAMATAN BANGSALSARI	42.900.000,00
10	PUSKESMAS PAKUSARI	35.713.228,00
11	PUSKESMAS RAMBIPUJI	79.851.897,00
12	PUSKESMAS SUMBERSARI	99.175.493,00
13	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	237.518.350,00
14	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	401.471.000,00
15	SEKRETARIAT DAERAH	396.304.336,00
	JUMLAH	72.252.822.584,00

Lampiran 7 Belanja Modal Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	81.932.978.872,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	8.521.895.000,00
3	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	186.998.425,00
	JUMLAH	90.641.872.297,00

Lampiran 8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	978.000.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN	47.575.583.566,00
3	PUSKESMAS SUMBERBARU	7.664.000,00
4	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	61.000.000,00
5	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	55.500.000,00
	JUMLAH	48.677.747.566,00

Lampiran 9 Belanja Modal Aset Lainnya

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	79.600.000,00
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	294.544.050,00
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	279.218.000,00
4	PUSKESMAS SILO I	57.255.000,00
	JUMLAH	710.617.050,00

Lampiran 10 Daftar Nilai Utang Telepon, Listrik, Internet, Air Dan Surat Kabar Tahun 2024

NO.	OPD	TELEPON	LISTRIK	INTERNET	AIR	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	180.774,00	27.645.666,00	50.000,00	817.863,00	28.694.303,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	38.997.287,00	0,00	376.586,00	39.373.873,00
3	RSD Dr. SOEBANDI	6.036.283,00	278.981.200,00	22.234.660,00	283.379,00	307.535.522,00
4	Rsd Balung	252.824,00	200.619.341,00	5.622.390,00	32.500,00	206.527.055,00
5	Rsd Kalisat	1.300.397,00	39.983.476,00	2.638.506,00	0,00	43.922.379,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber Daya Air	759.312,00	24.045.402,00	14.085.150,00	524.845,00	39.414.709,00
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya	109.007,00	3.193.545.443,00	0,00	0,00	3.193.654.450,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	111.782,00	0,00	2.702.310,00	0,00	2.814.092,00
9	Dinas Sosial	3.784.347,00	8.268.332,00	0,00	939.500,00	12.992.179,00
10	Dinas Tenaga Kerja	0,00	4.688.205,00	0,00	0,00	4.688.205,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	305.093,00	4.944.134,00	0,00	201.081,00	5.450.308,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	6.188.391,00	0,00	4.808.354,00	10.996.745,00
15	Dinas Perhubungan	1.045.608,00	30.514.702,00	0,00	82.887,00	31.643.197,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	69.100,00	11.492.440,00	0,00	0,00	11.561.540,00
17	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	3.470.875,00	3.470.875,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.100,00	14.826.103,00	1.850.650,00	60.169,00	16.806.022,00
19	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	0,00	3.015.776,00	0,00	587.488,00	3.603.264,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	80.737,00	6.823.116,00	5.009.999,00	0,00	11.913.852,00
21	Dinas Perikanan	69.100,00	29.926.503,00	2.262.750,00	42.730,00	32.301.083,00
22	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	303.844,00	18.195.508,00	5.373.800,00	0,00	23.873.152,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	60.109,00	19.464.506,00	0,00	0,00	19.524.615,00
24	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	41.517,00	1.619.058,00	1.423.470,00	0,00	3.084.045,00
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	80.814,00	28.385.597,00	9.550.197,00	378.137,00	38.394.745,00

NO.	OPD	TELEPON	LISTRIK	INTERNET	AIR	TOTAL
26	Bagian Umum	6.909.217,00	188.543.078,00	16.587.140,00	50.394.659,00	262.434.094,00
27	Bagian Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Bagian Hukum	107.855,00	0,00	1.668.080,00	0,00	1.775.935,00
29	Bagian Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	0,00	0,00	711.790,00	0,00	711.790,00
31	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	7.878.814,00	0,00	0,00	0,00	7.878.814,00
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	4.267.832,00	4.267.832,00
35	Kecamatan Kaliwates	58.000,00	5.390.434,00	4.038.200,00	191.653,00	9.678.287,00
36	Kecamatan Patrang	40.407,00	17.833.967,00	3.881.250,00	981.970,00	22.737.594,00
37	Kecamatan Sumbersari	0,00	7.631.752,00	2.994.500,00	0,00	10.626.252,00
38	Kecamatan Arjasa	0,00	2.178.898,00	793.100,00	0,00	2.971.998,00
39	Kecamatan Jelbuk	0,00	2.059.431,00	750.640,00	0,00	2.810.071,00
40	Kecamatan Pakusari	408.150,00	2.353.800,00	0,00	0,00	2.761.950,00
41	Kecamatan Sukowono	0,00	1.857.586,00	0,00	0,00	1.857.586,00
42	Kecamatan Kalisat	0,00	2.555.125,00	712.900,00	0,00	3.268.025,00
43	Kecamatan Ledokombo	0,00	1.697.943,00	607.450,00	0,00	2.305.393,00
44	Kecamatan Sumberjambe	0,00	1.160.788,00	3.591.420,00	0,00	4.752.208,00
45	Kecamatan Mayang	0,00	1.973.154,00	543.900,00	0,00	2.517.054,00
46	Kecamatan Silo	0,00	1.540.993,00	674.550,00	0,00	2.215.543,00
47	Kecamatan Mumbulsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Kecamatan Tempurejo	0,00	3.627.031,00	372.800,00	0,00	3.999.831,00
49	Kecamatan Rambipuji	0,00	3.976.900,00	613.280,00	567.473,00	5.157.653,00
50	Kecamatan Jenggawah	0,00	742.140,00	490.900,00	0,00	1.233.040,00
51	Kecamatan Panti	0,00	4.863.015,00	808.280,00	0,00	5.671.295,00
52	Kecamatan Sukorambi	0,00	3.914.290,00	0,00	0,00	3.914.290,00

NO.	OPD	TELEPON	LISTRIK	INTERNET	AIR	TOTAL
53	Kecamatan Ajung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kecamatan Tanggul	0,00	2.445.725,00	915.200,00	0,00	3.360.925,00
55	Kecamatan Semboro	0,00	2.159.704,00	991.230,00	0,00	3.150.934,00
56	Kecamatan Sumberbaru	0,00	3.878.531,00	1.231.440,00	0,00	5.109.971,00
57	Kecamatan Bangsalsari	0,00	5.587.958,00	519.150,00	0,00	6.107.108,00
58	Kecamatan Kencong	0,00	944.066,00	725.391,00	0,00	1.669.457,00
59	Kecamatan Gumukmas	0,00	4.149.853,00	603.690,00	0,00	4.753.543,00
60	Kecamatan Umbulsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kecamatan Puger	0,00	1.998.595,00	939.000,00	0,00	2.937.595,00
62	Kecamatan Jombang	0,00	2.052.176,00	532.840,00	0,00	2.585.016,00
63	Kecamatan Balung	0,00	2.503.509,00	1.090.800,00	0,00	3.594.309,00
64	Kecamatan Wuluhan	0,00	5.270.814,00	907.650,00	0,00	6.178.464,00
65	Kecamatan Ambulu	0,00	3.130.246,00	859.700,00	0,00	3.989.946,00
66	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	3.912.520,00	994.230,00	531.809,00	5.438.559,00
67	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	56.391,00	6.926.438,00	1.304.370,00	2.417.765,00	10.704.964,00
68	Inspektorat	127.544,00	0,00	2.939.380,00	0,00	3.066.924,00
69	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	1.956.961,00	0,00	0,00	0,00	1.956.961,00
70	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Badan Pendapatan Daerah	206.522,00	18.338.436,00	0,00	0,00	18.544.958,00
72	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm	30.250,00	11.077.405,00	0,00	3.095.608,00	14.203.263,00
73	Puskesmas Gumukmas	236.474,00	7.892.156,00	2.277.960,00	0,00	10.406.590,00
74	Puskesmas Puger	291.252,00	5.481.252,00	1.044.906,00	0,00	6.817.410,00
75	Puskesmas Wuluhan	68.309,00	3.783.003,00	1.145.250,00	0,00	4.996.562,00
76	Puskesmas Lojejer	238.608,00	8.451.626,00	2.710.200,00	0,00	11.400.434,00
77	Puskesmas Ambulu	47.367,00	3.321.520,00	1.077.150,00	0,00	4.446.037,00
78	Puskesmas Sabrang	46.108,00	2.878.909,00	1.043.850,00	0,00	3.968.867,00
79	Puskesmas Tempurejo	220.656,00	12.604.238,00	1.182.990,00	0,00	14.007.884,00

NO.	OPD	TELEPON	LISTRIK	INTERNET	AIR	TOTAL
80	Puskesmas Mayang	0,00	3.649.300,00	879.680,00	0,00	4.528.980,00
81	Puskesmas Mumbulsari	800.923,00	5.989.143,00	1.855.930,00	0,00	8.645.996,00
82	Puskesmas Jenggawah	0,00	2.818.168,00	718.078,00	0,00	3.536.246,00
83	Puskesmas Kemuningsari	0,00	9.777.085,00	3.158.318,00	0,00	12.935.403,00
84	Puskesmas Ajung	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
85	Puskesmas Karangduren	0,00	3.549.503,00	1.926.000,00	0,00	5.475.503,00
86	Puskesmas Rambipuji	277.780,00	4.983.049,00	823.070,00	0,00	6.083.899,00
87	Puskesmas Jombang	267.059,00	5.893.606,00	1.476.512,00	0,00	7.637.177,00
88	Puskesmas Sumberbaru	0,00	5.327.500,00	2.296.827,00	0,00	7.624.327,00
89	Puskesmas Rowotengah	0,00	3.006.170,00	1.016.677,00	0,00	4.022.847,00
90	Puskesmas Tanggul	36.831,00	6.035.945,00	1.054.950,00	32.500,00	7.160.226,00
91	Puskesmas Klatakan	34.369,00	2.354.430,00	1.275.840,00	0,00	3.664.639,00
92	Puskesmas Panti	226.489,00	3.835.759,00	634.090,00	0,00	4.696.338,00
93	Puskesmas Sumberjambe	51.171,00	5.667.413,00	565.550,00	0,00	6.284.134,00
94	Puskesmas Sukowono	0,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00
95	Puskesmas Jelbuk	0,00	0,00	0,00	723.239,00	723.239,00
96	Puskesmas Kaliwates	0,00	0,00	0,00	42.828,00	42.828,00
97	Puskesmas Mangli	153.403,00	4.587.912,00	0,00	97.500,00	4.838.815,00
98	Puskesmas Jemberkidul	0,00	0,00	0,00	86.036,00	86.036,00
99	Puskesmas Sumbersari	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
100	Puskesmas Patrang	0,00	0,00	0,00	471.608,00	471.608,00
	JUMLAH	35.436.658,00	4.432.537.674,00	155.851.961,00	76.573.874,00	4.700.400.167,00

Lampiran 11 Utang Belanja

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Utang Belanja Bagi Hasil	TOTAL
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	16.370.462,00	14.203.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.573.725,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	5.438.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438.559,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.357.744,00	10.704.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.062.708,00
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	18.544.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544.958,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	0,00	1.162.160.406,37	451.113.080,00	0,00	0,00	1.771.854,48	1.615.045.340,85
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	29.816.529,00	1.956.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773.490,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.246.339,00	3.603.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849.603,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
9	DINAS KESEHATAN	457.255.649,00	12.278.514.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.735.769.751,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	40.792.161,00	3.084.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.876.206,00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	11.561.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.561.540,00
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	0,00	3.470.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.875,00
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	14.458.255,00	23.873.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.331.407,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	0,00	763.086.911,00	0,00	0,00	548.804.697,25	0,00	1.311.891.608,25
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	43.679.771,00	10.996.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.676.516,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	5.450.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.308,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.537.707,00	16.806.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.343.729,00
18	DINAS PENDIDIKAN	14.344.305.348,00	28.694.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372.999.651,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	28.341.916,00	38.537.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.879.415,00
20	DINAS PERIKANAN	0,00	32.301.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.301.083,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	47.700.635,00	38.394.745,00	0,00	3.459.303.983,78	0,00	0,00	3.545.399.363,78

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Utang Belanja Bagi Hasil	TOTAL
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28.529.582,00	11.913.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.443.434,00
23	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	0,00	3.193.654.450,00	0,00	56.247.400,00	0,00	0,00	3.249.901.850,00
24	DINAS SOSIAL	6.222.029,00	12.992.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214.208,00
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0,00	19.524.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.524.615,00
26	DINAS TENAGA KERJA	21.199.805,00	4.688.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.888.010,00
27	INSPEKTORAT	57.444.016,00	3.066.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.510.940,00
28	KECAMATAN AJUNG	98.924.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.924.270,00
29	KECAMATAN AMBULU	0,00	3.989.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989.946,00
30	KECAMATAN ARJASA	0,00	2.971.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.998,00
31	KECAMATAN BALUNG	0,00	3.594.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.309,00
32	KECAMATAN BANGSALSARI	0,00	6.107.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107.108,00
33	KECAMATAN GUMUKMAS	5.787.742,00	4.753.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541.285,00
34	KECAMATAN JELBUK	0,00	2.810.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.071,00
35	KECAMATAN JENGGAWAH	0,00	1.233.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.040,00
36	KECAMATAN JOMBANG	15.026.510,00	2.585.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.611.526,00
37	KECAMATAN KALISAT	2.699.340,00	3.268.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.365,00
38	KECAMATAN KALIWATES	49.865.249,00	9.678.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.543.536,00
39	KECAMATAN KENCONG	3.069.787,00	1.669.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.244,00
40	KECAMATAN LEDOKOMBO	0,00	2.305.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305.393,00
41	KECAMATAN MAYANG	0,00	2.517.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.054,00
42	KECAMATAN PAKUSARI	0,00	2.761.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.950,00
43	KECAMATAN PANTI	0,00	5.671.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671.295,00
44	KECAMATAN PATRANG	50.091.409,00	22.737.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.829.003,00
45	KECAMATAN PUGER	7.317.187,00	2.937.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254.782,00

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Utang Belanja Bagi Hasil	TOTAL
46	KECAMATAN RAMBIPUJI	0,00	5.157.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.653,00
47	KECAMATAN SEMBORO	0,00	3.150.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.934,00
48	KECAMATAN SILO	0,00	2.215.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215.543,00
49	KECAMATAN SUKORAMBI	0,00	3.914.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.290,00
50	KECAMATAN SUKOWONO	0,00	1.857.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857.586,00
51	KECAMATAN SUMBERBARU	0,00	5.109.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.971,00
52	KECAMATAN SUMBERJAMBE	6.758.679,00	4.752.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510.887,00
53	KECAMATAN SUMBERSARI	43.514.327,00	10.626.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.140.579,00
54	KECAMATAN TANGGUL	0,00	3.360.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.925,00
55	KECAMATAN TEMPUREJO	7.620.126,00	3.999.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619.957,00
56	KECAMATAN UMBULSARI	14.995.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995.290,00
57	KECAMATAN WULUHAN	2.180.000,00	6.178.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358.464,00
58	PUSKESMAS AJUNG	349.997.400,00	198.104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.101.800,00
59	PUSKESMAS AMBULU	203.275.300,00	245.040.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.316.037,00
60	PUSKESMAS ANDONGSARI	157.659.820,00	222.732.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.392.286,00
61	PUSKESMAS ARJASA	4.650.000,00	66.111.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.761.552,00
62	PUSKESMAS BANGSALSARI	0,00	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.000,00
63	PUSKESMAS BANJARSENGON	41.356.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.356.757,00
64	PUSKESMAS CAKRU	62.836.139,00	51.475.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114.312.105,75
65	PUSKESMAS CURAHNONGKO	0,00	182.843.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.843.590,00
66	PUSKESMAS GLADAKPAKEM	0,00	150.090.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.090.061,00
67	PUSKESMAS GUMUKMAS	175.922.153,00	270.571.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.493.939,00
68	PUSKESMAS JELBUK	175.634.000,00	34.698.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.332.239,00
69	PUSKESMAS JEMBERKIDUL	0,00	86.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.036,00

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Utang Belanja Bagi Hasil	TOTAL
70	PUSKESMAS JENGGAWAH	162.662.280,00	179.443.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.105.316,00
71	PUSKESMAS JOMBANG	277.407.570,00	174.022.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.429.706,00
72	PUSKESMAS KALIWATES	124.010.171,00	57.615.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.625.309,00
73	PUSKESMAS KARANGDUREN	100.424.961,00	102.617.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.042.382,00
74	PUSKESMAS KASIYAN	128.150.000,00	112.205.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.355.800,00
75	PUSKESMAS KEMUNINGSARI	276.105.182,00	331.126.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.231.517,00
76	PUSKESMAS KENCONG	156.535.714,00	56.760.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.296.193,00
77	PUSKESMAS KLATAKAN	87.537.000,00	27.470.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.007.397,00
78	PUSKESMAS LOJEJER	398.546.164,00	137.204.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.751.068,00
79	PUSKESMAS MANGLI	237.456.625,00	201.655.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.111.850,00
80	PUSKESMAS MAYANG	100.675.208,00	121.033.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.709.188,00
81	PUSKESMAS MUMBULSARI	336.760.698,00	83.506.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.267.406,00
82	PUSKESMAS NOGOSARI	84.741.100,00	99.674.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.415.746,00
83	PUSKESMAS PALERAN	88.899.124,00	134.083.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.982.262,00
84	PUSKESMAS PANTI	0,00	30.261.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.261.795,00
85	PUSKESMAS PATRANG	0,00	21.640.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640.608,00
86	PUSKESMAS PUGER	0,00	65.030.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.030.062,00
87	PUSKESMAS RAMBIPUJI	316.188.600,00	193.773.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.961.899,00
88	PUSKESMAS ROWOTENGAH	116.911.553,00	133.733.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.644.888,00
89	PUSKESMAS SABRANG	106.659.385,00	162.764.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.423.654,00
90	PUSKESMAS SEMBORO	96.808.440,00	59.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.820.440,00
91	PUSKESMAS SILO I	0,00	21.791.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.791.377,00
92	PUSKESMAS SILO II	0,00	28.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112.000,00
93	PUSKESMAS SUKORAMBI	71.999.081,00	51.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.940.081,00

NO	OPD	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Utang Belanja Bagi Hasil	TOTAL
94	PUSKESMAS SUKOREJO	239.724.304,00	281.683.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.407.468,00
95	PUSKESMAS SUKOWONO	0,00	120.572.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.572.080,00
96	PUSKESMAS SUMBERBARU	0,00	8.086.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.962,00
97	PUSKESMAS SUMBERJAMBE	232.461.096,00	431.534.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.995.853,00
98	PUSKESMAS SUMBERSARI	0,00	37.415.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.415.754,00
99	PUSKESMAS TANGGUL	0,00	21.650.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.226,00
100	PUSKESMAS TEMBOKREJO	0,00	12.641.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641.160,00
101	PUSKESMAS TEMPUREJO	3.000.000,00	255.667.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.667.443,00
102	PUSKESMAS UMBULSARI	0,00	10.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794.000,00
103	PUSKESMAS WULUHAN	99.940.300,00	23.311.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.251.862,00
104	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	933.509.490,29	21.552.726.703,97	2.001.085.000,00	0,00	0,00	0,00	24.487.321.194,26
105	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	3.100.295.865,00	57.191.196.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.291.492.643,04
106	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	462.382.317,00	1.759.043.198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.425.515,48
107	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.672.940,00	2.814.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.487.032,00
108	SEKRETARIAT DAERAH	139.977.692,00	272.800.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.778.325,00
109	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40.441.860,00	4.267.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.709.692,00
TOTAL		25.192.324.153,29	103.848.892.035,61	2.452.198.080,00	3.515.551.383,78	548.804.697,25	1.771.854,48	135.559.542.204,41



TIRTA PANDALUNGAN

JL. Trunojoyo No. 73 Jember, Kode Pos 68137
Telp. (0331) 483509, 485421 Fax. 425462 . e-mail : perumdam@tirtapandalungan.com

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER
No : 690 / 350 / 436.62 / 2024**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.**
Alamat Kantor : Jalan Trunojoyo Nomor 73, Jember
Alamat Domisili : Jalan Trunojoyo Nomor 73, Jember
Nomor Telepon : 081333490620
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Pandalungan Jember;
2. Laporan Keuangan Perumdam Tirta Pandalungan Jember tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumdam Tirta Pandalungan Jember telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perumdam Tirta Pandalungan Jember tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung sudah lengkap disusun dan disimpan oleh Perumdam Tirta Pandalungan Jember sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perumdam Tirta Pandalungan Jember.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jember, Maret 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER

Direksi,



MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.
Direktur Utama

68AA2AKX603730169

TIRTA PANDALUNGAN JEMBER



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Catatan	2023 Rp.	2022 Rp.
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3.1	15,692,442,622	10,363,366,320
Piutang Usaha	3.2	9,788,603,379	8,971,316,186
Akumul Penyisihan Piutang Usaha	3.3	(3,094,870,012)	(2,329,388,603)
Piutang Usaha Bersih		6,693,733,367	6,641,927,583
Piutang Non Usaha	3.4	442,087,522	262,486,936
Akumul Penyisihan Piutang Non Usaha		-	-
Piutang Non Usaha Bersih		442,087,522	262,486,936
Persediaan	3.5	3,724,139,239	2,741,419,226
Akumulasi Penurunan Nilai		-	-
Persediaan Bersih		3,724,139,239	2,741,419,226
Pembayaran Dimuka	3.6	1,298,736,539	1,014,711,505
Jumlah Aset Lancar		27,851,139,288	21,023,911,569
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan pada Unit AMDK Hazora	3.7	-	1,347,184,172
Aset Tetap		162,640,724,495	153,580,090,585
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(101,401,806,261)	(91,794,266,566)
Nilai Buku Aset Tetap	3.8	61,238,918,234	61,785,824,019
Aset Tidak Berwujud		1,828,689,050	1,373,047,000
Akumulasi Amortisasi		(1,364,300,410)	(1,190,629,000)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	3.9	464,388,640	182,418,000
Aset Dalam Penyelesaian	3.10	1,650,443,873	820,687,755
Jumlah Aset Tidak Lancar		63,353,750,747	64,136,113,945
JUMLAH ASET		91,204,890,035	85,160,025,514



LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 Lanjutan

Uraian	Catatan	2023 Rp.	2022 Rp.
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Utang Usaha	3.11	141,274,200	74,000,000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3.12	183,651,908	27,612,487
Pendapatan Diterima Dimuka	3.13	74,700,000	305,887,950
Utang Pajak	3.14	2,477,979,863	1,536,100,500
Rupa rupa Kewajiban Lainnya	3.15	2,827,096,984	1,709,630,969
Jumlah Liabilitas Lancar		5,704,702,955	3,653,231,906
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Iuran Dapenma Pamsi	3.16	1,805,075,592	524,769,278
Cadangan		-	-
Kewajiban Lainnya	3.17	4,688,441,242	3,526,531,848
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		6,493,516,834	4,051,301,126
JUMLAH LIABILITAS		12,198,219,790	7,704,533,032
EKUITAS			
Modal Disetor Pemerintah Kabupaten	3.18	454,632,950	454,632,950
Modal Disetor Pemerintah Pusat	3.19	68,382,000	68,382,000
Modal Hibah	3.20	388,376,559	388,376,559
Penyertaan Pemerintah Pusat	3.21	1,524,617,981	1,524,617,981
Penyert Pem.Pusat JBL Jelas Statu	3.22	35,978,476,752	35,978,476,752
Penyert Pem.Prop. JBL Jelas Statu	3.23	298,000,000	298,000,000
Penyertaan Pemerintah Kabupaten	3.24	41,324,023,201	41,324,023,201
Penyert Pem.Kabp. JBL Jelas Statu	3.25	2,134,181,000	2,134,181,000
Saldo Laba (Rugi) Ditahan	3.26	(10,850,132,197)	(9,100,487,770)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	3.27	7,686,111,999	4,385,289,809
Jumlah Ekuitas		79,006,670,245	77,455,492,482
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		91,204,890,035	85,160,025,514

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN KABUPATEN JEMBER
Direksi

MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)

TIRTA PANDALUNGAN KABUPATEN JEMBER

Jl. Trunojoyo No.73 Jember. Kode Pos 68137 Telp. (0331) 483509, 485421

Fax.425482 E-mail : perumdam@tirtapandalungan.com

LAPORAN LABA / RUGI
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Catatan	2023 Rp.	2022 Rp.
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Air		55,129,541,835	45,613,933,183
Pendapatan Non Air		4,026,643,970	3,302,184,358
Jumlah Pendapatan Usaha	3.28	59,156,185,805	48,916,117,541
PENDAPATAN NON USAHA			
Pendapatan Non Usaha		2,234,141,565	360,618,794
Jumlah Pendapatan Non Usaha	3.29	2,234,141,565	360,618,794
JUMLAH PENDAPATAN		61,390,327,370	49,276,736,335
BEBAN USAHA	3.30		
Beban Pegawai		16,227,499,564	14,696,125,196
Beban Pemakaian Bahan Bakar		189,385,803	118,865,085
Beban Listrik		5,297,246,599	4,914,396,979
Beban Pemakaian Bahan Pembantu		4,758,697	1,537,272
Beban Pemeliharaan		2,610,732,583	1,929,522,113
Beban Air Baku		216,556,479	200,215,865
Beban Penyusutan dan Amortisasi		9,781,211,105	8,871,073,364
Beban Pemakaian Bahan Kimia		1,936,356,465	2,425,417,236
Beban Pinjaman		275,000	1,312,767
Beban Penyisihan Piutang Rek.Air		765,481,409	1,077,452,886
Beban Operasi lainnya		14,202,050,213	9,115,485,762
Jumlah Beban Usaha		51,231,553,917	43,351,404,526
BEBAN NON USAHA	3.31		
Beban Non Usaha		6,461,754	3,941,499
Jumlah Beban Non Usaha		6,461,754	3,941,499
JUMLAH BEBAN		51,238,015,671	43,355,346,025
LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK		10,152,311,699	5,921,390,309
PAJAK PENGHASILAN	3.32	2,466,199,700	1,536,100,500
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		7,686,111,999	4,385,289,809

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA PANDALUNGAN JEMBER
Direksi

MIFTAHUR RIDHO, S.E.I.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Penyertaan Pemerintah Kab.Jember	Penyertaan Pemerintah Pusat	Hibah	Penyertaan Pemerintah YBJ Statusnya	Akumulasi Laba (Rugi)	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2021	41,778,656,151	1,592,999,981	388,376,559	38,410,657,752	(7,832,811,957)	74,337,878,486
Koreksi yang mempengaruhi Akumulasi Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	(1,267,675,813)	(1,267,675,813)
Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-
Laba /(Rugi) Tahun berjalan	-	-	-	-	4,385,289,809	4,385,289,809
Saldo per 31 Desember 2022	41,778,656,151	1,592,999,981	388,376,559	38,410,657,752	(4,715,197,961)	77,455,492,482
Koreksi yang mempengaruhi Akumulasi Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-	(6,134,934,236)	(6,134,934,236)
Penambahan Penyertaan Pemerintah Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-
Laba /(Rugi) Tahun berjalan	-	-	-	-	7,686,111,999	7,686,111,999
Saldo per 31 Desember 2023	41,778,656,151	1,592,999,981	388,376,559	38,410,657,752	(3,164,020,198)	79,006,670,245

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023 Rp.	2022 Rp.
I. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Laba / (Rugi) bersih	7,686,111,999	4,385,289,809
Penyesuaian atas beban non kas		
- Beban Penyisihan Piutang Rekening Air	765,481,409	1,077,452,886
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	9,781,211,105	8,871,073,364
Laba (Rugi) sebelum perubahan Modal Kerja	18,232,804,513	14,333,816,060
Perubahan Modal Kerja		
1. Penurunan / (Kenaikan) Aset Lancar		
- Piutang Usaha	(817,287,193)	(2,037,392,728)
- Piutang Non Usaha	(179,600,586)	(22,312,811)
- Persediaan	(982,720,013)	134,648,153
- Pembayaran Dimuka	(284,025,034)	69,897,025
2. Kenaikan / (Penurunan) Kewajiban		
- Utang Usaha	67,274,200	222,900,000
- Utang Non Usaha	-	-
- Biaya Yang Masih Harus Dibayar	156,039,421	3,700,635
- Pendapatan Diterima Dimuka	(231,187,950)	(63,471,200)
- Utang Pajak	941,879,363	747,851,500
- Rupa-rupa Kewajiban Lainnya	1,117,466,015	39,576,395
Jumlah Perubahan Modal Kerja (1 + 2)	(212,161,777)	(904,603,031)
Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	18,020,642,736	13,429,213,029
II. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
(Penambahan) / Pengurangan pada :		
- Aset Tetap	(9,060,633,910)	(5,678,061,923)
- Aset Dalam Penyelesaian	(829,756,118)	559,470,195
- Aset Tidak Berwujud/Beban Ditangguhkan	(455,642,050)	-
- Penyertaan pada Unit AMDK Hazora	1,347,184,172	(122,197,714)
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(8,998,847,906)	(5,240,789,442)
III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kenaikan (Penurunan) pada :		
- Utang Dapenma Pamsi	1,280,306,314	(1,488,296,413)
- Cadangan Dana	2,631,173,884	1,373,315,464
- Pembayaran PAD tahun 2022	(1,250,000,000)	(1,000,000,000)
- Pembayaran Jasa Produksi Th.2022	(219,264,490)	(105,639,651)
- Saldo Rugi Tahun Lalu	(1,749,644,427)	739,477,558
- Pembagian Laba Tahun 2022	(4,385,289,809)	(2,112,793,021)
Arus Kas bersih Aktivitas Pendanaan	(3,692,718,528)	(2,593,936,064)
IV. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	5,329,076,301	5,594,487,523
V. SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS	10,363,366,319	4,768,878,796
VI. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	15,692,442,621	10,363,366,319

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

Nomor : 00015/2.0664/AU.2/11/1197-1/1/III/2024

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dewan Pengawas dan Direksi

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA PANDALUNGAN
KABUPATEN JEMBER****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA PANDALUNGAN KABUPATEN JEMBER yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

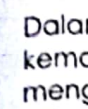
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat dapat diekspetasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap resiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis opini bagi kami. Resiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Drs. BASRI HARDJOSUMARTO, M.Si, Ak & REKAN

Partner

Drs. Subyakto, MM, Ak, CA, CPA
NRAP : AP. 1197

Surabaya, 27 Maret 2024



00015

Office 1 Jl Gubeng Kertajaya III F/10 Surabaya 60281
2. Regus Pakuwon Centre 23rd Floor
Jalan Embong Malang No. 1 - 5 Surabaya 60261
Telp / Fax : 031 - 5055789 / 5046348
Email : kapbasriandirekan@yahoo.co.id
www.kapbasrisurabaya.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00581/3.0329/AU.2/01/1220-3/1/X/2024

Pemegang Saham dan Direksi
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (selanjutnya disebut "Perusahaan") yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Entitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus sejak sebelum tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: saldo rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.391.394.434, rugi tahun 2022 sebesar Rp700.244.843, rugi tahun 2023 sebesar Rp268.940.234. Kondisi ini mengancam kelangsungan hidup Perusahaan, namun berdasarkan Perda Jember no. 5/2023 tanggal 4 Desember 2023 tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan, perusahaan akan mendapatkan tambahan modal sebesar Rp83.114.772.285. dengan harapan kinerja perusahaan meningkat sehingga mampu menghasilkan laba. Rencana penyertaan modal tersebut telah direalisasi sebesar Rp15.000.000.000 pada tanggal 4 April 2024. (lihat catatan no. 16).

Informasi Lain

Kami juga mengaudit laporan keuangan perusahaan periode tahun 2022 dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00524/3.0329/AU.2/01/1220-2/1/IX/2023 tanggal 1 September 2023 dengan opini wajar dengan pengecualian.

Informasi Lain (Lanjutan)

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 (Laporan Tahunan). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penekanan Suatu Hal

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 23 dalam catatan atas laporan keuangan, Perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2022 sehubungan dengan reklasifikasi akun. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Adanya piutang yang tidak bisa dilacak debiturnya pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp95.141.200 dari total piutang kopi bubuk dan goreng sebesar Rp181.385.950 telah memenuhi syarat untuk dihapus namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Perusahaan belum menghapus piutang tersebut karena ijin dari Bupati Jember untuk menghapus piutang tersebut masih belum turun. (lihat catatan no. 4)

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Entitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.

Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

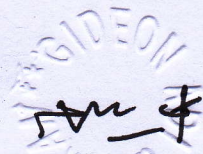
Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Entitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Perusahaan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggungjawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Entitas. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK GIDEON ADI & REKAN

A circular stamp with the text "KANTOR AKUNTAN PUBLIK GIDEON ADI & REKAN" around the perimeter. In the center of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Valiant Great Ekaputra, CA., CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1220

Surabaya, 22 Oktober 2024



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
PERUMDA PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFYAN SAURI, S.M., M.M.
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 245 Jember
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember
2. Laporan keuangan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perumda Perkebunan Kahyangan Jember

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jember, 22 Oktober 2024

Atas nama dan mewakili Direksi



SOFYAN SAURI, S.M., M.M.
Direktur Utama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
NERACA
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2e,3	7.814.369.167	8.826.943.165
Piutang usaha, neto	2f,4	296.778.476	429.629.515
Piutang non usaha, neto	2f,5	55.074.885	44.160.110
Persediaan	2g,6	3.255.461.003	3.168.431.636
Pendapatan yang masih harus diterima	7	7.706.149	6.981.839
Total aset lancar		11.429.389.680	12.476.146.265
Aset tidak lancar			
Aset tetap, neto	2i,8	33.456.215.598	33.727.680.233
Beban ditangguhkan, neto	2j,9	1.445.713.305	1.306.725.705
Total aset tidak lancar		34.901.928.903	35.034.405.938
Total Aset		46.331.318.583	47.510.552.203
Kewajiban dan ekuitas			
Kewajiban jangka pendek			
Utang usaha	2k,10	17.790.025	109.772.900
Utang pajak	2k,11a	4.318.066.668	4.316.189.823
Biaya yang masih harus dibayar	2k,12	901.595.916	356.345.533
Utang lain-lain	2k,13	348.674.091	348.674.091
Pendapatan diterima di muka	2k,14	2.185.101.663	2.576.766.581
Total kewajiban jangka pendek		7.771.228.363	7.707.748.928
Kewajiban jangka panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	2l,15	5.077.861.726	5.278.233.414
Total kewajiban jangka panjang		5.077.861.726	5.278.233.414
Ekuitas			
Penyertaan dari Pemerintah Kabupaten Jember	2n,16	16.014.359.613	16.014.359.613
Cadangan	2p,17	19.859.263.315	20.632.664.448
Saldo rugi		(2.391.394.434)	(2.122.454.200)
Total ekuitas		33.482.228.494	34.524.569.861
Total kewajiban dan ekuitas		46.331.318.583	47.510.552.203

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2 0 2 3	2 0 2 2
Pendapatan	2o,18	28.801.977.835	32.905.161.809
Beban pokok pendapatan	2p,19	25.386.469.338	28.019.903.199
Laba kotor		3.415.508.497	4.885.258.610
Beban usaha			
Beban penjualan	2p,20	11.245.000	10.214.851
Beban administrasi dan umum	2p,21	5.949.209.813	5.843.366.693
Rugi operasional		(2.544.946.316)	(968.322.934)
Pendapatan (beban) di luar usaha			
Pendapatan di luar usaha	2o,22	2.948.887.910	1.595.803.092
Beban di luar usaha	2o,23	672.881.828	1.327.725.001
Jumlah pendapatan (beban) di luar usaha		2.276.006.082	268.078.091
Rugi sebelum beban pajak		(268.940.234)	(700.244.843)
Beban pajak			
Kini		-	-
Tangguhan		-	-
Rugi bersih		(268.940.234)	(700.244.843)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penyertaan dari Pemerintah Kabupaten Jember	Cadangan	Saldo Rugi	Total Ekuitas
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	16.014.359.613	21.423.568.784	(1.422.209.357)	36.015.719.040
Penyesuaian koreksi:				
Penggunaan cadangan	-	(790.904.336)	-	(790.904.336)
Rugi tahun berjalan	-	-	(700.244.843)	(700.244.843)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	16.014.359.613	20.632.664.448	(2.122.454.200)	34.524.569.861
Penyesuaian koreksi:				
Penggunaan cadangan	-	(773.401.133)	-	(773.401.133)
Rugi tahun berjalan	-	-	(268.940.234)	(268.940.234)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	16.014.359.613	19.859.263.315	(2.391.394.434)	33.482.228.494

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Rugi tahun berjalan	(268.940.234)	(700.244.843)
Beban penyusutan aset tetap	1.726.726.183	1.200.631.345
Beban amortisasi atas beban ditangguhkan	16.537.897	16.537.897
Arus kas operasional sebelum perubahan modal kerja	1.474.323.846	516.924.399
Penurunan piutang usaha	1.389.849.750	1.678.864.600
(Penurunan)/Kenaikan penyisihan piutang usaha	(1.256.998.711)	(1.085.298.016)
(Penurunan)/Kenaikan piutang non usaha	(10.914.775)	(44.075.180)
(Penurunan)/Kenaikan persediaan	(87.029.367)	318.087.133
(Penurunan)/Kenaikan pendapatan yang masih harus diterima	(724.310)	(5.180.597)
(Penurunan)/kenaikan utang usaha	(91.982.875)	104.237.900
Kenaikan biaya yang masih harus dibayar	545.250.383	54.090.417
(Penurunan)/kenaikan pendapatan diterima di muka	(391.664.918)	475.357.031
(Penurunan)/Kenaikan utang pajak	1.876.845	1.653.726.845
Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasi	1.571.985.868	3.666.734.532
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penurunan/(Kenaikan) aset tetap	(1.455.261.548)	(402.522.407)
Penurunan/(Kenaikan) beban ditangguhkan	(155.525.497)	(397.701.312)
Penurunan/(Kenaikan) kewajiban imbalan pasca kerja	(200.371.688)	226.881.830
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.811.158.733)	(573.341.889)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
(Penurunan)/Kenaikan penyesuaian cadangan	(773.401.133)	(790.904.336)
Arus kas netto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(773.401.133)	(790.904.336)
(PENURUNAN)/PENINGKATAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(1.012.573.998)	2.302.488.307
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	8.826.943.165	6.524.454.858
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	7.814.369.167	8.826.943.165
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	278.982.215	142.368.122
Bank	7.535.386.952	6.584.575.043
Deposito berjangka	-	2.100.000.000
Total kas dan setara kas	7.814.369.167	8.826.943.165

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan secara keseluruhan.

